



**PERATURAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN KABUPATEN GAYO LUES
TAHUN 2023-2026**



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN GAYO LUES
2022**



**BUPATI GAYO LUES
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR 3 TAHUN 2022**

**TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2023-2026**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, maka perlu dilakukan Penyusunan Rencana Pembangunan Kabupaten Gayo Lues Tahun 2023-2026;
- b. bahwa untuk memberikan arah dan tujuan dalam pembangunan Kabupaten Gayo Lues Tahun 2023-2026. Perlu disusun Rencana Pembangunan Kabupaten Gayo Lues kurun waktu 4 (empat) tahun yang berisi Permasalahan, Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Program Prioritas dengan asumsi-asumsi keuangan terkini serta menampung kebijakan nasional dan provinsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu dibentuk Peraturan Bupati Kabupaten Gayo Lues tentang Rencana Pembangunan Kabupaten Gayo Lues Tahun 2023-2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
14. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Kabupaten Gayo Lues (Berita Kabupaten

Gayo Lues Tahun 2016 Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Kabupaten Gayo Lues (Berita Kabupaten Gayo Lues Tahun 2021 Nomor 122).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GAYO LUES TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2023-2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Gayo Lues;
2. Pemerintah daerah Pemerintah Kabupaten Gayo Lues;
3. Bupati adalah Bupati Gayo Lues;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum;
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gayo Lues;
6. Satuan Kerja Perangkat Perangkat Kabupaten Gayo Lues yang selanjutnya disebut dengan SKPK adalah penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Gayo Lues yang bertanggung jawab kepada Bupati;
7. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan Nasional yang memuat visi, misi dan arah pembangunan untuk jangka waktu 20 tahun, terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025;
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Aceh yang selanjutnya disingkat RPJPA adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Aceh yang memuat visi, misi dan arah pembangunan untuk jangka waktu 20 tahun, terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025;
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Gayo Lues yang memuat visi, misi dan arah pembangunan untuk jangka waktu 20 tahun, terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025;
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gayo Lues yang selanjutnya disingkat RPJMK adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah

Kabupaten Gayo Lues yang memuat penjabaran dari visi, misi program Bupati untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, dengan RPJPD;

12. Rencana Pembangunan Kabupaten Gayo Lues yang selanjutnya disebut RPK adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Gayo Lues untuk jangka waktu 4 (empat) tahun;
13. Rencana kerja Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disebut RKPK, adalah dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
14. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat Renstra SKPK adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan bagi Satuan Kerja Perangkat Kabupaten;
15. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan;
16. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan;
17. Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari penyusunan dokumen RPK adalah:

- a. Untuk memberikan landasan kebijakan strategis dalam kerangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Gayo Lues;
- b. Sebagai acuan bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
- c. Untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan;
- d. Memberikan tolok ukur dan mempermudah untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja 4 (empat) tahun.

Pasal 3

RKP bertujuan :

- a. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara dokumen RPK dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, baik secara vertikal maupun horizontal, juga sebagai pedoman dalam melihat dan memelihara konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;

b. Melakukan / 5

- b. Melakukan analisis kebijakan perencanaan pembangunan daerah, untuk dapat merumuskan arah kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah yang menjamin tercapainya pemanfaatan sumber daya secara optimal;
- c. Membagi pencapaian sasaran setiap SKPK dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergitas pemahaman antar pelaku pembangunan, baik secara lintas ruang, maupun lintas kegiatan.

BAB III

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RPK

Pasal 4

- (1) Sistematika RPK adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan RPK Gayo Lues Tahun 2023-2026.

BAB II GAMBARAN UMUM

Bab ini menguraikan aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah Kabupaten Gayo Lues.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menjelaskan hasil pengolahan data dan analisis tentang kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, dan kerangka pendanaan pembangunan Kabupaten Gayo Lues.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Bab ini berisi uraian tentang permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis yang menjadi dasar utama pembangunan Kabupaten Gayo Lues.

BAB V TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini berisi uraian tentang tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Gayo Lues Tahun 2023-2026.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

Bab ini diuraikan tentang strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PD

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra SKPK beserta indikator kinerja, pagu indikatif target SKPK penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARA PEMERINTAH DAERAH

Bab ini menetapkan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan Indikator penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir priode masa jabatan.

BAB IX PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan rekomendasi ringkas tentang pelaksanaan RPK Gayo Lues Tahun 2023-2026.

- (2) Uraian lebih lanjut RPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PELAKSANAAN RPK Pasal 5

- (1) RPK merupakan penjabaran permasalahan, tujuan, sasaran, isu strategis, arah kebijakan, program pemerintah kabupaten.
- (2) RPK memuat arah kebijakan keuangan kabupaten, kebijakan umum dan program SKPK dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang bersifat indikatif;
- (3) Pagu anggaran yang tercantum dalam RPK bersifat indikatif, sehingga dapat disesuaikan secara proporsional berdasarkan karakteristik dan permasalahan yang dihadapi.
- (4) RPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi :
 - a. SKPK dalam Menyusun Rencana Strategis SKPK;
 - b. Pemerintah Kabupaten dalam Menyusun Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK).

BAB V
PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan RPK.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

RPK Gayo Lues dijadikan sebagai dasar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Penjabat Bupati Tahun 2023-2026.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Gayo Lues.

Ditetapkan di Blangkejeren
Pada Tanggal, 19 Maret 2022 M
12 Sya'ban 1443 H

 **BUPATI GAYO LUES,**
 **H. MUMAMMAD AMRU**

Ditetapkan di Blangkejeren
Pada Tanggal 19 Maret 2022 M
12 Sya'ban 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GAYO LUES,


RASYIDIN PORANG

LEMBARAN KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2022 NOMOR 632

DAFTAR ISI

	Hal
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	BAB I-1
1.1. Latar Belakang	BAB I-1
1.2. Dasar Hukum	BAB I-11
1.3. Hubungan Antar Dokumen	BAB I-16
1.4. Maksud Dan Tujuan	BAB I-18
1.5. Sistematika.....	BAB I-19
BAB II GAMBARAN UMUM.....	BAB II-1
2.1. Aspek Geografi dan Demografi.....	BAB II-1
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	BAB II-16
2.3. Aspek Pelayanan Umum	BAB II-40
2.4. Aspek Daya Saing Daerah	BAB II-100
2.5. Evaluasi Pelaksanaan Indikator Pada RPJMK Periode Sebelumnya	BAB II-108
BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH	BAB III-1
3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu	BAB III-2
3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu (2017-2021).....	BAB III-21
3.3. Kerangka Pendanaan	BAB III-26
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS.....	BAB IV-1
4.1. Permasalahan Pembangunan	BAB IV-2
4.2. Isu Strategis Pembangunan	BAB IV-10
BAB V TUJUAN DAN SASARAN	BAB V-1
5.1. Tujuan dan Sasaran	BAB V-1
BAB VI STRAGTEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS	BAB VI-1
6.1. Strategi	BAB VI-1
6.2. Kebijakan Pembangunan.....	BAB VI-4
6.3. Program Prioritas	BAB VI-6
BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	BAB VII-1
BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	BAB VIII-1
BAB IX PENUTUP.....	BAB IX-1
9.1. Kaidah Pelaksanaan	BAB IX-1
2.2. Pedoman Transisi	BAB IX-2

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1.1	Program Prioritas dan Program Nasional Tahun 2020-2024..... BAB I-4
Tabel 1.2	Jadwal Tahapan Penyusunan RPK Gayo Lues 2023-2026 BAB I-10
Tabel 2.1	Formasi Geologi, Luasan dan Persentasenya di Kabupaten Gayo Lues..... BAB II-4
Tabel 2.2	Jenis Tanah, Luasan dan Persentasenya di Kabupaten Gayo Lues..... BAB II-5
Tabel 2.3	Wilayah Sungai (WS) di Kabupaten Gayo Lues BAB II-6
Tabel 2.4	Jumlah Penduduk Kabupaten Gayo Lues Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2017-2021 BAB II-8
Tabel 2.5	Penempatan Wilayah Pengembangan (WP) BAB II-9
Tabel 2.6	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017-2021 (Persen) BAB II-17
Tabel 2.7	Distribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017-2021 (Persen)..... BAB II-19
Tabel 2.8	Laju Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Berdasarkan ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017-2021 (Persen) . BAB II-20
Tabel 2.9	Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Karakteristik Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017-2021 BAB II-29
Tabel 2.10	Persentase Dalam Penerapan Syariat Islam di Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017-2021 (Persen)..... BAB II-41
Tabel 2.11	Pendapatan Zakat, Infaq, Sadaqah dan Wakaf Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017-2021 BAB II-42
Tabel 2.12	Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017- 2021 (Persen) BAB II-45
Tabel 2.13	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017-2021 BAB II-45
Tabel 2.14	Angka Kematian Neonatus Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017-2021 BAB II-46
Tabel 2.15	Data Prevalensi Stunting Per Kecamatan Tahun 2021 BAB II-47
Tabel 2.16	Panjang Ruas Jalan dan Jembatan Provinsi Dalam Kabupaten Gayo Lues BAB II-50
Tabel 2.17	Pola Ruang Wilayah di Kabupaten Gayo Lues Berdasarkan RTRW 2012-2032 BAB II-52
Tabel 2.18	Nama Daerah Irigasi dengan Luas Daerah Irigasi dan Luas Sawah Irigasi di Kabupaten Gayo Lues Tahun 2021 BAB II-55
Tabel 2.19	Capaian Indikator Pelayanan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gayo Lues Tahun 2018-2021..... BAB II-59
Tabel 2.20	Rasio Capaian Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2017-2021 BAB II-60
Tabel 2.21	Jumlah Pelanggaran Syariat Islam Tahun 2017-2021..... BAB II-61
Tabel 2.22	Banyaknya Panti Asuhan Pemerintah/Swasta Menurut Kapasitas Tahun. 2017-2021 BAB II-62
Tabel 2.23	Perbandingan Jumlah PMKS yang Telah Dibantu Tahun 2021..... BAB II-63
Tabel 2.24	Persentase Hak Milik Atas Tanah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017-2021 BAB II-68
Tabel 2.25	Kepemilikan KTP-Elektronik, Akta Kelahiran dan Nikah Penduduk Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017-2021 BAB II-72

Tabel 2.26	Jumlah Kelompok Binaan LPM Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017-2020	BAB II-74
Tabel 2.27	Jumlah Penerbangan di Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017-2021	BAB II-76
Tabel 2.28	Aspek Perhubungan Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017-2021	BAB II-77
Tabel 2.29	Rasio Koperasi Aktif dan Tidak Aktif Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017-2021	BAB II-81
Tabel 2.30	Nilai Investasi Perusahaan PMA dan PMDN Tahun 2020-2021	BAB II-82
Tabel 2.31	Jumlah Organisasi, Club dan Gedung Olah Raga di Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017-2021	BAB II-84
Tabel 2.32	Jumlah Sanggar Tari di Kabupaten Gayo Lues Tahun 2021	BAB II-86
Tabel 2.33	Komoditas Tanaman Pangan Lahan Terluas Tahun 2017-2021	BAB II-90
Tabel 2.34	Produksi Tanaman Perkebunan Menurut Komoditi Tahun 2017-2021	BAB II-91
Tabel 2.35	Jumlah Ternak Kab. Gayo Lues Menurut Jenis Ternak Tahun 2017-2021 (ton)	BAB II-92
Tabel 2.36	Data Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kabupaten Gayo Lues Tahun 2021	BAB II-95
Tabel 2.37	Konsumsi/Pengeluaran Per Kapita Per Bulan (Rp) Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017-2021	BAB II-102
Tabel 2.38	Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum dan Sanitasi Layak Tahun 2017-2021	BAB II-106
Tabel 2.39	Hasil Analisis Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMK Gayo Lues 2018-2022	BAB II-109
Tabel 2.40	Hasil Analisis Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Terhadap Indikator Kinerja Daerah (IKD) RPJMK Gayo Lues 2018-2022	BAB II-115
Tabel 3.1	Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Kabupaten Gayo Lues 2017-2021	BAB III-6
Tabel 3.2	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017-2021	BAB III-11
Tabel 3.3	Anggaran dan Realisasi Belanja Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017-2021 ...	BAB III-12
Tabel 3.4	Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017-2021	BAB III-13
Tabel 3.5	Neraca dan Rata-rata Pertumbuhan Neraca Kabupaten Gayo Lues 2017-2021	BAB III-15
Tabel 3.6	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Gayo Lues	BAB III-24
Tabel 3.7	Surplus/Defisit Riil Anggaran Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017-2021	BAB III-25
Tabel 3.8	Proyeksi Anggaran Pendapatan dan belanja Kabupaten Gayo Lues Tahun 2023-2026	BAB III-32
Tabel 3.9	Proyeksi Kapasitas riil Kemampuan Daerah Tahun 2023-2026	BAB III-42
Tabel 3.10	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kabupaten Gayo Lues 2023-2026	BAB III-43
Tabel 5.1	Tujuan dan Sasaran	BAB V-3
Tabel 6.1	Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Gayo Lues 2023-2026	BAB VI-2
Tabel 6.2	Kebijakan Pembangunan Kabupaten Gayo Lues Tahun 2023-2026	BAB VI-4
Tabel 6.3	Strategi Kebijakan Pembangunan Kabupaten Gayo Lues Tahun 2023-2026	BAB VI-5

Tabel 6.4	Tujuan, Sasaran dan Indikator dan Program Prioritas.....	BAB VI-7
Tabel 7.1	Proyeksi Anggaran Pendapatan dan BelanjaKabupaten Gayo Lues Tahun 2023-2026	BAB VII-4
Tabel 7.2	Kerangka Pendanaan Pembangunan Kabupaten Gayo Lues Tahun..... Lues Tahun 2023-2026	BAB VII-8
Tabel 7.3	Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2023-2026	BAB VII-11
Tabel 8.1	Penetapan Indikator Makro Kabupaten Gayo Lues 2023-2026	BAB VIII-2
Tabel 8.2	Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Gayo Lues 2023-2026	BAB VIII-3
Tabel 8.3	Penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten Gayo Lues 2023-2026	BAB VIII-4

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1.1 Target Indikator Makro Nasional	BAB I-3
Gambar 1.2 Hubungan Antar Dokumen	BAB I-17
Gambar 2.1 Peta Administrasi dan Tata Letak Kabupaten Gayo Lues	BAB II-1
Gambar 2.2 Persentase Wilayah Masing-masing Kecamatan (persen/km)	BAB II-2
Gambar 2.3 Ketinggian Kabupaten Gayo Lues (persen/ha)	BAB II-3
Gambar 2.4 Kemiringan Kabupaten Gayo Lues (persen/ha)	BAB II-3
Gambar 2.5 Peta Jaringan Sungai Kabupaten Gayo Lues.....	BAB II-5
Gambar 2.6 Peta Wilayah Sungai Kabupaten Gayo Lues.....	BAB II-6
Gambar 2.7 Curah Hujan per Bulan Kabupaten Gayo Lues (mm)	BAB II-7
Gambar 2.8 Laju Pertumbuhan PDRB Gayo Lues dibandingkan dengan Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2017-2021	BAB II-17
Gambar 2.9 Perkembangan Inflasi Kabupaten Gayo Lues, Banda Aceh, Meulaboh dan Aceh Tahun 2017-2021.....	BAB II-21
Gambar 2.10 PDRB Per Kapita Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017-2021 (Juta Rupiah) ..	BAB II-22
Gambar 2.11 Gini Rasio Kabupaten Gayo Lues, Aceh dan Nasional Tahun 2017-2021 ...	BAB II-23
Gambar 2.12 Persentase Kemiskinan Gayo Lues, Aceh dan Nasional Tahun 2017-2021 (Persen).....	BAB II-26
Gambar 2.13 Jumlah Penduduk Miskin Gayo Lues, Aceh dan Nasional Tahun 2017-2021 (ribu)	BAB II-26
Gambar 2.14 Indeks Kedalaman (P1) dan Indeks Keparahan (P2) Kemiskinan Gayo Lues, Aceh dan Nasional Tahun 2017-2021.....	BAB II-28
Gambar 2.15 Garis Kemiskinan (GK) Gayo Lues, Aceh dan Nasional Tahun 2017-2021 (Rp/Kapita/Bulan).....	BAB II-28
Gambar 2.16 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2017-2021..	BAB II-30
Gambar 2.17 Penduduk Bekerja menurut Status Pekerjaan Utama Di Kabupaten Gayo Lues Tahun 2021.....	BAB II-31
Gambar 2.18 Angkatan Kerja menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Gayo Lues Tahun 2021.....	BAB II-31
Gambar 2.19 Angka Melek Huruf Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017-2021 (Persen).....	BAB II-32
Gambar 2.20 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Gayo Lues, Aceh dan Nasional Tahun 2017-2021 (Tahun).....	BAB II-33
Gambar 2.21 Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017-2021 (Tahun).....	BAB II-34
Gambar 2.22 Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017-2021.....	BAB II-35
Gambar 2.23 Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017-2021	BAB II-36
Gambar 2.24 Usia Harapan Hidup Kabupaten Gayo Lues, Aceh dan Nasional Tahun 2017-2021	BAB II-37
Gambar 2.25 Pertumbuhan IPM Gayo Lues, Aceh dan Nasional Tahun 2017-2021 (Poin).....	BAB II-38
Gambar 2.26 Panjang Jalan Negara, Provinsi dan Kabupaten Tahun 2021	BAB II-48
Gambar 2.27 Persentase Jalan Menurut Jenis Kondisi di Kabupaten Gayo Lues Tahun 2021	BAB II-48
Gambar 2.28 Persentase Jalan Menurut Jenis Kondisi Mantap di Kabupaten Gayo Lues Tahun 2018-2021	BAB II-49

Gambar 2.29	Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Gayo Lues Tahun 2021.....	BAB II-49
Gambar 2.30	Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum dan Sanitasi Layak Tahun 2017-2021 (Persen)	BAB II-51
Gambar 2.31	Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Aceh dan Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017-2021 (persen).....	BAB II-64
Gambar 2.32	Produksi Perikanan Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017-2021 (Ton)	BAB II-66
Gambar 2.33	Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Gayo Lues dan Aceh Tahun 2017-2020.....	BAB II-67
Gambar 2.34	Status Desa di Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017-2021.....	BAB II-73
Gambar 2.35	Objek Wisata Andalan Kabupaten Gayo Lues Tahun 2021	BAB II-89
Gambar 2.36	Distribusi PDRB ADHB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Kabupaten Gayo Lues.....	BAB II-90
Gambar 2.37	Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017-2021	BAB II-94
Gambar 2.38	Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017-2021.....	BAB II-95
Gambar 2.39	Peningkatan Daya Saing Daerah di Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017-2021	BAB II-101
Gambar 2.40	Perkembangan Persentase Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita (Makanan dan Non Makanan) Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017-2021 (persen).....	BAB II-102
Gambar 2.41	Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Aceh Tahun 2017-2022	BAB II-103
Gambar 2.42	NTP Aceh Menurut Subsektor, Januari 2022.....	BAB II-104
Gambar 2.43	Rasio Ketersediaan Listrik Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017- 2021 (Persen).....	BAB II-I07
Gambar 2.44	Persentase Rumah Tangga Berlistrik diKabupaten Gayo Lues Tahun 2017-2021 (Persen).....	BAB I07
Gambar 3.1	Realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017-2021	BAB III-10



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 258 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Hal ini berarti bahwa pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan merupakan bentuk perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki. Pelaksanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerangka pembangunan nasional. Dalam pelaksanaannya, untuk mencapai tujuan pembangunan daerah yang efektif dan efisien maka harus dilakukan sinergi perencanaan dalam mendukung pencapaian target pembangunan nasional, sehingga dapat diwujudkan tujuan bernegara.

Perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan pembangunan daerah disusun guna mewujudkan tujuan pembangunan daerah, baik jangka panjang maupun jangka menengah. Selain itu, rencana pembangunan daerah disusun guna menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, sehingga penyusunannya harus dilakukan secara terpadu, terukur, serta dapat dilaksanakan dan berkelanjutan.

Rencana pembangunan daerah merupakan landasan dalam pelaksanaan pembangunan yang disusun berdasarkan kondisi saat ini beserta dinamika permasalahannya serta cita-cita yang akan diwujudkan serta disesuaikan dengan kemampuan sumber daya yang dimiliki. Sesuai pasal 263 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dokumen perencanaan pembangunan tersebut dibagi berdasarkan jangka waktunya, meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk periode dua puluh tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode lima tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk periode satu tahun.



Lebih lanjut, dengan adanya rencana pemerintah melaksanakan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2024 sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang, yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakannya pemilu kepala daerah serentak secara nasional Tahun 2024, maka proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah juga harus menyesuaikan dengan dinamika perkembangan yang ada, Kabupaten Gayo Lues merupakan salah satu daerah yang kepala daerahnya akan berakhir masa jabatannya pada tahun 2022 bersamaan dengan berakhirnya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) Gayo Lues tahun 2018-2022, dengan demikian terdapat kekosongan dokumen perencanaan tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 khususnya Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK), sehingga untuk mengatasi kekosongan tersebut Pemerintah Kabupaten Gayo Lues sesuai dengan kewenangannya tetap akan menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional serta akan menindaklanjuti Diktum kesatu Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 yang mengamanatkan agar Pemerintah Daerah menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 serta bagi Organisasi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.

Pemerintah Daerah melalui Bappeda dalam pelaksanaan penyusunan rancangan rencana pembangunan daerah telah melakukan forum konsultasi publik yang bertujuan untuk menyerap saran dan/atau masukan dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan daerah, termasuk DPRK serta bahan penyempurnaan rancangan rencana pembangunan daerah yang dituangkan dalam berita acara Forum Konsultasi Publik serta ditandatangani oleh perwakilan dari pemangku kepentingan yang hadir, penyelenggaraan forum konsultasi publik dilaksanakan sesuai dengan kondisi daerah dengan mempertimbangkan prinsip efektivitas dan efisiensi.

Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Kabupaten Tahun 2023-2026 Pemerintah Kabupaten Gayo Lues tetap memperhatikan:

1. Penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024.

A. Indikator Makro

Target Indikator makro nasional tahun 2020-2024 menjadi acuan untuk menentukan target indikator makro daerah. Indikator makro nasional dapat dilihat pada Gambar 1.1. yang diuraikan sebagai berikut:

- (1). Pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat meningkat rata-rata 5,4-6,0 persen per tahun dan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) per kapita sebesar 3,0-5,0 persen;
- (2). Selain menjaga pertumbuhan ekonomi, stabilitas inflasi tetap menjadi prioritas, dengan target 2,0-4,0 persen.
- (3). Tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) pun diharapkan turun menjadi 6,5-7,0 persen dan 4,0-4,6 persen pada tahun 2024;
- (4). Indeks pembangunan manusia (IPM) diharapkan meningkat menjadi 75,54 pada 2024, yang mengindikasikan perbaikan kualitas sumber daya manusia;
- (5). Indeks ketimpangan pendapatan (indeks gini) diharapkan meningkat mencapai 0,370-0,374.

Gambar 1.1

Target Indikator Makro Nasional

Pertumbuhan Ekonomi 5,4 - 6,0 %	PDRB Per Kapita 3,0 - 5,0 %	Tingkat Kemiskinan 6,5 - 7,0 %
	TPT PENGANGGURAN 4,0 - 4,6 %	
Inflasi 2,0 - 4,0 %	Indeks GINI 0,370 - 0,374	IPM 75,54

B. Program Prioritas Nasional (PN)

Dalam program yang terdapat dalam RPK Gayo Lues 2023-2026 perlu disinergikan dengan Program Prioritas Nasional (PN) dengan bertujuan tercapainya sinkronisasi dengan tujuan dan sasaran pembangunan antara pusat dan daerah. Terdapat enam Prioritas Nasional yang berkaitan dengan ekonomi, sumber daya manusia (SDM), Revolusi Mental dan Kebudayaan, Infrastruktur, Lingkungan Hidup (LH) dan Kebencanaan, Stabilitas Keamanan dan Pelayanan Publik. Masing-masing Prioritas Nasional ini memiliki Program Prioritas (PP) Nasional yang penting untuk disinergikan oleh seluruh daerah yang dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 1.1
Program Prioritas dan Program Nasional
Tahun 2020-2024

No	Prioritas Nasional/Program Prioritas Nasional	Keterangan
I	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas	PN-1
1	Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)	PN-1, PP1
2	Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	PN-1, PP2
3	Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan	PN-1, PP3
4	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan	PN-1, PP4
5	Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi	PN-1, PP5
6	Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	PN-1, PP6
7	Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)	PN-1, PP7
8	Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi	PN-1, PP8



No	Prioritas Nasional/Program Prioritas Nasional	Keterangan
II	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	PN-2
1	Perlindungan sosial dan tata kelola kependudukan	PN-2 PP-1
2	Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial	PN-2 PP-2
3	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	PN-2 PP-3
4	Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas	PN-2 PP-4
5	Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda	PN-2 PP-5
6	Pengentasan kemiskinan	PN-2 PP-6
7	Peningkatan produktivitas dan daya saing	PN-2 PP-7
III	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PN-3
1	Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter	PN-3, PP1
2	Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia	PN-3, PP2
3	Memperkuat moderasi beragama untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan dan harmoni sosial	PN-3, PP3
4	Peningkatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan dan berkarakter	PN-3, PP4
IV	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	PN-4
1	Infrastruktur pelayanan dasar	PN-4, PP1
2	Infrastruktur ekonomi	PN-4, PP2
3	Infrastruktur perkotaan	PN-4, PP3
4	Energi dan ketenagalistrikan	PN-4, PP4
5	Transformasi digital	PN-4, PP5



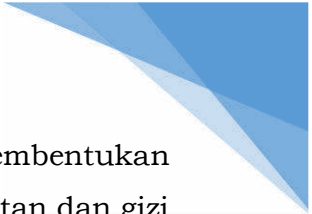
No	Prioritas Nasional/Program Prioritas Nasional	Keterangan
V	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	PN-5
1	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	PN-5, PP1
2	Peningkatan ketahanan bencana dan iklim	PN-5, PP2
3	Pembangunan rendah karbon	PN-5, PP3
VI	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	PN-6
1	Konsolidasi demokrasi	PN-6, PP1
2	Optimalisasi kebijakan luar negeri	PN-6, PP2
3	Penegakan hukum nasional	PN-6, PP3
4	Reformasi birokrasi dan tata kelola	PN-6, PP4
5	Menjaga stabilitas keamanan nasional	PN-6, PP5

Sumber RPJMN 2020-2024

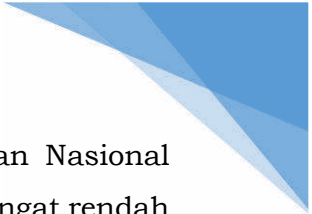
2. Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Gayo Lues sampai dengan Tahun 2025.

Sesuai dengan Qanun Gayo Lues Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Gayo Lues 2005-2025, Gayo Lues masuk ke Tahapan Pembangunan Ke-4 (2021 – 2025), yang merupakan rangkaian akhir tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Gayo Lues yang diharapkan pada akhir periode ini akan terwujud masyarakat Gayo Lues yang bermartabat, terbebas dari keterisolasian dan kemiskinan yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas berdasarkan Syariat Islam yang Kaffah. Prioritas pembangunan pada periode ini diarahkan pada:

- (1). Pada bidang keagamaan akan lebih meningkatkan pemahaman dan kualitas pelaksanaan nilai-nilai islam dalam kehidupan masyarakat sehingga dapat terbentuk karakter masyarakat Gayo Lues yang islami;
- (2). Bidang pemerintahan akan mengutamakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan profesional serta akan meningkatkan pelayanan kepada publik dengan maksimal;

- 
- (3). Pembangunan bidang kesehatan akan diprioritaskan pada pembentukan manusia yang sehat dengan cara meningkatkan kualitas kesehatan dan gizi masyarakat serta kualitas sumber daya kesehatan, pada bidang pendidikan akan diprioritaskan pada pembentukan manusia yang cerdas dan mandiri sehingga dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - (4). Pada bidang kebudayaan akan lebih memprioritaskan pada pelestarian nilai-nilai sejarah, adat istiadat dan seni budaya Gayo Lues sehingga dapat membentuk dan menghasilkan karakter setiap sumber daya manusia yang sejalan dengan karakter budaya Gayo;
 - (5). Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan akan dilakukan secara terencana, optimal, aman produktif dan berkelanjutan sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh semua kalangan masyarakat tanpa merusak kawasan ekosistem yang ada;
 - (6). Bidang keamanan dan ketertiban akan tetap dilakukan secara terus-menerus dalam rangka terciptanya rasa aman dan damai bagi masyarakat Gayo Lues dalam setiap kehidupan bermasyarakat;
 - (7). Pembangunan akan dilakukan secara menyeluruh untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata.
3. Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMK Gayo Lues Tahun 2017-2021.

Hasil evaluasi capaian indikator makro pembangunan Gayo Lues tahun 2021 menunjukkan data pertumbuhan yang bervariasi terhadap capaian indikator makro Provinsi dan Nasional, indikator makro Gayo Lues yang berada di bawah Provinsi dan Nasional yaitu: Laju PDRB Gayo Lues Tahun 2021 masih dibawah laju PDRB Provinsi dan Nasional dimana laju PDRB Gayo Lues sebesar 2,32 persen, provinsi sebesar 2,79 persen dan nasional Tahun 2021 sebesar 3,69 persen. IPM Gayo Lues pada angka 67,56 masih dibawah IPM provinsi sebesar 72,18 dan Nasional sebesar 72, 29. Angka Kemiskinan Gayo Lues masih diatas rata-rata Provinsi dan Nasional, dimana tahun 2021 angka kemiskinan Gayo Lues sebesar 19,64 persen, Provinsi sebesar 15,33 dan Nasional sebesar 9,71, sehingga untuk ekonomi makro laju PDRB, IPM dan Angka Kemiskinan Pemerintah Gayo Lues harus mengambil langkah-langkah nyata untuk mengatasinya. Indikator Makro Gayo Lues yang berada diatas Provinsi dan Nasional yaitu: laju inflasi Gayo Lues dibawah laju inflasi Provinsi, inflasi Gayo



Lues sebesar 1,97 persen, Provinsi sebesar 2,24 persen sedangkan Nasional sebesar 1,87 persen. Tingkat pengangguran terbuka di Gayo Lues sangat rendah dan berada dibawah tingkat pengangguran provinsi dan nasional, TPT Gayo Lues sebesar 1,84 persen, Provinsi sebesar 6,30 persen dan Nasional sebesar 6,49. Untuk gini rasio Gayo lues sebesar 0,263 persen, Provinsi sebesar 0,323 dan Nasional 0,381 artinya kesenjangan pendapatan di Gayo Lues sangat rendah dan sudah terjadi pemerataan pendapatan.

4. Isu-isu strategis yang berkembang:

(1). Penanganan Covid-19.

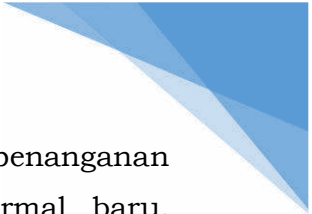
Penanganan Covid-19 menjadi program prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2023-2026. Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak secara signifikan terhadap kesehatan, tetapi juga berdampak negatif terhadap ekonomi dan sosial masyarakat. Selain penanganan Covid-19 yang menjadi prioritas penanganan, permasalahan lainnya yang diakibatkan oleh pandemi adalah melakukan program peningkatan ekonomi masyarakat dan program jaring pengaman sosial agar masyarakat yang terdampak dapat keluar dari masalah ekonomi yang diakibatkan pandemi.

(2). Demokrasi.

Pelaksanaan demokrasi di Gayo Lues akan dilaksanakan pada tahun 2024, dimana pada tahun tersebut akan dilaksanakan dua pemilihan umum dalam waktu yang berdekatan yaitu pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak, dimana dalam tahapannya akan dimulai dengan pendaftaran partai politik sampai dengan rekapitulasi perhitungan suara. Pelaksanaan demokrasi akan menjadi program yang dapat meningkatkan kualitas demokrasi di Kabupaten Gayo Lues.

5. Kebijakan nasional.

- a. Menggunakan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial, serta kebijakan perencanaan anggaran belanja berdasarkan *money follows* program dengan cara memastikan program bermanfaat yang dialokasikan dan bukan hanya merupakan tugas fungsi OPD yang bersangkutan;
- b. Mengalokasikan belanja wajib (*mandatory spending*) untuk pendidikan sebesar 20 persen dari total APBK dan kesehatan sebesar 10 persen dari total APBK diluar gaji dan tunjangan;

- 
- c. Menyediakan dukungan pendanaan untuk belanja kesehatan penanganan Covid-19 dan dampaknya terutama penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman diberbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi dengan fokus pelayanan kesehatan seperti optimalisasi pencegahan, optimalisasi fasilitas kesehatan, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan serta efisiensi pemanfaatan pembiayaan kesehatan;
 - d. Mengalokasikan anggaran untuk pengawasan ke dalam APBDK untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan pembinaan dan pengawasan sebesar 1,00 persen dari total APBDK.
6. Regulasi yang berlaku.
- a. Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Pemulihan Ekonomi Daerah (PED);
Pemerintah melaksanakan Penyertaan Modal Negara (PMN), Penempatan Dana, Investasi Pemerintah, dan Penjaminan. Berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional (PEN).
Melakukan percepatan penyediaan sarana dan prasarana layanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah, termasuk pembangunan sumber daya manusia dukungan pendidikan sesuai dengan amanat Peraturan menteri keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemi covid-19 dan dampaknya.
 - b. Pemilu dan Pilkada
Amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Pemerintah sudah menetapkan untuk melaksanakan Pemilu pada tanggal 14 Februari 2024 (Pilpres dan Pileg) dan Pilkada pada tanggal 27 November 2024 dan sesuai dengan surat menteri dalam negeri nomor 90/3037 tanggal 28 April 2021 dimana pemerintah daerah diminta memberikan dukungan anggaran untuk mensukseskan Pemilu dan Pilkada di tahun 2024 untuk pendidikan politik, forum kerukunan, dan gerakan mitra bersama.

Proses Penyusunan RPK Tahun 2023-2026 dilakukan melalui tahapan dan tata cara sebagai berikut:

- a. Bappeda menyusun Rancangan RPK Tahun 2023-2026 berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021;
- b. SKPK menyusun Rancangan Renstra SKPA Tahun 2023-2026 sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 serta Rancangan RPK Tahun 2023-2026;
- c. Melakukan Forum Konsultasi Publik dengan pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan daerah termasuk DPRK untuk menyerap saran dan masukan yang dituangkan dalam Berita Acara Forum Konsultasi Publik serta ditandatangani oleh perwakilan dari pemangku kepentingan yang hadir;
- d. Forum Konsultasi Publik dilaksanakan sesuai dengan kondisi daerah dengan mempertimbangkan prinsip efektivitas dan efisiensi;
- e. Melakukan fasilitasi terhadap RPK 2023-2026 serta berpedoman kepada surat rekomendasi gubernur sebagai bahan tindak lanjut sebelum ditetapkan ditetapkan oleh kepala daerah;
- f. RPK Tahun 2023-2026 yang telah ditetapkan menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Akhir Renstra SKPK Tahun 2023-2026;
- g. Rancangan Akhir Renstra SKPK Tahun 2023-2026 yang telah disempurnakan sesuai hasil verifikasi, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Selanjutnya tahapan penyusunan RPK Tahun 2023-2026 diawali dengan persiapan, penyusunan rancangan, konsultasi publik, penyusunan rancangan akhir, reviu APIP, fasilitasi dan penetapan RPK yang secara rinci terdapat pada tabel dibawah .

Tabel 1.2

Jadwal Tahapan Penyusunan RPK Gayo Lues Tahun 2023-2026

NO	URAIAN	JANUARI				FEBRUARI				MARET			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
I	PERSIAPAN												
1	Penyiapan SK TIM Penyusun												
2	Sosialisasi SKPK/Renstra												
II	PENYUSUNAN RANCANGAN												
1	Penyusunan Bab Per Bab Rancangan RPK dan Renstra												



NO	URAIAN	JANUARI				FEBRUARI				MARET			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
-	Penyusunan Rancangan RPK dan Renstra SKPK												
-	Pembahasan Rancangan Renstra SKPK												
-	Perbaikan Rancangan RPK dan Renstra SKPK												
III	KONSULTASI PUBLIK												
1	Pembahasan RPK dengan Bappeda Aceh												
2	Konsultasi Publik												
IV	PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR												
1	Penyempurnaan Hasil Konsul Publik												
2	Penyempurnaan RPK dan Renstra SKPK												
3	Finalisasi Dengan Pak Ahli												
V	REVIU APIP												
VI	FASILITASI GUBERNUR												
VII	PENETAPAN RPK												
1	Penetapan RPK												
2	Penetapan Renstra												

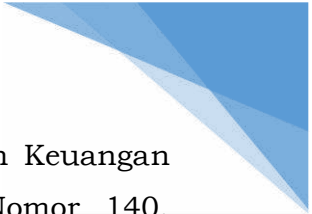
Kabupaten Gayo Lues merupakan salah satu daerah yang masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerahnya akan berakhir pada Tahun 2022, maka dengan disusunnya Dokumen Rencana Pembangunan Kabupaten Gayo Lues ini akan dijadikan acuan dan dasar hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten tahun 2023 sampai dengan tahun 2026, dimana RKPK tersebut akan menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagai satu kesatuan dalam rangkaian penyusunan APBK.

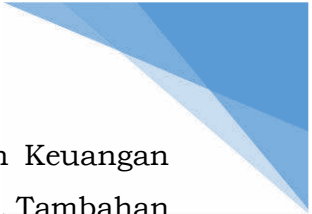
1.2. Dasar Hukum

Penyusunan Rencana Rencana Pembangunan Kabupaten Tahun 2023-2026 berlandaskan pada beberapa dasar hukum, yaitu:

Rencana Pembangunan Kabupaten Gayo Lues Tahun 2023-2026
Bab I - 11

- 
1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
 2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

- 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4745);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);

- 
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 17. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2001 tentang *Master Plan* Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
 18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disesase-19 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

- 
26. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
 27. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh;
 28. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Tambahan Lembaran Aceh Nomor 102);
 29. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032 (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 9);
 30. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh (RTRWA) Tahun 2013-2033 (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 1);
 31. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022 (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 9);
 32. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembagian dan Penyaluran Bantuan Keuangan Dana Otonomi Khusus Aceh Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2019;
 33. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026;
 34. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2008 Nomor 2), sebagaimana telah di ubah dengan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2013 Nomor 55);
 35. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 13 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Gayo Lues Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2013 Nomor 67);

- 
36. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gayo Lues 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2013 Nomor 65);
 37. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2020 Nomor 40);
 38. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Gayo Lues Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2021 Nomor 126); dan
 39. Evaluasi Hasil Pelaksanaan RPJMK Gayo Lues 2017-2022 Tahun Pelaksanaan Tahun 2018-2021.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, prinsip-prinsip dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yaitu:

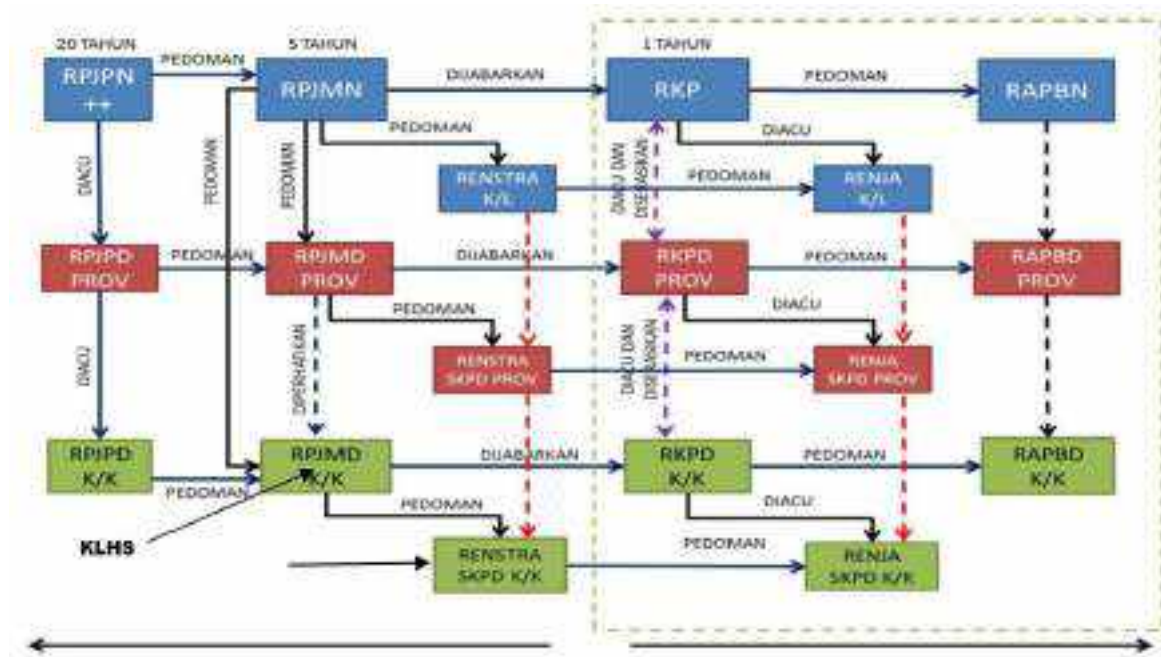
1. Merupakan satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional;
2. Dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
3. Mengintegrasikan rencana tata ruang dan perencanaan pembangunan daerah;
4. Dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi masing-masing daerah sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Rencana Pembangunan Kabupaten Tahun 2023-2026 sebagai bagian dari dokumen perencanaan pembangunan nasional dalam proses penyusunannya menggunakan prinsip-prinsip tersebut. Sesuai dengan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, Rencana Pembangunan Kabupaten berpedoman dan selaras dengan RPJMN 2020-2024, Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026 serta sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Gayo Lues sampai tahun 2025. Selain itu, Rencana Pembangunan Kabupaten yang disusun juga terkait dengan dokumen lain seperti RTRW Nasional, RTRW Provinsi, dan RTRW Kabupaten/Kota.

Hubungan antar dokumen sebagaimana tergambar pada bagan alur berikut:

Gambar 1.2

Hubungan antar Dokumen



Hubungan antar dokumen Rencana Pembangunan Kabupaten Gayo Lues dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, Rencana Pembangunan Kabupaten Gayo Lues Tahun 2023-2026 memperhatikan dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020, karena pembangunan daerah adalah bagian pembangunan nasional maka pembangunan Kabupaten Gayo Lues diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dengan target yang jelas disertai arah kebijakan dan pembangunan wilayah berdasarkan koridor pertumbuhan dan pemerataan serta memperhentikan agenda pembangunan yang menjadi Prioritas Nasional dalam Perencanaan Tahunan Rencana Kerja Pemerintah;
2. Rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) Kabupaten Gayo Lues tahun 2005-2025 masuk pada periode terakhir, oleh sebab itu rencana pembangunan Kabupaten Gayo Lues Tahun 2023-2026 akan mengutamakan penyelesaian permasalahan dan isu strategis terkait dengan sasaran pokok yang terdapat pada RPJPD;

- 
3. Rencana pembangunan daerah provinsi Aceh akan dipedomani dalam penyusunan rencana pembangunan kabupaten Gayo Lues Tahun 2023-2026, hal ini dimaksudkan agar arah pembangunan Kabupaten Gayo Lues dapat sejalan dengan Provinsi Aceh guna terciptanya sinkronisasi dan sinergi pembangunan jangka menengah serta keterpaduan struktur dan pola ruang sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan;
 4. Penyelarasan dengan dokumen perencanaan lainnya yang berkaitan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Kabupaten Gayo Lues Tahun 2023-2026 seperti: RTRW Nasional, RTRW Provinsi Aceh, RTRW Kabupaten Gayo Lues serta dokumen lainnya. Penyelarasan dengan rencana tata ruang bertujuan untuk melihat pemanfaatan ruang daerah selama 4 (empat) tahun kedepan untuk mewujudkan rencana tata ruang yang bersifat indikatif yang akan diwujudkan melalui sinkronisasi program dan kegiatan.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

1.4.1. MAKSUD

Maksud penyusunan Rencana Pembangunan Kabupaten Gayo Lues Tahun 2023-2026 adalah sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah selama 4 (empat) tahun kedepan yang bertujuan untuk menghindari kekosongan atau tidak adanya dokumen perencanaan jangka menengah yang akan dijadikan pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan, yang diakibatkan karena akan dilaksanakannya pemilihan kepala daerah serentak pada tahun 2022, serta menindaklanjuti amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, Rencana Pembangunan Kabupaten Tahun 2023-2026 akan menjadi pedoman Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPK) dan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah.

1.4.2. TUJUAN

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan Rencana Pembangunan Kabupaten Gayo Lues Tahun 2023-2026, adalah:

1. Menetapkan kebijakan pembangunan jangka menengah yang selaras dengan keadaan dan penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah pusat;
2. Memberikan pedoman kepada perangkat daerah dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD);
3. Memberikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK);
4. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis serta terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten Gayo Lues.

1.5. SISTEMATIKA

Sistematika dokumen Rencana Pembangunan Kabupaten Tahun 2023-2026 disusun sebagaimana tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021, yang terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan Rencana Pembangunan Kabupaten Gayo Lues 2023-2026.

BAB II GAMBARAN UMUM

Bab ini menguraikan aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah Kabupaten Gayo Lues.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menjelaskan hasil pengolahan data dan analisis tentang kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, dan kerangka pendanaan pembangunan Kabupaten Gayo Lues.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Bab ini berisi uraian tentang permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis yang menjadi dasar utama pembangunan Kabupaten Gayo Lues.

BAB V TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini berisi uraian tentang tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Gayo Lues 2023-2026.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

Dalam bagian ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, perangkat daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini berisi Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian pembangunan Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada akhir periode rencana pembangunan kabupaten.

BAB IX PENUTUP

Bagian ini berisi kesimpulan dan rekomendasi ringkas tentang pelaksanaan Rencana Pembangunan Kabupaten Gayo Lues 2023-2026.



BAB II GAMBARAN UMUM

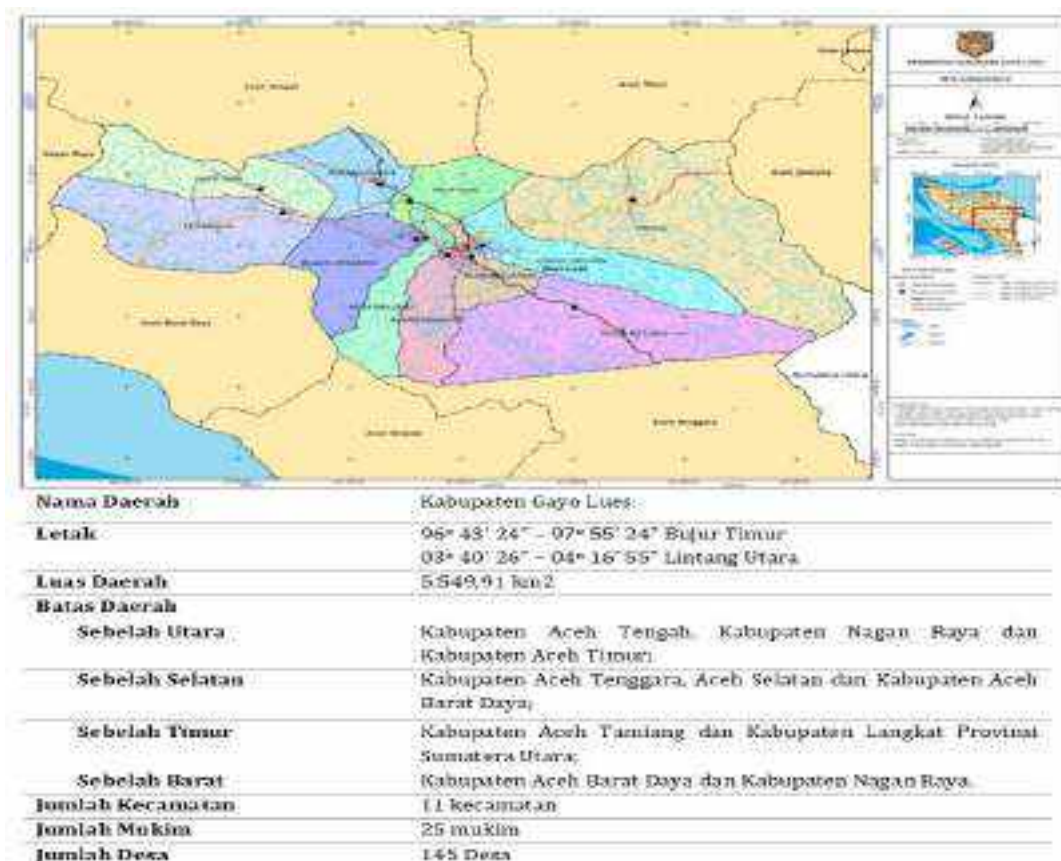
2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

A. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2002 menjadi tonggak bersejarah terbentuknya Kabupaten Gayo Lues yang sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Aceh Tenggara. Letaknya yang berada dalam gugusan Bukit Barisan menjadikan Kabupaten Gayo Lues memiliki ciri wilayah dengan permukaan yang bergunung dan berbukit. Berdasarkan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gayo Lues tahun 2012-2032 disebutkan bahwa 71,18 persen dari wilayah Kabupaten Gayo Lues berupa kawasan lindung dan 28,82 persen merupakan kawasan budidaya dengan luas wilayah 554.991 ha (5.549,91 km²) atau 9,77 persen dari luas Provinsi Aceh 5.677.081 ha (56.770,81 km²). Untuk Lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar berikut :

Gambar 2.1
Peta Administrasi dan Tata Letak Kabupaten Gayo Lues



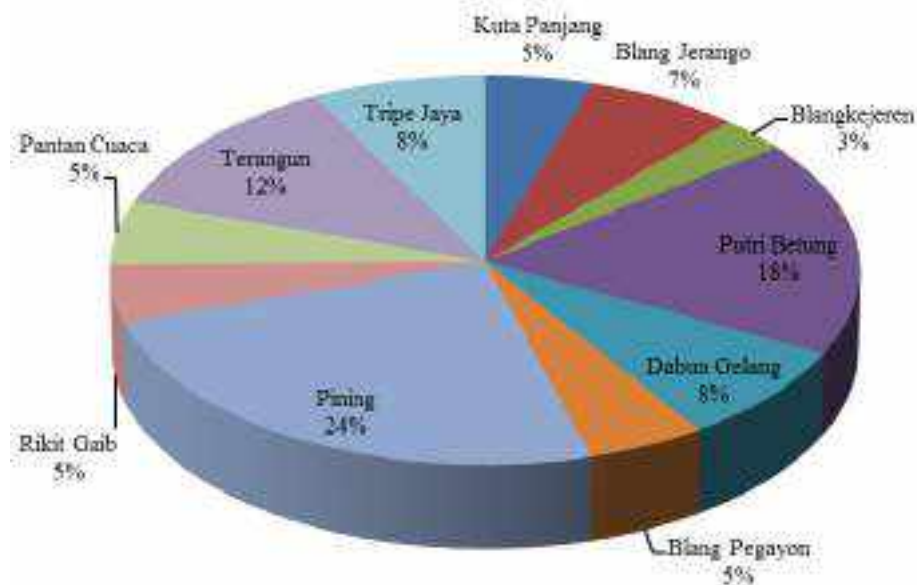
Sumber : RTRW Kabupaten Gayo Lues tahun 2012-2032 (diolah)

Rencana Pembangunan Kabupaten Gayo Lues Tahun 2023-2026

Bab II - 1

Kecamatan dengan wilayah terluas adalah Kecamatan Pining dengan luas wilayah 1.350,09 km, atau 24,33 persen dari luas wilayah, sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah kecamatan Blangkejeren dengan luas wilayah 166,06 km atau 2,99 persen dari luas wilayah Kabupaten Gayo Lues. Kecamatan terjauh dari Ibukota Kabupaten Gayo Lues adalah Kecamatan Tripe Jaya dan Kecamatan Pining yang berjarak sekitar 55 km, sedangkan ibukota kecamatan terdekat dari ibukota Kabupaten Gayo Lues adalah Kecamatan Dabun Gelang dengan Ibukota Kecamatan Kampung Badak Burjumpe. Kecamatan Blangkejeren merupakan Ibukota Kabupaten Gayo Lues. Nama kecamatan dan luas secara rinci dapat dilihat pada Gambar 2.2 berikut:

Gambar 2.2
Persentase Wilayah Masing-masing Kecamatan (persen/km)



Sumber: Kabupaten Gayo Lues Dalam Angka, 2022

B. Topografi

Ditinjau dari sisi topografi wilayah, Kabupaten Gayo Lues terletak pada ketinggian 100-3.000 meter di atas permukaan laut (mdpl). Ketinggian tempat paling dominan adalah pada ketinggian 1.000-1.500 mdpl yaitu seluas 175.944,16 hektar atau 31,70 persen, sedangkan luasan terkecil berada pada ketinggian >3.000 yaitu 3.387,44 hektar atau sekitar 0,61 persen. Ketinggian dan Karakteristik bentang lahan yang sangat variatif dengan dominasi berbukit hingga bergunung menjadi inspirasi sebutan Kabupaten Gayo Lues sebagai Negeri Seribu Bukit Secara rinci lihat Gambar di bawah ini:

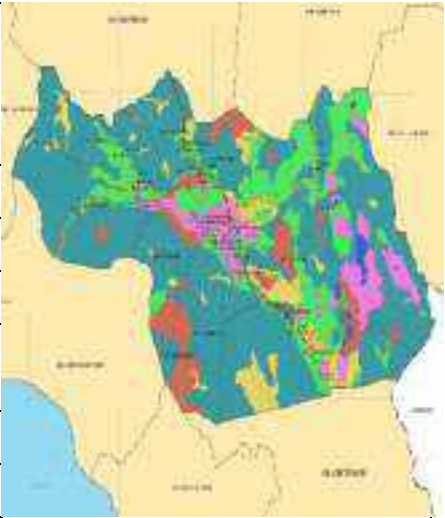
Gambar 2.3
Ketinggian Kabupaten Gayo Lues (persen/ha)

Ketinggian (mdpl)	Luas (ha)	Persentase (%)	
100-500	22 661,56	4,08	
500-1.000	115 955,36	20,89	
1.000-1.500	175 944,16	31,70	
1.500-2.000	135 293,80	24,38	
2.000-2.500	75 571,01	13,62	
2.500-3.000	26 177,73	4,72	
>3.000	3 387,44	0,61	
Gayo Lues	554 991,06	100,00	

Sumber: Profil Gayo Lues 2020

Kemudian jika dilihat dari kelerengan daratan pada gambar di atas, Gayo Lues mempunyai bentangan yang beragam. Sesuai tipikal daerah yang terletak pada wilayah pegunungan dataran tinggi, dominasi lereng-lereng yang curam dengan kemiringan di atas 40 persen sangat begitu terasa. Yang masuk kategori datar hanya seluas 967,42 ha atau 0,17 persen dari total luas wilayah), sedangkan yang masuk kategori landai hanya 42.019,39 ha atau 7,57 persen.

Gambar 2.4
Kemiringan Kabupaten Gayo Lues (persen/ha)

Kemiringan (%/kelas)	Luas Wilayah (ha)	Persentase (%)	
0-3 (datar)	967,42	0,17	
3-8 (landai)	42.019,39	7,57	
8-15 (berombak)	45.591,20	8,21	
15-25 (bergelombang)	128.601,43	23,17	
25-40 (berbukit)	94.024,51	16,94	
> 40(bergunung)	243.788,07	43,93	
Gayo Lues	554.991,06	100,00	

Sumber: Profil Gayo Lues 2019

C. Geologi

Wilayah Kabupaten Gayo Lues tersusun dari berbagai jenis formasi batuan. Susunan batuan di sebelah tengah dan utara terdiri dari Formasi Batu Gamping. Sedangkan susunan Batu Granit letaknya menyebar. Susunan yang mendominasi adalah Formasi Gamping. Pada bagian selatan tersusun oleh Formasi Alas,

Layangbaung dan Mikrodolit Dalam. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Formasi Geologi, Luasan dan Persentasenya di Kabupaten Gayo Lues

	Formasi Geologi	Luas (ha)	Persentase (%)
1	Anggota Batu Gamping Reungeuet	233,1	0,04
2	Anggota Terlis	1.947,06	0,35
3	Batolit Serbajadi	2.309,00	0,42
4	Batu Gamping Tak Terpisahkan	2.528,98	0,46
5	Batuan Gamping Kenyaran	2.537,02	0,46
6	Dusun Member	3.012,35	0,54
7	Formasi Alas	3.197,97	0,58
8	Formasi Batu Gamping Sise	3.229,74	0,58
9	Formasi Batu Gamping Ujeuen	3.841,20	0,69
10	Formasi Batuan Gamping Brawan	4.874,13	0,88
11	Formasi Batugamping Sembuang	5.466,74	0,99
12	Formasi Batugamping Ujeuen	7.307,51	1,32
13	Formasi Gunung Api Akul	7.463,25	1,34
14	Formasi Kutacane	8.606,63	1,55
15	Formasi Layangbaung	11.156,63	2,01
16	Formasi Layangbaung	15.355,75	2,77
17	Formasi Rampong	18.705,61	3,37
18	Granit Lamacut	25.363,12	4,57
19	Granit Palok	26.390,76	4,76
20	Granodiorit Pantan Dadalu	31.026,77	5,59
21	Granodiorit Tak Bernama	38.088,38	6,86
22	Kelompok Woyla Tak Terpisahkan	55.117,29	9,93
23	Komplek Kais	118.019,76	21,27
24	Mikrodiolit Dalam	159.212,32	28,69
Jumlah		554.991,06	100

Sumber : Profil Gayo Lues Tahun 2020

Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Gayo Lues terdiri dari tanah jenis alluvial hidromof, hidromof kelabu, podsolik merah kuning, latosol dan podsolik coklat. Pada lahan-lahan yang dijadikan persawahan didominasi oleh jenis tanah alluvial hidromof dan hidromof kelabu, sedangkan pada daerah pergunungan jenis tanah

pada umumnya adalah latosol, podsolik merah kuning, dan kambisol. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 2.2
Jenis Tanah, Luas Wilayah dan Persentasenya di Kabupaten Gayo Lues

No	Jenis Tanah	Luas Wilayah (km ²)	Persentase (%)
1	Aluvial-Hidromof (fluvaquepts)	84,65	1,53
2	Hidromof Kelabu (eutrodepts)	72,74	1,31
3	Kambisol (dystropepts)	857,03	15,44
4	Latosol (dystrandepts)	133,31	2,40
5	Podsolik Merah Kuning (hapludults)	4033,65	72,68
6	Podsolik Coklat (eutropepts)	368,51	6,64
Jumlah		5 549,91	100,00

Sumber: Profil Gayo Lues 2019

D. Hidrologi

Tutupan hutan yang masih sangat luas di Kabupaten Gayo Lues mengindikasikan potensi sumber daya air yang sangat besar. Tingkat kerapatan jaringan sungai relatif tinggi merupakan kombinasi topografi dan luasan hutan sebagai penyimpan dan penahan air. Pemanfaatan secara umum potensi sumberdaya air tersebut adalah untuk pengairan pertanian, sumber air bersih dan sumber pembangkit listrik. Sedangkan untuk sumber air bersih, ada 7 unit intake air bersih, akan tetapi yang fungsional baru 5 unit.

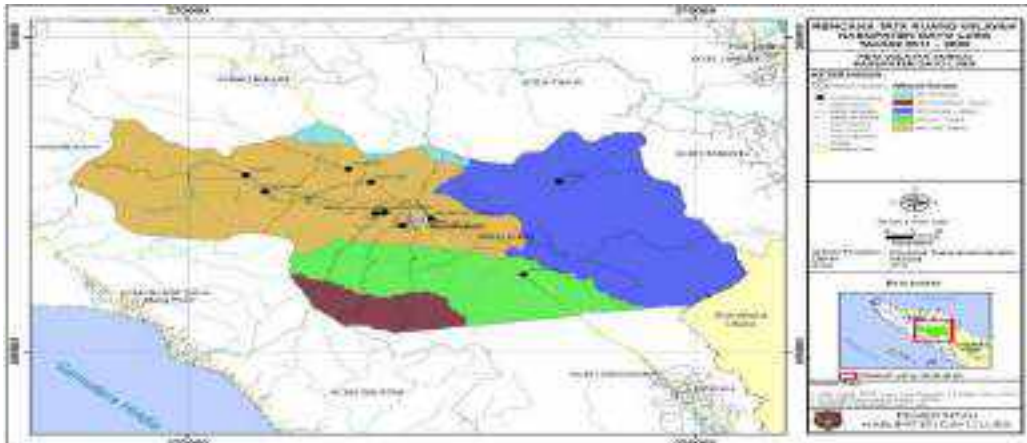
Gambar 2.5
Peta Jaringan Sungai Kabupaten Gayo Lues



Sumber: RTRW Gayo Lues 2012-2032

Sementara itu, sampai dengan tahun 2019 ada 116 unit jaringan irigasi dan baru efektif mengairi 154 hektar sawah, terdiri dari 16 lokasi memiliki 19 unit Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) yang dibangun dari tahun 1992 sampai dengan 2019 dengan daya mampu 3.100 KW dari kapasitas total 3.900 KW.

Gambar 2.6
Peta Wilayah Sungai Kabupaten Gayo Lues



Sumber: RTRW Gayo Lues 2012-2032

Untuk pengelolaan sungai sebagai sumber daya air dari 9 (sembilan) Wilayah Sungai atau biasa disingkat WS yang terdapat di Aceh berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.11A/PRT/M/2006, 5 (lima) WS berada di wilayah Gayo Lues yaitu WS. Alas-Singkil, WS. Woyla – Batee, WS. Tamiang-Langsa, WS. Krueng Baro-Kleut, dan WS. Jambo Aye seperti yang terlihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 2.3
Wilayah Sungai (WS) di Kabupaten Gayo Lues

No.	Nama WS	DAS	Luas (ha)	Urusan	Keterangan
1	Jambo Aye	Jambo Aye	9.514,60	Pemerintah Pusat	Strategis Nasional
2	Woyla – Batee	Kr. Tripa	228.261,42	Pemerintah Pusat	Strategis Nasional
3	Alas – Singkil	Lawe Singkil	98.760,71	Pemerintah Aceh	Lintas Provinsi
4	Baru – Klueut	Kr. Baru	33.058,33	Pemerintah Aceh	Lintas Kabupaten
5	Tamiang-Langsa	Kr. Tamiang	185.396,01	Pemerintah Aceh	Lintas Kabupaten
Jumlah			554.991,06		

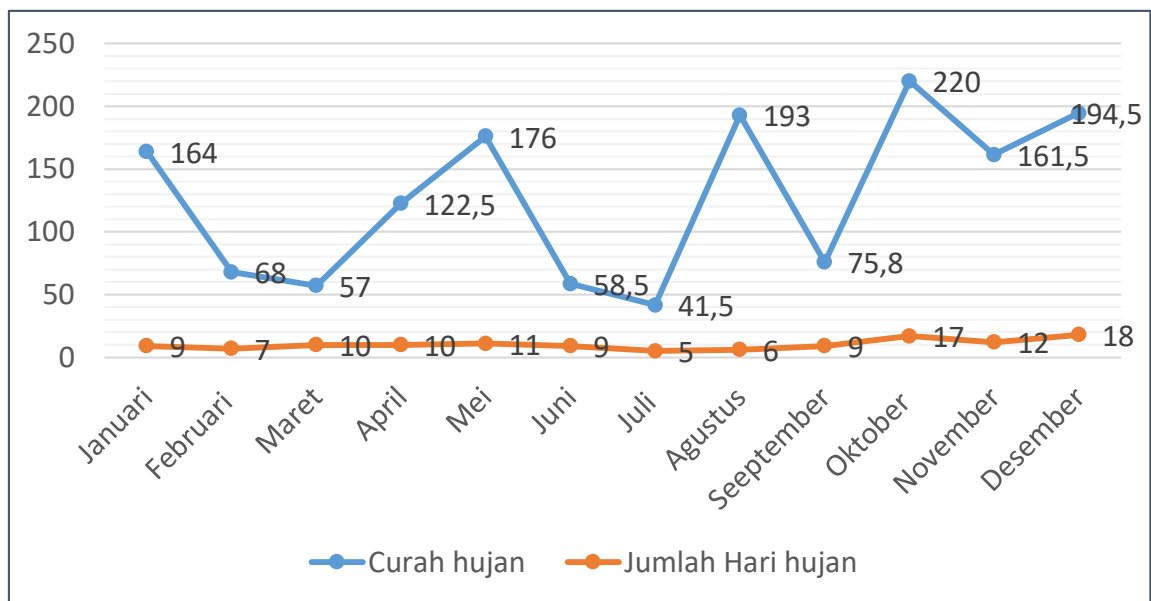
Sumber : Badan Pengelola DAS Wilayah Sumatera

E. Klimatologi

Tipe iklim wilayah Kabupaten Gayo Lues menurut Mohr, Schmidt dan Ferguson termasuk Iklim B (basah). Iklim Kabupaten Gayo Lues lebih basah jika dibandingkan dengan bagian utara Provinsi Aceh. Hal ini akibat pengaruh letak Kabupaten Gayo Lues di daerah medium sampai tinggi serta tingkat kerapatan vegetasi yang masih tinggi menyebabkan daerah ini memiliki curah hujan relatif tinggi. Rata-rata suhu udara bulanan di Kabupaten Gayo Lues adalah 27° C. Bulan terpanas terjadi pada Bulan Maret-Mei yaitu berkisar 30° C, sedangkan Bulan September-Desember

merupakan bulan-bulan dengan suhu terendah, dengan suhu udara berkisar 25° C. Kelembaban udara di Kabupaten Gayo Lues cukup tinggi yaitu berkisar 84–89 persen dengan rata-rata dalam 10 tahun terakhir 86,6 persen. Sepanjang tahun 2019 tercatat jumlah hari hujan sebanyak 123 hari dengan intensitas curah hujan 1.532,3 mm. Curah hujan rendah terjadi di bulan Juli dan curah hujan tinggi terjadi di bulan Januari, Oktober, November hingga Desember. Untuk lebih lanjut dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2.7
Curah Hujan per Bulan Kabupaten Gayo Lues (mm)



Sumber : BPS Kabupaten Gayo Lues Tahun 2020

Dilihat dari tabel di atas, Bulan Oktober terlihat sebagai puncak musim hujan sepanjang tahun 2019. Sedangkan Rata-rata suhu udara bulanan di Kabupaten Gayo Lues adalah 27°C. Bulan terpanas terjadi pada Bulan Maret-Mei yaitu berkisar 30°C, sedangkan bulan September- Desember merupakan bulan-bulan dengan suhu terendah, dengan suhu udara berkisar 25°C. Kelembaban udara di Kabupaten Gayo Lues cukup tinggi yaitu berkisar 84-89 persen dengan rata-rata dalam 10 tahun terakhir 86,6 persen.

2.1.2. Demografi

Kondisi demografi suatu daerah secara umum tercermin melalui jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, struktur penduduk, sebaran penduduk serta ketenagakerjaan. Menurut data BPS tahun 2021, Populasi penduduk Kabupaten Gayo Lues berjumlah 101.102 jiwa meningkat dari tahun sebelumnya yang berjumlah 99.532 jiwa. Struktur umur dan jenis kelamin penduduk secara rinci dapat lihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Jumlah Penduduk Kabupaten Gayo Lues Berdasarkan Kelompok Umur
Tahun 2017-2021

No.	Kelompok Umur	2017	2018	2019	2020	2021
1	0 - 4	10.960	10.860	10.944	10.944	10.104
2	5 - 9	10.527	10.527	10.628	10.628	9.963
3	10 - 14	9.986	9.986	10.240	10.240	9.068
4	15 - 19	5.802	8.702	7.874	7.874	9.067
5	20 - 24	7.500	8.400	7.517	7.517	9.707
6	25 - 29	9.383	9.383	9.394	9.394	9.311
7	30 - 34	8.030	9.030	8.187	8.187	8.780
8	35 - 39	7.157	7.754	7.309	7.309	8.022
9	40 - 44	5.627	6.627	5.787	5.787	6.918
10	45 - 49	4.825	4.825	4.975	4.975	5.670
11	50 - 54	3.921	5.558	3.694	3.694	4.600
12	55 - 59	2.362	4.362	2.454	2.454	3.354
13	60 - 64	1.959	1.959	2.062	2.062	2.598
14	65 - 69	1.230	1.230	1.305	1.305	1.534
15	70 - 74	812	821	850	850	1.106
16	75+	856	856	880	880	1.300
Jumlah		91.024	92.602	94.100	99.532	101.102

Sumber : BPS Provinsi Aceh dan Kab. Gayo Lues dalam Angka, 2022

Dilihat pada Tabel di atas, Pada tahun 2021 jumlah penduduk Kabupaten Gayo Lues lebih tinggi di banding tahun lainnya. Berdasarkan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gayo Lues 2012-2032, Luas Hutan Lindung ditetapkan 480.635,94 ha (71,24 persen) dan Kawasan Budidaya dengan seluas 1.599,59 km (28 persen). Apabila dijumlahkan secara keseluruhan luas wilayah Kabupaten Gayo Lues adalah 5.549,91 km². Laju pertumbuhan jumlah penduduk Kabupaten Gayo Lues dari tahun 2017-2021 menunjukkan angka positif sebesar 1,55 persen. Laju pertumbuhan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Putri Betung sebesar 2,50 persen.

2.1.3. Potensi Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah merupakan rangkaian upaya untuk mencapai suatu perkembangan sesuai dengan yang dibutuhkan wilayah terkait. Dalam pengembangan wilayah yang ingin dicapai adalah keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumberdaya, mengikat dan menyeimbangkan pembangunan dalam satu

kesatuan wilayah, meningkatkan keserasian antar kawasan dan keterpaduan antar sektor pembangunan dengan prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Kabupaten Gayo Lues memiliki potensi besar di sektor kehutanan, pertanian, perkebunan, pertambangan dan energi. Penggalan potensi tersebut akan melahirkan potensi berikutnya yaitu di sektor jasa, perdagangan dan industri, bahkan pariwisata.

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan wilayah adalah sumber daya yang terbatas dan tidak seimbang dengan kebutuhan pembangunan, oleh karena itu ruang untuk mempertemukan antara kebutuhan dengan keterbatasan sumber daya adalah perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien serta fokus terhadap masalah yang dihadapi.

Sebagai wilayah yang berada di tengah Aceh dengan potensi sumberdaya alam yang kaya, Kabupaten Gayo Lues sangat strategis untuk dibangun dan dikembangkan menjadi kawasan pengembangan ekonomi di bagian hulu Aceh dan pendukung pengembangan wilayah timur dan barat Aceh. Wujud operasional secara terpadu dituangkan melalui pendekatan tata ruang melalui Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang komprehensif dan berhirarki.

Rencana Pusat Pengembangan Wilayah telah ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Gayo Lues berdasarkan Pasal 9 Qanun Nomor 15 Tahun 2013 Kabupaten Gayo Lues tentang RTRW Kabupaten Gayo Lues Tahun 2012-2032, Pusat-pusat pelayanan untuk pengembangan wilayah, meliputi :

1. PKL (Pusat Kegiatan Lokal) Blangkejeren;
2. PKLP (Pusat Kegiatan Lokal Promosi) Terangun dan Pining; dan
3. PPK (Pusat Pelayanan Kawasan) Kuta Panjang, Ampa Kolak, Cinta Maju, Badak Bur Jumpe, Buntul Gemunyang, Rerebe, Gumpang, dan Kenyaran; serta PPL (Pusat Pelayanan Lingkungan) Pantan Antara, Air Jernih, Sangir, Pintu Rime Gayo, Goh Lemu, Pasir Antara dan Marpunge.

Penetapan wilayah pengembangan secara rinci dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 2.5
Penempatan Wilayah Pengembangan (WP)

No	Hirarki /Fungsi	Kecamatan	Keterangan	Fungsi Utama Dan Arah Pengembangan
1	PKL	Blangkejeren	Ibukota Kabupaten Gayo Lues	Pusat pemerintahan kabupaten, Perdagangan, Industri dan Jasa skala kabupaten
				Industri pengolahan dan jasa hasil perkebunan kopi, kakao, nilam, sere wangi dan tembakau

No	Hirarki /Fungsi	Kecamatan	Keterangan	Fungsi Utama Dan Arah Pengembangan
				Pusat penelitian dan pengembangan perkebunan
				Pusat penelitian dan pengembangan pertanian tanaman pangan
				Pusat pengembangan perikanan air tawar
				Pusat industri hasil pertambangan mineral
				Pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura
				Pusat Kebudayaan dan Pariwisata
				Pusat Kegiatan Olahraga
2	PKLp	Terangun	Ibukota Kecamatan Terangun	Pusat Pemerintahan Kecamatan Terangun
				Kawasan strategis kabupaten wilayah barat
				Jalur lintas strategis dari Gayo Lues ke wilayah Barat Aceh
				Pusat perdagangan, industri dan jasa skala kecamatan
				Pusat industri pengolahan dan jasa hasil perkebunan kopi, kakao, jeruk manis, nilam, sere wangi dan kelapa sawit
				Pusat pengembangan perikanan air tawar
				Pusat pengembangan peternakan (Desa Berhut)
				Pusat industri hasil pertambangan mineral
				Pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura wilayah barat
				Pusat kebudayaan dan pariwisata
		Pining	Ibukota Kecamatan Pining	Pusat Pemerintahan Kecamatan Pining
				Kawasan strategis kabupaten wilayah timur
				Jalur lintas strategis Gayo Lues ke wilayah Timur Aceh
				Pusat perdagangan, industri dan jasa skala kecamatan
				Kawasan industri pengolahan dan jasa hasil perkebunan kakao, nilam, sere wangi, kelapa sawit dan karet
				Kawasan pengembangan peternakan (Desa Gajah)
				Kawasan industri hasil pertambangan mineral

No	Hirarki /Fungsi	Kecamatan	Keterangan	Fungsi Utama Dan Arah Pengembangan
3	PPK			Pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura wilayah timur
				Pusat kebudayaan dan pariwisata
		Kuta Panjang	Ibukota Kecamatan Kuta Panjang	Pusat Pemerintahan Kecamatan Kutapanjang
				Pusat perdagangan, industri dan jasa skala kecamatan
				Kawasan industri pengolahan dan jasa hasil perkebunan kopi, kakao, buah-buahan, sere wangi dan tembakau
				Kawasan industri hasil pertambangan mineral
				Kawasan industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura
				Pusat kebudayaan dan pariwisata
		Ampakolak	Ibukota Kecamatan Rikit Gaib	Pusat Pemerintahan Kecamatan Rikit Gaib
				Pusat perdagangan, industri dan jasa skala kecamatan
				Kawasan industri pengolahan dan jasa hasil perkebunan kopi, kakao, buah-buahan, sere wangi dan tembakau
				Kawasan industri hasil pertambangan mineral
				Pusat kebudayaan dan pariwisata
		Cinta Maju	Ibukota Kecamatan Blangpegayon	Pusat Pemerintah Kecamatan Blangpegayon
				Pusat perdagangan, industri dan jasa skala kecamatan
				Pusat industri hasil pertambangan mineral
				Pusat kebudayaan dan pariwisata
		Badak Bur Jumpe	Ibukota Kecamatan Dabun Gelang	Pusat Pemerintahan Kecamatan Dabun Gelang
				Pusat perdagangan, industri dan jasa skala kecamatan
				Pusat industri hasil pertambangan mineral
				Pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan
				Pusat kebudayaan dan pariwisata
		Rerebe	Ibukota Kecamatan Tripe Jaya	Pusat Pemerintahan Kecamatan Tripejaya
				Pusat perdagangan, industri dan jasa skala kecamatan



No	Hirarki /Fungsi	Kecamatan	Keterangan	Fungsi Utama Dan Arah Pengembangan
				Kawasan industri pengolahan dan jasa hasil perkebunan kopi, kakao, buah-buahan, sere wangi dan tembakau
				Pusat industri hasil pertambangan mineral
				Pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan
				Pusat kebudayaan dan pariwisata
		Buntul Gemunyang	Ibukota Kecamatan Blangjerango	Pusat Pemerintahan Kecamatan Blangjerango
				Pusat perdagangan, industri dan jasa skala kecamatan
				Kawasan industri pengolahan dan jasa hasil perkebunan kakao, nilam, sere wangi, kelapa sawit dan karet
				Pusat penelitian dan pengembangan perkebunan
				Pusat industri hasil pertambangan mineral
				Pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan
				Pusat kebudayaan dan pariwisata
		Gumpang	Ibukota Kecamatan Putri Betung	Pusat Pemerintah Kecamatan Putri Betung
				Pusat perdagangan, industri dan jasa skala kecamatan
				Kawasan industri pengolahan dan jasa hasil perkebunan kakao, nilam, sere wangi, kelapa sawit dan karet
				Pusat industri hasil pertambangan mineral
				Pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan
				Pusat kebudayaan dan pariwisata
		Kenyaran	Ibukota Pantai Cuaca	Pusat Pemerintahan Kecamatan Pantai Cuaca
				Pusat perdagangan, industri dan jasa skala kecamatan
				Kawasan industri pengolahan dan jasa hasil perkebunan kakao, nilam, sere wangi, kelapa sawit dan karet
				Pusat pengembangan perikanan air tawar
				Pusat industri hasil pertambangan mineral

No	Hirarki /Fungsi	Kecamatan	Keterangan	Fungsi Utama Dan Arah Pengembangan
4	PPL			Pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan
				Pusat kebudayaan dan pariwisata
		Pantan Antara		Pusat Pemerintahan Mukim Pantan Antara di Kecamatan Pantan Cuaca
				Kawasan industri pengolahan dan jasa hasil perkebunan kakao, nilam, sere wangi, kelapa sawit dan karet
				Kawasan kebudayaan dan pariwisata
		Air Jernih		Pusat Pemerintahan Mukim Air Jernih di Kecamatan Blangjerango
				Kawasan pengembangan perkebunan kopi, sere wangi, kemiri dan pertanian tanaman pangan
				Kawasan kebudayaan dan pariwisata
		Sangir		Pusat Pemerintahan Mukim Sangir di Kecamatan Dabun Gelang
				Kawasan industri pengolahan dan jasa hasil perkebunan kakao, nilam, sere wangi, kelapa sawit dan karet
				Kawasan kebudayaan dan pariwisata
		Pintu Rime Gayo		Pusat Pemerintahan Mukim Pintu Rime Gayo Kecamatan Terangun
				Kawasan industri pengolahan dan jasa hasil perkebunan kakao, nilam, sere wangi, kelapa sawit dan karet
				Kawasan kebudayaan dan pariwisata
		Goh Lemu		Pusat Pemerintahan Mukim Pasir Antara Kecamatan Tripejaya
				Kawasan kebudayaan dan pariwisata
		Pasir Antara		Pusat Pemerintahan Mukim Pasir Antara Kecamatan Tripejaya
				Kawasan industri pengolahan dan jasa hasil perkebunan kakao, nilam, sere wangi, kelapa sawit dan karet
				Kawasan kebudayaan dan pariwisata
		Marpunge		Pusat Pemerintah Mukim Marpunge Kecamatan Putri Betung
				Pusat industri hasil pertambangan mineral
				Pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan
				Kawasan kebudayaan dan pariwisata

Sumber : Qanun RTTW Kabupaten Gayo Lues 2020

Catatan :

PKL : Pusat Kegiatan Lokal

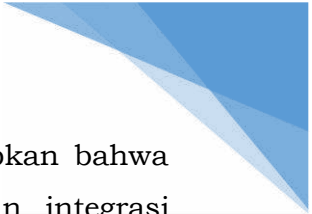
PPK : Pusat Pelayanan Kawasan

PKLp: Pusat Kegiatan Lokal Promosi

PPL : Pusat Pelayanan Lokal

Rencana Pembangunan Kabupaten Gayo Lues Tahun 2023-2026

Bab II - 13

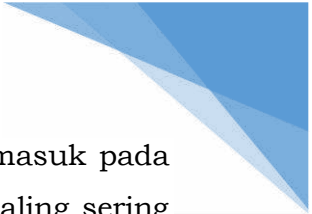


Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mewajibkan bahwa setiap rencana pembangunan, termasuk RPJMK, untuk melakukan integrasi rekomendasi hasil KLHS kedalam Rancangan RPJMK. Amanat ini dikukuhkan juga dalam Peraturan Menteri LHK Nomor 69 Tahun 2017 yang mewajibkan dibuatnya Berita Acara hasil integrasi KLHS kedalam RPJMK Gayo Lues sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 30 ayat 2.

Kegiatan pembangunan perlu disertai dengan upaya inovasi dan kreatifitas yang tinggi, antara lain (a) memposisikan kegiatan konservasi dan perlindungan lingkungan dan sumberdaya alam Gayo Lues sebagai kegiatan yang produktif, yakni sebagai sumber manfaat ekonomi (*benefit center*) daripada sumber biaya (*cost center*), (b) berorientasi pada diversifikasi jenis usaha dan komoditi, dan fokus pada (c) peningkatan nilai tambah dan (d) membuka konektivitas dengan tujuh kabupaten yang berbatasan langsung disekeliling Gayo Lues: yaitu Aceh Tengah, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Aceh Selatan, Aceh Barat Daya dan Bener Meriah; konektivitas ini bahkan bisa diperluas dengan lima kabupaten lainnya, termasuk kabupaten yang ada di Sumatera Utara. Sebagai contoh, DAS Peuruelak Tamiang dimana Gayo Lues ada di daerah hulu akan memberikan pasokan air kepada Kabupaten Aceh Timur, Langsa, dan Aceh Tamiang. Demikian pula untuk kasus DAS lainnya yang berhulu di Kabupaten Gayo Lues. Konektivitas ini disarankan menggunakan (e) pendekatan hulu-hilir (*upstream-downstream mechanism*) yang fokus pada imbal jasa lingkungan terutama dari sisi keberlanjutan pasokan air dan bahkan dalam isu global dalam bentuk cadangan karbon. Kedepan konektivitas ini sangat baik sedapat mungkin dikerangka dalam bentuk yang lebih formal misalnya berupa rencana strategis operasional pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan antar tujuh Kabupaten yang disebutkan di atas.

2.1.4. Wilayah Rawan Bencana

Kondisi geografis, hidrologis dan demografis wilayah Kabupaten Gayo Lues memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap terjadinya bencana. Pada umumnya bencana alam meliputi bencana-bencana akibat fenomena geologi (gempa bumi, tsunami, gerakan tanah dan letusan gunung berapi), bencana akibat kondisi hidrometeorologi (banjir, tanah longsor, kekeringan, dan angin topan), bencana akibat faktor biologi (wabah penyakit manusia, dan penyakit tanaman/ternak) serta kegagalan teknologi (kecelakaan industri, kecelakaan transportasi, radiasi nuklir, dan pencemaran bahan kimia). Bencana akibat ulah manusia terkait dengan konflik antar manusia akibat perebutan sumber daya terbatas, (konflik dengan alam, alasan ideologi, agama dan politik).



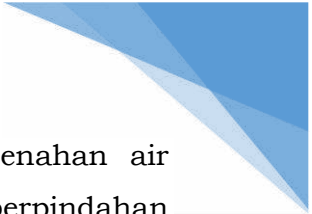
Berdasarkan Qanun RTRW 2012-2032 Kabupaten Gayo Lues termasuk pada kawasan yang terletak pada zona patahan aktif. Bencana alam yang paling sering terjadi di Kabupaten Gayo Lues adalah longsor dan banjir. Longsor pada umumnya terjadi pada topografi curam akibat menurunnya kemampuan tanah menyimpan dan menahan air sehingga pada saat intensitas curah hujan di atasnya tinggi terjadi perpindahan massa tanah (*landslide*) dengan volume yang tinggi. Kawasan rawan longsor dengan intensitas tertinggi di Kabupaten Gayo Lues terjadi di wilayah:

- a. Kampung Pungkejaya dan Kampung Ramung Musara di Kecamatan Putri Betung;
- b. Kampung Genting di Kecamatan Dabun Gelang;
- c. Kampung Ise-Ise di Kecamatan Pantan Cuaca; dan
- d. Kampung Pining, Pertik, Ekan, Pasir Putih di Kecamatan Pining;

Kampung Pungke Jaya, Ramung Musara dan Ise-Ise berada di jalur Jalan Nasional, sehingga transportasi di titik ini sering terganggu akibat longsor yang kerap terjadi ketika musim penghujan. Demikian juga halnya dengan banjir, hal ini disebabkan menurunnya daya simpan terhadap air, serta akibat menurunnya fungsi hutan sebagai penyimpan air ditambah daerah tangkapan air yang sempit serta drainase yang tidak tertata dengan baik. Kawasan rawan banjir tidak ditemui secara permanen di Kabupaten Gayo Lues, hanya pada beberapa daerah yang dilalui oleh sungai-sungai besar di wilayah Kabupaten Gayo Lues yaitu Aih Tripe, serta biasanya bencana banjir hanya terjadi sesaat. Sebagai kawasan rawan bencana, pengembangan wilayah Kabupaten Gayo Lues secara tata ruang harus memperhatikan kendala pengembangan secara fisik, terutama terhadap resiko bencana alam. Untuk mengembangkan wilayah yang memiliki kerentanan tinggi terhadap bencana perlu dibarengi dengan pembangunan berbasis mitigasi bencana.

Secara umum peran manusia terhadap terjadinya bencana alam disebabkan masih rendahnya pemahaman sebagai pelaku dan objek pembangunan serta keterbatasan daya dukung lingkungan yang belum memperhatikan prinsip konservasi. Sepanjang tahun 2021, bencana banjir paling sering terjadi di Kecamatan Blangkejeren, Pining dan Terangun. Bencana longsor paling sering terjadi di Kecamatan Putri Betung yaitu 3 kali. Sedangkan bencana kebakaran paling sering terjadi Kecamatan Kuta Panjang dan Blangkejeren.

Catatan historis kebencanaan dalam beberapa tahun terakhir, Kabupaten Gayo Lues mengalami beberapa bencana alam seperti kekeringan, banjir genangan dengan durasi yang semakin cenderung meningkat, banjir bandang, longsor, Kebakaran lahan, dan kecelakaan transportasi. Longsor pada umumnya terjadi pada topografi



curam akibat menurunnya kemampuan tanah menyimpan dan menahan air sehingga pada saat intensitas curah hujan di atasnya tinggi terjadi perpindahan massa tanah (*landslide*) dengan volume yang tinggi.

2.1.5. Sosiologi

Masyarakat Kabupaten Gayo Lues merupakan masyarakat yang relegius (dinul islam), dinamis dan sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Maka dari itu, Pemerintah Kabupaten Gayo Lues berkeinginan memperkuat dinul islam dengan menciptakan seribu hafiz yang dijadikan sebagai prioritas pembangunan Tahun 2017-2022. Hubungan interaksi yang dibangun dalam masyarakat Kabupaten Gayo Lues didasarkan pada norma-norma islami, yang karakternya harus terlihat di dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Gayo Lues. Berkaitan dengan hal tersebut maka fungsi ulama dan tokoh adat memegang peran penting untuk ikut serta dalam pembangunan, karakter dan perilaku dalam kehidupan masyarakat Gayo Lues bertaqwa, beradat, berbudaya islami, berketauladanan, kesehajaan, kebijaksanaan, kesabaran dan kejuangannya.

Kearifan adat budaya ini juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dimana kedudukan Wali Nangroe merupakan pemimpin adat sebagai pemersatu masyarakat independen, berwibawa, dan berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, adat istiadat, dan pemberian gelar/derajat dan upacara-upacara adat lainnya. Wali Nangroe berhak memberikan gelar kehormatan atau derajat adat pada perseorangan atau lembaga, baik dalam maupun luar negeri yang berkriteria dan tata caranya diatur dengan Qanun. Untuk mendukung aktivitas lembaga Wali Nangroe membutuhkan infrastruktur penunjang berupa gedung sekretariat perkantoran dan tempat tinggal.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

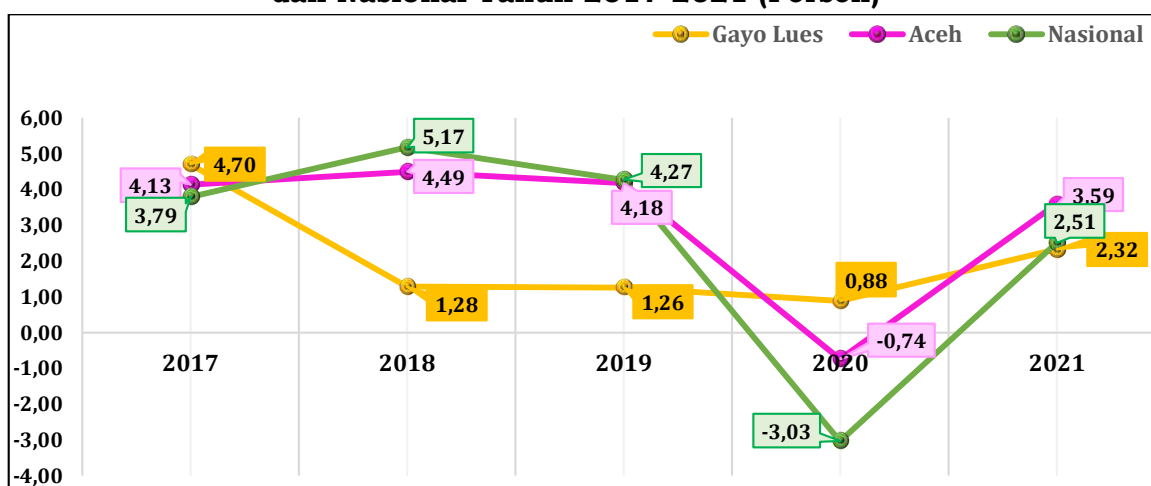
2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

A. Pertumbuhan PDRB

PDRB merupakan salah satu indikator penting dalam mengetahui kondisi perekonomian secara makro di Gayo Lues dan dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi Gayo Lues. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gayo Lues tercermin oleh perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 dengan non migas. Perhitungan pertumbuhan dilakukan baik secara kuartalan (q-to-q), Semesteran (c-to-c) dan tahunan (y-on-y). Kondisi ini dapat memberikan gambaran lebih jelas dan perbandingan relative antar waktu terhadap perkembangan semua sektor ekonomi.

Selama periode 2017-2021 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gayo Lues yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Harga Konstan (ADHK) 2010 dengan non migas mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017-2021 kinerja ekonomi Kabupaten Gayo Lues tumbuh positif dan signifikan masing-masing sebesar 4,70 persen, 2,18 persen, 1,01 persen. Pada tahun 2020 mengalami perlambatan pertumbuhan sebesar 0,88 persen karena pada tahun 2020 terjadi ekonomi global (*war trade*) dan akibat merebaknya pandemi Covid-19. Kemudian pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi relatif membaik menjadi 2,34 persen. Untuk melihat perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gayo Lues maka dapat kita lihat pada gambar berikut ini :

Gambar 2.8
Laju Pertumbuhan PDRB Gayo Lues dibandingkan dengan Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2017-2021 (Persen)



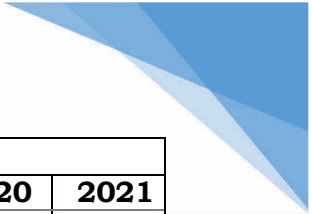
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh dan Kab. Gayo Lues, 2022

Perkembangan pertumbuhan PDRB ADHK 2010 menurut Lapangan Usaha periode 2017-2021 sebagaimana pada Tabel 2.6 menggambarkan beberapa lapangan usaha mengalami pertumbuhan kontraksi yang cukup dalam. Pada tahun 2017-2021 secara keseluruhan menunjukkan perkembangan yang berfluktuasi dan terjadi kontraksi pertumbuhan pada beberapa lapangan usaha. Untuk melihat laju pertumbuhan dari setiap indikator pertumbuhan PDRB maka dapat kita lihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 2.6
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017-2021 (Persen)

Kategori	LAPANGAN USAHA	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	7,52	-4,32	-0,95	3,92	0,37
B	Pertambangan dan Penggalan	-16,69	-15,32	-0,71	0,91	0,1

Rencana Pembangunan Kabupaten Gayo Lues Tahun 2023-2026



Kategori	LAPANGAN USAHA	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
C	Industri Pengolahan	8,70	7,47	-3,79	-1,70	3,42
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,86	5,40	6,93	4,50	1,94
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah Konstruksi	8,52	8,31	14,27	1,69	2,04
F	Konstruksi	-10,89	5,03	0,58	0,54	1,38
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,39	5,89	4,87	-0,99	2,55
H	Transportasi dan Pergudangan	3,13	2,00	-0,06	-21,41	18,24
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	22,38	24,53	27,05	-8,13	0,03
J	Informasi dan Komunikasi	3,91	2,70	7,16	13,76	9,62
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,51	0,47	13,01	0,52	-5,37
L	Real Estate	3,57	6,09	7,40	0,11	0,28
MN	Jasa Perusahaan	8,55	6,61	8,86	-8,67	1,66
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	6,21	6,13	0,39	-2,81	4,66
P	Jasa Pendidikan	4,82	7,79	10,49	1,80	1,65
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,21	5,78	8,88	5,73	9,15
RSTU	Jasa lainnya	5,25	5,13	8,67	0,36	2,58
Produk Domestik Regional Bruto		4,70	1,28	1,26	0,88	2,32

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Gayo Lues, 2022

Laju pertumbuhan PDRB Gayo Lues dari tahun 2017-2021 berkisar di angka positif 0,88-4,70 dimana perlambatan signifikan terjadi dari tahun 2017 ke 2018. Salah satu penyebabnya diduga adalah penarikan pengelolaan Dana Otonomi Khusus 100 persen kembali ke Pemerintah Provinsi. Akan tetapi tahun 2020, sementara laju pertumbuhan PDRB Nasional dan Aceh menjadi negatif, Gayo Lues masih menunjukkan *survive* di masa pandemi Covid-19 dengan angka positif 0,88. Kontribusi terbesar terhadap laju pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 disumbang oleh sektor pertanian sebesar 39,40 persen.

Untuk melihat kontribusi sektor lapangan usaha terhadap perekonomian Gayo Lues dapat dilihat pada Tabel 2.7. Tabel tersebut menunjukkan penyumbang tertinggi pertumbuhan ekonomi Gayo Lues masih berada pada sektor primer atau sektor produksi, yaitu pada lapangan usaha pertanian sebesar 39,73 persen, diikuti sektor pemerintahan 11,37 persen, industri pengolahan 10,79 persen dan perdagangan

10,55 persen dan konstruksi 9,87 persen. Lapangan usaha lainnya berkontribusi sebesar 0,03 sampai 4,21 persen.

Tabel 2.7
Distribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017-2021 (Persen)

Kategori	LAPANGAN USAHA PDRB	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	41,65	39,09	38,25	39,40	39,73
B	Pertambangan dan Penggalian	1,57	1,30	1,29	1,29	1,24
C	Industri Pengolahan	11,20	12,14	10,75	10,63	10,79
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah Konstruksi	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
F	Konstruksi	9,47	9,98	10,03	10,04	9,87
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,89	10,99	11,33	10,99	10,55
H	Transportasi dan Pergudangan	2,15	2,09	2,04	1,62	1,81
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,78	0,97	1,30	1,17	1,15
J	Informasi dan Komunikasi	1,15	1,10	1,16	1,31	1,36
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,17	1,16	1,31	1,26	1,14
L	Real Estate	2,93	3,09	3,34	3,31	3,16
MN	Jasa Perusahaan	0,16	0,17	0,18	0,16	0,16
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	10,58	11,33	11,50	11,27	11,37
P	Jasa Pendidikan	2,45	2,60	3,04	3,00	2,92
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,37	3,51	3,93	4,04	4,21
RSTU	Jasa lainnya	0,38	0,39	0,42	0,42	0,40
Produk Domestik Regional Bruto		100	100	100	100	100

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Gayo Lues, 2022

PDRB menurut Pengeluaran ADHK 2010 dari tahun 2017-2021 sebagaimana pada tergambar pada Tabel 2.7, pada tahun 2017-2020 Konsumsi Rumah Tangga tumbuh relative kecil rata-rata sebesar 2,48 persen, Pengeluaran Konsumsi LNPRT rata-rata sebesar 9,50 persen, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 0,28 persen dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 1,52 persen, Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Pertumbuhan tertinggi pada pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Rumah Tangga (LNPRT) rata-rata sebesar 9,50 persen.

Untuk melihat laju PDRB berdasarkan ADHK 2010 menurut pengeluaran kabupaten Gayo Lues maka dapat kita lihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 2.8
Laju Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Berdasarkan ADHK 2010
Menurut Pengeluaran Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017-2021 (Persen)

Komponen		2017	2018	2019	2020	2021
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3,95	2,98	5,52	-2,53	2,49
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	14,91	25,50	11,65	-14,08	0,65
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2,64	1,54	4,81	-7,88	4,95
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	-0,95	3,18	1,17	2,66	-0,21
5	Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6	Ekspor Barang dan Jasa	-	-	-	-	-
Produk Domestik Regional Bruto		4,70	1,28	1,26	0,88	2,32

Sumber : BPS Kabupaten Gayo Lues, 2022

Pada tahun 2018 Pengeluaran Konsumsi LNPRT mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 25,50 persen dan pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -14,08 persen. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah tumbuh sebesar 4,81 persen pada tahun 2019. Pertumbuhan tertinggi pada pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Rumah Tangga (LNPRT) terjadi pada tahun 2018 sebesar 25,50 persen. Sumber-sumber pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gayo Lues tertinggi menurut Pengeluaran tahun 2021 adalah Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 4,95 persen, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 2,49 persen, Pengeluaran Konsumsi LNPRT sebesar 0,65 persen, dan Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar -0,21 persen.

B. Laju Inflasi

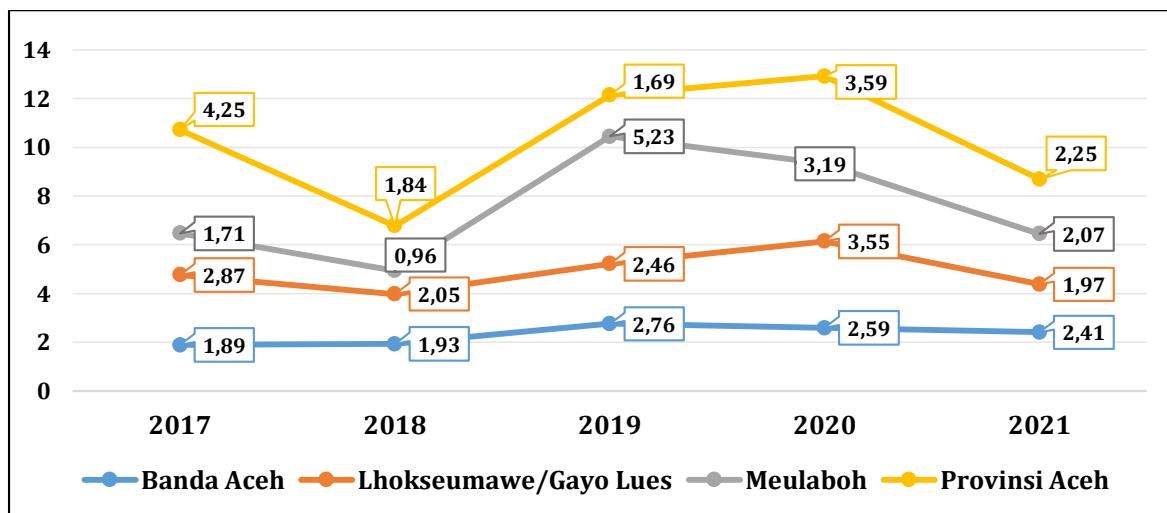
Inflasi merupakan salah satu indikator stabilitas ekonomi suatu wilayah dalam memberikan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Terjadinya inflasi karena ketidakseimbangan antara permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*) dalam perekonomian. Penyebab inflasi antara lain; *cost push inflation*, *demand pull inflation* dan *expected inflation*. Unsur ini mengakibatkan perubahan nilai tukar yang fluktuatif dan secara tidak langsung menyebabkan kecenderungan kenaikan perubahan struktur harga. Begitu juga sebaliknya, deflasi yang terus menerus akan menimbulkan resesi dimana perekonomian mengalami kelesuan, tidak ada gairah bagi produsen untuk meningkatkan produksi.

Berdasarkan Bank Indonesia, tingkat inflasi adalah pertumbuhan harga secara kontinu dalam periode waktu tertentu. Adapun, pertumbuhan harga yang dimaksud yaitu kenaikan harga dari beberapa barang yang juga akan berdampak pada

kenaikan harga barang lainnya. Berdasarkan tingkat keparahannya, kenaikan angka inflasi dapat dibedakan menjadi beberapa kategori yaitu, Inflasi ringan, yaitu tingkat inflasi kurang dari 10 persen per tahun, Inflasi sedang, di antara 10%-30% per tahun, Inflasi berat, berkisar antara 30%-100% per tahun dan Hiperinflasi, yaitu mencapai lebih dari 100 persen per tahun.

Selama periode 2017-2021 inflasi Kabupaten Gayo Lues relatif stabil dan terkendali. Inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 3,55 persen dan terendah terjadi pada tahun 2021 sebesar 1,97 persen. Untuk melihat perkembangan inflasi Kabupaten Gayo Lues, Banda Aceh, Meulaboh dan Aceh maka dapat kita lihat pada Gambar berikut ini :

Gambar 2.9
Perkembangan Inflasi Kabupaten Gayo Lues, Banda Aceh,
Meulaboh dan Aceh Tahun 2017-2021



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh dan Kab. Gayo Lues, 2022

Berdasarkan Gambar diatas dan jenis inflasi, maka dapat disimpulkan bahwa laju inflasi di Kabupaten Gayo Lues termasuk jenis inflasi ringan karena masih berada di bawah 10 persen. Untuk inflasi Kabupaten Gayo Lues masih mengacu pada Kota Lhokseumawe. Berdasarkan informasi yang didapat dari Badan Statistik Lhokseumawe Inflasi tahun 2021 sebesar 1,97 persen.

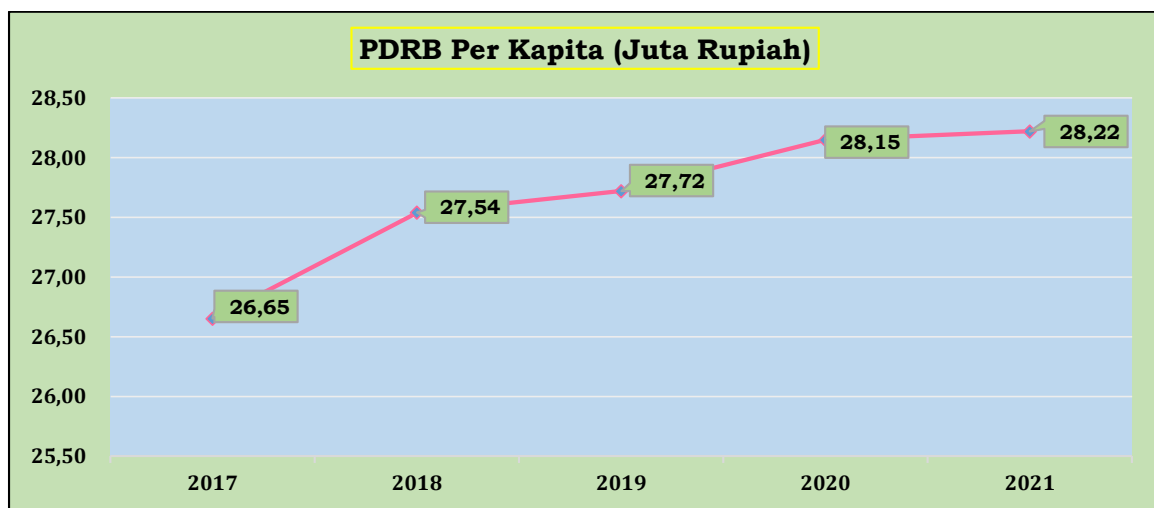
C. Pendapatan Per Kapita

Nilai PDRB Perkapita diperoleh dengan cara membagi nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Indikator ini dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk di suatu wilayah. Meskipun sebenarnya nilai PDRB Perkapita ini belum tentu menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk secara riil masyarakat, namun demikian dengan mengamati perkembangan PDRB Perkapita dari tahun ke tahun setidaknya dapat diketahui gambaran tingkat kesejahteraan penduduk secara umum di Kabupaten Gayo Lues.

Rencana Pembangunan Kabupaten Gayo Lues Tahun 2023-2026

Daya beli masyarakat mencerminkan kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang dan jasa. Kemampuan ini berbeda antar wilayah, karena nilai tukarnya juga berbeda tergantung pada harga riil pada masing-masing wilayah. Agar daya beli masyarakat memiliki perbandingan perlu dibuat standarisasi. Dengan adanya standarisasi ini, maka perbedaan kemampuan wilayah dapat dibandingkan. Implikasinya standar hidup antar wilayah pun menjadi dapat di bandingkan. Untuk melihat PDRB Per Kapita Kabupaten Gayo Lues maka dapat kita lihat pada Gambar berikut ini :

Gambar 2.10
PDRB Per Kapita Kabupaten Gayo Lues
Tahun 2017-2021 (Juta Rupiah)



Sumber : Kabupaten Gayo Lues Dalam Angka, 2022

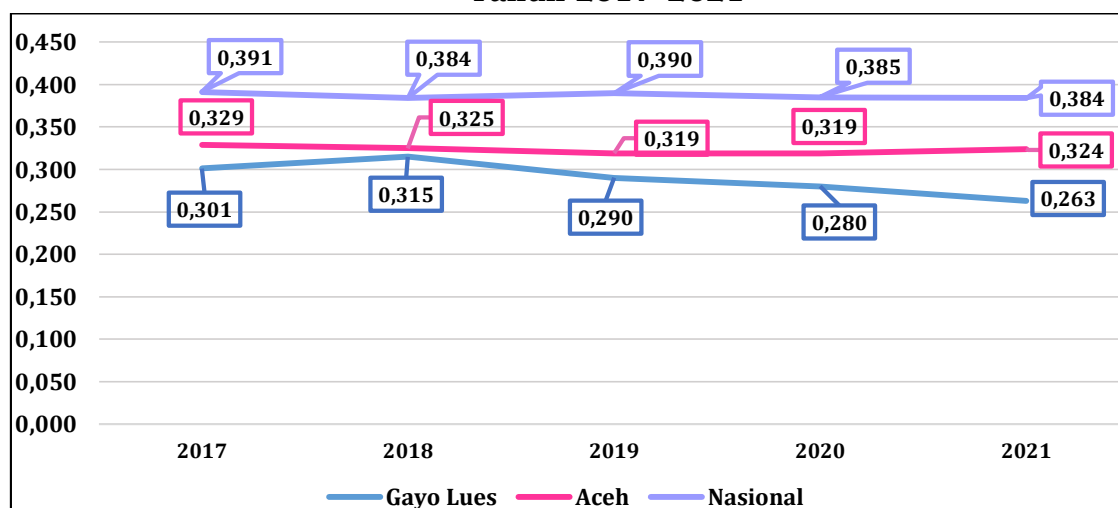
Nilai PDRB per kapita Kabupaten Gayo Lues sejak tahun 2017-2021 senantiasa mengalami kenaikan menunjukkan bahwa adanya peningkatan kesejahteraan penduduk Kabupaten Gayo Lues. Pada tahun 2020 PDRB per kapita tercatat sebesar Rp28.150.000,00, Secara nominal mengalami kenaikan pada tahun 2021 mencapai 28.220.000,00. Hal ini menggambarkan bahwa ketersediaan barang dan jasa yang dapat dinikmati oleh setiap masyarakat di Kabupaten Gayo Lues semakin besar, sehingga akan semakin banyak pula ketersediaan barang dan jasa yang dapat mereka nikmati untuk peningkatan kesejahteraan. Pada tahun 2022 kecenderungan PDRB per Kapita akan meningkat seiring dengan meningkatnya kegiatan ekonomi karena pulihnya pandemi.

D. Indeks Gini (Ketimpangan Pendapatan)

Indeks Gini atau Koefisien Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan

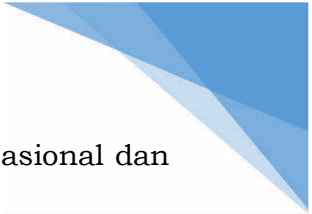
pendapatan yang sempurna atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama, sedangkan jika bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna. Menurut Badan Pusat Statistik, Indeks Gini didasarkan pada Kurva Lorenz, yakni sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Koefisien Gini dari negaranegara yang mengalami ketidakmerataan tinggi berkisar antara 0,50-0,70; ketidakmerataan sedang berkisar antara 0,36-0,49; dan yang mengalami ketidakmerataan rendah antara 0,20-0,35. Indeks Gini membantu pemerintah dalam menganalisis tingkat kemampuan ekonomi masyarakat karena menjadi indikator derajat keadilan dalam suatu negara. Pada gambar dibawah dapat kita lihat Gini Rasio Kabupaten Gayo Lues, Aceh dan Nasional:

Gambar 2.11
Gini Rasio Kabupaten Gayo Lues, Aceh Dan Nasional
Tahun 2017-2021



Sumber : BPS Nasional dan Provinsi Aceh, 2022

Pada Gambar 2.11, menunjukkan terjadinya fluktuasi perkembangan ketimpangan pendapatan Aceh selama kurun waktu 2017-2021. Hal ini terlihat dari Indeks Gini Gayo Lues pada tahun 2017 sebesar 0,301 dan mengalami peningkatan menjadi 0,318 di tahun 2018. Indeks Gini kembali menurun menjadi 0,290 pada tahun 2019 dan mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 0,280. Sedangkan pada tahun 2021 menjadi 0,263 atau menurun sebesar 0,017 poin. Indeks Gini Kabupaten Gayo Lues dari tahun 2017-2021 masih dibawah Aceh dan Nasional yang dapat diartikan pemerataan pendapatan tidak melebar kesenjangannya dari tahun ke tahun. Dari nilai tersebut menunjukkan bahwa pengeluaran penduduk berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah karena berada dibawah 0,40. Bila dibandingkan dengan perkembangan Indeks Gini Nasional dan Aceh maka



ketimpangan Aceh relatif lebih baik atau berada di bawah rata-rata Nasional dan Aceh.

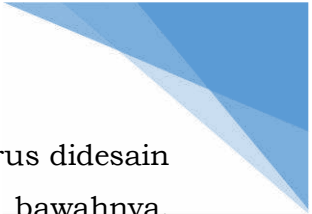
E. Indeks Williamson (Ketimpangan Regional)

Ketimpangan pembangunan antarwilayah (*regional disparity*) merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah karena adanya perbedaan sumber daya alam dan kondisi geografis suatu wilayah, serta adanya wilayah yang sudah maju dan wilayah yang masih terbelakang. Ukuran ketimpangan antar wilayah (regional) cerminan dari kemajuan pembangunan di suatu wilayah dengan menggunakan Indeks Williamson. Indeks Williamson merupakan persebaran (*coefficient of variation*) dari rata-rata nilai sebaran dihitung berdasarkan estimasi dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan penduduk daerah-daerah yang berada pada lingkup wilayah yang dikaji dan dianalisis. Walaupun indeks ini memiliki beberapa kelemahan, yaitu sensitive terhadap definisi wilayah yang digunakan dalam perhitungan ketimpangan namun alasannya jelas karena yang diperbandingkan adalah tingkat pembangunan antar wilayah dan bukan tingkat kemakmuran antar kelompok.

Pertumbuhan ekonomi yang cepat namun tidak diimbangi dengan pemerataan, akan menimbulkan ketimpangan wilayah. Indeks ketimpangan wilayah dapat diukur melalui Indeks Williamson dengan interval indeks 0-1. Kriteria besaran indeks williamson adalah $0 < IW < 1$. Jika $IW = 0$, berarti pembangunan wilayah sangat merata, $IW = 1$, berarti pembangunan wilayah sangat tidak merata (kesenjangan sempurna), $IW \sim 0$, berarti pembangunan wilayah semakin mendekati merata dan $IW \sim 1$, berarti pembangunan wilayah semakin mendekati tidak merata. Indeks Williamson mencerminkan ketimpangan pada tingkat pembangunan ekonomi suatu daerah.

F. Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Kemiskinan selalu menjadi isu utama dalam pembangunan ekonomi yang membutuhkan perhatian serius dari pelaku pembangunan dan pengambil kebijakan. Didalam poin-poin SDG's (*Sustainable Development Goals*) masalah kemiskinan (*no poverty*) menempati urutan pertama dan menjadi isu global untuk segera ditindaklanjuti. Dunia bersepakat untuk meniadakan kemiskinan dalam bentuk apapun dengan prinsip pembangunan *no one left behind* atau penanganan kemiskinan harus memberikan manfaat untuk semua



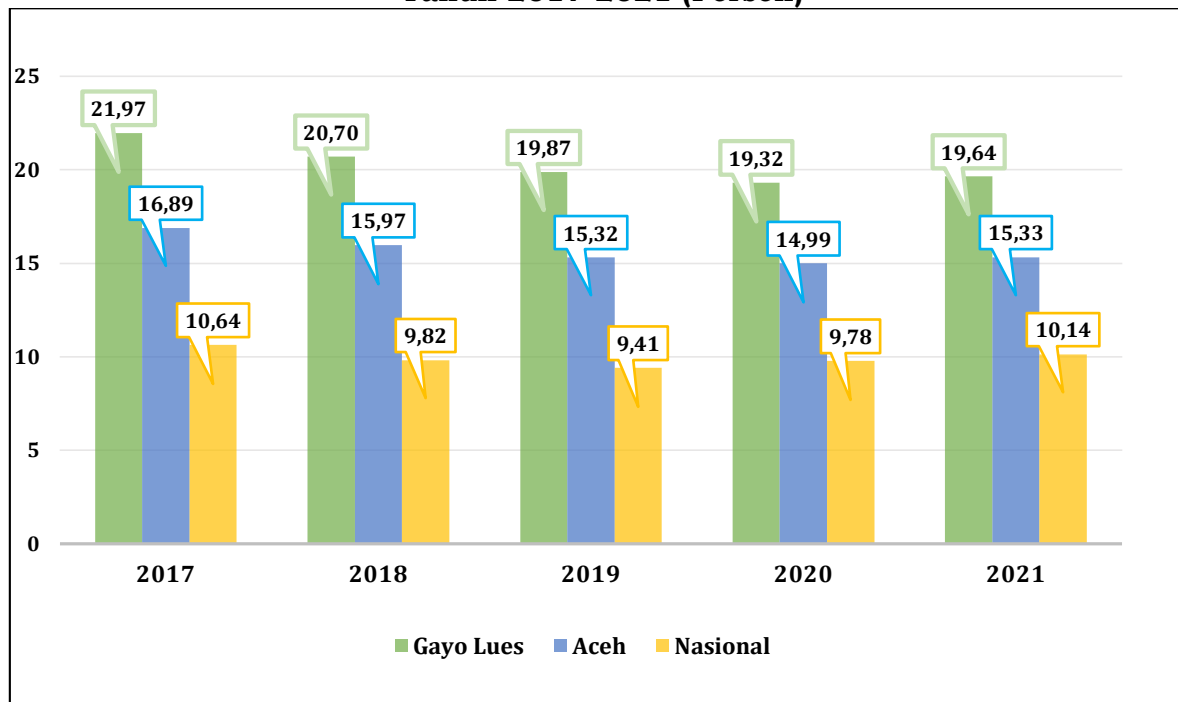
dan melibatkan semua kepentingan. Strategi pembangunan tersebut harus didesain baik pada tingkat nasional maupun pada tingkatan pemerintahan di bawahnya, dalam jangka waktu yang ditargetkan dan diimplementasikan dengan baik. Dalam berbagai pengalaman pengentasan kemiskinan dunia, fakta dan bukti empiris menunjukkan bahwa paradigma pembangunan ekonomi yang mengejar pertumbuhan terlihat tidak cukup akurat dan bertenaga untuk mengentaskan kemiskinan.

Sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Presiden melalui amanat Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penanggulangan kemiskinan yang merupakan penyempurnaan dari Peraturan Presiden nomor 13 Tahun 2009 Tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. Selanjutnya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota, untuk mengatur mekanisme kerja TKPK Daerah maka dibentuklah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Gayo Lues berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Gayo Lues Nomor 205 Tahun 2018 tentang Penetapan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Gayo Lues Tahun 2018. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Gayo Lues telah menyusun Blue Print Pengentasan Kemiskinan Kabupaten Gayo Lues yang dikenal dengan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Gayo Lues.

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui taraf kesejahteraan masyarakat di suatu daerah adalah dengan melihat tingkat kemiskinan di daerah tersebut. Tingginya + mencerminkan bahwa dampak dari pembangunan belum memberikan pengaruh signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Gayo Lues. Oleh karena itu, program pengentasan kemiskinan melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan keterampilan masyarakat yang didukung oleh pembangunan infrastruktur dasar yang terintegrasi menjadi prioritas di masa yang akan datang. Demikian juga dengan dukungan terhadap akses modal, pemasaran produk unggulan masyarakat dan penguatan kelembagaannya perlu menjadi program prioritas di tahun mendatang.

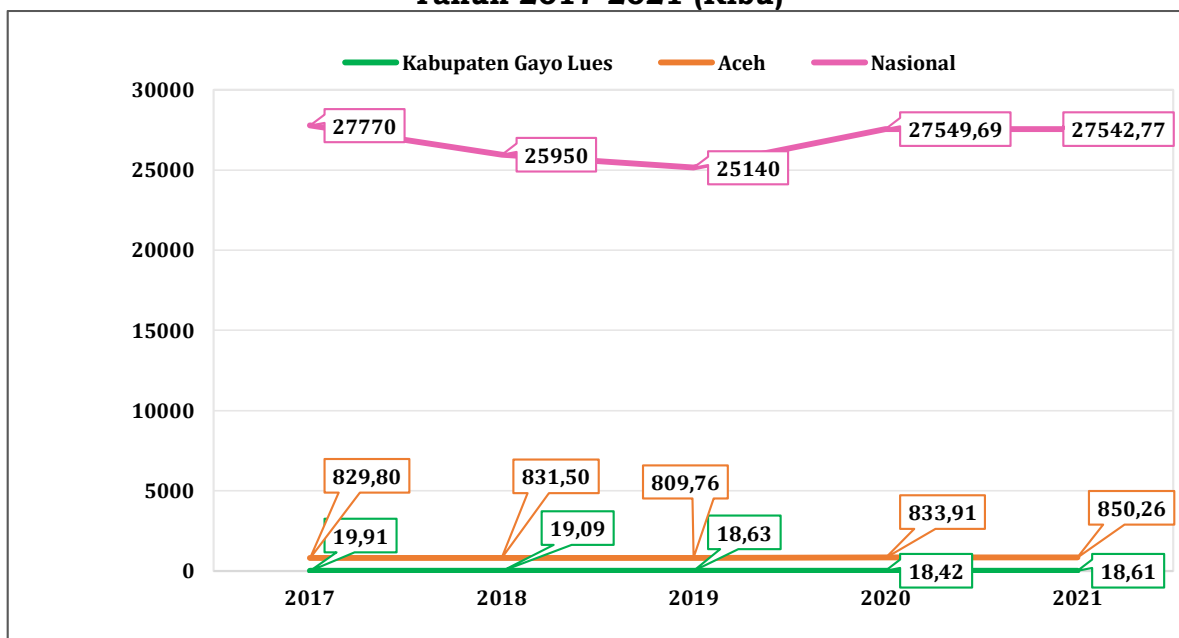
Persentase dan jumlah penduduk miskin Nasional, Aceh dan Kabupaten Gayo Lues dari tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Gambar dan tabel di bawah ini :

Gambar 2.12
Persentase Kemiskinan Gayo Lues, Aceh dan Nasional
Tahun 2017-2021 (Persen)



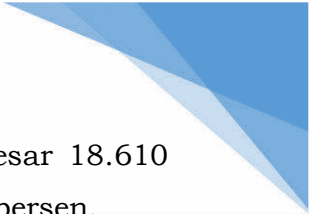
Sumber: BPS Nasional dan Provinsi Aceh, 2022

Gambar 2.13
Jumlah Penduduk Miskin Gayo Lues, Aceh dan Nasional
Tahun 2017-2021 (Ribu)



Sumber: BPS Nasional dan Provinsi Aceh, 2022

Dari Gambar dan tabel diatas, dapat dilihat persentase penduduk miskin di Gayo Lues masih di atas persentase penduduk miskin nasional dan Aceh. Pada



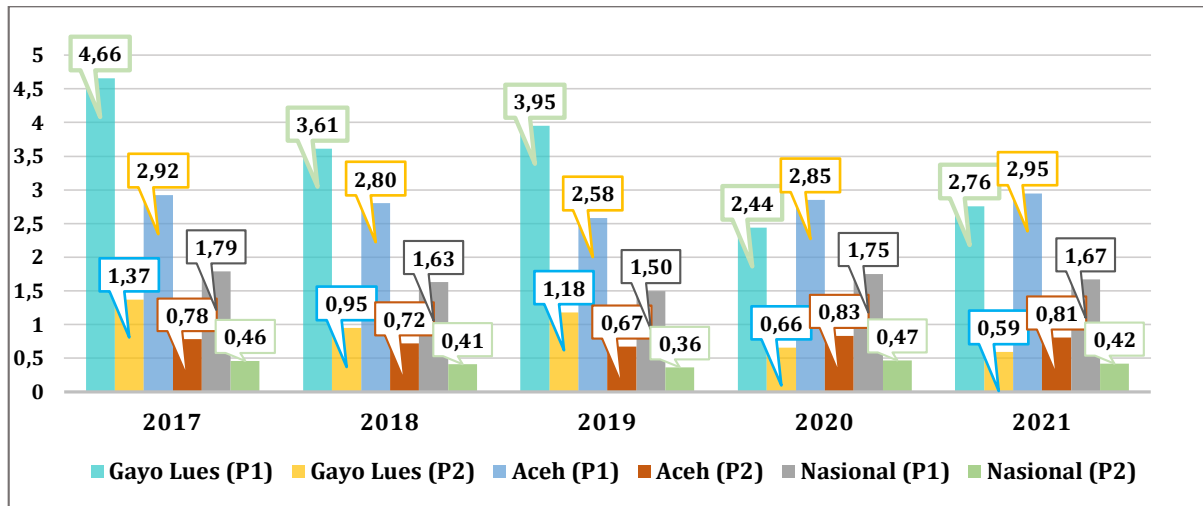
tahun 2021, Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Gayo Lues sebesar 18.610 orang dan persentase kemiskinan Gayo Lues berada pada angka 19,64 persen.

Hal ini menggambarkan bahwa upaya pengentasan kemiskinan belum mencapai target, belum optimalnya kinerja Pemerintah dalam melaksanakan program-program penanggulangan kemiskinan. Jika dibandingkan dengan tahun 2020, persentase kemiskinan dan jumlah penduduk miskin cenderung mengalami penurunan yang sangat signifikan dimana pada tahun 2020 persentase kemiskinan Kabupaten Gayo Lues berada pada angka 19,32 persen dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 19,64 persen. Salah satu penyebab diantaranya rendahnya pendapatan per kapita penduduk Kabupaten Gayo Lues. Untuk menindaklanjuti upaya pengentasan kemiskinan perlu mengoptimalkan pembangunan pada sektor pertanian, perkebunan dan perikanan sebagai sektor yang menyerap jumlah tenaga kerja, dimana hampir 70 persen penduduk Gayo Lues bekerja pada sektor pertanian, perkebunan dan perikanan.

Untuk memahami kondisi kemiskinan yang lebih komprehensif, perlu diketahui indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan. Adapun indeks kedalaman kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, sedangkan indeks keparahan kemiskinan menggambarkan penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin.

Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*) dan Keparahannya Kemiskinan (*Poverty Severity Index-P2*) Gayo Lues, Aceh dan Nasional, periode 2017-2021 mengalami pergerakan pola penurunan dan kenaikan yang sama. Secara umum selama periode tersebut Nilai Indeks (P1) dan (P2) Gayo Lues berada di atas rata-rata Aceh dan Nasional. Pada tahun 2017 (P1) Gayo Lues sebesar 4,66 dan terus menurun pada tahun 2018 menjadi 3,61, begitupun dengan (P1) Aceh sebesar 1,37 menjadi 0,95 di tahun 2018 dan (P1) Nasional sebesar 1,79 menjadi 1,50 di tahun 2019. Selanjutnya pada Tahun 2020-2021 Gayo Lues nilai indeks bergerak meningkat (masing-masing sebesar 2,44 dan 2,76) dan Aceh nilai indeks bergerak meningkat (masing-masing sebesar 2,85 dan 2,95) sedangkan Nasional sebaliknya, nilai Indeks bergerak turun (masing-masing 1,75 dan 1,67). Perkembangan Indeks Kedalaman dan Keparahannya Kemiskinan Gayo Lues periode tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Gambar 2.14.

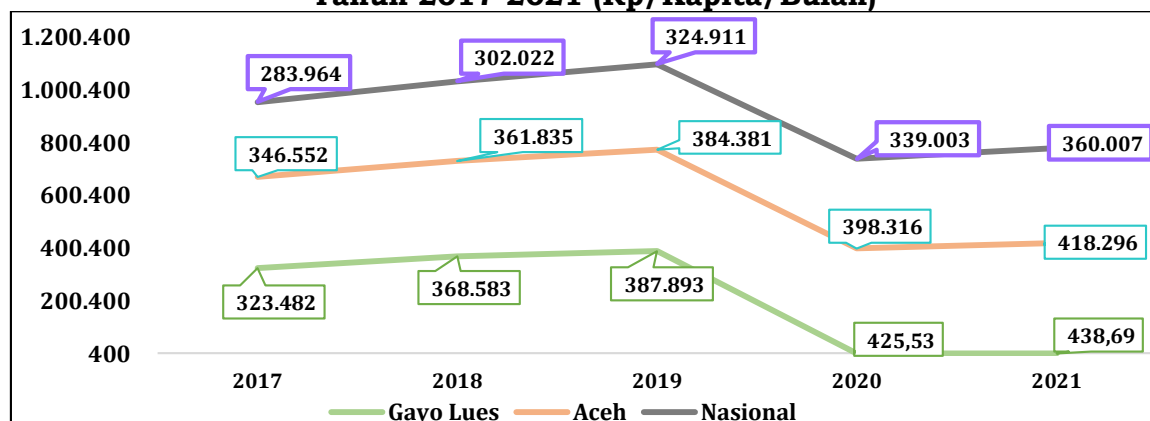
Gambar 2.14
Indeks Kedalaman (P1) dan Indeks Keparahan (P2) Kemiskinan Gayo Lues, Aceh dan Nasional Tahun 2017-2021



Sumber: BPS Nasional dan Provinsi Aceh, 2022

Perbandingan kedua nilai Indeks Kedalaman (P1) dan Keparahan Kemiskinan (P2) Gayo Lues, Aceh dan Nasional mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin Gayo Lues jauh lebih rendah dari rata-rata pengeluaran penduduk miskin Aceh dan Indonesia. Indeks Keparahan Kemiskinan Gayo Lues Tahun 2021 sebesar 0,81 lebih tinggi dari Indeks Keparahan Nasional sebesar 0,59. Dari data indeks (P1) dan (P2) Gayo Lues, Aceh dan Nasional di atas menggambarkan bahwa kondisi tingkat pendapatan penduduk miskin Nasional relatif lebih baik. Sedangkan pengeluaran penduduk miskin di Gayo Lues masih jauh dari Garis Kemiskinan dan terdapat jurang perbedaan pendapatan diantara penduduk miskin. Untuk melihat Garis Kemiskinan (GK) Kabupaten Gayo Lues, Aceh dan Nasional dari tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Gambar di bawah ini :

Gambar 2.15
Garis Kemiskinan (GK) Gayo Lues, Aceh dan Nasional Tahun 2017-2021 (Rp/Kapita/Bulan)



Sumber: BPS Nasional dan Provinsi Aceh, 2022

Rencana Pembangunan Kabupaten Gayo Lues Tahun 2023-2026

Selain itu, garis kemiskinan sangat mempengaruhi jumlah penduduk miskin. Garis kemiskinan (GK) merupakan batas bawah pengeluaran yang diperlukan seorang individu untuk hidup miskin yaitu seperti dapat membeli makanan setara dengan 2.100 kilo kalori dan membeli keperluan non makanan lainnya. Garis Kemiskinan di Kabupaten Gayo Lues lebih tinggi dari garis kemiskinan Aceh dan Nasional. Pada tahun 2017-2021, Garis Kemiskinan Gayo Lues, Aceh dan Nasional menunjukkan kenaikan setiap tahunnya dengan pola kenaikan yang sama, namun GK Kabupaten Gayo Lues lebih tinggi bila dibandingkan dengan GK Aceh dan Nasional, tercatat pada tahun 2017 dan tahun 2021 GK Kabupaten Gayo Lues sebesar Rp. 323.482 dan Rp. 438,69, Aceh sebesar Rp. 346.552 dan Rp. 418.296 sedangkan Nasional tercatat sebesar Rp. 283.964 dan Rp. 360.007.

G. Pengangguran

Perkembangan kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Gayo Lues sangat variatif. Bila dilihat dari jumlah penduduk usia kerja, terjadi peningkatan jumlah penduduk yang bekerja dari tahun 2017 hingga 2021. Peningkatan jumlah tersebut berimplikasi terhadap meningkatnya jumlah penduduk usia kerja di Kabupaten Gayo Lues yang juga memiliki tren yang meningkat. Namun demikian, tren positif tersebut terjadi pada jumlah pengangguran yang harus mengalami penurunan di tahun 2021 dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 1,84 persen.

Berdasarkan Tabel 2.9 dapat dilihat bahwa TPAK Kabupaten Gayo Lues pada tahun 2019 sebesar 75,23. Angka ini berarti dari 100 penduduk usia 15 tahun ke atas, terdapat sekitar 75 orang tersedia untuk melakukan kegiatan produktif pada tahun 2019. TPAK Kabupaten Gayo Lues meningkat pada tahun 2020 menjadi 86,36. Kondisi ini menunjukkan semakin banyaknya penduduk yang produktif di Kabupaten Gayo Lues tahun 2020 dan pada tahun 2021 terjadi penurunan TPAK Kabupaten Gayo Lues sebesar 78,99 persen.

Tabel 2.9
Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Karakteristik
Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017-2021

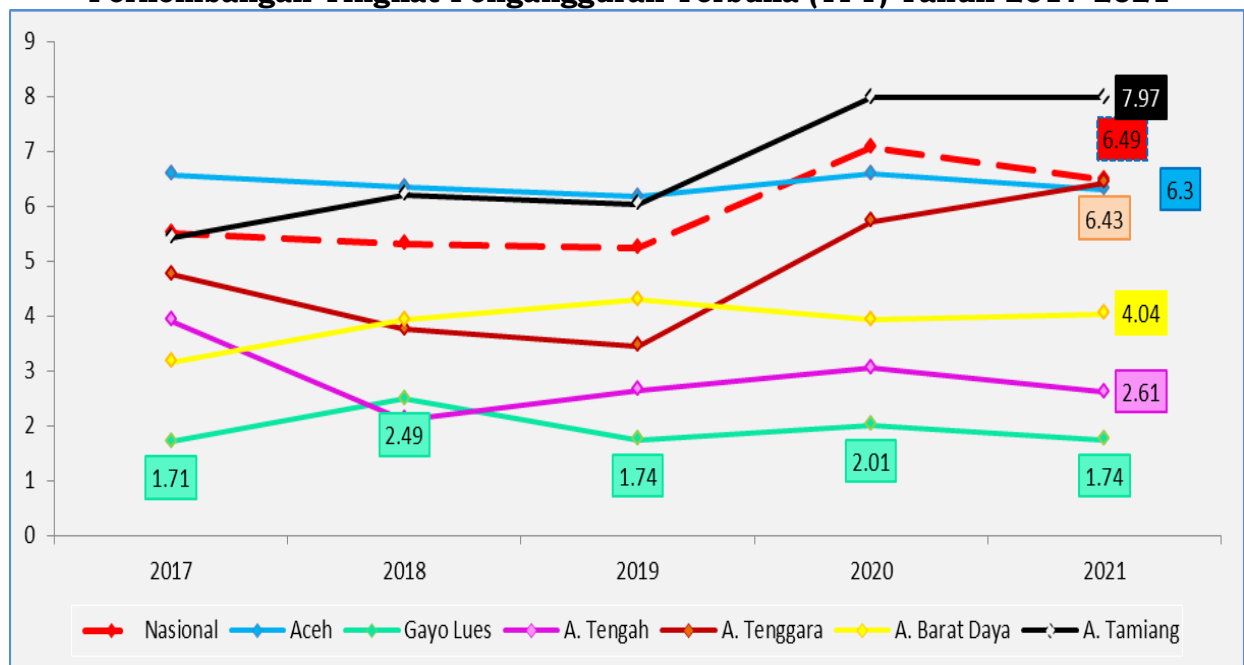
Karakteristik	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Penduduk Usia Kerja	57.765	61.322	61.841	64.313	65.809
a. Angkatan Kerja	45.685	48.005	46.526	55.541	51.980
- Bekerja	44.660	46.793	45.717	54.422	51.023
- Pengangguran	1.025	1.212	809	1.119	957
b. Bukan Angkatan Kerja	12.080	13.317	15.315	8.772	13.829

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Gayo Lues dan Provinsi Aceh, 2022

Rencana Pembangunan Kabupaten Gayo Lues Tahun 2023-2026

Kabupaten Gayo Lues merupakan salah satu kabupaten yang memiliki Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terendah se-Provinsi Aceh, bahkan sejak tahun 2017 sampai 2021 selalu lebih rendah dibanding TPT Nasional dan TPT empat kabupaten yang berbatasan dengan Gayo Lues. Sejak tahun 2018 hanya TPT Kabupaten Aceh Tengah yang mendekati TPT Gayo Lues, bahkan pada tahun 2018 TPT Aceh Tengah justru lebih rendah dari TPT Gayo Lues. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.

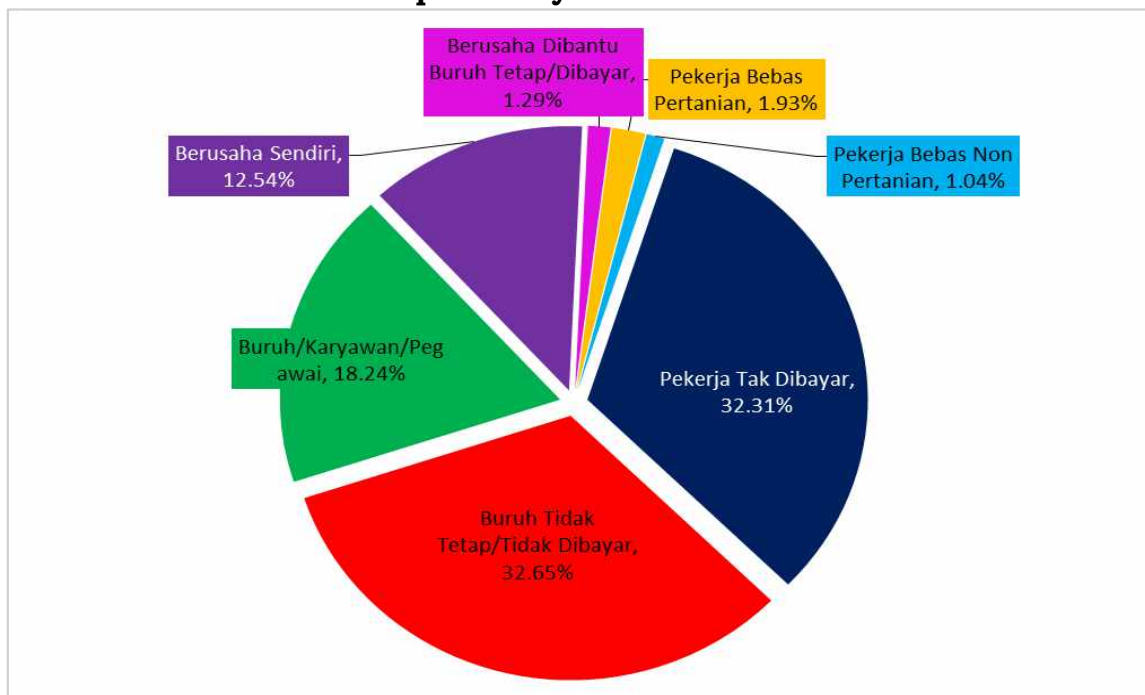
Gambar 2.16
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2017-2021



Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Gayo Lues, 2022

Tingkat Pengangguran Terbuka Gayo Lues yang rendah ternyata tidak diikuti dengan peningkatan pengeluaran perkapita dan pengurangan kemiskinan yang signifikan. Jika TPT, Gayo Lues terendah se Provinsi Aceh, akan tetapi kemiskinan sebagai indikator kesejahteraan makro berada pada posisi 22 dari 23 Kabupaten/Kota se Provinsi Aceh. Hal tersebut terkait dengan status pekerjaan utama masih didominasi oleh pekerja yang tidak dibayar sekitar 64.96 persen (Sumber : BPS dalam Statistik Daerah Tahun 2021). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

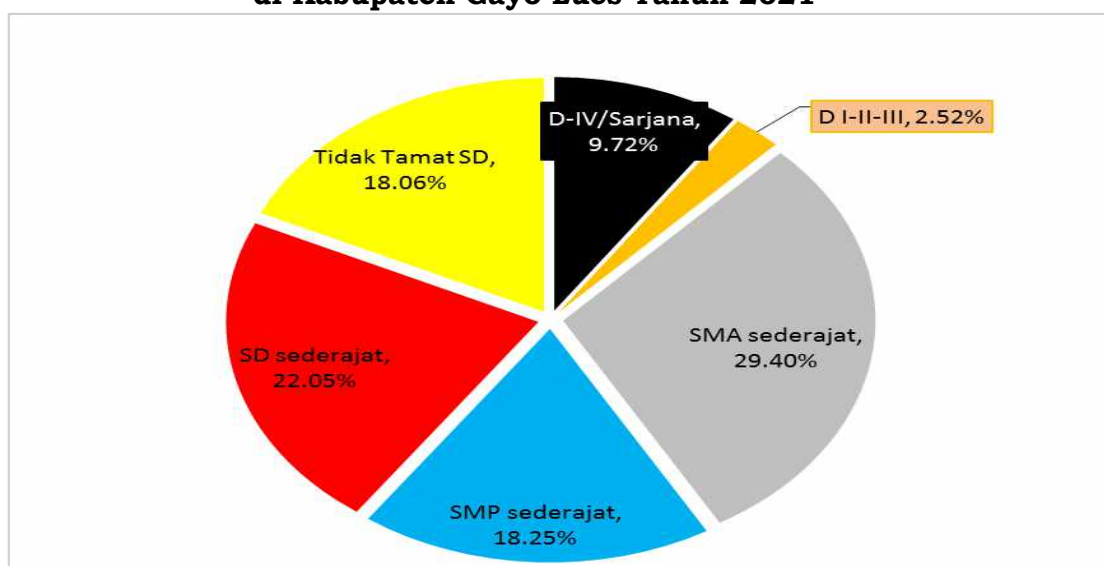
Gambar 2.17
Penduduk Bekerja menurut Status Pekerjaan Utama
di Kabupaten Gayo Lues Tahun 2021



Sumber : Badan Pusat Statistik dalam Statistik Daerah, 2022

Tingginya angkatan kerja yang tidak dibayar ada kaitannya dengan tingkat pendidikan angkatan kerja dan minimnya jumlah industri atau usaha yang membutuhkan tenaga kerja berpendidikan tinggi dan memiliki keterampilan tinggi. Hal tersebut digambarkan pada Gambar berikut.

Gambar 2.18
Angkatan Kerja menurut Tingkat Pendidikan
di Kabupaten Gayo Lues Tahun 2021



Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Gayo Lues, 2022

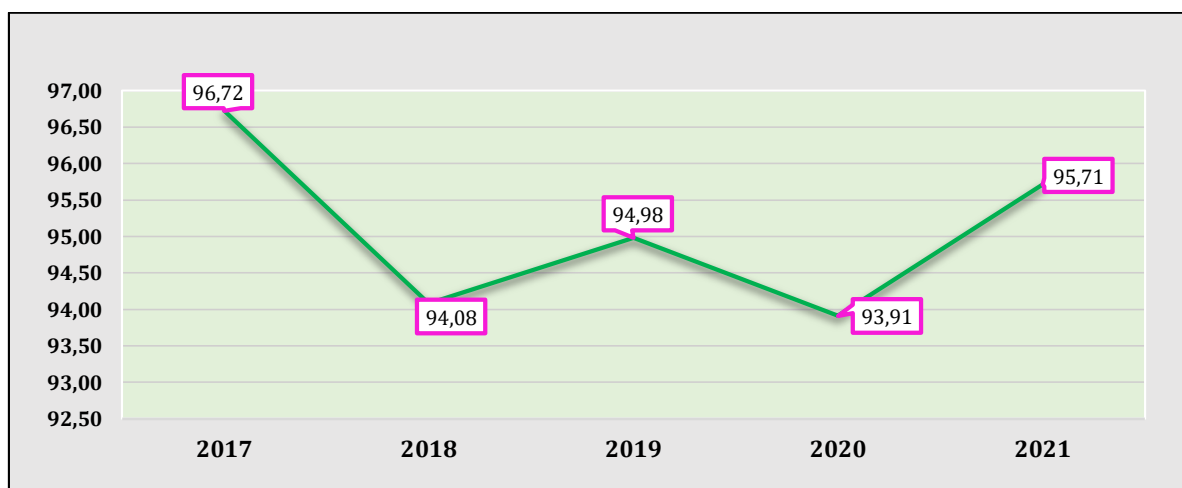
2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

A. Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf (AMH) adalah proporsi penduduk usia 15 tahun keatas yang mempunyai kemampuan membaca menulis huruf latin dan huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang dibaca/ditulisnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. Dalam Perencanaan pembangunan wilayah, AMH digunakan untuk melihat pencapaian indikator dasar yang telah dicapai oleh suatu daerah, karena membaca merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan. Dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat, Kabupaten Gayo Lues terus berusaha meningkatkan kualitas pendidikan, mengingat dengan pendidikan dapat membuka pola pikir masyarakat serta membuka wawasan untuk berusaha keluar dari jeratan kemiskinan yang mereka alami selama ini. Walaupun pada masa kini dimana angka melek huruf sudah tidak lagi digunakan dalam salah satu komponen pembentuk nilai IPM karena dianggap tidak relevan lagi dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan.

Angka Melek Huruf dapat digunakan untuk; (1) mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf, terutama di daerah perdesaan di Indonesia dimana masih tinggi jumlah penduduk yang tidak pernah bersekolah atau tidak tamat Sekolah Dasar (SD), (2) menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media, (3) menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tulisan. Berikut adalah data Capaian dan Target Angka Melek Huruf Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017-2021 pada Gambar berikut ini:

Gambar 2.19
Angka Melek Huruf Kabupaten Gayo Lues
Tahun 2017-2021 (Persen)



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh dan Kab. Gayo Lues, 2022

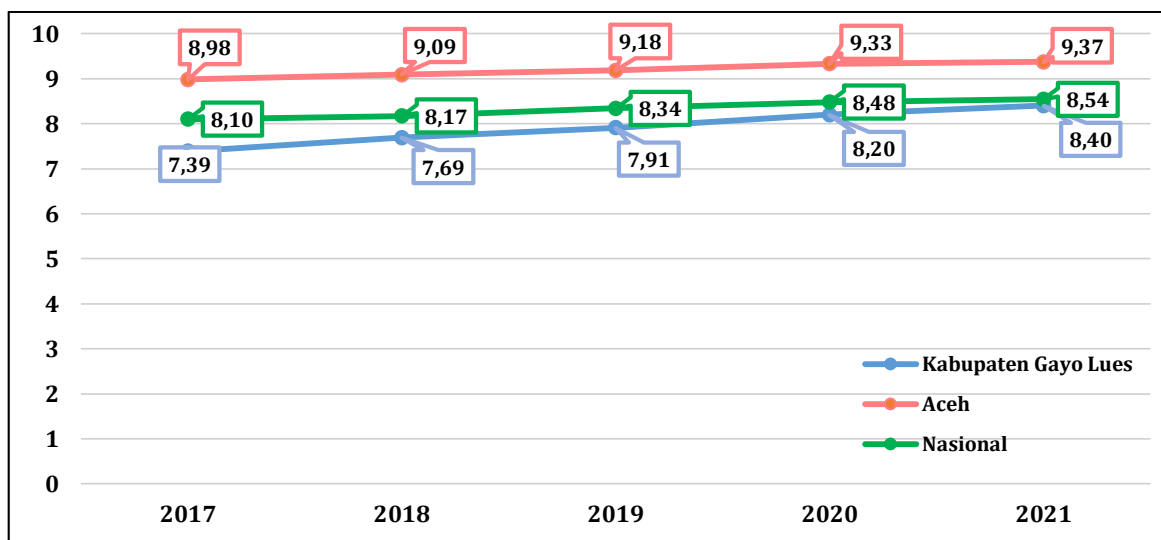
Berdasarkan Gambar di atas, dapat dilihat bahwa capaian Angka Melek Huruf Kabupaten Gayo Lues terus mengalami perbaikan dan pada tahun 2021 mencapai angka 95,71 persen.

B. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) akan menjadi salah satu komponen pembentuk indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yaitu pengukuran perbandingan harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara-negara berkembang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup suatu wilayah. Makin tinggi RLS berarti semakin tinggi jenjang pendidikan yang dijalani.

Selain Harapan Lama Sekolah (HLS), indikator lain yang digunakan untuk menggambarkan aspek pendidikan adalah Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Untuk perkembangan RLS di Kabupaten Gayo Lues dapat dilihat pada Gambar berikut :

Gambar 2.20
Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Gayo Lues,
Aceh dan Nasional Tahun 2017–2021 (Tahun)



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh dan Kab. Gayo Lues, 2022

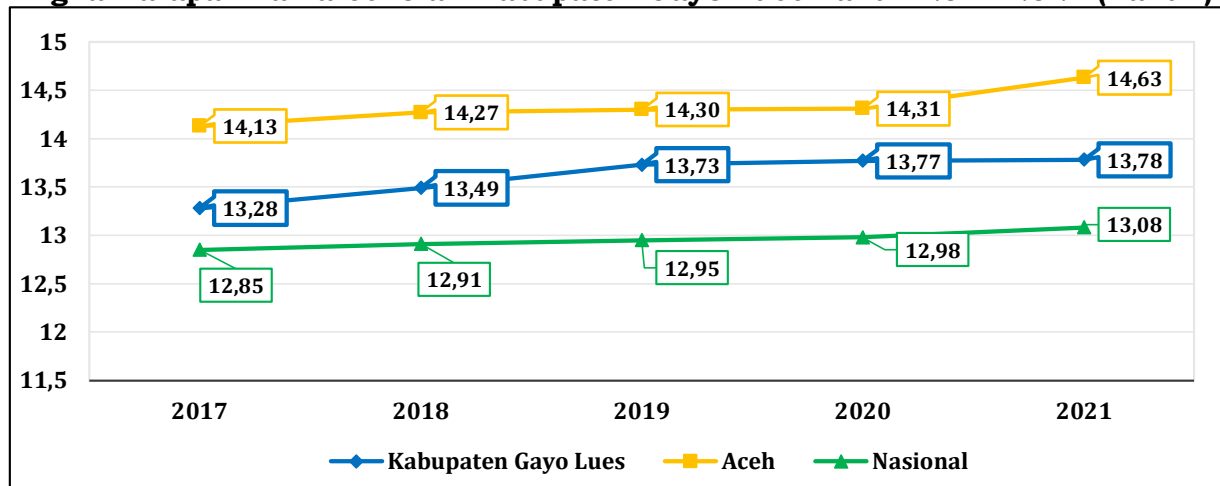
Dari Gambar diatas dapat terlihat, bahwa RLS Kabupaten Gayo Lues terus membaik. Pada tahun 2021 meningkat menjadi 8,40 tahun. Dengan Membaiknya RLS ini mencerminkan membaiknya juga Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Gayo Lues.

C. Angka Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Peningkatan

partisipasi masyarakat dan perluasan kesempatan dalam bidang pendidikan dapat dilihat dari indikator HLS dan RLS penduduk. Keberhasilan pencapaian kedua indikator ini ditentukan oleh kepedulian keluarga, masyarakat dan kinerja pemerintah. Untuk melihat perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Gayo Lues dapat dilihat pada Gambar berikut :

Gambar 2.21
Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017-2021 (Tahun)



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh dan Kab. Gayo Lues, 2022

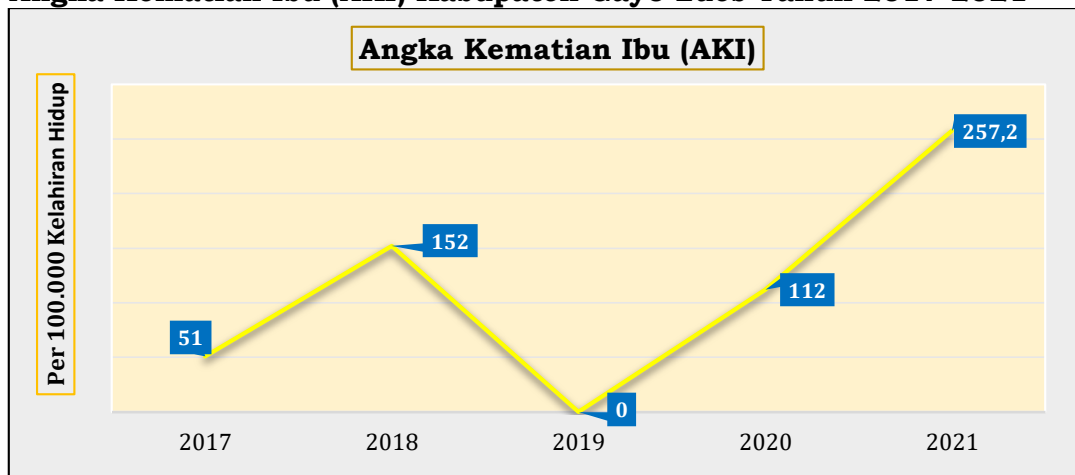
Dari Gambar diatas dapat dilihat, HLS Kabupaten Gayo Lues selama periode 2017–2021 terus mengalami peningkatan. Angka HLS Kabupaten Gayo Lues Tahun 2021 berada diatas nasional yaitu sebesar 13,78 tahun, sedangkan Nasional 13,08 tahun. Ini menunjukkan bahwa seorang yang berusia 7 tahun memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,78 tahun atau sampai jenjang perkuliahan di tahun kedua. Semakin meningkatnya HLS ini mengidentifikasikan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dan perluasan kesempatan dalam bidang pendidikan menunjukkan semakin membaik dari tahun ke tahun. Perbaikan ini menjadi pertanda bahwa sistem pendidikan di Gayo Lues sudah berjalan pada 13,78 tahun. Hal ini mencerminkan membaiknya Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Gayo Lues.

D. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator untuk melihat keberhasilan upaya kesehatan ibu. AKI adalah rasio kematian ibu selama masa kehamilan, persalinan dan nifas yang disebabkan oleh kehamilan, persalinan, dan nifas atau pengelolaannya tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan atau insidental di setiap 100.000 kelahiran hidup. Indikator ini juga mampu menilai derajat kesehatan masyarakat, dikarenakan sensitifitasnya terhadap perbaikan

pelayanan kesehatan baik dari sisi aksesibilitas maupun kualitas. Untuk mengetahui perkembangan angka kematian ibu lihat gambar di bawah ini:

Gambar 2.22
Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017-2021



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Gayo Lues, 2022

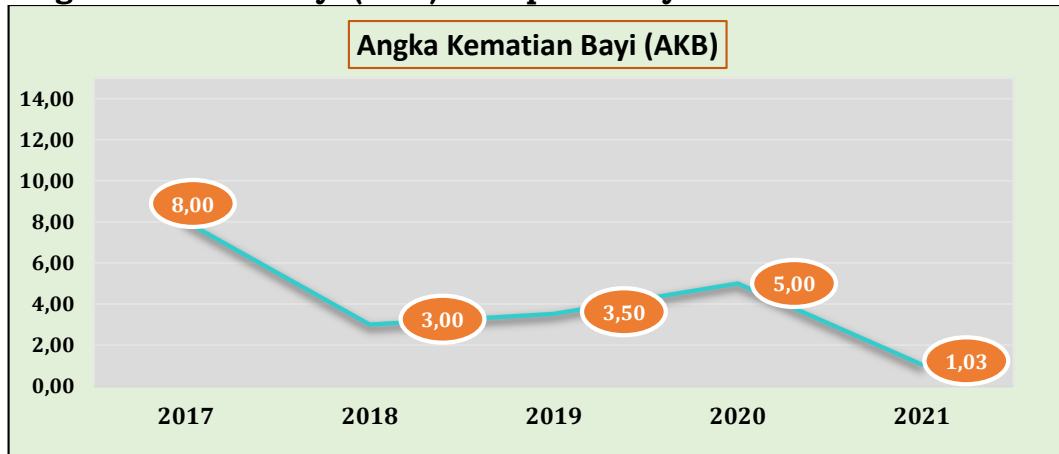
Dilihat dari tabel diatas, Angka kematian Ibu di Kabupaten Gayo Lues masih berfluktuasi, pada tahun 2017 sebesar 51/100.000 kelahiran hidup, namun terjadi kenaikan pada tahun 2018 menjadi 152/100.000 kelahiran hidup, kemudian meningkat lagi menjadi 257,2/100.000 kelahiran hidup pada tahun 2021. Hal ini disebabkan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan ibu dan anak masih rendah, kompetensi tenaga kesehatan masih kurang, fasilitas kesehatan belum memadai, akses terhadap pelayanan kesehatan masih rendah, serta terjadinya Pandemi Covid-19. Angka Kematian Ibu melahirkan paling banyak disebabkan pendarahan, hipertensi dan infeksi. Peningkatan kesadaran bagi ibu yang memiliki resiko tinggi agar lebih *aware*, dapat meminimalkan terjadinya komplikasi selama kehamilan yang diharapkan menekan Angka Kematian Ibu.

E. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menentukan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu banyak upaya kesehatan yang dilakukan dalam rangka menurunkan angka kematian bayi. Berbagai faktor dapat menyebabkan adanya penurunan AKB, diantaranya peningkatan kompetensi petugas penolong persalinan, pemerataan pelayanan kesehatan dan fasilitasnya serta perbaikan gizi pada ibu hamil. Hal ini menyebabkan AKB sangat sensitif terhadap perbaikan pelayanan kesehatan. Selain itu perbaikan kondisi ekonomi yang tercermin dengan pendapatan masyarakat juga dapat berkontribusi melalui perbaikan gizi yang berdampak pada daya tahan tubuh terhadap infeksi penyakit.

Angka Kematian Bayi menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup). Tingginya angka kematian bayi dipicu karena berat badan bayi lahir yang rendah, yaitu dibawah 2.500 gram. Untuk mengetahui angka kematian bayi, lihat Gambar dibawah ini:

Gambar 2.23
Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017-2021



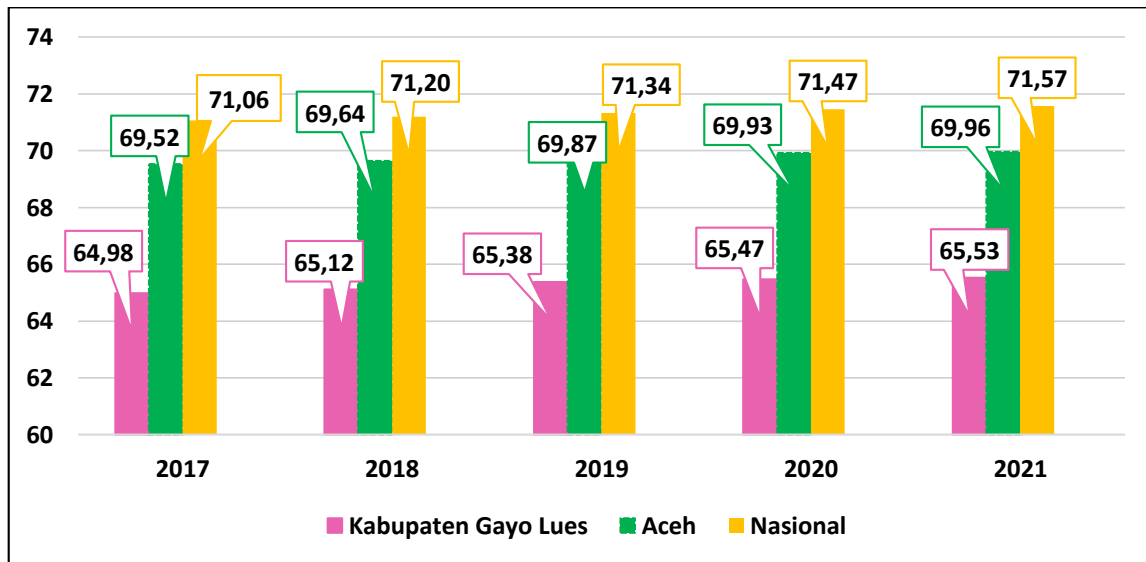
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Gayo Lues, 2022

Dilihat dari gambar diatas, angka kematian bayi di Kabupaten Gayo Lues mengalami fluktuasi dari tahun 2017-2021, namun cenderung mengalami penurunan di tahun 2021 sebesar 1,03 per 1.000 kelahiran hidup. Hal ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan untuk menekan Angka Kematian Bayi sudah menunjukkan kemajuan.

F. Angka Usia Harapan Hidup (UHH)

Angka Usia Harapan Hidup (UHH) menggambarkan aspek kesehatan, panjang umur penduduk dalam suatu wilayah. Besar kecilnya usia harapan hidup suatu generasi sangat dipengaruhi oleh banyaknya penduduk yang mampu melewati umur tertentu, dan banyaknya penduduk dilahirkan hidup dari suatu generasi sampai mencapai umur tertentu. Disamping itu, terjadinya pandemic *Corona Virus Disease* 19 (Covid-19) juga telah menyebar ke Kabupaten Gayo Lues. Hal ini akan berpengaruh pada capaian status Kesehatan seperti Usia Harapan Hidup (UHH) yang pada akhirnya akan berdampak pada Indeks Pembangunan Manusia. Untuk melihat UHH Kabupaten Gayo Lues, Aceh dan Nasional Tahun 2017 sampai dengan 2021 dapat dilihat dari Gambar dibawah ini:

Gambar 2.24
Usia Harapan Hidup Kabupaten Gayo Lues,
Aceh dan Nasional Tahun 2017-2021



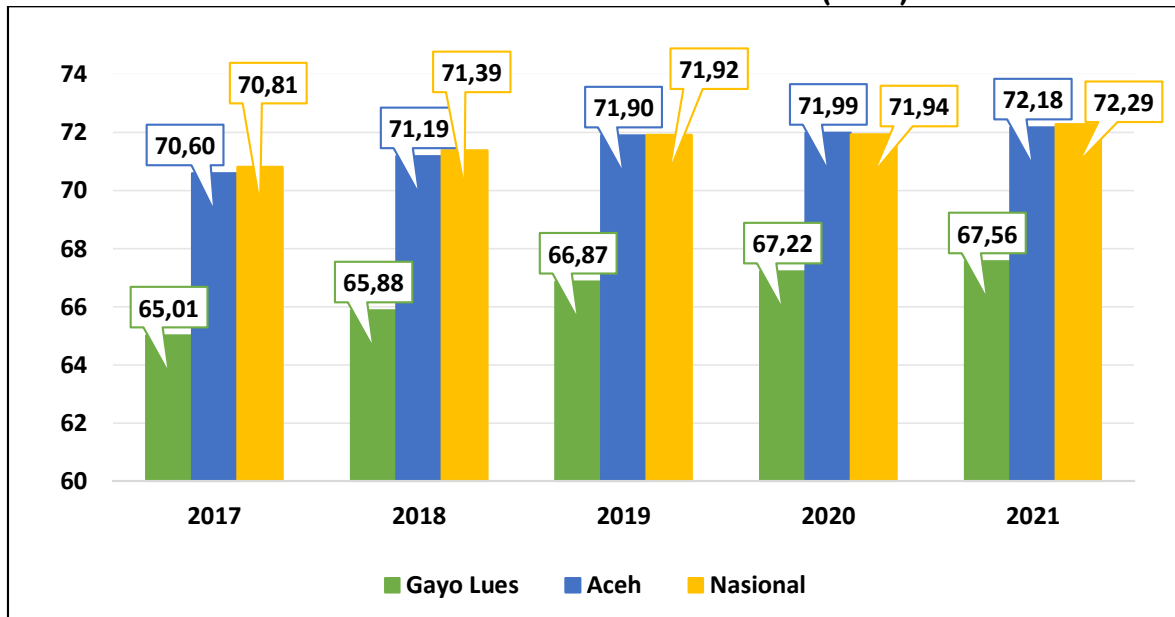
Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Gayo Lues, 2022

Berdasarkan Gambar diatas, dapat dilihat bahwa Angka Usia Harapan Hidup dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, semakin meningkatnya Usia Harapan Hidup ini mengindikasikan bahwa derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Gayo Lues semakin membaik. Usia Harapan Hidup Kabupaten Gayo Lues Pada Tahun 2021 naik, artinya setiap penduduk pada tahun 2021, dapat berharap untuk hidup sampai usia 65,53 tahun.

G. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan salah satu tolak ukur kinerja pembangunan secara keseluruhan. Indeks ini dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan penghidupan yang layak. Indikator- indikator yang merepresentasikan ketiga dimensi ini terangkum dalam satu nilai tunggal, yaitu angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Penyajian angka IPM dilakukan mulai dari tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/ kota. Penyajian IPM menurut daerah memungkinkan setiap provinsi dan kabupaten/kota mengetahui peta pembangunan manusia baik pencapaian, posisi, maupun disparitas antardaerah. Sehingga diharapkan setiap daerah dapat terpacu untuk berupaya meningkatkan kinerja pembangunan melalui peningkatan kapasitas dasar penduduk dan pembangunan manusianya. Untuk melihat Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Gayo Lues, Aceh dan Nasional Tahun 2017 sampai dengan 2021 dapat dilihat dari Gambar dibawah ini:

Gambar 2.25
Pertumbuhan IPM Gayo Lues, Aceh dan Nasional Tahun 2017-2021 (Poin)



Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Gayo Lues, 2022

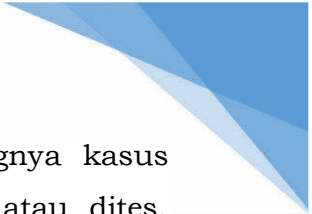
Secara umum Pandemi COVID-19 membawa pengaruh terhadap pembangunan manusia di Indonesia. Hal ini terlihat dari perlambatan pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2021 dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kondisi seperti ini memerlukan upaya yang lebih menyentuh pada kesejahteraan dasar masyarakat melalui perencanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada bidang pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Meskipun konsep pembangunan manusia melalui peningkatan nilai IPM ini mengalami reduksi karena tidak sepenuhnya menjelaskan secara komprehensif dan utuh mengenai kualitas manusia, namun konsep ini telah digunakan secara luas untuk mengukur kemajuan pembangunan manusia di sebuah negara atau wilayah/daerah.

IPM Kabupaten Gayo Lues selama periode 2017-2021 ternyata masih berada di bawah IPM Aceh dan IPM Nasional. Perkembangan manusia di Kabupaten Gayo Lues mengalami perkembangan yang signifikan dengan meningkatnya IPM Kabupaten Gayo Lues, IPM pada tahun 2021 mencapai 67,56 poin, angka meningkat sebesar 0,34 poin dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 67,22 poin. Hal ini disebabkan karena komponen-komponen IPM juga mengalami peningkatan pada tahun 2021, Angka Usia Harapan Hidup 65,53 tahun meningkat 0,06 tahun dibandingkan tahun sebelumnya.

H. Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Sampai dengan bulan Desember 2021, Indonesia telah melaporkan 4.262.720 kasus positif, 144.094 kasus meninggal. Namun, angka kematian diperkirakan

Rencana Pembangunan Kabupaten Gayo Lues Tahun 2023-2026



jauh lebih tinggi dari data yang dilaporkan lantaran tidak dihitungnya kasus kematian dengan gejala COVID-19 akut yang belum dikonfirmasi atau dites. Sementara 4.114.347 dinyatakan sembuh.

Khusus di Aceh, kasus perdana muncul pada 23 Maret 2020. Penularan itu masih terus terjadi secara massif di tengah masyarakat hingga saat ini. Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 mencatat sejak pertengahan tahun 2020 penambahan kasus positif baru mencapai puluhan bahkan ratusan orang per hari, sehingga mengantarkan posisi Aceh masuk dalam deretan daerah zona merah penyebaran virus corona di Indonesia. Sedangkan di Kabupaten Gayo Lues, kasus perdana muncul pada Bulan Maret 2020.

Namun, sejak awal November 2020 peningkatan mulai melanda hingga sekarang. Per 31 Desember 2021 di Kabupaten Gayo Lues terkonfirmasi 688 kasus positif, meliputi telah sembuh 659 orang dan meninggal dunia 29 orang. Sejak memasuki fase kenormalan baru, aktivitas masyarakat sudah berjalan seperti biasanya, namun tetap mengikuti protokol kesehatan sekaligus mengantongi izin dari Satgas COVID-19.

Terhadap vaksinasi dari 4.028.891 total sasaran masyarakat Aceh yang harus di vaksin, pada vaksinasi tahap I tercapai sebanyak 2.658.828 orang (66 persen), sedangkan untuk tahap II tercapai sebanyak 1.188.862 orang (29,5 persen), dan total vaksin tahap III sebanyak 36.809 tenaga kesehatan (65,2 persen). Dilaporkan bahwa penduduk Kabupaten Gayo Lues yang wajib melakukan vaksinasi sebanyak 74.545 peserta. Dari total peserta tersebut, 45 persen telah melakukan vaksinasi tahap I dan 25 persen telah selesai melakukan vaksinasi tahap II per tanggal 31 Oktober 2021.

2.2.3. Fokus Seni Budaya

Gayo Lues sebagai salah satu Kabupaten dari 23 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Aceh memiliki mekanisme dan aturan adat yang melibatkan masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian seni budayanya. Masyarakat Gayo Lues mempunyai adat istiadat yang khas dan kental dengan nuansa Islami. Berbagai ungkapan tersurat dalam pepatah-pepatah bijak dengan makna yang dalam, dan banyak ditemukan pada kebudayaan Gayo Lues. Adapun beberapa pepatah bijak tersebut adalah :

1. *Asal Linge Awal Serule* adalah sebuah semboyan yang mengisyaratkan jati diri Gayo Lues, dalam kesenian Saman disetiap pembukaannya selalu menyebutkan *Asal Linge Awal Serule*.

- 
2. *Deret uer pangan kule, deret ni tarak pangan musang adalah sebuah semboyan yang mempunyai arti larangan keluar dari norma hukum, adat dan budaya setempat.*
 3. *Akal ken pangkal, kekire ken belenye adalah sebuah semboyan yang mempunyai arti kerajinan modal dalam kehidupan.*
 4. *Blang pediangan, bur perutemen adalah sebuah semboyan yang mempunyai arti tanda sebuah kebiasaan.*

Ini dimaksudkan sebagai sebuah identitas diri masyarakat Gayo yang tersebar di beberapa wilayah di Provinsi Aceh. Ada dua potensi pariwisata yang bisa dikembangkan di Gayo Lues, yaitu pariwisata alam dan pariwisata budaya. Pariwisata Alam merupakan andalan dari Gayo Lues dimana ada 14 wisata alam yang salah satunya yang sudah mendunia adalah Taman Nasional Gunung Leuser. Taman Nasional ini dikenal sebagai paru-paru dunia dengan keanekaragaman hayati yang sangat luar biasa. Kekuatan wisata alam eko wisata/wahana wisata lokasi TNGL ditetapkan di Gumpang ibukota Kecamatan Putri Betung. Arung jeram adalah wisata alam lainnya yang berpotensi dikembangkan di sepanjang Sungai Alas yang belum tergarap secara optimal. Strategi pengembangan wisata Gayo Lues dapat dimulai dari TNGL (paling banyak pengunjung dan adanya turis asing) dan selanjutnya diperluas ke pariwisata budaya. Sedangkan Pariwisata budaya yang sering dikunjungi di Kabupaten Gayo Lues adalah masjid asal nampaan. Tempat ibadah ini sering dikunjungi khususnya pada hari jumat, baik itu dari masyarakat Kabupaten Gayo Lues maupun di luar Kabupaten Gayo Lues.

2.3. Aspek Pelayanan Umum

2.3.1. Fokus Layanan Urusan Keistimewaan Aceh

A. Pendidikan Islami/Syariat Islam

Sejak disahkan Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintah Aceh, Pemerintah Gayo Lues komitmen “Menjalankan Syariat Islam Secara Kaffah”, karena dengan mengarahkan pola pikir dan budaya hidup Islami masyarakat akan hidup damai, sehat, cerdas sehingga sejahtera. Pendidikan islami bertujuan untuk memadukan dan menyempurnakan iman dan amal shaleh untuk tercapainya kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Untuk mewujudkan hal tersebut diatas Kabupaten Gayo Lues telah menetapkan pendidikan dayah sebagai prioritas yang sesuai dengan visi Kabupatenn Gayo Lues yaitu Mewujudkan Gayo Lues yang Islami, Mandiri dan Sejahtera. Maka dari itu Pemerintah Kabupaten Gayo Lues ingin menciptakan budaya islami dengan cara menciptakan seribu hafidz, melaksanakan shalat shubuh keliling dan maghrib keliling.

Ada beberapa aspek yang harus dipenuhi agar suatu sekolah ditetapkan sebagai sekolah yang benuansa islami yaitu dari aspek administrasi meliputi: tersedianya aturan kepala sekolah untuk melaksanakan syariat Islam dan buku pantau ibadah siswa; aspek substansi meliputi: terpenuhinya guru agama Islam, tersedianya Alquran di setiap kelas dan ruang guru, Rasio ketersediaan buku wawasan keislaman minimal 25 persen dari jumlah siswa; dan aspek pendukung meliputi: tersedianya motto dengan tulisan arab yang bersumber dari Alquran dan Hadits, dilaksanakannya sholat dzuhur berjamaah, sholat dhuha, kajian keagamaan setiap semester, kegiatan PHBI, membaca doa dan Alqur'an sebelum memulai pelajaran, kegiatan belajar membaca Alqur'an, tersedianya masjid/musholla serta MCK dan tempat berwudhu yang fungsional.

Kampung bernuansa islami harus memenuhi beberapa aspek yaitu: aspek administrasi meliputi: tersedianya SK/aturan/resam pengulu untuk melaksanakan syariat islam dan terlaksananya pengajian mingguan di Kampung; Aspek substansi meliputi: tersedianya tempat ibadah, ada BKM di Mesjid, terlaksananya sholat berjamaah 5 (lima) waktu di masjid, adanya kelompok pengajian/majelis taklim, adanya imam kampung, adanya PAUD/TPQ dan kegiatan magrib mengaji, serta aspek pendukung meliputi: adanya tulisan/motto yang bersumber dari Alquran dan hadits. Adapun SKPK pengampu program/kegiatan untuk pencapaian indikator tersebut adalah Dinas Syariat Islam. Untuk capaian masing-masing Indikator Kinerja Utama dapat di lihat pada Tabel Berikut :

Tabel 2.10
Persentase Dalam Penerapan Syariat Islam di Kabupaten Gayo Lues
Tahun 2017-2021 (Persen)

No	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase Sekolah Bernuansa Islami	N/A	4	35	25	30
2	Persentase Kampung Bernuansa Islami	N/A	5	8	15	30
3	Jumlah Pelanggaran Syari'at Islam	80	52	50	66	48
4	Persentase Kemakmuran Masjid	85	10	20	15	30

Sumber : Dinas Syari'at Islam, 2022

Pengelolaan Harta agama juga menjadi elemen penting dalam penerapan nilai Dinul Islam dalam masyarakat. Berdasarkan Qanun Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal menegaskan Pemerintahan Aceh dalam merealisasikan Syariat Islam di bidang Kesejahteraan dan Pemberdayaan umat. Baitul Mal diberikan kewenangan untuk mngelola zakat, infaq, shadakah, dan wakaf (ZISWAF) dan harta agama

lainnya. Untuk capaian masing-masing Indikator Kinerja Utama dapat di lihat pada Tabel Berikut :

Tabel 2.11
Pendapatan Zakat, Infaq, Sadaqah dan Wakaf
Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017-2021

No.	Uraian	Pendapatan (Juta)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Zakat	3.300	3.300	2.900	2.333	2.253
2	Infaq	1.195	1.250	1.800	1.000	1.100
3	Sadaqah	5	5	5	5	5
4	Wakaf	-	-	-	-	-
TOTAL		2.575	3.050	4.500	3.338	3.358

Sumber: Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues, 2022

B. Penyelenggaraan Kehidupan Adat

Dalam masyarakat Gayo Lues, adat merupakan sesuatu yang tertulis ataupun tak tertulis yang menjadi pedoman didalam bermasyarakat Gayo Lues. Adat yang dipahami ini merupakan titah dari para pemimpin dan para pengambil kebijakan guna jalannya sistim dalam masyarakat. Dalam masyarakat Gayo Lues, adat atau hukum adat tidak boleh bertentangan dengan ajaran agama islam. Sesuatu yang telah diputuskan oleh para pemimipin dan ahli tersebut haruslah seirama dengan ketentuan syariat. Dan jika adat ini bertentangan Ajaran Syariat maka hukum adat itu akan dihapuskan. Inilah bukti bahwa masyarakat Gayo Lues sangat menjunjung tinggi Nilai-nilai keagamaan.

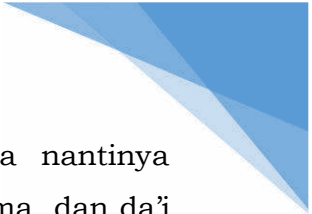
C. Penyelenggaraan Pendidikan

Pendidikan Islami bertujuan memadukan dan menyempurnakan iman dan amal saleh untuk tercapainya kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Pendidikan Islami bukan semata-mata menekankan pada pengembangan aspek jasmaniah, akal dan moral, tetapi juga menekankan pentingnya ubudiyah dan amal saleh, yang semuanya berkembang secara seimbang.

Upaya meningkatkan pendidikan Islami di Aceh melalui dayah sudah melembaga dan membudaya, sehingga meskipun dewasa ini di Aceh memiliki lembaga pendidikan baru, namun masyarakat Aceh tetap menjaga keberadaan lembaga pendidikan dayah. Tujuan Pendidikan Dayah adalah untuk menjaga kebutuhan masyarakat dalam bidang studi keagamaan dan dalam upaya untuk mengendalikan gejala-gejala negatif yang tidak diinginkan yang mungkin terjadi dalam masyarakat.

D. Peran Ulama dalam Penetapan Kebijakan Daerah

Dengan pelaksanaan Pendidikan Kader Ulama (PKU) ini diharapkan akan lahir para ulama yang mempunyai kompetensi dalam artian mempunyai wawasan ke-



islaman yang luas yang tersebar di seluruh wilayah Aceh sehingga nantinya dapat berkontribusi nyata dalam masyarakat. Dengan hadirnya ulama dan da'i yang mempunyai wawasan ke-islaman yang mumpuni, mempunyai kompetensi intelektual dan integritas moral yang terpuji akan mampu merespon berbagai gejala dan fenomena sosial sehingga dapat berperan maksimal di tengah-tengah kehidupan umat serta diharapkan nantinya dapat mengurai dan memberikan solusi yang tepat atas berbagai persoalan yang ada dalam masyarakat.

Dalam pelaksanaan Syari'at Islam tidak hanya menyangkut bidang ibadah, muamalah dan aqidah semata tetapi termasuk juga masalah kehalalan suatu produk berupa barang dan jasa yang diproduksi dan dikonsumsi masyarakat Aceh. Pelaksanaan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) merupakan hal penting dan menjadi satu kesatuan dalam pelaksanaan Syari'at Islam. Pelaksanaan Syari'at Islam juga harus mencakup bidang pangan, makanan, obat-obatan dan kosmetika.

Berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat maupun umat saat ini, baik itu persoalan kemiskinan, pornografi, korupsi, pendangkalan akidah dan akhlak, penyebaran aliran sesat dan juga kerusakan moral lainnya yang sedang berkembang, seolah menegaskan akan pentingnya peran seluruh masyarakat dalam menagatasi akutnya problematika sosial masyarakat tersebut.

Dalam mengatasi masalah tersebut, Pemerintah Kabupaten Gayo Lues berupaya mendorong suatu usaha peningkatan peran serta ulama melalui program Permusyawaratan Ulama Aceh yang mencakup pengkaderan dan pemberdayaan ulama. Dengan adanya program ini diharapkan akan hadir ulama dan da'i yang mempunyai wawasan ke-islaman yang luas yang tersebar di seluruh Kabupaten Gayo Lues sehingga dapat berkontribusi nyata dalam masyarakat.

Capaian indikator kemakmuran masjid pada tahun 2021 sudah mencapai 30 persen. Sebuah masjid dikategorikan makmur jika memenuhi beberapa aspek yakni: 1) Aspek administrasi meliputi : tersedianya SK kepengurusan masjid, struktur organisasi kepengurusan masjid, papan informasi pengelolaan kegiatan masjid, dan program kerja tahunan masjid; 2) Aspek substansi meliputi: terlaksananya sholat berjama'ah lima waktu, memiliki imam masjid yang hafidz qur'an, melaksanakan kajian/mejelis taklim minimal 2 kali sebulan, adanya kegiatan remaja masjid dan TPA/PAUD Qur'an; 3) Aspek pendukung meliputi tersedianya papan nama, tempat wudhu yang fungsional, MCK yang bersih dan fungsional, *sound system* yang fungsional, mimbar, perlengkapan sholat, perpustakaan masjid, dan terciptanya K3 (Ketertiban, Keamanan dan Keindahan).

E. Perdamaian

Berbagai upaya telah dilakukan para pihak untuk menyelesaikan konflik di Aceh. Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) telah dengan sukses mengambil suatu langkah penting menyelesaikan konflik Aceh, dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) damai pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia.

Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki menegaskan bahwa undang-undang baru tentang penyelenggaraan pemerintahan di Aceh akan diundangkan dan akan mulai berlaku sesegera mungkin dan selambat-lambatnya tanggal 31 Maret 2006. Berdasarkan hal tersebut, pasca persetujuan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Presiden Republik Indonesia Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 1 Agustus 2006 mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).

Sejak dibentuk melalui Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 330/106/2006 tertanggal 2 Mei 2006, Badan Reintegrasi Aceh (BRA) menjadi pemangku mandat penyaluran dana dan pelaksanaan 4 (empat) program utama reintegrasi (pemberdayaan ekonomi, rehabilitasi dan perlindungan sosial, anak korban konflik yang mendapat perhatian pemerintah, dan lembaga penanganan korban konflik). Berbagai hal yang berkaitan dengan keterbatasan kelembagaan hingga terisolasinya dukungan penguatan perdamaian dari perencanaan pembangunan reguler menjadi catatan tambahan BRA, selain berbagai kendala di lapangan, diantaranya disebabkan oleh ketidakakuratan data. BRA awalnya dibangun sebagai organisasi skala kecil, organisasi ini didesentralisasikan di bawah kepemimpinan paruh waktu dengan kapasitas terbatas untuk mendistribusikan dana reintegrasi dari Pemerintah Indonesia.

2.3.2. Fokus Layanan Urusan Wajib

A. Layanan Urusan Wajib Dasar

A.1. Pendidikan

a. Angka Partisipasi Murni (APM)

Tingkat partisipasi sekolah merupakan salah satu indikator yang dapat mengukur partisipasi masyarakat dalam mengikuti pendidikan dari berbagai jenjang pendidikan dan kelompok umur. Tingkat partisipasi sekolah yang dapat diukur diantaranya Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM). APM Kabupaten Gayo Lues untuk tingkat pendidikan terus mengalami

peningkatan. Pada tahun 2021, APM Kabupaten Gayo Lues tercatat sebesar 99,84 persen meningkat dari 3 tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya partisipasi dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dan menyekolahkan anak tepat waktu serta tercapainya kemajuan terutama dalam hal pemerataan akses terhadap pendidikan.

Perkembangan APM Kabupaten Gayo Lues pada tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.12 berikut :

Tabel 2.12
Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Gayo Lues
Tahun 2017- 2021 (Persen)

No	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
1	Angka Partisipasi Murni SD/MI	100	99,65	99,65	99,73	99,84
2	Angka Partisipasi Murni SMP/MTs	99,75	90,78	90,78	90,45	89,62

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

b. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan jumlah siswa kelompok usia tertentu yang bersekolah ditingkat jenjang pendidikan tertentu pada tahun yang bersangkutan dibandingkan dengan jumlah penduduk usia sekolah tersebut. Selama periode tahun 2017-2021, capaian APS menurut kelompok usia sekolah mengalami fluktuasi. Angka APS Kabupaten Gayo Lues tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Tabel 2.13 berikut ini :

Tabel 2.13
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Gayo Lues
Tahun 2017-2021

Kelompok Usia	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
7-12	Laki-laki	100	100	100	99,44	99,65
	Perempuan	100	100	100	100	100
13-15	Laki-laki	100	100	100	97,89	97,09
	Perempuan	100	100	100	100	100
16-18	Laki-laki	91,08	92,37	92,37	81,34	86,33
	Perempuan	91,08	85,57	85,57	96,98	92,75

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

A.2. Kesehatan

Bidang kesehatan ini mencakup kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang cukup luas cakupannya, dimulai dari pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga profesional terlatih. Di Kabupaten Gayo Lues terdapat 1

rumah sakit pemerintah, 12 unit Puskesmas, 31 unit Puskesmas Pembantu, 8 klinik/balai kesehatan, dan 84 Polindes. Setiap desa sudah memiliki posyandu, tetapi yang aktif hanya 136 posyandu dari 136 total posyandu.

Selain sarana, bidang kesehatan juga ditunjang oleh tenaga medis yang memadai. Kabupaten Gayo Lues terdapat 257 orang bidan dan 165 orang perawat. Tenaga medis dokter yang ada di Kabupaten Gayo Lues berjumlah 23 orang untuk dokter umum dan 8 (delapan) orang untuk dokter gigi. Tenaga medis yang harus ditambah adalah tenaga dokter spesialis yang sampai saat ini berjumlah 8 (delapan) orang dokter spesialis. Peran dokter spesialis sangat penting mengingat banyak penyakit yang diderita masyarakat yang memerlukan diagnosa tepat dari dokter ahli di bidang penyakit tersebut.

a. Angka Kematian Neonatus (AKN)

Angka Kematian Neonatus adalah jumlah bayi (usia 0-28 hari) yang meninggal di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Dari tahun 2017-2021 Angka Kematian Neonatus (AKN) Kabupaten Gayo Lues dapat dilihat pada Tabel 2.14 berikut ini:

Tabel 2.14
Angka Kematian Neonatus Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017-2021

Jumlah Kematian	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Neo Natal	Per 1000 KH	3	3	3,5	4,5	10,29

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Gayo Lues, 2022

Faktor-faktor yang mempengaruhi kematian neonatal berdasarkan penyebab langsung dan penyebab tidak langsung. Penyebab langsungnya adalah berat bayi lahir rendah, infeksi atau peradangan, serta pengembangan parasit dalam tubuh, dan asfiksia.

b. Gizi Buruk

Berdasarkan data dari Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) penanganan gizi buruk dengan prevalensi stunting di Gayo Lues tahun 2021 sebesar 42,9 persen, rata-rata provinsi Aceh sebesar 33,2 persen, sedangkan rata-rata nasional sebesar 24,4 persen. Oleh sebab itu, diperlukan kerjasama dari seluruh lapisan baik masyarakat dan pemerintah dalam penanganan stunting. Pencegahan dapat dimulai dari Perilaku Hidup bersih dan Sehat pemenuhan kebutuhan nutrisi yang cukup bagi anak di 1000 hari pertama kehidupan, bagi ibu hamil rutin melakukan pemeriksaan pada masa kehamilan menghindari asap rokok serta berolah raga secara rutin, dengan adanya penerapan tersebut diharapkan kasus penderita gizi

buruk/Stunting 4 (empat) Tahun kedepan dapat menurun dengan target penurunan menjadi 23 persen. Berikut data Prevalensi stunting di Gayo Lues tahun 2021:

Tabel 2.15
Data Prevalensi Stunting Per Kecamatan Tahun 2021

Data Bulan Agustus 2021

No	Puskesmas	JUMLAH BALITA SASARAN	Jumlah Input	Persentase Input (%)	TS/U				JUMLAH STUNTING	PREVALENSI
					Sangat Pendek	Pendek	Normal	Tinggi		
1	2	3	4=(6+7+8+9)	5= (4/3*100)	6	7	8	9	10=(5+6)	11 =(10/4*100)
1	KUTA PANJANG	920	517	56,20	1	28	488	0	29	5,61
2	BLANGIERANGO	822	458	55,72	1	16	439	0	19	4,15
3	BLANGKEJEREN	2232	1657	74,24	1	9	1647	0	10	0,60
4	GUMPANG	982	293	29,84	14	35	242	2	49	16,72
5	DABUN GELANG	632	563	89,08	2	51	508	2	53	9,41
6	CINTA MAHU	621	372	59,90	5	23	318	6	28	7,53
7	PINING	236	122	51,69	3	25	94	0	28	22,95
8	PINTU RIME	170	80	47,06	1	12	67	0	13	16,25
9	RIKIT GAUS	440	285	64,77	12	27	244	2	39	13,68
10	KENYARAN	372	319	85,75	3	50	266	0	53	16,61
11	TERANGUN	801	445	55,56	32	103	307	3	135	30,34
12	REREBE	428	98	22,90	12	19	67	0	31	31,53
JUMLAH		8656	5209	60,18	89	398	4707	15	487	9,35

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Gayo Lues, 2022

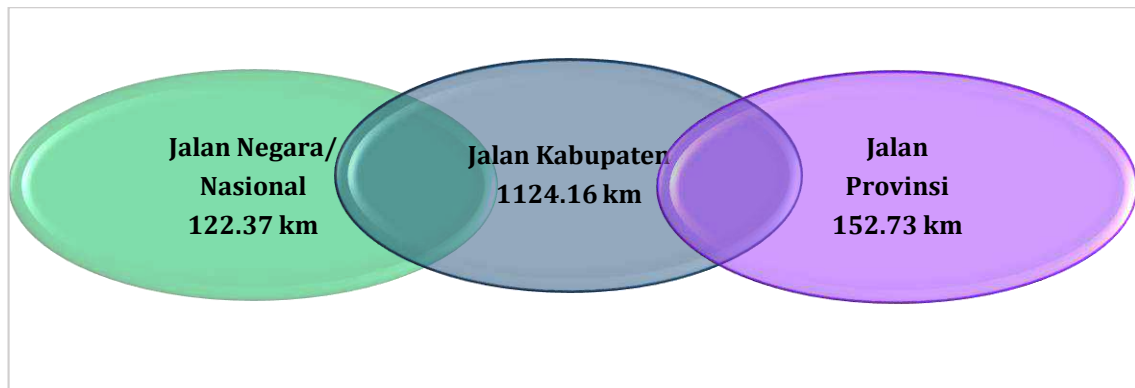
A.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Kondisi Jalan

Pembangunan infrastruktur jalan merupakan hal yang esensial dalam pengembangan suatu wilayah. Jalan merupakan infrastruktur pendukung mobilitas masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya, serta pertahanan dan keamanan. Peningkatan infastruktur jalan dapat berdampak pada peningkatan ekonomi disuatu wilayah. Untuk mengevaluasi manfaat jalan maka dilakukan perhitungan rasio pada bagian ini. Panjang jalan yang dihitung adalah panjang jalan nasional (tidak termasuk jalan tol), jalan provinsi, jalan kabupaten, dan jalan kota. Mengingat jalan memegang peranan penting untuk menjadikan Kabupaten Gayo Lues lebih terbuka dan lebih dikenal oleh daerah lain.

Total panjang jalan di Kabupaten Gayo Lues sampai dengan tahun 2021 adalah 1.399.26 km yang terdiri dari Jalan Negara, Jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten. Adapun luas jalan yang dimiliki dapat dilihat dari Gambar berikut ini:

Gambar 2.26
Panjang Jalan Negara, Provinsi dan Kabupaten Tahun 2021



Sumber : Dinas PUPR Kab. Gayo Lues, 2022

Permukaan jalan kabupaten terdiri 48,72 persen Aspal, 38,38 persen tanah dan 12,90 persen kerikil. Panjang jalan permukaan aspal pada tahun 2020 bertambah 4,600 km dari tahun 2019. Total penambahan panjang jalan pada tahun 2021 sebesar 34,046 km. Adapun Persentase jalan Menurut Jenis Kondisi dapat dilihat dari Gambar berikut ini:

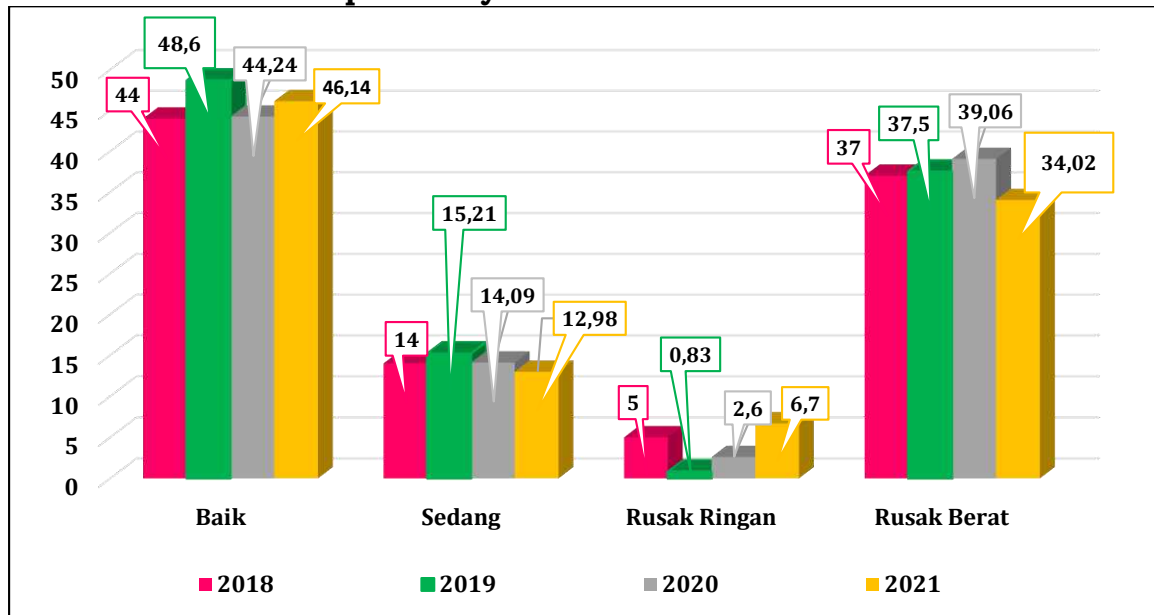
Gambar 2.27
Persentase Jalan Menurut Jenis Kondisi di Kabupaten Gayo Lues Tahun 2021



Sumber : Dinas PUPR Kab. Gayo Lues, 2022

Dilihat dari gambar di atas, Pada tahun 2021 kondisi jalan di Kabupaten Gayo Lues mengalami perbaikan pada kondisi jalan baik, Rusak Ringan dan Rusak Berat, sedangkan pada kondisi jalan sedang mengalami penurunan 1,11 persen dari 14,09 persen pada tahun 2020 menjadi 12,98 persen pada tahun 2021. Untuk perbandingan Kondisi jalan tersebut dapat kita lihat pada Gambar berikut :

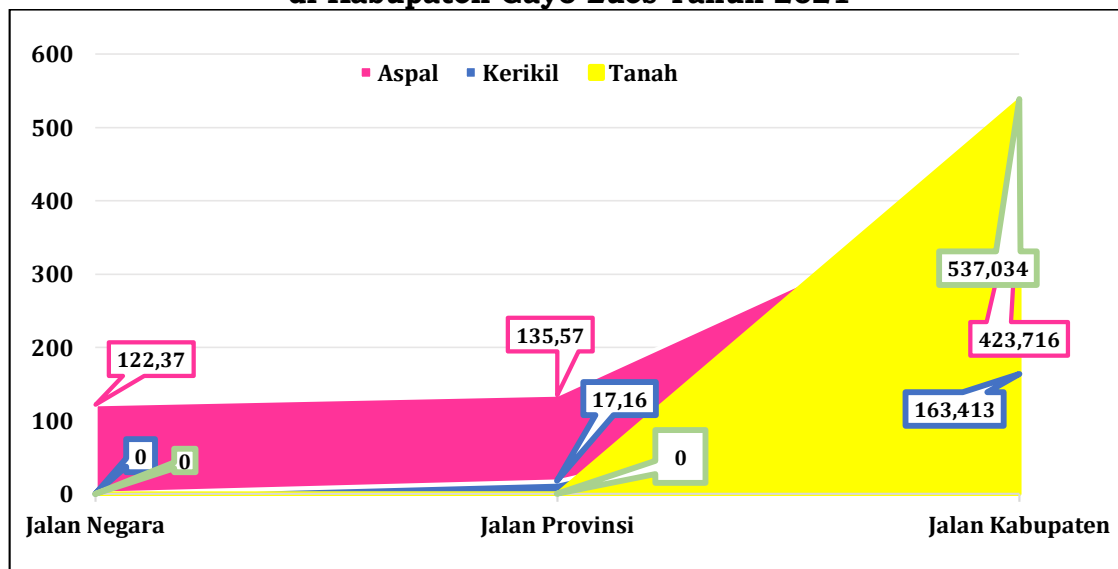
Gambar 2.28
Persentase Jalan Menurut Jenis Kondisi Mantap
di Kabupaten Gayo Lues Tahun 2018-2021



Sumber : Dinas PUPR Kab. Gayo Lues, 2022

Sedangkan panjang jalan menurut jenis permukaan jalan di Kabupaten Gayo Lues Tahun 2021 dapat dilihat pada Gambar berikut :

Gambar 2.29
Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan
di Kabupaten Gayo Lues Tahun 2021



Sumber : Dinas PUPR Kab. Gayo Lues, 2022

Dilihat dari Gambar tersebut di atas, dapat dilihat pada tahun 2021 kondisi jalan menurut jenis permukaan jalan di Kabupaten Gayo Lues lebih dominan Tanah pada jalan yang merupakan kewenangan Kabupaten. Selain infrastruktur jalan, dengan kondisi fisik Gayo Lues yang banyak dibentuk oleh alur-alur kecil dan sedang bahkan sungai-sungai besar, maka pembangunan jembatan juga merupakan

sebuah keharusan dimana sampai saat ini hampir ribuan jembatan kecil maupun sedang telah terpasang di seluruh ruas jalan yang ada. Sampai 2021, di Jalan Provinsi saja telah dibangun 115 unit jembatan dengan panjang total 2100,40 meter.

b. Kondisi Jembatan

Jumlah jembatan yang ada di Kabupaten Gayo Lues pada Tahun 2021 adalah 115 unit dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.16
Panjang Ruas Jalan dan Jembatan Provinsi Dalam Kabupaten Gayo Lues

No	Nama Ruas Jalan (km)	Panjang Jalan (m)	Lebar Jalan (m)	Kondisi Jalan (km)			Jembatan	
				Baik	Kurang Baik	Tidak Baik	Unit	Panjang (m)
1	Blangkejeren – Aceh Tenggara	63,99	6	40,99	22,30	0,70	22	420,70
2	Blangkejeren – Aceh Timur	62,03	6	35,75	22,78	3,50	42	755, 00
3	Blangkejeren – Aceh Tengah	59,38	6	58,38	0,00	1,00	18	430,80
4	Blangkejeren - Aceh Barat Daya	90,72	6	80,00	5,72	5,00	33	493,90
Jumlah		276,12	24	215,1	50,80	10,20	115	2100,4

Sumber : Dinas PUPR, 2022

Dari tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kondisi jembatan Provinsi yang ada di Kabupaten Gayo Lues terus membaik walaupun dalam jumlah tetap sama, hal ini menggambarkan bahwa program/kegiatan DOKA telah mencapai sasaran.

c. Air Minum dan Sanitasi

Sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan melalui pembangunan sanitasi (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi). Rumah tinggal berakses sanitasi sekurang-kurangnya mempunyai akses untuk memperoleh layanan sanitasi, sebagai berikut: 1) Fasilitas air bersih, 2) Pembuangan air besar/tinja, 3) Pembuangan air limbah (air bekas) dan 4) pembuangan sampah.

Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi). Selanjutnya Air minum dan sanitasi merupakan salah satu jenis pelayanan dasar yang pemenuhannya bukan sekadar aka meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas hidup, tetapi pada

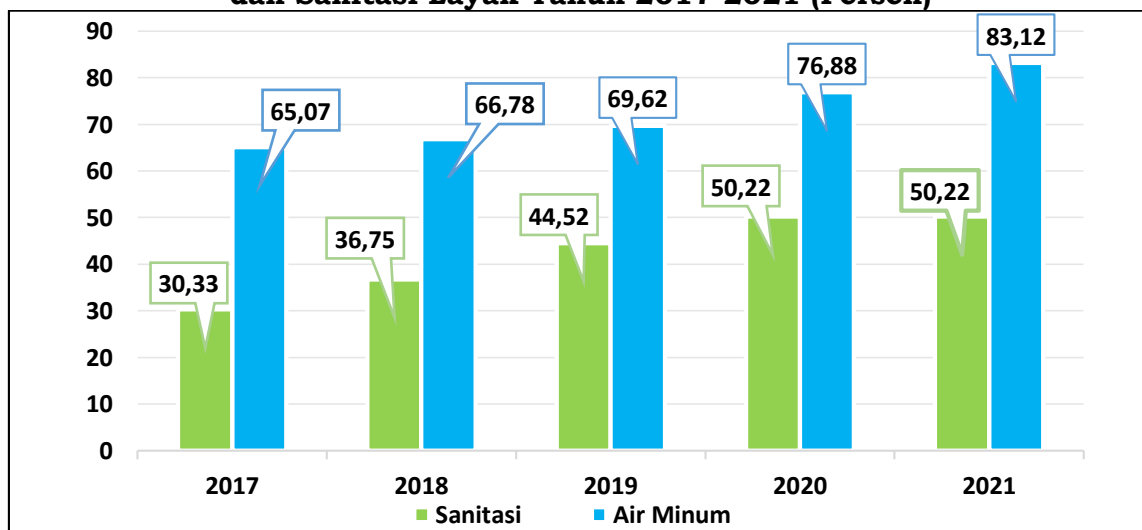
akhirnya juga meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemenuhan akses air minum dan sanitasi merupakan salah satu urusan wajib pemerintah dalam rangka penyediaan kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal (PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal).

1. Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum dan Rumah Tinggal Bersanitasi

Air minum yang layak adalah air minum yang terlindung meliputi air ledeng (keran), keran umum, hydrant umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 meter dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan, air isi ulang, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tanki, air sumur tidak terlindung, mata air tidak terlindung, dan air permukaan (seperti sungai/danau/waduk/kolam/irigasi).

Fasilitas sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain klosetnya menggunakan leher angsa, tempat pembuangan akhir tinjanya menggunakan tanki septik (septic tank) atau Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL), dan fasilitas sanitasi tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goal's*). Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses selengkapannya sebagaimana tersaji pada Gambar 2.30:

Gambar 2.30
Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum dan Sanitasi Layak Tahun 2017-2021 (Persen)



Sumber : BPS Provinsi Aceh, 2022

Persentase Rumah Tangga dengan akses air minum dan sanitasi layak sejak tahun 2017-2021 menunjukkan angka yang beragam. Rumah tangga berakses air minum dan layak mengalami peningkatan dari tahun 2017-2021. Pada tahun 2020 terus menunjukkan peningkatan pelayanan sebesar 6,24 persen. Sedangkan kondisi pelayanan akses sanitasi layak terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 16,60 persen. Pada sektor sanitasi peningkatan capaian terjadi seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat serta pengelolaan limbah dan sampah rumah tangga yang lebih baik.

d. Penataan Ruang

Penataan ruang pada dasarnya merupakan bentuk intervensi yang dilakukan agar terwujud alokasi ruangan nyaman, produktif dan berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan keseimbangan tingkat perkembangan wilayah. Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten merupakan arahan perwujudan ruang wilayah kabupaten yang ingin dicapai pada masa yang akan datang, yang berfungsi sebagai dasar untuk memformulasikan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten, memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW kabupaten dan sebagai dasar dalam penetapan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

1. Kesesuaian Pelaksanaan Struktur Ruang dan Pola Ruang terhadap RTRW

Penggunaan lahan merupakan pencerminan dari hubungan antara alam/lahan dengan manusia dalam kegiatannya. Apabila jumlah manusia sangat kecil dibandingkan dengan luas wilayah/kawasan, maka dapat diartikan bahwa penggunaan lahan belum banyak bervariasi sesuai dengan jenis kegiatan yang dilakukan. Berikut tabel pola ruang wilayah di Kabupaten Gayo Lues :

Tabel 2.17
Pola Ruang Wilayah di Kabupaten Gayo Lues
Berdasarkan RTRW 2012-2032

No	Penggunaan Lahan	Luas (km²)	Persentase (%)
1	Kawasan Lindung	3.950,28	71,18
	a. TNGL	2.035,20	36,67
	b. Hutan Lindung	1.883,52	33,94
	c. Kawasan Cagar Budaya	-	0,00
	d. Danau	0,36	0,01
	e. Sempadan Danau	-	0,00
	f. Sempadan Sungai	19,07	0,34
	g. Sungai	11,89	0,21
	h. Ruang Terbuka Hijau	0,24	0,00
2	Kawasan Budidaya	1.599,63	28,82
	a. Area Peternakan	38,01	0,68

Rencana Pembangunan Kabupaten Gayo Lues Tahun 2023-2026



No	Penggunaan Lahan	Luas (km ²)	Persentase (%)
	b. Hutan Produksi	306,45	5,52
	c. Hutan Produksi Konservasi	-	0,00
	d. Hutan Produksi Terbatas	262,55	4,73
	e. Kawasan Bandara	2,29	0,04
	f. Kawasan Hankam	0,35	0,01
	g. Kawasan Wisata	3,86	0,07
	h. Perkebunan Rakyat	756,36	13,63
	i. Permukiman	42,47	0,77
	j. Pertanian Lahan Kering	35,49	0,64
	k. Sawah	83,87	1,51
	l. Transmigrasi	67,76	1,22
	m. Wisata Budaya	0,11	0,00
	n. Balai Benih Ikan	-	0,00
	o. Kawasan Adat Terpencil	0,05	0,00
	Jumlah	5 549,91	100,00

Sumber: Profil Gayo Lues 2020

Berdasarkan Tabel di atas, dapat dilihat bahwa seluas 2.035.20 km² atau 36,67 persen dari total luas wilayah Kabupaten Gayo Lues merupakan daerah suaka alam Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) yang diandalkan sebagai paru-paru dunia atau secara keseluruhan seluas 3.950,33 km² atau 71,24 persen luas wilayah merupakan kawasan lindung yang terdiri dari TNGL, hutan lindung, dan kawasan lindung lainnya.

Hutan Produksi merupakan penggunaan lahan terbesar kedua yang mencapai luas 306,45 km² atau sekitar 5,56 persen dan hutan produksi terbatas seluas 227,19 km² atau 4,12 persen. Selanjutnya pemukiman pedesaan mempunyai luas sebesar 78,02 km², atau sekitar 1,42 persen. Penggunaan lahan eksisting paling kecil adalah kawasan hankam dan bandara yaitu 0,15 km² dan 2,29 km². Pola pemanfaatan penggunaan lahan/hutan disesuaikan dengan fungsi lahan/hutan itu sendiri sehingga dapat menjamin kelestarian produksi dan keseimbangan lingkungan hidup. Pola sebaran permukiman penduduk berkaitan erat dengan kondisi topografi, yaitu di kawasan perbukitan dan pergunungan.

2. Ruang Terbuka Hijau

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan area yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja di tanam. Dalam Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang menyebutkan bahwa 30 persen wilayah kota harus berupa Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang terdiri dari 20 persen publik dan 10 persen privat. Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Gayo Lues dari 2017



sampai dengan tahun 2021 menunjukkan 110,92 Ha atau 18 titik dan yang dikelola 2,89 Ha atau 5 titik.

3. Pengairan

Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Pengelolaan Sumber Daya Air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Air, Pendayagunaan Sumber Daya Air, dan Pengendalian Daya Rusak Air. Konservasi Sumber Daya Air ditujukan untuk menjaga kelangsungan keberadaan, daya dukung, daya tampung, dan fungsi Sumber Daya Air. Konservasi Sumber Daya Air dilakukan dengan mengacu pada Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air melalui kegiatan: perlindungan dan pelestarian Sumber Air; pengawetan air; pengelolaan kualitas air; dan pengendalian pencemaran air.

Pendayagunaan Sumber Daya Air ditujukan untuk memanfaatkan Sumber Daya Air secara berkelanjutan dengan prioritas utama untuk pemenuhan air bagi kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat yang dilakukan melalui kegiatan: penatagunaan Sumber Daya Air; penyediaan Sumber Daya Air; Penggunaan Sumber Daya Air; dan Pengembangan Sumber Daya Air. Pengendalian Daya Rusak Air dilakukan secara menyeluruh yang mencakup upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan. Pengendalian Daya Rusak Air ditujukan untuk mencegah terjadinya bencana yang diakibatkan oleh Daya Rusak Air.

e. Jaringan Irigasi

Jaringan irigasi meliputi bangunan saluran dan bangunan pelengkap sebagai satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi. Selanjutnya secara operasional dibedakan kedalam tiga kategori yaitu jaringan primer, skunder dan tersier. Sedangkan ditinjau dari sisi kewenangan jaringan dibedakan menjadi jaringan irigasi kewenangan pusat, kewenangan provinsi dan kewenangan kabupaten.

Pada tahun 2021, Kabupaten Gayo Lues ada 116 daerah irigasi dengan luas areal 10.014 Ha, Kondisi Jaringan Baik sebesar 80.882,72 Meter dan Kondisi Jaringan Rusak sebesar 77.153,8 Meter.

Sedangkan Nama Daerah Irigasi dengan Luas Daerah Irigasi dan Luas Sawah Irigasi di Kabupaten Gayo Lues Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.18
Nama Daerah Irigasi dengan Luas Daerah Irigasi dan
Luas Sawah Irigasi di Kabupaten Gayo Lues Tahun 2021

No	Nama Daerah Irigasi	Luas D.I. Sesuai Permen 14/15 (Ha)	Luas Sawah Irigasi (Ha)
1	D.I Atu Kasar	260	-
2	D.I Badak	645	41
3	D.I Cempa	120	29
4	D.I Cinta Maju	120	-
5	D.I Ekan	55	21
6	D.I Gele	100	-
7	D.I Gumpang	100	-
8	D.I Kendawi	50	27
9	D.I Kenyaran	150	-
10	D.I Kuta Bukit	450	-
11	D.I Kute Lesung	150	122
12	D.I Kute Sange	75	15
13	D.I Leme	100	35
14	D.I Lokot	95	14
15	D.I Padang Terangun	180	57
16	D.I Palok	75	48
17	D.I Pangur	100	21
18	D.I Pasir	100	75
19	D.I Pasir Putih	50	4
20	D.I Penampaan	150	-
21	D.I Penggalangan	275	-
22	D.I Perlak	150	37
23	D.I Pining	120	41
24	D.I Rema Baru	100	-
25	D.I Rempelam	125	54
26	D.I Remukut	45	19
27	D.I Rerebe	145	48
28	D.I Rigebe	350	-
29	D.I Rikit	65	5
30	D.I Rumpi	135	-
31	D.I Sangir	125	23
32	D.I Sere	50	-
33	D.I Soyo	100	21
34	D.I Terlis	100	2
35	D.I Tiga Desa	200	-
36	D.I Truil	200	95
37	D.I Uring	175	41
38	D.I Buah Penggalangan	172	21
39	D.I Cinte	80	33



No	Nama Daerah Irigasi	Luas D.I. Sesuai Permen 14/15 (Ha)	Luas Sawah Irigasi (Ha)
40	D.I Gao	150	-
41	D.I Gelinggang Soyo	50	4
42	D.I Kala Pinang	35	-
43	D.I Kalajernih	80	-
44	D.I Lempuh	90	-
45	D.I Makmur Jaya	90	40
46	D.I Pantan Kela	45	-
47	D.I Pintu Gayo	40	-
48	D.I Telpi	75	-
49	D.I Tetinggi Blang Papan	45	13
50	D.I Tingkem	42	15
51	D.I Tium	25	14
52	D.I Tongra	30	12
53	D.I Uning Gelung	42	61
54	D.I Uning Gerogoh	52	-
55	D.I Uning Nangka	15	24
56	D.I Uyem Roa Pepir	80	29
57	D.I Waih Kulit	15	-
58	D.I Waih Ongkap	70	-
59	D.I Bacang	15	-
60	D.I Badak Uken	45	41
61	D.I Blang Kunci	35	18
62	D.I Bukit	58	-
63	D.I Bukut	100	26
64	D.I Cane Toa	80	25
65	D.I Cane Uken	40	33
66	D.I Cike	50	11
67	D.I Gajah	20	2
68	D.I Gantung Geluni	48	-
69	D.I Gegarang	40	-
70	D.I Jabo Gumpang	30	44
71	D.I Kala Kenol	12	10
72	D.I Kala Suem	20	-
73	D.I Kereteng	85	-
74	D.I Kerkun	70	-
75	D.I Ketemi Peparik Gaib	70	28
76	D.I Kute Reje	75	6
77	D.I Lung	50	38
78	D.I Nanga	25	-
79	D.I Napal	50	11
80	D.I Palungen Peparik Gaib	35	44



No	Nama Daerah Irigasi	Luas D.I. Sesuai Permen 14/15 (Ha)	Luas Sawah Irigasi (Ha)
81	D.I Pantan Lues	20	35
82	D.I Peger Gantung	53	-
83	D.I Penomon	45	37
84	D.I Pepalan	40	-
85	D.I Pepir	65	10
86	D.I Pertik	10	2
87	D.I Pinang Juling	35	44
88	D.I Porang	80	-
89	D.I Putri Betung	93	99
90	D.I Rak Lintang	30	-
91	D.I Rak Lintang Tiga Desa	80	58
92	D.I Rak Nunang	36	-
93	D.I Renggali Penggalangan	30	25
94	D.I Sekuelen	88	37
95	D.I Seneren	55	33
96	D.I Sesik	63	-
97	D.I Setul	42	18
98	D.I Tetingi Blang Pegayon	50	-
99	D.I Tetingi Remukut	45	26
100	D.I Ulumblang	30	6
101	D.I Ulun Tanoh I	50	46
102	D.I Ulun Tanoh II	50	-
103	D.I Ume Bete	120	34
104	D.I Uning Pune	56	24
105	D.I Uyem Ulu	40	25
106	D.I Agusen	34	37
107	D.I Aih Kurik	35	-
108	D.I Aih Lebah	30	10
109	D.I Aih Riuh	40	30
110	D.I Air Panas	70	-
111	D.I Akul	90	63
112	D.I Alur Nangka	30	6
113	D.I Anak Reje	45	-
114	D.I Arul Ngang	30	5
115	D.I Gele I	150	-
116	D.I Pucuk Padang	190	73
	Total	10.014	2.281

Sumber : Dinas PUPR Kab. Gayo Lues, 2022

Salah satu upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan fungsi layanan suatu Daerah Irigasi dilakukan melalui *Program Integrated Participatory Development*



and Management of Irrigation Program (IPDMIP) yang bertujuan untuk mencapai keberlanjutan sistem irigasi, baik sistem irigasi kewenangan pusat, kewenangan provinsi maupun kewenangan kabupaten. Upaya ini diharapkan dapat mendukung tercapainya swasembada beras sesuai program Nawacita Pemerintah Indonesia.

1. Sungai

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, Provinsi Aceh memiliki 152 DAS. Untuk pengelolaan sungai sebagai sumber daya air dari 9 (sembilan) Wilayah Sungai atau biasa disingkat WS yang terdapat di Aceh berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.11A/PRT/M/2006, 5 (lima) WS berada di wilayah Gayo Lues yaitu WS Alas-Singkil, WS Woyla-Batee, WS Tamiang-Langsa, WS Baru-Kluet, dan WS Jambo Aye. WS. Alas- Singkil memiliki 8 DAS, WS. Woyla-Bateue memiliki 13 DAS, WS. Tamiang-Langsa memiliki 17 DAS, WS. Baru-Kluet memiliki 21 DAS, dan WS. Jambo Aye memiliki 13 DAS.

Terdapat beberapa sungai yang telah mengalami degradasi dan sedimentasi sehingga diperlukan penanganan menyeluruh mulai dari bagian hulu, tengah, dan hilir sungai. Untuk bagian hulu dilakukan penanganan terhadap rehabilitasi lahan kritis melalui reboisasi pada luasan daerah aliran sungai. Sementara itu wilayah tengah sungai diperlukan pengawasan dan penertiban pemanfaatan sungai, berikut pembangunan tanggul terhadap penyelamatan fasilitas publik yang didahului dengan perencanaan. Sedangkan wilayah hilir dilakukan Pengerukan pada daerah-daerah yang terjadi sedimentasi yang telah mengganggu aktivitas pelayaran dan aktivitas perekonomian lainnya.

A.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Perumahan dan permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan merupakan faktor penting dalam meningkatkan harkat dan martabat serta mutu kehidupan yang sejahtera dalam masyarakat yang adil dan makmur. Perumahan dan permukiman juga merupakan bagian dari pembangunan nasional yang perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan secara terpadu, terarah, terencana, dan berkesinambungan.

Perumahan adalah kumpulan Rumah sebagai bagian dari Permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagai hasil upaya pemenuhan Rumah yang layak huni. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa Kawasan Perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau Lingkungan Hunian dan tempat kegiatan yang

mendukung perikehidupan dan penghidupan. Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan Perumahan, penyelenggaraan kawasan Permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman).

Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman perlu dilaksanakan secara komprehensif melalui perencanaan, pembangunan, pemanfaatan dan pengendalian yang baik termasuk didalamnya kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan serta keterlibatan dan peran serta masyarakat. Pelayanan urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Gayo Lues memiliki beberapa indikator yang ditunjukkan pada Tabel 2.19.

Tabel 2.19
Capaian Indikator Pelayanan Urusan Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Kabupaten Gayo Lues Tahun 2018-2021

No	ASPEK	SATUAN	2018	2019	2020	2021
1	Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten	%	26,65	0,00	7,26	6,24
2	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	0,00	0,00	0,00	0,21
3	Rumah Tangga Bersanitasi	%	23,99	0,00	5,70	
4	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	%	26,65	20,06	7,26	15,83
5	Kawasan Kumuh	Rasio	1,25	0,00	1,36	0,00
6	Ruang Terbuka Hijau Persatuan Luas Wilayah	Ha	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Penyediaan dan Rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	Unit	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Fasilitasi Penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah Kabupaten	%	0,00	0,00	0,97	0,00
9	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten yang ditangani	%	0,00	1,25	0,00	0,00
10	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Unit	0,00	0,00	0,00	0,00

No	ASPEK	SATUAN	2018	2019	2020	2021
11	Jumlah Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	Unit	0,00	0,13	0,00	0,00
12	Rumah Layak Huni	Rasio	1,00	2,67	0,00	0,14

Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman Kab. Gayo Lues, 2022

Luas wilayah permukiman Kabupaten Gayo Lues 56,91 Km² atau 0,74 persen dengan jumlah penduduk 95.041 jiwa tahun 2021. Sedangkan rasio rumah layak huni di Kabupaten Gayo Lues baru mencapai 14 persen. Sementara itu, luas kawasan kumuh pada tahun 2013 mengacu pada Surat Keputusan Bupati/Walikota dengan total luasan ini mengalami angka stagnan di angka 69,34 ha hingga tahun 2021.

A.5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Rakyat

Untuk penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat umum diperlukan Satuan Polisi Pamong Praja dan Polisi Wilayahul Hisbah (SatPol PP dan WH). Satpol PP dan WH mempunyai fungsi untuk membantu menyelenggarakan ketentraman, keamanan, dan menegakkan peraturan serta kebijakan daerah. Sedangkan, Polisi Wilayahul Hisbah mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan pengawasan. Pemerintah Kabupaten Gayo Lues melalui Badan Kesbang Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Gayo Lues telah melakukan kegiatan pembinaan Politik Daerah. Untuk lebih jelas rasio capaian yang telah dicapai dapat kita lihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 2.20
Rasio Capaian Ketentraman dan Perlindungan
Masyarakat Tahun 2017-2021

No	INDIKATOR	RASIO CAPAIAN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Peningkatan Keamanan Ketertiban Masyarakat	99	99	99	99	99
2	Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan beragama serta peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan	98	99	99	99	99
3	Peningkatan Fasilitas hubungan dengan penyelenggara Pemilu antar Partai Politik, ORMAS dan LSM	86	90	90	98	99

Sumber : Bakesbangpol Kab. Gayo Lues, 2022

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti pemilu. Jumlah pemilih Kabupaten Gayo Lues yang memiliki hak suara pada pemilu 2019 adalah 64.293 pemilih, yang terdiri dari 31.841 laki-laki dan 32.452 perempuan. Persentase partisipasi pemilih dalam daftar pemilih tetap yang memilih di Kabupaten Gayo Lues

adalah 87,96 persen yang lebih tinggi dari partisipasi Provinsi Aceh sebesar 79,7 persen dan partisipasi nasional sebesar 81,69 persen.

Dari tahun 2017-2021, ada kondisi pelanggaran mengalami fluktuasi seperti kasus khalwat mengalami peningkatan yang sangat signifikan di tahun 2018 dan 2019 sebanyak 41 dan 74 kasus dimana pada tahun 2020 mengalami penurunan sebanyak 47 kasus menjadi 35 kasus pada tahun 2021, mashir mengalami penurunan menjadi 0 kasus pada tahun 2021, pelanggaran khamar mengalami penurunan dimana pada tahun 2017 sebanyak 12 kasus menjadi 10 kasus pada tahun 2021, dan pelanggaran Busana sebanyak 10 kasus ditahun 2021. Untuk lebih jelas jumlah pelanggaran Syariat Islam yang dilakukan Masyarakat dapat kita lihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 2.21
Jumlah Pelanggaran Syariat Islam Tahun 2017-2021

No	Jenis Pelanggaran (Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014)	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Mashir	Kasus	37	1	0	0	0
2	Khalwat	Kasus	20	41	74	47	35
3	Khamar	Kasus	12	16	0	13	0
4	Busana	Kasus	0	0	35	0	10
Jumlah Kasus			69	58	109	60	45

Sumber : SatPol PP dan WH Kab. Gayo Lues, 2022

Dari Tabel diatas, dapat dilihat jumlah kasus pelanggaran berdasarkan Qanun Aceh nomor 6 Tahun 2014, dimana Tahun 2019 memiliki jumlah pelanggaran sebanyak 109 kasus. Untuk menekan angka pelanggaran Syariat Islam perlu dilaksanakan sosialisasi tentang penerapan syariat Islam pada semua aspek kehidupan melalui khutbah jumat, majelis taklim, tabligh akbar atau berupa peraturan tentang penerapan syariat Islam dari Bupati.

A.6. Sosial

Pada aspek pelayanan umum penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) diselenggarakan melalui empat pilar. Pilar perlindungan dan jaminan sosial diarahkan kepada jaminan sosial bagi PMKS non produktif dan terlantar serta pemenuhan kebutuhan dasar korban pada saat dan paska kejadian bencana provinsi. Sedangkan pilar rehabilitasi sosial diarahkan guna pemenuhan kebutuhan sosial dasar PMKS yang dilaksanakan pada panti pelayanan sosial baik milik pemerintah provinsi dan masyarakat, serta penguatan kapasitas PMKS

baik lembaga, perorangan, maupun keluarga perorangan guna meningkatkan perannya dalam melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial.

1. Sarana Sosial

Panti pelayanan sosial milik Kabupaten Gayo Lues memiliki peran strategis sebagai ujung tombak yang bersentuhan langsung dalam penanganan PMKS dalam hal pemenuhan kebutuhan sosial dasar di dalam panti. Kondisi sarana prasarana panti pelayanan sosial saat ini sebanyak 4 unit dalam kondisi baik. Panti pelayanan sosial merupakan unit pelaksana teknis yang melaksanakan pelayanan rehabilitasi sosial dasar secara langsung kepada PMKS sesuai dengan standar teknis pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesejahteraan sosial. Selama kurun waktu 2017-2021 jumlah panti asuhan pemerintah dan swasta berdasarkan kapasitas dan jumlah anak dan penerima subsidi di Kabupaten Gayo Lues dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 2.22
Banyaknya Panti Asuhan Pemerintah/Swasta
Menurut Kapasitas Tahun 2017-2021

Tahun	Banyaknya Panti Asuhan	Kapasitas	Anak Asuh	Penerima Subsidi
2017	3	176	187	88
2018	3	176	187	88
2019	3	172	167	80
2020	3	172	142	74
2021	4	172	152	44

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Gayo Lues, 2022

Dilihat dari tabel diatas banyaknya Panti Asuhan Pemerintah/Swasta dari tahun 2017-2021 tidak menunjukkan perubahan yang signifikan, tapi pada tahun 2018-2019 mengalami perubahan yang signifikan hal ini menunjukkan bahwa program dan kegiatan yang ada di Dinas Sosial telah mencakup keseluruhan Panti Asuhan yang ada di Kabupayen Gayo Lues.

2. PMKS yang memperoleh bantuan sosial

Pelaksanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Gayo Lues menunjukkan berbagai kemajuan. Di bidang sosial, sejumlah 68 persen dari penyandang masalah kesejahteraan sosial telah dibantu yang terdiri dari anak yatim, penyandang disabilitas, fakir miskin, penyandang cacat berat, Orang Yang Pernah menderita Kusta (OYPMK) dan lansia. Untuk lebih jelas perbandingan jumlah PMKS yang telah dibantu tahun 2021 dapat kita lihat pada Tabel 2.23 berikut ini:

Tabel 2.23
Perbandingan Jumlah PMKS yang Telah Dibantu Tahun 2021

No	Uraian	Jumlah PMKS	Telah dibantu	Persentase
1	Anak Yatim	1450	1450	100
2	Penyandang Disabilitas	380	67	0,176
3	Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)	3102	3102	100
4	Fakir Miskin	12.855	12.855	100
5	Orang Yang Pernah menderita Kusta (OYPMK)	200	200	100
6	Orang dengan Kecacatan Berat	16	16	100
7	Lansia	1521	2	0,001
	Jumlah	19.524	17.692	71,45

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Gayo Lues, 2022

3. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial merupakan unsur masyarakat yang memberikan dukungan riil dalam penanganan PMKS disekitarnya. Peningkatan kapasitas PSKS merupakan upaya dalam mendorong kemampuan memberikan sumbangsih dan dukungan terhadap percepatan penanganan PMKS.

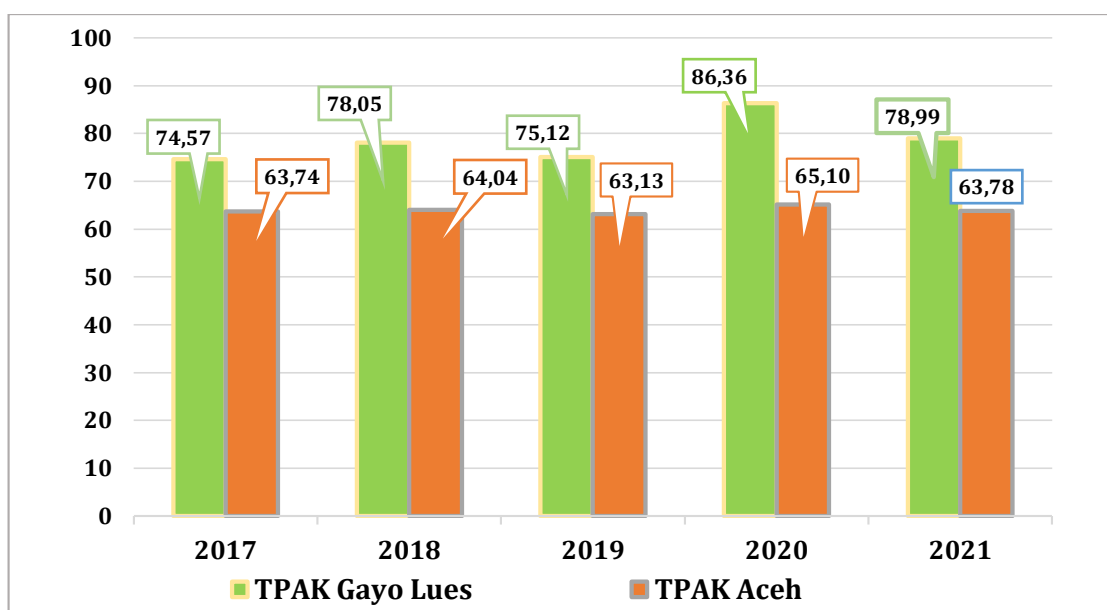
B. Urusan Pemerintahan Wajib Non-Pelayanan Dasar

B.1. Ketenagakerjaan

Sektor ketenagakerjaan merupakan bagian penting dalam pencapaian tujuan pembangunan secara menyeluruh. Hal tersebut berkaitan erat dengan meningkatnya pendayagunaan angkatan kerja, produktivitas, tingkat pengangguran terbuka serta besarnya beban ketergantungan penduduk usia non produktif terhadap penduduk usia produktif yang tersebar di Kabupaten Gayo Lues. Upaya maksimal dalam pemetaan masalah ketenagakerjaan tersebut dapat mempengaruhi keberhasilan pembangunan secara makro dan ditandai dengan pencapaian indikator ketenagakerjaan sebagai berikut:

1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Gambar 2.31
Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Aceh dan
Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017-2021 (persen)



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Gayo Lues, 2022

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari berdasarkan tahun perhitungan yang dilakukan. Semakin besar jumlah penduduk yang tergolong bukan angkatan kerja, maka semakin kecil pula nilai TPAK yang diperoleh. TPAK Kabupaten Gayo Lues sejak tahun 2018 menunjukkan tren di atas 70 persen dan di atas TPAK Provinsi Aceh. Pada tahun 2021, TPAK Kabupaten Gayo Lues merupakan yang tertinggi di Provinsi Aceh yang mencapai 78,99 persen. Kenaikan TPAK memberikan indikasi adanya kenaikan potensi ekonomi dari sisi pasokan tenaga kerja.

Dari 54.422 penduduk yang bekerja, sekitar 58,35 persen diantaranya berpendidikan SMA ke bawah. Sementara 29,40 persen memiliki tingkat pendidikan SMA/setara dan 12,25 persen memiliki tingkat pendidikan Diploma/Universitas. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan penduduk yang bekerja di Kabupaten Gayo Lues masih dibawah dari target SDGs, yaitu mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya yang tentunya dihasilkan oleh pekerja yang menempuh pendidikan dan pelatihan.

2. Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan)

Rasio Ketergantungan adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja). Rasio ketergantungan ini dapat mengukur dampak keberhasilan pembangunan kependudukan dengan melihat perubahan komposisi penduduk menurut umur yang tercermin dengan semakin rendahnya proporsi penduduk usia tidak produktif (kelompok umur 0-14 tahun dan kelompok umur ≥ 65 tahun). Semakin kecil angka rasio ketergantungan hidup akan memberikan kesempatan bagi penduduk usia produktif untuk meningkatkan produktifitasnya.

3. Produktivitas Tenaga Kerja

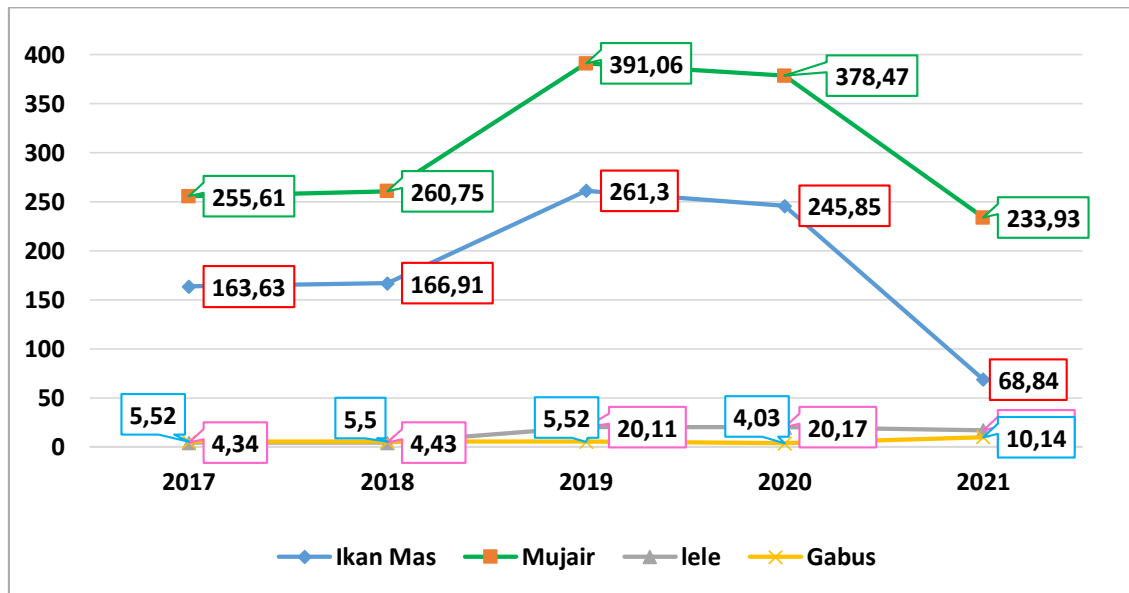
Penyerapan tenaga kerja persektor ekonomi masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 51,03 persen penduduk yang bekerja menjadikan sektor pertanian sebagai lapangan usaha utamanya. Sementara 16,74 persen di sektor industri pengolahan; 15,74 persen di sektor jasa kemasyarakatan, sosial, & perorangan; 11,84 persen di sektor perdagangan, rumah makan, & jasa akomodasi; serta 4,65 persen sisanya disektor lapangan usaha lainnya.

Meskipun secara umum jumlah tenaga kerja sektor pertanian dominan dari semua sektor, namun bila dibandingkan dengan sektor lainnya produktivitas pertanian masih jauh lebih rendah karena serapan tenaga kerja dan nilai PDRB nya lebih tinggi dibandingkan sektor lainnya. Rendahnya produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian dipengaruhi oleh berbagai faktor. Dari sisi tenaga kerja, dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pendidikan dan kualitas manajemen usaha tani. Rendahnya tingkat inovasi dan penerapan teknologi telah mengakibatkan produktivitas sangat terbatas peningkatannya atau bahkan cenderung turun pada beberapa komoditas. Kurangnya dukungan terhadap pemberdayaan petani dirasakan turut mempengaruhi tingkat produktivitas petani. Padahal, apabila produktivitas tenaga kerja pertanian tersebut dapat ditingkatkan maka kontribusi terhadap PDRB juga dapat meningkat.

B.2. Pangan dan Perikanan

Sektor pertanian dibagi menjadi 3 (tiga) subsektor dalam perhitungan PDRB Kabupaten Gayo Lues yaitu subsektor pertanian, peternakan, perburuan dan Jasa pertanian; Sub sektor kehutanan dan penebangan kayu; dan Sub sektor perikanan. Untuk produksi perikanan tahun 2017-2021 dapat kita lihat pada Gambar 2.31 berikut ini:

Gambar 2.32
Produksi Perikanan Kabupaten Gayo Lues
Tahun 2017-2021 (Ton)



Sumber : Dinas Pangan dan Perikanan Kab. Gayo Lues, 2022

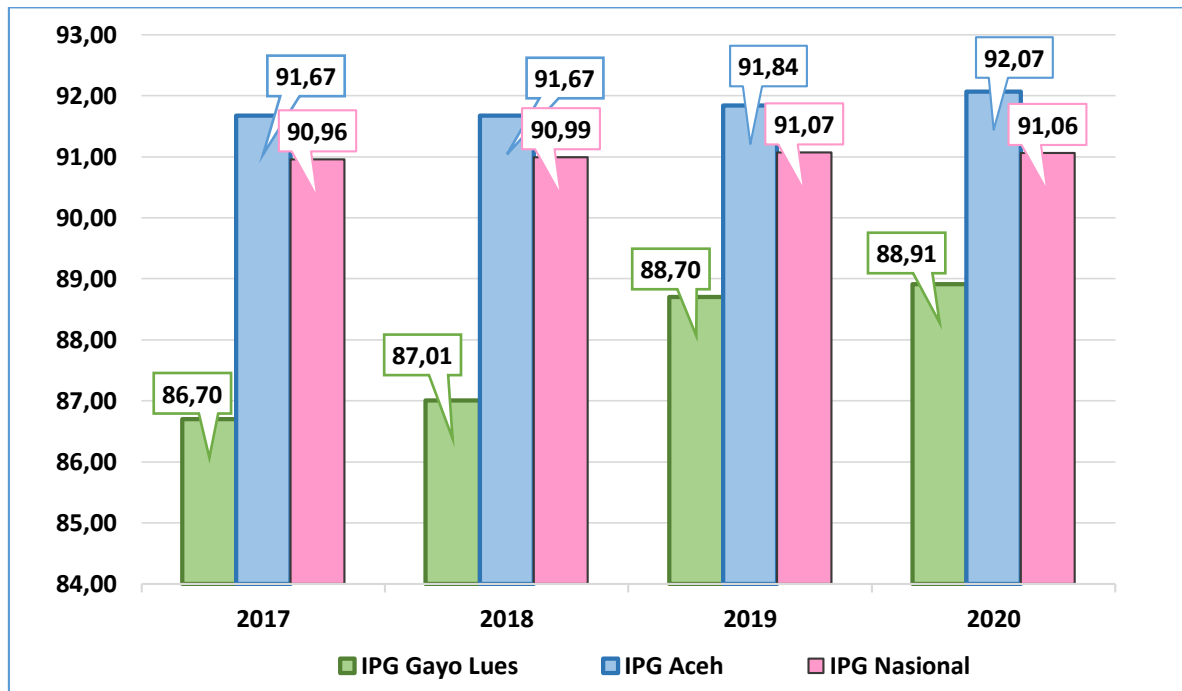
Perkembangan Produksi Perikanan Kabupaten Gayo Lues dari tahun ke tahun semakin membaik tetapi pada Tahun 2021 terjadi penurunan produksi Ikan Air Tawar Menurut Jenis Ikan sebesar 68,84 ton pada Jenis Ikan Mas, Mujair dan Lele. Untuk jenis ikan Gabus mengalami peningkatan produksi sebesar 10,14 ton. Dalam mencapai beberapa indikator pangan tersebut tidak terlepas dari beberapa peran prasarana dan sarana pangan berupa lumbung pangan di beberapa kabupaten/kota yang saat ini belum mampu dioptimalkan. Selain itu juga meskipun banyak daerah yang notabenenya merupakan daerah lumbung pangan namun beberapa desa yang mencakup di dalamnya masih dikategorikan sebagai kecamatan dan desa rawan pangan.

B.3. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1) Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) menggambarkan kualitas pembangunan manusia yang dilihat dari komponen yang sama yaitu dengan IPM yaitu Angka Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah, dan Pengeluaran Per Kapita. Perkembangan Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Gayo Lues dari tahun ke tahun semakin membaik bahkan angkanya lebih baik daripada angka nasional. IPG Kabupaten Gayo Lues tahun 2017 (86,70) dibawah Aceh (91,67) dan nasional (90,82) Kemudian tahun 2020 menjadi 88,91 dan masih dibawah Aceh (92,07) dan nasional (91,06). Seperti terlihat pada Gambar 2.32 di bawah ini.

Gambar 2.33
Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Gayo Lues
dan Aceh Tahun 2017-2020



Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, 2022

2) Proporsi Perempuan di Parlemen

Terbatasnya jumlah perempuan di lembaga legislatif merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan yang lebih memihak kepada kepentingan perempuan. Anggota parlemen perempuan harus bekerja dan berupaya lebih keras untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam mempengaruhi keputusan-keputusan politik yang menjamin hak-hak perempuan dan masyarakat.

Pendidikan Politik bagi perempuan yang aktif berpolitik dan berorganisasi pada periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 baru mencapai 15 persen, hal ini disebabkan kurangnya minat perempuan terhadap pendidikan politik, dan kedepannya dari pihak Aparatur Dinas melakukan sosialisasi terkait pentingnya pendidikan berpolitik bagi perempuan. Persentase tingkat keterwakilan perempuan lembaga Eksekutif/Legislatif pada tahun 2020 hanya 5 persen. Hal ini dikarenakan kurangnya representasi perempuan dalam bidang politik dan dipengaruhi oleh faktor budaya dan jalan pemikiran perempuan yang kurang berminat dalam bidang politik. Hal ini harus disosialisasikan bagaimana peran penting perempuan di lembaga eksekutif/legislatif.

3) Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Persentase Kekerasan terhadap perempuan yang ditangani selama Tahun 2021 mencapai 0,000030 persen dengan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan

Rencana Pembangunan Kabupaten Gayo Lues Tahun 2023-2026

sebanyak 4 orang sedangkan persentase Kekerasan Terhadap Anak yang ditangani selama Tahun 2021 mencapai 0,00013 persen dengan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan sebanyak 5 orang, dimana setiap tahunnya mengalami fluktuasi, ini dikarenakan enggan nya para korban melaporkan hal terkait kekerasan kepada pihak yang berwajib dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana. Solusi selanjutnya harus adanya kontribusi dari pihak terkait dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana lebih rensponsif terhadap kekerasan pada perempuan.

4) Persentase Perempuan di Lembaga Pemerintah

Sedangkan Partisipasi perempuan dalam Lembaga Pemerintahan sudah mengalami peningkatan hal ini terlihat dari banyaknya jumlah perempuan yang menduduki jabatan Eselon II, Eselon III dan Eselon IV pada tahun 2021 jumlah perempuan yang menduduki jabatan eselon sebanyak 167 orang dari 635 Jabatan yang terisi. Persentase Perempuan di Lembaga Pemerintah pada tahun 2021 mencapai 47,89 persen.

5) Persentase Pasangan Usia Subur

Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan kontrasepsi pada tahun 2017-2021 mencapai 84 persen, Hal ini dikarenakan bertambahnya kuantitas dan kualitas pasangan usia subur di Kabupaten Gayo lues.

B.4. Pertanian

1. Persentase Hak Milik Atas Tanah

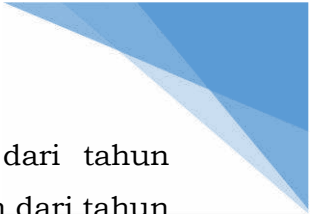
Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah/Tanah di Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017-2020 dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 2.24
Persentase Hak Milik Atas Tanah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017-2021

No	Kepemilikan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Milik Sendiri	74,95	77,88	72,31	80,92	83,80
2	Kontrak/Sewa	8,44	8,09	7,24	4,76	5,47
3	Bebas Sewa	15,77	12,72	17,32	13,53	10,45
4	Dinas	0,71	1,14	2,91	0,79	0,28
5	Lainnya	0,13	0,18	0,22	0,00	0,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Gayo Lues dan Aceh , 2022

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa Hak Milik Atas Tanah yang merupakan milik sendiri pada tahun 2021 meningkat sekitar 80,92 persen dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 83,80 persen, Kontrak meningkat dari tahun sebelumnya



sekitar 4,76 persen menjadi 5,47 persen, Bebas Sewa menurun dari tahun sebelumnya sekitar 13,53 persen menjadi 10,45 persen, Dinas menurun dari tahun sebelumnya sekitar 0,79 persen menjadi 0,28 persen dan Kepemilikan Lainnya menurun sebesar 0,22 menjadi 0,00 persen.

2. Jumlah Lahan Masyarakat Miskin Yang Bersertifikat

Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui Redistribusi dan legalisasi aset/tanah bagi masyarakat miskin/ekonomi lemah merupakan salah satu program prioritas daerah dalam mendukung reforma agraria.

3. Jumlah Penyelesaian Sengketa dan Konflik yang Di Fasilitasi

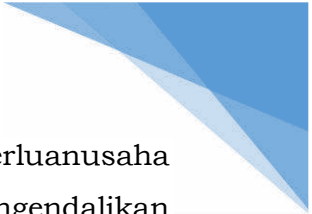
Penyelesaian konflik pertanahan dilaksanakan sesuai dengan kewenangan yang datur dalam Menurut ketentuan Lampiran Huruf J Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah, yaitu penyelesaian permasalahan tanah garapan dalam 1 (satu) kab/kota merupakan kewenangan Bupati/Walikota. Selanjutnya terdapat pula kewenangan penyelesaian oleh pemerintah pusat melalui ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, bahwa Kanwil BPN/Kantor Pertanahan mempunyai kewenangan dalam penyelesaian permasalahan sebagai berikut:

Sengketa atau Konflik yang menjadi kewenangan Kementerian (ATR) meliputi:

- a) kesalahan prosedur dalam proses pengukuran, Pemetaan dan/atau perhitungan luas;
- b) kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran penegasan dan/atau pengakuan hak atas tanah bekas milik adat;
- c) kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan/atau pendaftaran hak tanah;
- d) kesalahan prosedur dalam proses penetapan tanah terlantar;
- e) tumpang tindih hak atau sertifikat hak atas tanah yang salah satu alas haknya jelas terdapat kesalahan;
- f) kesalahan prosedur dalam proses pemeliharaan data pendaftaran tanah;
- g) kesalahan prosedur dalam proses penerbitan sertifikat pengganti;
- h) kesalahan dalam memberikan informasi data pertanahan;
- i) kesalahan prosedur dalam proses pemberian izin;
- j) penyalahgunaan pemanfaatan ruang; atau
- k) kesalahan lain dalam penerapan peraturan perundang-undangan.

4. Penyelesaian Izin Lokasi

Izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai



izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya. Dalam rangka mengarahkan dan mengendalikan perusahaan-perusahaan dalam memperoleh tanah mengingat penguasaan tanah harus memperhatikan kepentingan masyarakat banyak dan penggunaan tanah harus sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku dan dengan kemampuan fisik tanah itu sendiri.

5. Penyelesaian Penetapan Lokasi (Pemerintah)

Penetapan lokasi atas lokasi pembangunan untuk kepentingan umum ditetapkan dengan keputusan gubernur, yang dipergunakan sebagai izin untuk pengadaan tanah, perubahan penggunaan tanah dan peralihan hak atas tanah dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

6. Terintegrasinya Sistem Informasi Manajemen Pertanahan

Informasi yang terkait dengan lahan menjadi sangat penting dalam pengembangan lahan tersebut secara rapi, adil dan penggunaan yang tepat. Maka dibutuhkan Sistem Informasi Pertanahan yang efektif, efisien dan terintegrasi sehingga diharapkan dapat mengoptimalkan pelaksanaan reforma agraria.

7. Luas Tanah Objek Reforma Agraria Yang Diredistribusi

Tanah negara dan tanah HGU yang diindikasikan terlantar menjadi salah satu objek TORA yang akan diinventarisasi penggunaan dan penguasaannya dan selanjutnya akan diredistribusi dan dilegalisasi untuk kesejahteraan masyarakat. Guna mempercepat pelaksanaan TORA.

B.5. Lingkungan Hidup

1. Tersusunnya RPPLH Kabupaten Gayo Lues

Dalam penyusunan RPPLH, terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui, yakni inventarisasi lingkungan hidup, Pengolahan Data dan Informasi Hasil Inventarisasi Lingkungan Hidup, Analisis Data dan Informasi, Penentuan Target Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penyusunan Muatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sumber data dan informasi inventarisasi lingkungan hidup yang digunakan di dalam penyusunan RPPLH adalah Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD), 5 (lima) tahun terakhir, profil daerah, Daerah Dalam Angka, 5 (lima) tahun terakhir, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), 3 (tiga) tahun terakhir atau Data dan informasi hasil pemantauan kualitas lingkungan hidup, Peta Indikasi Daya Dukung dan Daya Tampung dan Data dan informasi kehutanan tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Mengingat pentingnya dokumen RPPLH ini, percepatan penyelesaian dokumen ini sangat dibutuhkan. Sampai saat ini dokumen RPPLH masih belum tersedia.



Kabupaten Gayo Lues belum ada RPPLH dan Peraturan Bupati Gayo Lues yang mengatur.

2. Tersedianya Dokumen KLHS

Landasan hukum pelaksanaan KLHS tercantum dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Menurut undang-undang tersebut, Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Sesuai UU PPLH Pasal 15 Ayat 1 Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan wilayah dan/atau Kebijakan Rencana Program.

Adapun tujuan KLHS adalah:

1. Mengintegrasikan pertimbangan lingkungan hidup dan keberlanjutan melalui penyusunan dokumen KLHS;
2. Memperkuat proses pengambilan keputusan atas KRP;
3. Mengarahkan, mempertajam fokus, dan membatasi lingkup penyusunan dokumen lingkungan yang dilakukan pada tingkat rencana dan pelaksanaan usaha/kegiatan.

3. Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah

Tujuan KLHS adalah untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau Kebijakan, Rencana dan atau Program. KLHS menghasilkan rekomendasi yang menjadi dasar bagi kebijakan, rencana dan atau pembangunan dalam suatu wilayah. Penyelenggaraan KLHS sangat penting untuk menjamin kebijakan dan rencana program yang diimplementasikan telah mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan.

4. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan hidup (IKLH) Kabupaten Gayo Lues tahun 2021 memiliki angka sebesar 77,91. Hal ini menyimpulkan bahwa status lingkungan hidup Kabupaten Gayo Lues pada Tahun 2021 berada dalam Kategori Baik. Kondisi ini memiliki makna bahwa lingkungan hidup di Gayo Lues sudah memenuhi kriteria lingkungan yang baik dan sehat sebagaimana diharapkan dalam UUD 1945 pasal 28 H ayat(1). Jika ditinjau berdasarkan indikatornya, nilai Indeks Kualitas Air Kabupaten Gayo Lues tahun 2021 mencapai 50 sedangkan hasil perhitungan Indeks Kualitas Udara Kabupaten Gayo Lues menunjukkan angka 90,85 di Tahun 2021

dan Indeks Kualitas Lahan Kabupaten Gayo Lues sebesar 100, hal ini menunjukkan tidak adanya perubahan luas wilayah hutan primer dan hutan sekunder.

Angka IKLH Kabupaten Gayo Lues tersebut merupakan angka indikatif yang masih dapat menjadi perdebatan dikarenakan keterbatasan data yang kita miliki, namun IKLH ini dapat menjadi acuan yang memberikan gambaran umum dan membantu dalam proses pengambilan kebijakan. Tentu saja diperlukan pengkajian yang lebih mendalam guna memperoleh pendekatan hasil kondisi sebenarnya yang mendekati kondisi lapangan.

5. Pengelolaan Persampahan

Sampah merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Gayo Lues, minimnya sarana dan prasarana Pendukung pengolahan sampah, jarak tempuh yang jauh menuju TPA dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam ikut serta dalam penanganan sampah menjadi faktor yang menyebabkan penanganan permasalahan sampah menjadi lambat. Pada tahun 2021 Jumlah sampah di Kabupaten Gayo Lues sebanyak 12.450,15 ton atau 49.800,60 m³, yang tertangani sebanyak 8.557,73 ton atau 34.230,92 m³ sekitar 68,74%.

B.6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Administrasi Kependudukan merupakan sebuah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan yang dilakukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Kondisi kepemilikan penduduk yang telah memiliki KTP-Elektronik dan Akta Kelahiran tahun 2017-2021 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.25.

Tabel 2.25
Kepemilikan KTP-Elektronik, Akta Kelahiran dan
Nikah Penduduk Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Penduduk yang Telah Memiliki KTP-Elektronik	%	99,75	99,49	98,32	98,74	90,51
2	Kepemilikan Akta Kelahiran	%	66,01	71,35	92,98	87,74	98,54

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2022

1. Persentase Penduduk yang Telah Memiliki KTP-Elektronik

Dari tahun 2017 sampai dengan 2021 persentase penduduk yang memiliki KTP elektronik mengalami penurunan. Pada tahun 2017 sebanyak 99,75 persen

penduduk sudah memiliki KTP elektronik, sementara pada tahun 2021 menurun menjadi 90,51 persen.

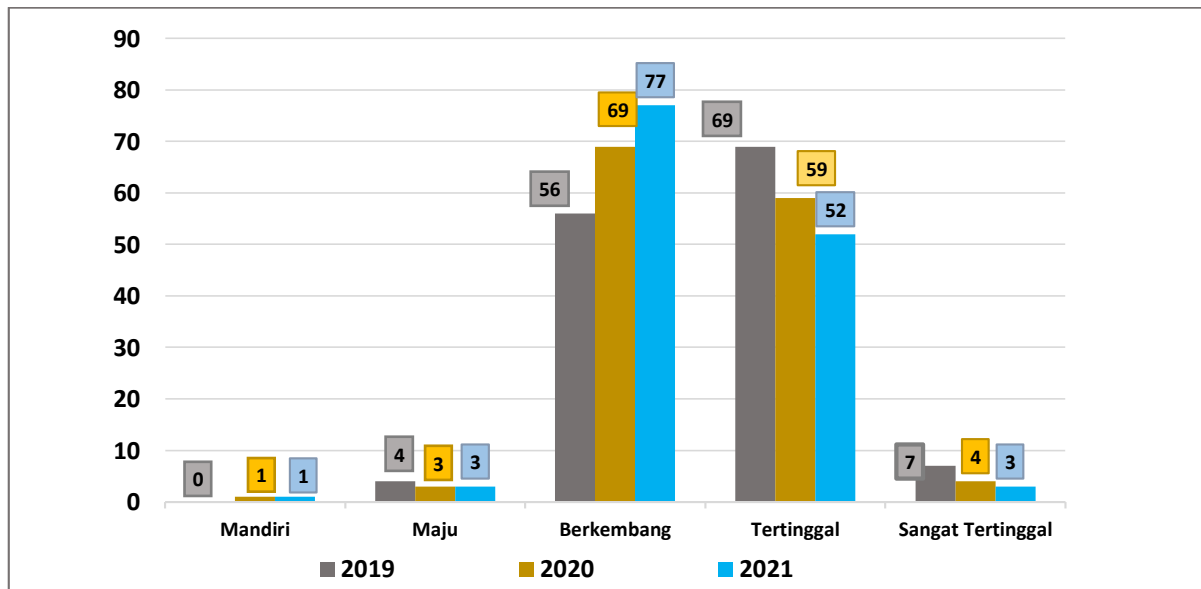
2. Persentase Bayi yang Memiliki Akta Kelahiran

Pencatatan kelahiran merupakan wujud pengakuan negara tentang status individu, status perdata dan status kewarganegaraan seseorang. Namun belum semua orang tua melaporkan kelahiran anaknya kepada pemerintah. Sepanjang tahun 2017-2021, persentase kepemilikan akte kelahiran terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2017, hanya 66,01 persen bayi yang memiliki akta kelahiran, meningkat menjadi 98,54 persen di tahun 2021.

B.7. Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong

Dalam rangka mengurangi jumlah desa tertinggal dan meningkatkan jumlah desa mandiri, Kementerian Desa PDTT meluncurkan Indeks Desa Membangun (IDM) melalui Permendesa PDTT Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun. Perkembangan status desa di Kabupaten Gayo Lues pada tahun 2017-2021 dapat dilihat dalam Gambar 2.33 di bawah ini.

Gambar 2.34
Status Desa di Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017-2021



Sumber : DPMK Kab. Gayo Lues, 2022

Dari Gambar 2.33 di atas, terlihat bahwa status desa yang sangat tertinggal dan tertinggal menurun dari tahun 2020 ke tahun 2021. Sedangkan status desa berkembang, maju, dan mandiri terus meningkat di tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020.

1) Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Desa telah dilakukan melalui: 1) pelatihan perencanaan pembangunan masyarakat kampung (KMKG)

Rencana Pembangunan Kabupaten Gayo Lues Tahun 2023-2026

yang diikuti oleh kader posyandu, kader KMKG, kader P3MG; 2) pelatihan manajemen pemerintah desa. Selanjutnya, pendistribusian sarana kerja kantor geucik untuk Kampung telah dilakukan untuk meningkatkan fungsi dan kinerja aparat desa. Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Gayo Lues tahun 2017-2020 dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 2.26
Jumlah Kelompok Binaan LPM Kabupaten Gayo Lues
Tahun 2017-2020

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Satuan	2017	2018	2019	2020
Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	Kelompok	18	18	20	22

Sumber : DPMK, 2021

Dilihat dari tabel di atas, maka rata-rata kelompok binaan LPM Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017-2020 mengalami peningkatan setiap pada tahun 2016-2017 dan 2018-2019. Meskipun pada tahun 2017-2018 tidak mengalami peningkatan hal ini menunjukkan bahwa Kelompok Binaan LPM masih dapat ditingkatkan melalui pelatihan perencanaan pembangunan Masyarakat Kampung (KMPG).

2) LPM Aktif dan Berprestasi

Lembaga pemberdayaan Masyarakat Desa atau Gampong (LMPD/LMPG) dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud mempunyai tugas menyusun Rencana Pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan mengendalikan hasil pembangunan, pelatihan peningkatan kapasitas LPMG/Tahun. Adapun jumlah LPM aktif di Kabupaten Gayo Lues pada tahun 2020 sebanyak 16,18 persen aktif. hal ini menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya sebanyak 14,71 persen. Sedangkan Jumlah LPM berprestasi di Kabupaten Gayo Lues sebesar 16,18 persen meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 14,71 persen.

3) PKK Aktif

PKK aktif dari tahun 2020 sebanyak 100 persen dari rata-rata jumlah kelompok yang aktif sebesar 68,38 persen. Untuk meningkatkan peran aktif PKK di setiap kampung harus diupayakan pembinaan yang lebih intensif dari TP PKK Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan. Khususnya TP PKK kecamatan lebih sering melakukan kunjungan pembinaan ke kampung di wilayah kecamatan setempat dan dilakukan juga melalui pelatihan.

4) Posyandu Aktif

Keterlibatan atau keikutsertaan masyarakat dalam bidang kesehatan dapat diukur dari berbagai segi salah satunya dapat dilihat dari aspek peran serta dalam membina kampung siaga aktif, jumlah pos pelayanan terpadu (Posyandu) di Kabutem Gayo Lues tidak mengalami perubahan dari tahun 2020 yaitu 100 persen.

5) Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan masyarakat

Untuk kegiatan fisik Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat. Adapun persentase Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat di Gayo Lues adalah 33,08 persen hal ini berdasarkan realisasi yang dilaporkan oleh DPMK Kabupaten Gayo Lues Tahun 2020.

B.8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Keluarga Berencana (KB) bertujuan untuk mewujudkan keluarga kecil yang berkualitas yang menciptakan rasa aman, tentram, dan harapan masa depan yang lebih baik. Selain itu, KB juga merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk meningkatkan ketahanan keluarga, kesehatan, dan keselamatan ibu, anak, serta perempuan. Total Fertility Rate (TFR) merupakan parameter fertilitas untuk mengetahui angka kelahiran total per wanita subur (15-49) tahun. Nilai TFR yang semakin rendah menunjukkan makin terkendalinya jumlah kelahiran penduduk.

1) Rasio Penyuluh Kampung KB

Rasio Penyuluh Kampung KB pada periode tahun 2020 mencapai 3,45 persen, hal ini dikarenakan kurangnya tenaga pendamping dalam memberikan penyuluhan di desa-desa terpencil.

2) Persentase KB Aktif

Peserta KB yang aktif pada periode tahun 2020 dengan persentase mencapai 80,31 persen. Hal ini dikarenakan sadarnya para peserta dalam menggunakan KB. Terjadinya penurunan peserta KB aktif antara lain disebabkan karena keyakinan sebahagian masyarakat akibat efek samping penggunaan alat kontrasepsi dan rendahnya pemakaian alat kontrasepsi MKJP. Disamping itu, belum adanya kebijakan pengendalian penduduk di provinsi menyebabkan kurangnya perencanaan yang komprehensif dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Gayo Lues.

3) Persentase Peserta KB Baru

Peserta KB yang baru pada periode tahun 2021 mencapai 80,72 persen. Hal ini dikarenakan faktor kuantitas dan kualitas peserta KB.

4) Jumlah Aseptor KB

Jumlah Aseptor KB di Kabupaten Gayo Lues pada periode tahun 2021 mencapai 119,26 persen. Hal ini dikarenakan telah maksimalnya pelayanan yang diberikan oleh pendamping.

5) Pusat Informasi, Konseling dan Konsultasi Pelayanan KB

Pusat Informasi, Konseling, dan Konsultasi bagi pelayanan KB dengan tenaga profesional pada periode tahun 2021 di angka 0 persen.

B.9. Perhubungan

Semenjak Tahun 2016, Kabupaten Gayo Lues sudah berusaha meningkatkan pelayanan transportasi yang ada dengan transportasi udara. Sepanjang Tahun 2019 Sekitar 47 armada tercatat melayani trayek antar kota dalam provinsi (AKDP) dan antar kota antar provinsi (AKAP) menuju Blangkejeren dari Banda Aceh, Medan, Kutacane, Takengon dan Aceh. Semenjak tahun 2016 Susi Air telah beroperasi di Kabupaten Gayo Lues. Untuk Transportasi udara Susi Air adalah salah satunya maskapai penerbangan menuju Gayo Lues yang melayani rute :

- Banda Aceh – Blangkejeren (PP)
- Medan – Blangkejeren (PP)

Untuk melihat jumlah penerbangan pertahunnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.27
Jumlah Penerbangan di Kabupaten Gayo Lues
Tahun 2017-2021

Tahun	Pesawat		Penumpang	
	Berangkat	Datang	Berangkat	Datang
2017	137	137	789	738
2018	98	100	475	392
2019	98	100	475	392
2020	96	96	288	101
2021	96	96	384	91

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Gayo Lues, 2022

Pemerintah Kabupaten Gayo Lues pada periode 2017-2021 telah terjadi perubahan yang sangat signifikan terhadap kemajuan pembangunan berbagai bidang di Kabupaten Gayo Lues diantaranya pembangunan dibidang perhubungan, antara lain pembangunan sarana pelayanan transportasi darat (pembangunan terminal, pos perbatasan, pelayanan armada angkutan bus sekolah, angkutan perdesaan dan pembangunan halte), adanya pendidikan pelatihan formal, peningkatan jaringan telekomunikasi perdesaan, Pengumpulan database angkutan kendaraan bermotor, perlengkapan jalan/pengendalian dan pengamanan lalu lintas

Rencana Pembangunan Kabupaten Gayo Lues Tahun 2023-2026

yaitu pengadaan rambu-rambu lalu lintas, pengadaan Marka Jalan, Pemasangan pagar pengaman jalan, pemasangan patok tikungan, pengadaan cermin tikungan.

Ditinjau dari segi aksesibilitas wilayah, sesuai dengan kondisi geografis Kabupaten Gayo Lues yang berada di daerah pedalaman di tengah gugusan pegunungan, transportasi darat menjadi andalan dan sebagai urat nadi penghubung antara Gayo Lues dan daerah luar dalam meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat.

Selain dengan transportasi darat, sebenarnya telah ada upaya pemerintah untuk menghubungkan Gayo Lues dengan daerah luar melalui udara. Saat ini telah beroperasi sebuah landasan udara yang kapasitasnya masih sebatas untuk didarati pesawat berbadan kecil dengan panjang landasan yang telah dibangun sepanjang 80 meter. Kondisi terakhir, sebuah maskapai perintis telah beroperasi dengan melayani rute penerbangan Banda Aceh Blangkejeren Medan (Pulang Pergi) dengan frekuensi satu rute penerbangan sebanyak 2 (dua) kali dalam seminggu. Untuk melihat aspek perhubungan kabupaten Gayo Lues pertahunnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.28
Aspek Perhubungan Kabupaten Gayo Lues
Tahun 2017-2021

NO	ASPEK	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021
1	Rasio ijin trayek	Indeks	8 Indeks	0,02 Indeks	0,02 Indeks	0,02 Indeks	0,01 Indeks
2	Jumlah Uji Kir Angkutan Umum	Unit	30 Buah	147 Buah	28 Buah	8 Buah	4 Buah
3	Pemasangan Rambu-rambu	Persen	N/A	60 %	60 %	74 %	0 %
4	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	Orang	8 Orang	81080 Orang	104390 Orang	990 Orang	19.800 Orang
5	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	Unit	1 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Gayo Lues, 2022

Perusahaan Bus Umum yang melayani trayek antar kota atau dalam provinsi untuk tahun 2021 sebanyak 165 armada meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya berjumlah 105 armada. Sedangkan Pelabuhan Udara atau bandara di Kabupaten Gayo Lues hanya satu yaitu Bandara Patiambang dan jumlah terminal Bus ada 3 yaitu Terminal Blangkejeren, Terminal Terpadu dan Terminal Kuta panjang. Banyaknya kendaraan Motor Tahun 2021 roda empat atau lebih sebanyak 1.616 unit dan roda dua atau tiga sebanyak 11.431 unit. Perusahaan atau pemilik Bus Angkutan Barang yang melayani trayek antar provinsi, kecamatan dan



pedesaan tahun 2021 sebanyak 13 perusahaan dengan jumlah Dumtruck sebanyak 55 unit dengan daya angkut pertahunnya 381,04 ton.

B.10. Komunikasi dan Informatika

Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Gayo Lues baru seumur jagung dibentuk berdasarkan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat Kabupaten Gayo Lues sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2017 tentang perubahan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2016. Maka Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Gayo Lues belum berjalan secara optimal sehingga Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Gayo Lues perlu perhatian khusus dari semua pihak dalam rangka menyelenggarakan Visi dan Misi Bupati Gayo Lues di Bidang Komunikasi, Informatika dan Persandian.

Berdasarkan persoalan di atas, masyarakat Kabupaten Gayo Lues sangat mengharapkan dan membutuhkan sarana dan prasarana komunikasi, informasi sebagai sarana informasi yang dapat menumbuh kembangkan di bidang informasi sebagai alat komunikasi yang baik, maka penyelenggaraan/operasional komunikasi, informatika dan persandian secara umum masih belum terlaksana secara optimal. Banyak persoalan yang belum dapat diselesaikan dan menjadi permasalahan secara tugas pokok dan fungsi.

Pada Tahun 2021, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Gayo Lues telah menyediakan Videotron. Ini merupakan salah satu langkah yang ditempuh untuk menarik perhatian masyarakat sebagai media informasi atau penyuluhan tentang kebijakan pemerintah secara langsung kepada orang-orang yang lalu lalang di jalanan. Cakupan layanan Komunikasi berupa Videotron ada 3 titik, yaitu 1 *outdoor* di Simpang Empat Jalan Blower dan 2 *indoor* di Bale Musara dan Ruang Sidang DPRK Gayo Lues. Hal ini menggambarkan bahwa sarana dan prasarana di Kabupaten Gayo Lues yang sudah terpenuhi.

B.11. Persandian

Selaras dengan peningkatan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, perubahan lingkungan strategik persandian, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka kegiatan persandian mengalami banyak perubahan. Sektor persandian perlu mendapat pengembangan serius ke depan terkait pengamanan informasi pemerintah. Pengembangan tersebut meliputi aspek pemanfaatan persandian di lingkungan instansi pemerintah, pengembangan organisasi, dan



pengembangan teknologi persandian yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Isu permasalahan terkait persandian adalah: 1)Perlu adanya peningkatan sistem keamanan informasi dalam rangka keotentikan informasi maupun informasi klarifikasi, serta 2) Terbatasnya sumber daya di bidang persandian saat ini, baik dari segi sumber daya manusia maupun sumber daya perangkat/peralatan persandian.

Sejalan dengan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks serta perkembangan teknologi yang sangat pesat dewasa ini maka telekomunikasi wajib dikembangkan agar menjadi wahana yang dapat diandalkan. Hal ini sangat penting guna mendukung kelancaran kegiatan ekonomi dan peneyelenggaraan pembangunan. Selanjutnya, keadaan sosial ekonomi rumah tangga dapat juga digambarkan melalui kepemilikan alat komunikasi dan informasi. Semakin banyak penduduk yang memiliki alat komunikasi dan informasi menunjukkan semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut. Kondisi kepemilikan alat komunikasi dan informasi selama ini sudah banyak beralih dari telepon rumah ke telepon selular.

B.12. Statistik

1. Statistik Sektoral Daerah

Keberadaan Statistik Sektoral Daerah sangat dibutuhkan untuk memperkuat data dalam merumuskan berbagai kebijakan dan program pembangunan daerah dari berbagai bidang kegiatan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan statistik sektoral pada lingkup daerah masing-masing. Selanjutnya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia (SDI) menyatakan tujuan dari pelaksanaan Satu Data Indonesia (SDI) yang turunannya dapat dilaksanakan pada skala Pemerintah adalah untuk:

- a. Memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi instansi pusat dan daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan evaluasi dan pengendalian pembangunan.
- b. Mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan.
- c. Mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada data.

d. Mendukung sistem statistik nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Geospasial

Geospasial atau ruang kebumihantoran adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi satu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu. Selain statistik sektoral, geospasial juga memegang peranan penting dalam mendukung berbagai kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Geospasial dapat mengambil peran dalam pembangunan dari berbagai sektor. Informasi tentang geospasial menjadi bahan pendukung dalam pengambilan keputusan dan kebijakan tertentu oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang berbasis spasial.

Informasi Geospasial (sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011) adalah informasi yang sangat berharga dan dapat digunakan serta dimanfaatkan untuk mengelola Sumber Daya Alam (SDA), penyusunan rencana tata ruang dan perencanaan lokasi investasi. Selain itu informasi geospasial juga dapat digunakan untuk menentukan garis batas wilayah, pertanahan, pertahanan keamanan, dan lain-lain yang semuanya dapat dijadikan dalam penyusunan Kebijakan Satu Peta (KSP) yang merupakan solusi sempurna untuk mengatasi tumpang tindih izin penggunaan lahan.

Oleh karena itu ketersediaan informasi geospasial yang akurat dapat mendukung dalam mengambil keputusan yang efisien, efektif dan komunikatif. Selembar peta mengandung beragam informasi yang menyangkut aspek keruangan. Informasi geospasial sangat penting untuk mendukung program pembangunan daerah dan nasional.

B.13. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

a) Koperasi

Koperasi merupakan lembaga ekonomi masyarakat yang cukup strategis dalam peningkatan perekonomian rakyat. Namun sayangnya koperasi belum berkembang menjadi alat perjuangan ekonomi rakyat terutama di pedesaan. Belum berkembangnya koperasi sebagaimana diharapkan diantaranya disebabkan oleh kurangnya kepercayaan masyarakat atas koperasi. Namun demikian, kinerja koperasi ditinjau dari sisi koperasi aktif yang mengalami perbaikan.

b) Koperasi Aktif

Rasio Capaian Jumlah Koperasi aktif dan tidak aktif di Kabupaten Gayo Lues 2017-2021 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 2.29
Rasio Koperasi Aktif dan Tidak Aktif Kabupaten Gayo Lues
Tahun 2017-2021

Tahun	Satuan	Koperasi Aktif
2017	Persen	60
2018	Persen	59
2019	Persen	54
2020	Persen	54
2021	Persen	6

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM, 2022

Penyebab tidak aktifnya koperasi diantaranya adalah: 1) tidak melaksanakan kewajibannya sebagai lembaga ekonomi koperasi, 2) rendahnya kualitas dan kuantitas SDM pembina koperasi.

Dari data tersebut menggambarkan bahwa jumlah Koperasi tidak aktif masih relatif banyak. Faktor penyebab tidak aktifnya koperasi adalah disebabkan oleh:

- 1) Tidak melaksanakan kewajibannya sebagai lembaga ekonomi koperasi, diantaranya tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), tidak melaksanakan kegiatan usaha, tidak menyampaikan laporan kegiatannya ke Dinas Teknis karena masih rendahnya kesadaran pengelola koperasi serta masyarakat/anggota koperasi terhadap manfaat berkoperasi;
- 2) Rendahnya kualitas dan kuantitas SDM pembina Koperasi.

Perkembangan UMKM saat ini belum menunjukkan kapasitas mereka sebagai pelaku usaha yang kuat dan berdaya saing, ini dikarenakan faktor penyebabnya antara lain :

1. Kualitas produk UMKM belum mampu bersaing dengan produk unggulan dari daerah lain;
2. Terbatasnya akses kepada sumberdaya produktif terhadap bahan baku;
3. Terbatasnya sarana dan prasarana serta informasi pasar;
4. Rendahnya kualitas dan kompetensi kewirausahaan sumberdaya manusia;
5. Terbatasnya dukungan modal; dan
6. Kondisi Pandemi Covid-19.

c) Jumlah UMKM

Sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) juga merupakan salah satu sektor yang cukup strategis dalam penyerapan tenaga kerja dan peningkatan usaha-usaha produktif bagi masyarakat. Persentase Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2020 di Kabupaten Gayo Lues sebesar 15 persen mengalami penurunan yang sangat signifikan sebesar 34,49 persen dari tahun sebelumnya yang sebesar 49,49 persen.

B.14. Penanaman Modal

1. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di semua wilayah termasuk Aceh peran swasta sangat menentukan. Kemajuan wilayah tersebut sangat didukung oleh kehadiran pihak swasta untuk melakukan investasi di berbagai sektor sehingga akan meningkatkan keterbukaan perdagangan dan memberikan ruang gerak yang cukup lebar terhadap peningkatan semua sektor bukan hanya pada sektor riil semata namun juga berimplikasi langsung terhadap sektor jasa. Perkembangan investasi di Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh masih menunjukkan kondisi yang belum cukup baik bila dibandingkan dengan provinsi lain termasuk Sumatera Utara sebagai provinsi tetangga. Hal tersebut ditandai dengan berfluktuatifnya jumlah investor baik skala nasional maupun asing.

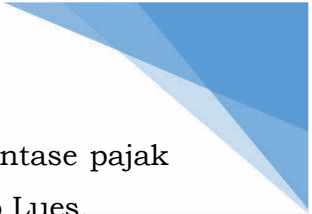
Dalam Rangka Penanaman Modal Asing menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, Pada Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Gayo Lues memiliki 10 Perusahaan (PMDN/PMA) dan Tahun 2021 ada 11 Perusahaan (PMDN/PMA). Dari segi kebijakan perizinan daerah yang pro investasi, sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Gayo Lues telah melakukan berbagai upaya untuk mendukung kemudahan berinvestasi. Nilai Investasi Perusahaan PMA dan PMDN Tahun 2020-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.30
Nilai Investasi Perusahaan PMA dan PMDN Tahun 2020-2021

Tahun	PMA		PMDN	
	Jumlah Perusahaan	Nilai Investasi (Rp)	Jumlah Perusahaan	Nilai Investasi (Rp)
2020	6	1.650.240.658	4	1.003.100.000.
2021	6	6.460.500.455	5	43.027.400.000

Sumber : Dinas Penanaman Modal Kab. Gayo Lues, 2022

Secara garis besar, tingkat realisasi investasi dapat diukur melalui tingkat persentase pajak suatu daerah terhadap pendapatan aslinya. Jika persentase tinggi maka bisa disimpulkan tingkat investasinya juga tinggi, begitu pula sebaliknya.



Dalam konteks ini, terdapat kecenderungan stagnansi dalam hal persentase pajak daerah terhadap total Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Gayo Lues.

B.15. Kepemudaan dan Olahraga

1. Kepemudaan

Pemuda merupakan salah satu pilar pembangun kehidupan bangsa. Keberadaan pemuda sebagai aset dan penerus cita-cita bangsa di masa depan harus menjadi salah satu perhatian utama pemerintah dalam setiap pembangunan yang dilakukan. Bangsa yang kuat tidak hanya ditopang oleh kehadiran pertahanan yang kuat tapi juga adanya pemuda-pemuda yang kuat dalam berbagai sektor baik dalam sektor ekonomi, maupun pendidikan.

Menghadapi kompleksnya permasalahan bangsa menghadapi era revolusi industri 4.0, peranan pemuda Indonesia dan Aceh khususnya terlihat nyata melalui berbagai usaha-usaha kreatif yang dilakukan dalam menggerakkan dan meningkatkan ekonomi bangsa melalui bisnis-bisnis *startup*. Kehadiran wirausaha muda melalui bisnis startup telah terbukti mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi bangsa. Tidak hanya itu, keberadaan pemuda dengan berbagai prestasi juga telah ikut mengharumkan nama bangsa di berbagai kancah internasional baik dalam skala ASEAN, ASIA, maupun global.

2. Keolahragaan

Olahraga merupakan suatu fenomena yang mendunia dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Bahkan melalui olahraga dapat dilakukan *National Character Building* suatu bangsa, sehingga olahraga menjadi sarana strategis untuk membangun kepercayaan diri, identitas bangsa, dan kebanggaan nasional. Berbagai kemajuan pembangunan di bidang keolahragaan yang bermuara pada meningkatnya budaya dan prestasi olahraga. Hal ini antara lain ditunjukkan oleh:

- (1) Tumbuhnya kesadaran masyarakat dalam melakukan kegiatan olahraga
- (2) Partisipasi masyarakat dalam melakukan kegiatan olahraga

Dengan demikian Pembudayaan dan Pembinaan Prestasi Olahraga mencakup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi. Ketiga lingkup olahraga ini dilakukan melalui pembinaan dan pengembangan olahraga secara terencana, sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan, yang dimulai dari pembudayaan dengan pengenalan gerak pada usia dini, pemassalan dengan menjadikan olahraga sebagai gaya hidup, pembibitan dengan penelusuran bakat dan pemberdayaan sentra-sentra keolahragaan, serta peningkatan prestasi dengan

pembinaan olahraga unggulan nasional sehingga olahragawan andalan dapat meraih puncak pencapaian prestasi.

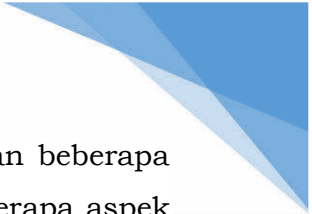
Organisasi olahraga merupakan wadah berkumpulnya para atlet berbagai cabang olahraga yang dibina oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gayo Lues. Di Kabupaten Gayo Lues mempunyai 4 (empat) fasilitas olahraga yaitu : GOR Blangsere, Stadion Pacuan Kuda Buntul Nege, Kompleks Stadion Seribu Bukit dan GOR Jaya Raya. Sedangkan Untuk jumlah lapangan olahraga yang dimiliki Kabupaten Gayo Lues sebanyak 5 (lima) jenis lapangan olahraga yaitu Lapangan Sepak Bola sebanyak 11 lapangan, Lapangan Basket sebanyak 38 lapangan, Lapangan Volly sebanyak 31 lapangan, Lapangan Bulu Tangkis sebanyak 10 Lapangan dan Kolam Renang sebanyak 1 unit. Untuk Organisasi Olahraga yang terdaftar di Kabupaten Gayo Lues pada tahun 2021 sebanyak 19 organisasi. Untuk organisasi olahraga di Kabupaten Gayo Lues tahun ketahunnya terus meningkat hal ini dikarenakan event-event olahraga secara rutin dilaksanakan setiap tahunnya yang meningkatkan antusias masyarakat dalam membentuk klub olahraga mulai dari tingkat desa dan kecamatan.

Pada Tahun 2021, Persentase organisasi pemuda yang aktif sebesar 91 persen, Persentase wirausaha muda sebanyak 67 persen, cakupan pembinaan olahraga sebesar 80,5 persen, Cakupan pembinaan atlet muda sebesar 65,9 persen dan jumlah atlet berprestasi sebanyak 47 orang. Untuk melihat Jumlah Organisasi, Club dan Gedung Olahraga di Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.31
Jumlah Organisasi, Club dan Gedung Olah Raga
di Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017-2021

NO	ASPEK	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	Persen	90	91	90	91	91
2	Persentase Wirausaha Muda	Persen	10	10	66,8	66,9	67
3	Cakupan Pembinaan Olahraga	Persen	83,3	83,3	80	80,4	80,5
4	Cakupan Pembinaan Atlet Muda	Persen	1,6	8,3	65,5	65,7	65,9
5	Jumlah Atlet Berprestasi	Orang	13	46	46	47	47
6	Jumlah Prestasi Olahraga di Tingkat Provinsi	Orang	2	44	45	45	46

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga, 2022



Dari Tabel di atas dapat dilihat, diketahui bahwa ada peningkatan beberapa aspek keolahragaan di Kabupaten Gayo Lues. Hal ini dikarenakan beberapa aspek bidang olahraga yang memiliki potensi dibina dan diberi dukungan penuh dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gayo Lues. Diharapkan dari setiap cabang olahraga binaan akan lahirnya bibit-bibit unggul baru.

B.16. Kebudayaan

Budaya sebuah bangsa akan menentukan nasib suatu bangsa dimasa yang akan datang. Nilai-nilai budaya ini diwariskan dari generasi ke generasi. Nilai-nilai dan karakteristik suku dan bahasa, karakteristik sosial budaya masyarakat, sangat dipengaruhi oleh keragaman suku/anak suku dan bahasa di Kabupaten Gayo Lues.

1. Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

Sejak pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) menyebar, pemerintah di berbagai daerah mulai memberlakukan protokol kesehatan secara ketat, seperti peraturan menjaga jarak dan pembatasan sosial berskala besar yang pastinya mengganggu perhelatan seni dan sejumlah aspek lainnya. Maka Pada Tahun 2021, tidak ada *event* yang dilaksanakan di Kabupaten Gayo Lues. Selain wisata yang sudah tradisi dan mendunia masih banyak wisata yang belum tersentuh yang masih perlu dikembangkan oleh Gayo Lues itu sendiri, seperti arung jeram yang adanya di Kampung Inggris Agusen dan bejamu saman yang dilaksanakan setiap tahunnya oleh kampung namun minim dari pemberitaan.

Kegiatan rutin dilaksanakan oleh pemerintah daerah berkaitan dengan promosi pariwisata adalah promosi budaya dan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri, pengembangan objek pariwisata unggulan, dan fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah. Hasil yang tidak kalah pentingnya dalam pembangunan pariwisata di Gayo Lues adalah diakuinya Tari Saman sebagai Warisan Budaya Dunia Tak Benda oleh UNESCO. Disamping itu, juga telah dicetaknya Buku Kamus Gayo dan partisipasi rutin Kabupaten Gayo Lues di setiap agenda Pekan Kebudayaan Aceh sebagai wadah pengenalan dan promosi pariwisata dan kebudayaan Gayo Lues. Selain wisata yang sudah tradisi dan mendunia masih banyak wisata yang belum tersentuh yang masih perlu dikembangkan oleh Gayo Lues itu sendiri, seperti arung jeram yang adanya di Kampung Inggris Agusen dan bejamu saman yang dilaksanakan setiap tahunnya oleh kampung namun minim dari pemberitaan.

Pariwisata Budaya dalam bentuk situs banyak terdapat di berbagai kecamatan di Kabupaten Gayo Lues. Kota Blangkejeren sebagai ibukota pemerintahan dapat dijadikan pusat wisata budaya dan selanjutnya disiapkan paket wisata budaya ke

Putri Betung dan Kuta Panjang. Wisata budaya yang bersifat sejarah (situs) tentunya perlu diperkaya dengan atraksi budaya yang dipusatkan di Kecamatan Kuta Panjang dengan atraksi utama Pacuan Kuda. Untuk melihat Jumlah Sanggar Tari di Kabupaten Gayo Lues Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.32
Jumlah Sanggar Tari di Kabupaten Gayo Lues Tahun 2021

No	Nama Sanggar	Jenis Kesenian	Lokasi
1	Rempelis Mude	Saman, Rapa'i	Dinas Pariwisata Kab. GayoLues
2	Buraq Terbang	Tari Tradisional dan Kreasi	Kp. Badak, Kec. Dabun Gelang
3	Rajawali	Saman	Kp. Pepalan, Kec. Dabun Gelang
4	Dabus Badak	Dabus	Kp. Badak, Kec. Dabun Gelang
5	Beringin Rebung Rige	Saman	Kp. Rige, Kec. Dabun Gelang
6	Ungke Rimang Sanggar SDN 1 Blangkejeren	Saman	Kec. Blangkejeren
7	Sena Rebung	Saman, Bines	Kec. Dabun Gelang
8	Maghfirah	Tari, Marhaban	Blangkejeren
9	Kutelintang	Tari Kreasi, Marhaban	Blangkejeren
10	Mangga Rebung	Saman	Rerebe, Kec. Dabun Gelang
11	Uluh Rebung	Marhaban	Kec. Blangkejeren
12	Beringin Sejuk/ SMAN 1 Rikit Gaib	Tari, Vokal Grup, Tari Kreasi	Kecamatan Rikit Gaib
13	Beringin Sejuk	Saman, Bines, Tari Kreasi	Kec. Rikit Gaib
14	Uluh Rebung	Tari Tradisional dan Kreasi	Kec. Putri Betung
15	Rempelis Gayo	Tari Tradisional dan Kreasi	Kec. Putri Betung
16	Bujang Serbang	Saman	Kec. Blangkejeren
17	Senin Fajar/SMA N 1	Saman, Bines dan Kreasi	Kec. Blangkejeren
18	Kecapi Leuser	Saman, Bines dan Kreasi	Kec. Blangkejeren
19	Pertik	Saman	Kec. Pining
20	Tampuk Manis	Saman, Bines dan Kreasi	Kec. Blangkejeren
21	Bujang Juwere	Saman	Kec. Terangun
22	Malem Dewa	Saman	Kec. Terangun
23	Yan Mehen	Saman, Bines dan Kreasi	Kec. Putri Betung

Sumber: Dinas Pariwisata Kab. Gayo Lues, 2022



Penyelenggaraan festival seni budaya merupakan bagian dari upaya Pemerintah Aceh untuk melakukan promosi guna memperkenalkan budaya Gayo kepada masyarakat Lokal secara umum dan wisatawan secara khusus. Tari saman sudah ditetapkan dan diakui UNESCO sebagai warisan Budaya Dunia Tak Benda sejak 24 November 2011 dengan kriteria warisan budaya yang memerlukan perlindungan mendesak. Tari saman merupakan warisan budaya masyarakat Gayo yang dapat dilacak sampai abad ke-13 yang kemudian dikembangkan oleh Syekh Saman dan berisi tentang pesan moral.

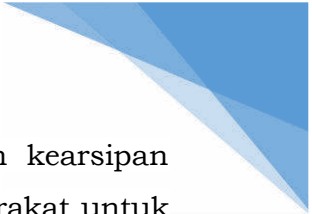
Tari saman tersebut dilakukan oleh anak laki-laki dengan jumlah pemain ganjil, duduk diatas tumit atau berlutut pada satu baris yang rapat. Pelatih atau pemimpin, disebut pengangkat duduk ditengah garis dan memimpin nyanyian ayat-ayat mengandung pesan tentang tradisi, pembangunan, agama, saran, sarkasme, humor bahkan roman. Tari saman tersebut dikenalkan oleh Bupati ke-2 Kabupaten Gayo Lues H.Ibnu Hasyim,S.Sos,.M.M sehingga dia sering diundang ke luar negeri untuk melakukan wawancara dan pertunjukan mengenai Tari saman tersebut. Pada Tahun 2021 Kabupaten Gayo Lues tidak melaksanakan penyelenggaraan festival seni dan budaya disebabkan pandemi Covid-19.

B.17. Perpustakaan

Perpustakaan sebagai infrastruktur dan aksesibilitas layanan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki daya akselerasi dalam rangka untuk mendukung upaya perbaikan kesejahteraan hidup rakyat. Tahun 2020 persentase kunjungan ke perpustakaan per jumlah penduduk sebesar 3 persen, mengalami penurunan sebesar 0,82 persen dari tahun sebelumnya. Hal itu disebabkan kurangnya minat baca masyarakat dan minimnya koleksi buku yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan maka upaya yang dilakukan untuk meningkatkan minat baca penduduk Gayo Lues dengan Publikasi dan Sosialisasi minat baca melalui berbagai media dan sosialisasi ke sekolah-sekolah. Dengan adanya wabah covid-19 minat baca pengunjung berkurang dan dibatasi untuk menghindari penyebaran wabah Covid-19 dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2019 adalah 101.045 jiwa mengalami peningkatan dimana pada tahun 2020 jumlah penduduk 107.900 jiwa.

B.18. Kearsipan

Bidang kearsipan terus diupayakan pelacakan terhadap naskah-naskah penting yang bernilai guna tinggi dan yang sampai sekarang ini masih sangat berada pada masyarakat luas, naskah tersebut tersebar diberbagai daerah di Kabupaten Gayo Lues maupun di luar Kabupaten Gayo Lues bahkan sampai keluar negeri. Arsip



merupakan memori kolektif bangsa karena dinas perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Gayo Lues berkewajiban memotivasi seluruh elemen masyarakat untuk menumbuh kembangkan kesadaran akan pentingnya arsip dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Gayo Lues telah membangun tempat penyimpanan arsip (DEPO) untuk mendukung program penyelamatan arsip. Sedangkan di Bidang Kearsipan, persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku pada tahun 2019 sebesar 14,56 persen. Hal ini menunjukkan tingkat kesadaran perangkat daerah untuk mengelola arsip secara baku sudah mengacu kepada standar pelayanan minimum. Sedangkan di Bidang Kearsipan, persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku pada tahun 2019 sebesar 14,56 persen.

2.3.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan

Analisis kinerja atas layanan urusan pilihan dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggara urusan pilihan pemerintah kabupaten yaitu bidang urusan pariwisata, pertanian, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, industri dan transmigrasi. Untuk melihat fokus layanan urusan pilihan dapat dilihat sebagai berikut :

A. Pariwisata

Pariwisata menjadi salah satu sektor utama dalam peningkatan Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gayo Lues. Peningkatan pada sektor ini bukan hanya mampu menggerakkan sebagian besar sektor penyediaan akomodasi dan makan minum secara khusus, tapi juga mampu memberikan *multiplier effect* bagi hampir seluruh sektor jasa dalam sebuah struktur perekonomian. Wisatawan Mancanegara (wisman) ialah setiap pengunjung yang mengunjungi suatu negara di luar tempat tinggalnya, didorong oleh satu atau beberapa keperluan tanpa bermaksud memperoleh penghasilan ditempat yang dikunjungi dan lamanya kunjungan tersebut tidak lebih dari satu tahun (12 bulan). Wisatawan (turis) ialah setiap pengunjung seperti definisi diatas yang tinggal paling sedikit 24 jam, akan tetapi tidak lebih dari 1 (satu) tahun di tempat yang dikunjungi, dengan maksud antara lain: berlibur, rekreasi, olah raga, menghadiri pertemuan, studi dan kunjungan dengan alasan kesehatan.

Pada Tahun 2021, jumlah pengunjung mengalami peningkatan menjadi 25.760 orang dengan fasilitas hotel sebanyak 18 Hotel yang memiliki fasilitas 308 kamar dan 486 tempat tidur siap untuk melayani pengunjung yang datang ke Kabupaten Gayo Lues. Peningkatan angka tersebut di karenakan adanya beberapa kegiatan

yang diselenggarakan oleh daerah berupa *event*, pagelaran seni budaya dan pameran. Dengan banyaknya kegiatan yang dilaksanakan tersebut namun Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor wisata tidak ada. Berdasarkan hal ini, perlunya peningkatan objek wisata untuk mencapai target PAD yang telah ditetapkan RPJMK Gayo Lues.

Ada 14 (empat belas) Objek wisata andalan yang ada di Kabupaten Gayo Lues dapat di Lihat pada Gambar berikut :

Gambar 2.35
Objek Wisata Andalan Kabupaten Gayo Lues Tahun 2021



Sumber : Dinas Pariwisata, 2022

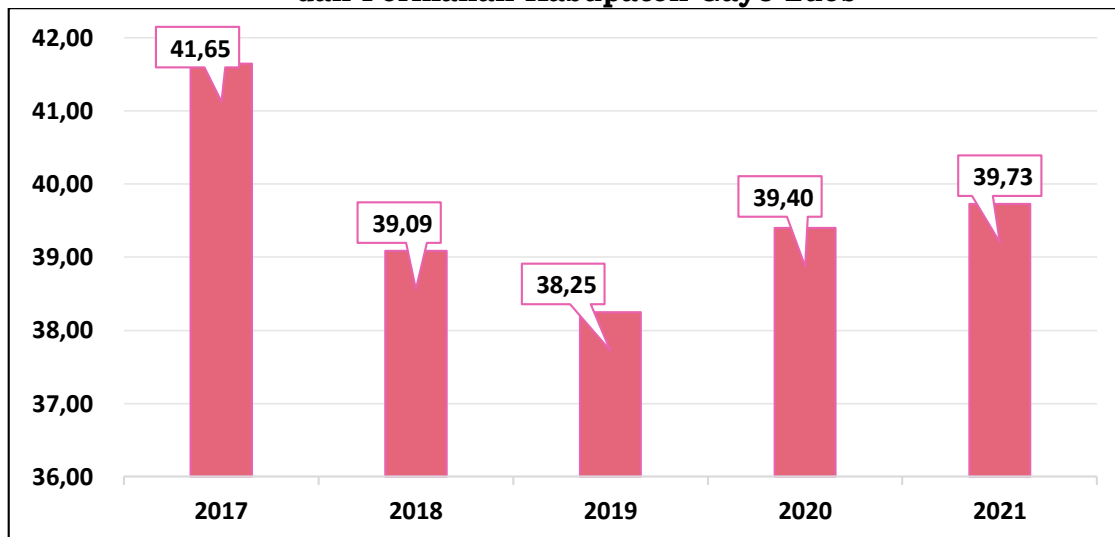
B. Pertanian

Pertanian masih merupakan tulang punggung perekonomian Kabupaten Gayo Lues dengan kontribusi terbesar dalam struktur perekonomian Kabupaten Gayo Lues. Tahun 2020 berdasarkan laporan PDRB BPS bahwa sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan memberikan kontribusi sebesar 3,92 persen. Struktur perekonomian Kabupaten Gayo Lues menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada tahun 2020 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Kabupaten Gayo Lues masih didominasi oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 39,40 persen.

Lahan merupakan faktor penting untuk kemajuan dan keberhasilan dalam bidang pertanian, karena tersedianya lahan maka petani siap untuk mengolah lahan tersebut. Jika lahan tidak diolah maka tidak akan menguntungkan. Lahan yang tidak diolah lagi atau dikenal dengan lahan tidur akan berdampak pada hasil

pertanian yang akan semakin berkurang dan berdampak pula pada pendapatan petani. Di Kabupaten Gayo Lues, Luas lahan produktif yang belum dimanfaatkan 2.400 hektar menyebar di 11 Kecamatan, dengan luas terbesar berada di Pantan Cuaca 500 hektar, Dabung Gelang 500 hektar, Blangkejeren 450 hektar, sisanya tersebar dikecamatan lain. Untuk melihat Distribusi PDRB ADHB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan di Kabupaten Gayo Lues dapat dilihat pada tabel berikut:

Gambar 2.36
Distribusi PDRB ADHB Sektor Pertanian, Kehutanan,
dan Perikanan Kabupaten Gayo Lues



Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Gayo Lues, 2022

1. Pertanian Tanaman Pangan

Untuk Tanaman pangan dan hortikultura dengan lahan terluas pada tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 2.33
Komoditas Tanaman Pangan Lahan Terluas Tahun 2017-2021

No	Tahun	Padi			Jagung		
		Lahan (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (ton)	Lahan (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (ton)
1	2017	7.746	13.053	63.645,8	3.726	4.189	25.134
2	2018	7.746	12.463	60.326,9	3.919	3.509	17.545
3	2019	4.856,5	8.861,8	36.333,4	1.090,5	1.915	11.357,9
4	2020	4.855,5	7.817,2	35.411,9	1.445,6	1.449,5	9.894,3
5	2021	6.389,6	6.132,3	25.725,5	2.764,6	1.510,3	9.124,9

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Gayo Lues, 2022

Dilihat dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa produksi pada tahun 2021 komoditi tanaman pangan padi sebesar 25.725,5 ton dan disusul komoditi tanaman pangan jagung sebesar 9.124,9 ton. Untuk produksi padi, pada Tahun 2021 dengan luas tanah sawah 4.855,5 Ha telah mendapatkan produksi sebanyak 25.725,5 Ton yang berarti rata-rata produksi 4,41 ton per hektar.

C. Perkebunan

Dalam pembangunan sektor perkebunan, permasalahan yang sering dihadapi masih berkisar pada kurang intensifnya pemeliharaan terhadap komoditas perkebunan, penggunaan bibit yang tidak bersertifikat, SDM petani yang masih kurang adaptif terhadap penggunaan teknologi pertanian dan perkebunan dan juga fluktuasi harga komoditas perkebunan yang juga masih menjadi permasalahan sehingga mempengaruhi rendahnya daya saing komoditas perkebunan. Untuk tanaman perkebunan produksinya dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 2.34
Produksi Tanaman Perkebunan Menurut Komoditi Tahun 2017-2021

Tanaman	Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019		
	Luas (Ha)		Produksi	Luas (Ha)		Produksi	Luas (Ha)		Produksi
	Tanam	Panen		Tanam	Panen		Tanam	Panen	
1.Kopi	2.080	2.322	2.090	5.088	2.250	1.368	2.680,5	2.250	1.566
2.Kakao	2.748	1.841	1.823	4.469	1.223	977	3.188	1.403	977
3.Tembakau	1.100	1.010	1.791	985	820	900	1.200	1.010	2.739,3
4. Nilam	800	847	45,0	863	784	274	863	784	108,3
5.Sereh Wangi	13.517	17.431	2.249	16.618	13.517	2.244	13.517	17.431	2.244

Tanaman	Tahun 2020			Tahun 2021		
	Luas (Ha)		Produksi	Luas (Ha)		Produksi
	Tanam	Panen		Tanam	Panen	
1.Kopi	5.646	2.281	1.564	5.841	2.281	1.564
2.Kakao	3.518	2.371	4.355	3.532	2.371	1.897
3.Tembakau	1.501	1.491	1.351	1.501	1.491	1.351
4. Nilam	89	89	31	89	89	15
5.Sereh Wangi	17.285	16.851	2.869	17.285	16.851	2.869

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Gayo Lues, 2022

Beberapa langkah yang dapat dilakukan yakni dengan meningkatkan kualitas SDM petani dan penguatan kelompok tani melalui koorporarsi yang kuat, ekstensifikasi pertanian serta menjaga kestabilan harga komoditas perkebunan melalui sistem resi gudang.

D. Peternakan

Subsektor peternakan merupakan salah satu subsektor yang memberikan kontribusi pada perekonomian Kabupaten Gayo Lues serta mampu menyerap tenaga kerja secara signifikan, sehingga dapat diandalkan dalam upaya perbaikan perekonomian. Pembangunan peternakan merupakan rangkaian kegiatan yang berkesinambungan untuk mengembangkan kemampuan masyarakat petani khususnya petani peternak, agar mampu melaksanakan usaha produktif dibidang peternakan secara mandiri. Usaha tersebut dilaksanakan bersama oleh petani peternak, pelaku usaha dan pemerintah sebagai fasilitator yang mengarahkan kepada berkembangnya usahapeternakan yang efisien dan memberi manfaat bagi petani peternak. Kontribusi sub sektor peternakan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Subsektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian menjadi subsektor dengan peranan terbesar dalam memberikan nilai tambah bagi pembentukan PDRB Sektor Pertanian di Kabupaten Gayo Lues. Lihat Tabel berikut ini jumlah ternak Kabupaten Gayo Lues Menurut jenis ternak:

Tabel 2.35
Jumlah Ternak Kab. Gayo Lues Menurut Jenis Ternak
Tahun 2017-2021 (ton)

No	Produk Komoditi Unggulan Peternakan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Sapi	7181	7806	7140	9445	8.542 ^{*)}
2	Kerbau	6299	6133	6512	7420	7.052 ^{*)}
3	Kambing	4441	4.766	6.393	7.739	8.595 ^{*)}

**) : Data Sementara*

Sumber : Dinas Pertanian, 2022

Selain faktor eksternal diatas, beberapa faktor internal juga dapat dipengaruhi guna peningkatan kesejahteraan peternak. Dari sisi konsumsi rumah tangga masih sangat dominan dengan konsumsi bahan makanan, makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau, dan transportasi dan komunikasi, dengan nilai rata-rata yang lebih besar daripada indeks yang diterima petani. Selanjutnya dari sisi biaya produksi dan penambahan barang modal telah menunjukkan nilai yang lebih kecil dari indeks terimanya, kecuali pada biaya transportasi. Biaya produksi dapat terus ditekan



dengan peningkatan diversifikasi produk peternakan dan integrasi peternakan dan pertanian misalnya dalam pengolahan pupuk dan pakan ternak.

Permasalahan utama pada sub sektor peternakan yakni terbatasnya ketersediaan bibit ternak disebabkan oleh belum optimalnya sistem reproduksi yang menggunakan Inseminasi Buatan (IB); Masih ditemukannya kasus penyakit hewan yang dapat menurunkan produksi ternak seperti SE, gangguan reproduksi, surra dan Parasiter, Masih tingginya pemotongan ternak diluar RPH dan tingginya pemotongan ternak betina produktif. Selanjutnya permasalahan pengembangan ternak unggas diantaranya: 1) terbatasnya populasi ayam petelur karena sulitnya memperoleh bibit ayam petelur dan mahalnnya pakan ternak; 2) sistem pengelolaan usaha ayam petelur masih dilakukan dalam skala kecil dan tidak berorientasi bisnis; dan 3) belum adanya industri pakan ternak lokal. Langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan diatas yaitu dengan penyediaan bibit ternak ruminansia berkualitas serta pengembangan industri pakan ternak lokal melalui kawasan peternakan terpadu.

E. Energi dan Sumber Daya Mineral

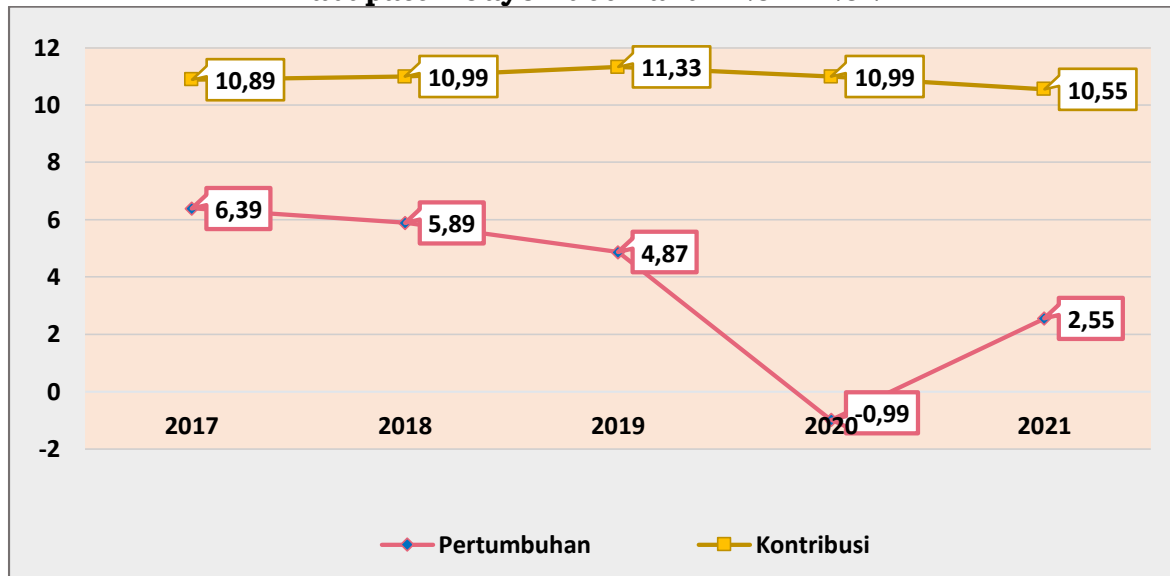
Dinas Perindustrian melalui Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2020 atas Indikator Kinerja : Rasio Elektrifikasi terlaksana atau tercapai 99 persen atau capaian kinerja 100 persen sesuai target yang ditetapkan (yakni Target 99 persen). Pada sistem isolated 20 Kv yaitu Sistem Blangkejeren (Gayo Lues). Berdasarkan Data KK Kabupaten Gayo Lues Tahun 2019 yang berjumlah 28.916 KK, Rumah Tangga (RT) Berlistrik berjumlah 28.626 kk di tahun 2020 dan Pengguna listrik PLTMH berjumlah 5.857 kk atau 20,60 persen dari RT berlistrik tersebut, serta RT belum berlistrik ± 290 KK Berdasar, ini sesungguhnya sudah berlistrik tetapi belum terdata sebagai pelanggan PLN (kWh bukan tersendiri).

F. Perdagangan

Peran sektor perdagangan dalam perekonomian Gayo Lues sampai saat ini selalu masuk pada 5 sektor paling berkontribusi setelah pertanian, industry dan administrasi pemerintahan. Akan tetapi kontribusi sektor perdagangan stabil berfluktuasi di angka 10,55 sampai 11,33 persen. Sementara laju pertumbuhan terus melambat, bahkan dari tahun 2019 ke tahun 2020 bergerak kebawah dari pertumbuhan 4,87 menjadi negatif 0,99 persen. Jika pada tahun 2019 kontribusi perdagangan masih menyumbang 11,33 persen meskipun laju melambat ke 4,87 padahal masa itu adalah masa awal pandemi Covid-19, diduga dikoreksi oleh meningkatnya aktifitas perdagangan online secara signifikan, akibat pembatasan aktifitas kerumunan. Akan tetapi kondisi tersebut tidak bertahan pada tahun 2020,

diduga karena semakin tigginya pembatasan akibat covid-19 dan makin melemahnya daya beli masyarakat untuk barang-barang komoditi perdagangan non makanan. Untuk lebih jelasnya sebagaimana ditunjukkan pada Gambar berikut:

Gambar 2.37
Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Perdagangan
Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017-2021

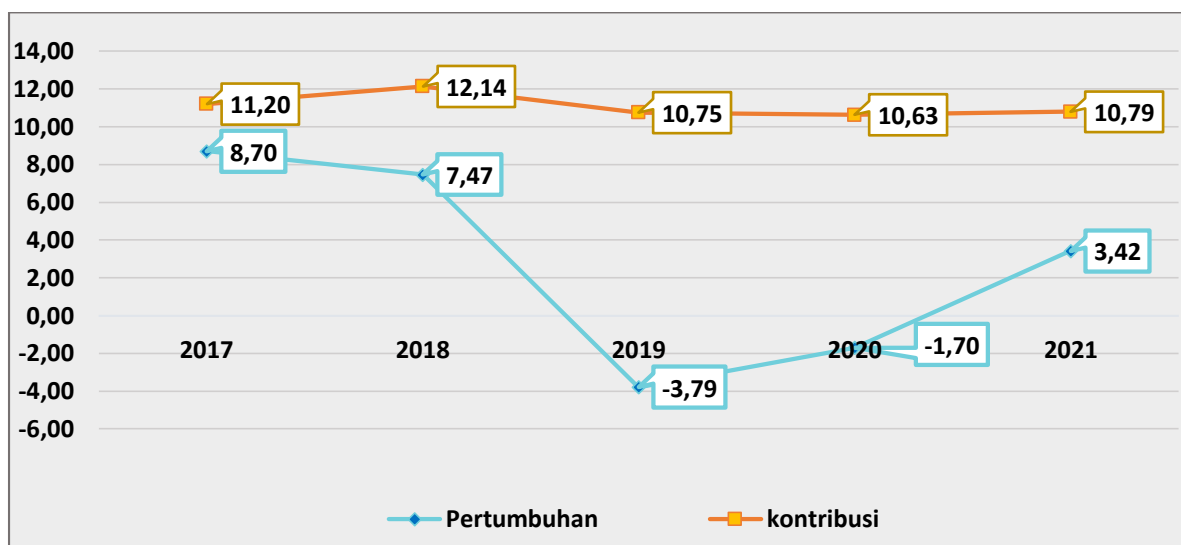


Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Gayo Lues, 2022

G. Perindustrian

Lapangan usaha industri di Gayo Lues didominasi oleh kategori industri pengolahan dan kelas industri rumah tangga. Industri pengolahan berbasis bahan baku serewangi, nilam, kopi, gula aren merupakan yang paling diminati rumah industri Gayo Lues. Sektor ini merupakan salah satu penyumbang nilai tambah bruto yang cukup signifikan dengan menyumbang perekonomian Gayo Lues 10,63 persen sampai 12,14 persen sepanjang tahun 2017 sampai dengan 2021. Bahkan ketika terjadi penurunan laju sampai pada angka negative 3,79 pada tahun 2019, akan tetapi tetap berkontribusi 10,75 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 2.38
Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Industri
Pengolahan Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017-2021



Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Gayo Lues, 2022

Dan untuk Data Produk Unggulan Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang ada di Dalam Wilayah Kabupaten Gayo Lues dan Data Luas Area dan Produksi Komoditi Kopi Perkebunan Rakyat Aceh Kabupaten Gayo Lues Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.36 di bawah ini:

Tabel 2.36
Data Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah (IKM)
Kabupaten Gayo Lues Tahun 2021

No	Jenis Produk Unggulan IKM	Jumlah IKM
1	Sere Wangi	6.931
2	Bubuk Kopi	204
3	Gula Aren	232
4	Kerawang Gayo	59
5	Anyaman Pandan	896
6.	Kakao	1
Total Jumlah Produk Unggulan IKM		8.323

Sumber : Dinas Perindustrian Kab. Gayo Lues, 2022

2.3.4. Penunjang Urusan

A. Perencanaan Pembangunan

Badan Pembangunan Perencanaan Daerah merupakan unsur pelaksana pemerintahan dan pembangunan dibidang perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan kabupaten berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sebagaimana sudah ditetapkan dengan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Gayo Lues (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2016 Nomor 84) dan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Rencana Pembangunan Kabupaten Gayo Lues Tahun 2023-2026



Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Kabupaten Gayo Lues.

Untuk melaksanakan tugas tersebut BAPPEDA mempunyai fungsi sebagai berikut: pelaksanaan urusan ketatausahaan badan, penyusunan program kerja tahunan, jangka panjang; perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pembangunan daerah, sarana dan prasarana, dan sosiasl budaya; pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan di Daerah yang bersumber dari APBA dan APBN; penyiapan bahan Rapat Koordinasi Evaluasi pelaksanaan pembangunan di Daerah; dan pembinaan Unit Pelaksana Teknis Badan.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud di atas BAPPEDA mempunyai kewenangan: menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten; melakukan Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (Renja SKPK); melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Musrenbang); melakukan Koordinasi Penyusunan Program dan Kegiatan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK), berdasarkan rumusan hasil Musrenbang Kabupaten; mengkoordinasikan perencanaan program/kegiatan daerah tahunan dalam bentuk Rancangan Kerja dan Anggaran (RKA) melalui Tim Anggaran; menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten melalui Tim Anggaran; meneliti dan mengevaluasi Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (RKA-SKPK) untuk bahan menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) perangkat daerah melalui Tim Anggaran; dan menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing.

Sesuai Amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan Surat Edaran Kementrian Dalam Negeri Nomor 130/736/SJ Tanggal 27 Januari 2020 tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Provinsi, dan Kabupaten/Kota harus melakukan langkah-langkah percepatan melalui integrasi proses Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Pengelolaan Keuangan Daerah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD, dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pada satu platform sistem informasi pemerintahan daerah.

1. Tersedianya dokumen perencanaan RPJP yang telah ditetapkan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh atau disingkat dengan RPJP Aceh 2012 – 2032 yang ditetapkan dengan Qanun Aceh nomor 9 tahun 2013 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Aceh periode tahun 2012 sampai tahun 2032



yang diundangkan pada tanggal 19 November 2012. Visi Aceh dalam RPJPA 2012 – 2032 adalah **“ACEH YANG ISLAMI, MAJU, DAMAI DAN SEJAHTERA”** yang akan dicapai visi tersebut melalui misi-misi sebagai berikut; Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia sesuai dengan nilai – nilai Islami; Mewujudkan masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidup dalam aspek ekonomi, sosial dan spiritual; Mewujudkan masyarakat demokrasi berdasarkan hukum; Mewujudkan Aceh yang aman, damai, dan bersatu; mewujudkan pembangunan yang berkualitas, maju, adil dan merata; Mewujudkan Aceh yang lestari dan tangguh terhadap bencana.

Untuk merealisasikan Visi dan Misi daerah tersebut secara bertahap akan dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Lima Tahunan atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang merupakan Visi dan Misi kepala daerah terpilih. Dalam RPJP Aceh 2012–2032 sudah ditetapkan tahapan-tahapan pembangunan lima tahunan yang merupakan fokus pembangunan atau arah kebijakan yang menitik beratkan pencapaian Visi dan Misi Aceh sampai tahun 2032 sebagaimana yang sudah disepakati bersama.

2. Tersedianya dokumen perencanaan RPJM yang telah ditetapkan

Rencana Pembangunan Jangka menengah atau RPJM Kabupaten Gayo Lues periode 2017-2022 saat ini masih berbentuk Rancangan Qanun Aceh tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gayo Lues periode tahun 2017 sampai tahun 2022 yang mana nantinya akan dijadikan pedoman dalam merencanakan pembangunan daerah sesuai Visi dan Misi kepala Daerah terpilih. Visi Kabupaten Gayo Lues untuk periode 2017-2022 adalah **“TERWUJUDNYA GAYO LUES YANG ISLAMI, MANDIRI DAN SEJAHTERA”**.

3. Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gayo Lues disusun berpedoman pada Arah Kebijakan Tahunan dalam RPJM Kabupaten Gayo Lues pada Bab VI Arah kebijakan yang mempunyai fokus pembangunan setiap tahunnya. Berdasarkan RKPD ini SKPK akan menjabarkan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi masing-masing di dalam Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan disepakati sebagai dasar penyusunan RAPBD setiap tahunnya.

B. Keuangan

Rata-rata pertumbuhan pendapatan sampai dengan Semester II tahun 2017-2021 sebesar -0,03 persen. Pada Semester II tahun 2021, jumlah realisasi Pendapatan Kabupaten Gayo Lues tertinggi bersumber dari Dana Perimbangan yaitu sebesar Rp 534.811.046.801,00 diikuti oleh Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp 50.771.540.912,00 dan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp



63.638.387.113,24. Pendapatan Asli Daerah tahun 2021 tercapai melebihi target dari proyeksi. Hal ini disebabkan capaian Pajak daerah, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dan Pendapatan ZIS melebihi target.

Pendapatan Retribusi Daerah yang rendah disebabkan lesunya kondisi perekonomian Tahun 2021 disebabkan oleh pandemi covid-19 disamping itu masalah mendasar seperti adanya wajib pajak dan retribusi daerah yang belum memenuhi atas kewajibannya karena beberapa kendala. Masalah lain yang muncul adalah adanya beberapa potensi Pendapatan Asli Daerah yang belum digali dan dikelola dengan optimal melalui ekstensifikasi dan intensifikasi yang mana saat ini adanya beberapa regulasi yang belum diatur secara rinci untuk pengelolaannya yang tentunya hal tersebut dilaksanakan oleh SOTK yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan ketentuan, serta tidak terlepas peran para pihak swasta murni atau swasta pemerintah yang terus harus dilakukan pembinaan untuk pengembangan usaha dengan memberikan pelayanan perizinan yang baik serta pemerintah dapat menjamin keamanan dan kenyamanan dalam menjalankan usaha.

Pemerintah Kabupaten Gayo Lues memiliki realisasi Pendapatan tertinggi bersumber dari Dana Perimbangan yaitu sebesar Rp.534.811.046.801,00 yang merupakan bagian dari dana transfer daerah yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, pada dasarnya berperan penting untuk menjaga/menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum dan mengurangi kesenjangan antar daerah. Hal ini memberikan kesempatan kepada Pemerintah Kabupaten Gayo Lues dalam menjalankan fungsi pelayanan dan pelaksanaan pembangunan dalam mengejar ketertinggalannya dari daerah lain sesuai dengan kewenangan yang diaturnya. Realisasi Dana Perimbangan mengalami kontraksi sebesar -1 persen dari rata-rata pertumbuhan, yang terdiri dari realisasi Transfer Umum sebesar Rp.419.760.894.000,00 mengalami kontraksi sebesar -2 persen dari rata-rata pertumbuhan dan Transfer Khusus sebesar Rp.98.716.500.818,00 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 12 persen. Realisasi Dana Perimbangan dari tahun ke tahun menurun, yaitu pada tahun 2018 sebesar Rp.649.955.059.479,00, kemudian tahun 2019 menjadi Rp.585.232.201.100,00, pada tahun 2020 ini menurun menjadi Rp.539.387.276.926,00 dan menurun lagi menjadi Rp.534.811.046.801,00 pada tahun 2021.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues tahun 2020 mendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Opini dari BPK merupakan yang ke tujuh kalinya



diperoleh Pemerintah Kabupaten Gayo Lues. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues tahun 2020 merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun Anggaran 2020. Laporan pertanggungjawaban tersebut juga sebagai salah satu instrumen untuk kepentingan evaluasi kinerja, serta menjadi salah satu tolok ukur untuk melihat kemajuan Rencana, Program dan Kegiatan Pembangunan dalam rangka pencapaian Visi Misi Pemerintah Kabupaten Gayo Lues.

C. Tata Kelola Pemerintahan, Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Tata kelola pemerintahan masih belum optimal antara lain terlihat dari distribusi aparatur pemerintah khususnya guru, tenaga medis dan para medis serta penyuluh masih belum merata di semua wilayah, baik secara kualitas maupun kuantitas. Namun kewenangan dalam mengatur distribusi guru, tenaga medis dan para medis serta penyuluh tersebut berada di masing-masing pemerintah kabupaten/kota. Oleh karena itu perlu dilakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota agar pendistribusian guru, tenaga medis dan para medis serta penyuluh dilakukan secara tersistem dan terintegrasi.

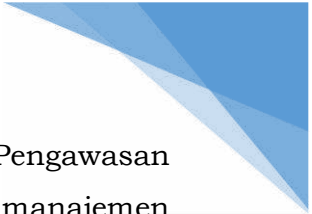
Tuntutan pelayanan publik di era globalisasi sekarang ini yang menjadi harapan dan dambaan masyarakat dan sekaligus merupakan gambaran masyarakat terhadap kualitas kinerja birokrasi pemerintahan yang berimplikasi luas terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Usaha dalam melakukan perbaikan kinerja pelayanan dalam bidang kepegawaian secara berkelanjutan terus ditingkatkan untuk mendorong terciptanya situasi yang kondusif kegiatan penyelenggaraan pelayanan manajemen aparatur yang akan memberikan kesejahteraan pada masyarakat. Pada tahun 2022, Sejumlah ASN yang sebelumnya Eselon IV telah dilantik menjadi Jabatan Fungsional sesuai kebutuhan di masing-masing SKPK Gayo Lues.

D. Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan pengembangan (litbang) memiliki peranan penting dalam perencanaan pembangunan serta dapat dijadikan indikator kemajuan dari suatu daerah. Peran fungsi litbang dari suatu daerah dapat diukur dengan persentase implementasi rencana kelitbangan; persentase pemanfaatan hasil kelitbangan; dan penerapan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) yang diukur dengan persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah, dan persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.

E. Pengawasan

Pelayanan bidang urusan pengawasan menyelenggarakan fungsi: perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan pengawaawasan internal terhadap kinerja



pegawai dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan. Pengawasan memiliki dan posisi yang sangat strategis baik ditinjau dari fungsi manajemen maupun dari sisi pencapaian visi dan misi pemerintah. Ia memiliki kedudukan yang setara dengan fungsi perencanaan atau fungsi pelaksanaan sekaligus menjadi pengawal dalam pelaksanaan program.

Pelayanan bidang urusan pengawasan memberikan informasi seperti persentase tindak lanjut temuan; persentase pelanggaran pegawai dan jumlah temuan BPK terhadap penyelenggaraan pemerintahan baik administrasi maupun keuangan yang ada di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Gayo Lues.

F. Sekretariat Dewan

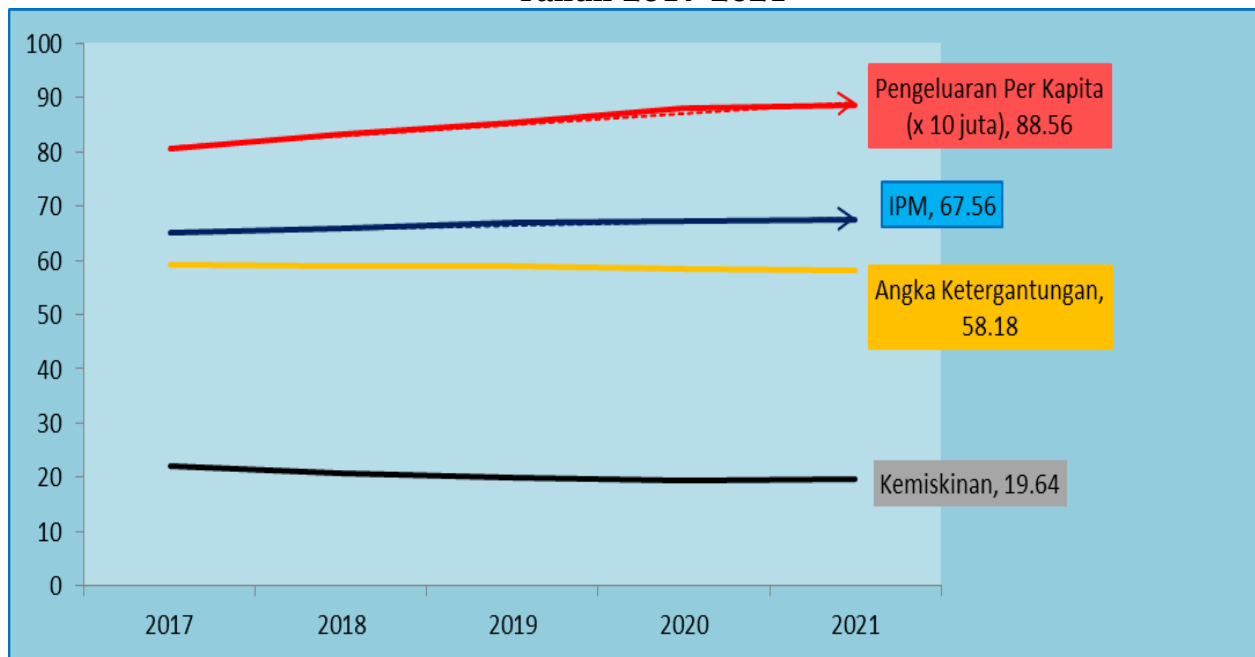
Layanan bidang urusan Sekretariat Dewan meliputi beberapa pelayanan antara lain: tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA); tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRA untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Qanun, dan fungsi anggaran dan dokumen rencana lima tahunan (RPJM) maupun dokumen rencana tahunan (RKPK); dan terintegrasinya program-program DPRK untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Qanun, dan Anggaran ke dalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran setwan DPRK.

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1 Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)

Peningkatan daya saing daerah merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah. Indeks Daya Saing Daerah ditentukan oleh perekonomian masyarakat dan kualitas sumberdaya manusia. Asumsinya, jika makin tinggi nilai IPM dan Pengeluaran Per Kapita Masyarakat dan makin sedikitnya Angka Kemiskinan dan menurunnya Angka Ketergantungan suatu daerah, maka Indeks Daya Saing Daerahnya juga akan makin baik. Indeks daya saing yang tinggi juga akan diikuti oleh meningkatnya Indeks Investasi Daerah. Sebagai gambaran dapat dilihat pada gambar 2.38. Gambar menunjukkan bahwa IPM dan pengeluaran per kapita terus menunjukkan peningkatan, sedangkan kemiskinan dan angka ketergantungan terus menurun. Hal ini mengindikasikan indeks daya saing daerah juga membaik, meskipun peningkatannya tidak menunjukkan lompatan.

Gambar 2.39
Peningkatan Daya Saing Daerah di Kabupaten Gayo Lues
Tahun 2017-2021



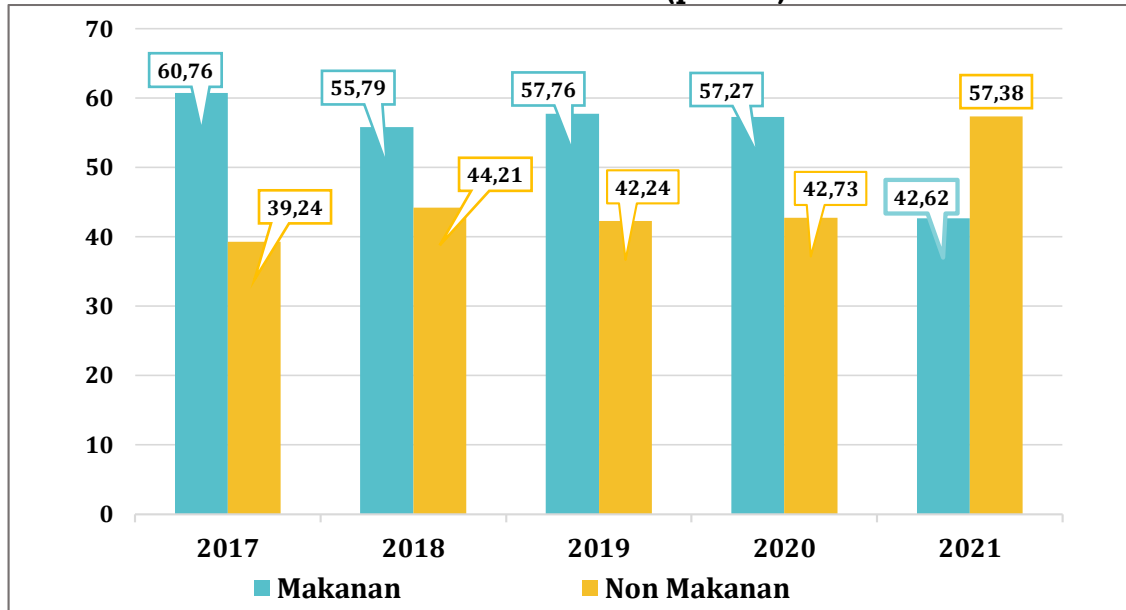
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Gayo Lues, 2022

2.4.2. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

A. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita adalah salah satu indikator untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi individu atau rumah tangga. Pengeluaran ini dibagi ke kelompok makanan dan non makanan. Secara makro kesejahteraan dapat dikatakan makin baik apabila pengeluaran per kapita meningkat. Secara umum pola konsumsi penduduk Kabupaten Gayo Lues didominasi oleh makanan dibandingkan dengan konsumsi non makanan. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir puncak persentase pengeluaran makanan tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 57,76 persen dan mengalami penurunan di tahun 2021 sebesar 42,62 persen. Sedangkan untuk konsumsi non makanan, persentase tertinggi terdapat pada tahun 2021 sebesar 57,38 persen. Persentase pengeluaran konsumsi rumah tangga tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.39 berikut.

Gambar 2.40
Perkembangan Persentase Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga
Perkapita (Makanan dan Non Makanan) Kabupaten Gayo Lues
Tahun 2017-2021 (persen)



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Gayo Lues, 2022

Kecenderungan konsumsi non makanan yang lebih besar dibandingkan makanan mengindikasikan bahwa penduduk di wilayah tersebut memiliki tingkat pendapatan yang lebih tinggi sehingga pemenuhan kebutuhan makanan lebih kecil dibandingkan pemenuhan kebutuhan lainnya. Pengeluaran konsumsi masyarakat perkapita di kabupaten Gayo Lues terdapat pada Tabel 2.37.

Tabel 2.37
Konsumsi/Pengeluaran Per Kapita Per Bulan (Rp)
Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017-2021

No	Tahun	Makanan	Non Makanan	Makanan dan Non Makanan
1	2017	588.121	379.884	968.005
2	2018	588.886	466.620	1.055.506
3	2019	733.860	536.630	1.270.489
4	2020	688.399	513.728	1.202.127
5	2021	830.289	616.835	1.447.124

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Gayo Lues, 2022

B. Nilai Tukar Petani

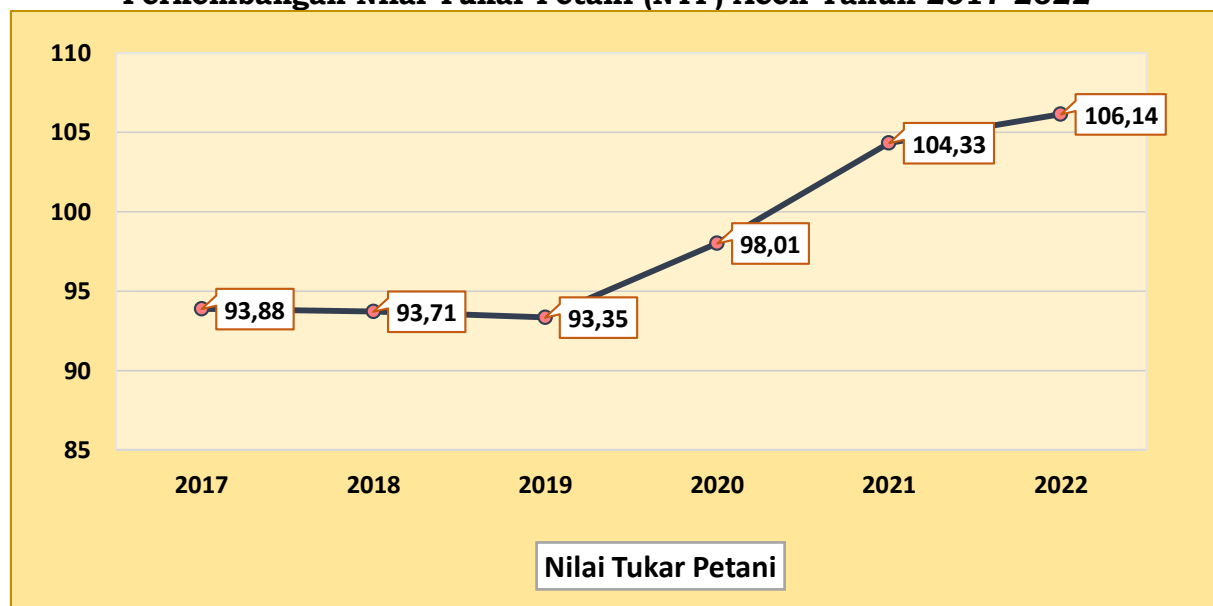
Nilai Tukar Petani (NTP) menjadi indikator yang menunjukkan kesejahteraan di tingkat petani. Pada dasarnya nilai Nilai Tukar Petani ini juga merupakan

Rencana Pembangunan Kabupaten Gayo Lues Tahun 2023-2026

gambaran sejauh mana pendapatan yang diperoleh petani dari hasil berproduksi dan yang dikeluarkannya untuk kebutuhan konsumsi. Nilai Tukar Petani tersebut dibagi kedalam beberapa sub sektor pertanian diantaranya: pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan.

Nilai Tukar Petani Kabupaten/Kota se-Aceh sampai saat ini masih menggunakan Nilai Tukar Petani Provinsi/Aceh, hal ini disebabkan Badan Pusat Statistik baru mampu menghitung Nilai Tukar Petani Provinsi, sedangkan untuk menghitung Nilai Tukar Petani Kabupaten/Kota masih keterbatasan sumberdaya. Berdasarkan grafik dibawah ini, diketahui bahwa Nilai Tukar Petani Aceh dari tahun 2017 sampai 2019 mengalami penurunan, kemudian meningkat signifikan di tahun 2020 dan 2021. Peningkatan masih berlanjut sampai di Januari 2022. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut :

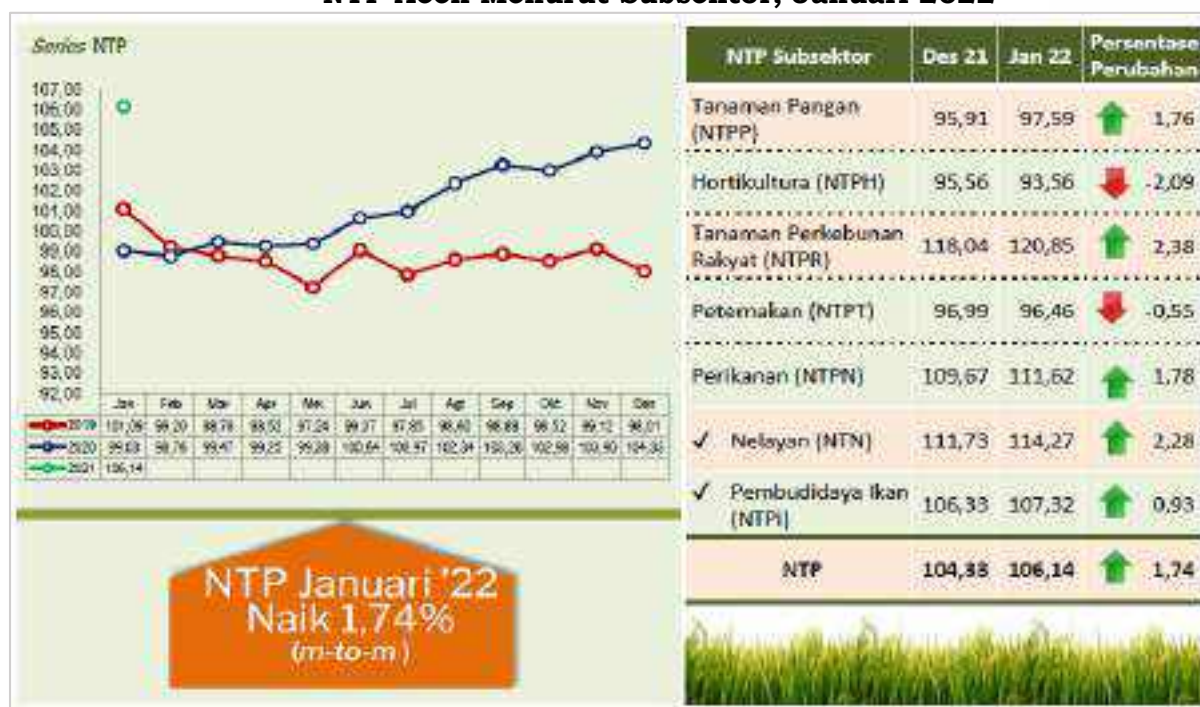
Gambar 2.41
Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Aceh Tahun 2017-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2022

Gambar 2.41 menunjukkan bahwa peningkatan NTP dari 2021 sampai dengan Januari 2022 terjadi pada sub sektor tanaman perkebunan, tanaman pangan dan perikanan, sedangkan sub sektor hortikultura dan peternakan mengalami penurunan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2.42
NTP Aceh Menurut Subsektor, Januari 2022



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2022

Akan tetapi jika disandingkan dengan provinsi se Sumatera, gambar di bawah ini memperlihatkan bahwa NTP Aceh masih terendah diantara 10 Provinsi se Sumatera.

C. Keterbukaan Ekonomi

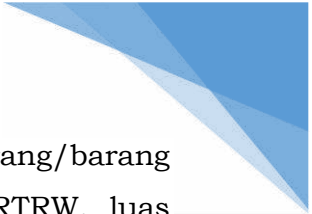
Keterbukaan ekonomi merupakan indikator yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan suatu daerah dalam mengakses pencapaian ekspor dan impor yang dapat merangsang pertumbuhan ekonomi.

D. Rasio Pinjaman Terhadap Simpanan di Bank

Kondisi stabilitas keuangan Kabupaten Gayo Lues pada triwulan III-2020 terlihat dalam kondisi yang kurang baik, lebih cenderung menurun. Ini tercermin dari ketahanan dan kualitas kredit/ pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan yang ada di Kabupaten Gayo Lues. Kondisi perbankan di Kabupaten Gayo Lues selama tahun 2020 menunjukkan bahwa penyaluran dana ke dana pihak ketiga (DPK) yang sedikit. Penurunan penggunaan Dana pihak ketiga (DPK) merupakan dampak dari wabah covid-19 yang melanda dunia, termasuk Indonesia dan bahkan Kabupaten Gayo Lues ikut terimbas karena berhentinya aktifitas ekonomi masyarakat yang dibiayai oleh perbankan.

2.4.3. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Analisis kinerja atas fasilitas wilayah infrastruktur dilakukan terhadap indikator-indikator sebagai berikut: rasio panjang jalan per jumlah kendaraan.



jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum. Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun. Ketaatan terhadap RTRW. luas wilayah produktif. luas wilayah industri. luas wilayah banjir. luas wilayah kekeringan. luas wilayah perkotaan. jenis dan jumlah bank dan cabang. jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang, jenis, kelas, dan jumlah restoran, jenis. kelas. dan jumlah penginapan/hotel, persentase rumah tangga (RT) yang menggunakan air bersih, rasio ketersediaan daya listrik, persentase rumah tangga yang menggunakan listrik dan persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon.

A. Indeks Aksesibilitas dan Mobilitas Menurut Kabupaten Gayo Lues

Kondisi prasarana jaringan jalan mempengaruhi mobilitas masyarakat dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Parameter yang biasa digunakan adalah dengan menggunakan indeks mobilitas dan indeks aksesibilitas. Wilayah yang memiliki jaringan prasarana jalan yang rapat dengan panjang jalan yang tinggi akan mempermudah masyarakatnya melakukan kebutuhan pergerakannya. Selain itu juga maka wilayah tersebut mudah dijangkau dari arah manapun. Kabupaten Gayo Lues dengan Luas 5.719,58 km² dengan jumlah penduduk 94.100 jiwa, panjang jalan 1.115,17 km dan indeks aksesibilitas sebesar 0,19 km/km² dan Indeks mobilitas sebesar 11,85 km/1.000 jiwa.

B. Persentase Penduduk yang menggunakan air bersih

Keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan tidak akan terwujud tanpa suatu lingkungan yang baik, seperti tersedianya air bersih, sanitasi lingkungan yang memadai, perumahan dan pemukiman yang sehat. Persentase rumah tangga berakses air minum dan sanitasi layak terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2019, persentase rumah tangga berakses sanitasi layak pada angka 44,52 persen dan akses terhadap air minum layak juga sudah mengalami peningkatan yakni 69,62 persen. Untuk akses terhadap air bersih telah diupayakan peningkatannya dengan adanya kerjasama pemerintah daerah dengan PAMSIMAS. Sedangkan rasio rumah layak huni baru mencapai 20,45 persen yang ditandai dengan minimnya jumlah unit rumah layak huni yang dibangun yakni sebanyak 50 unit dari 478 unit yang ditargetkan. Untuk lebih dijelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.38
Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum
dan Sanitasi Layak Tahun 2017-2021

No.	Akses Rumah Tangga	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Air Minum Layak	65,07	66,78	69,62	76,88	83,12
2	Sanitasi Layak	30,33	36,75	44,52	50,22	50,22

Sumber : Dinas Perkim Kab. Gayo Lues, 2022

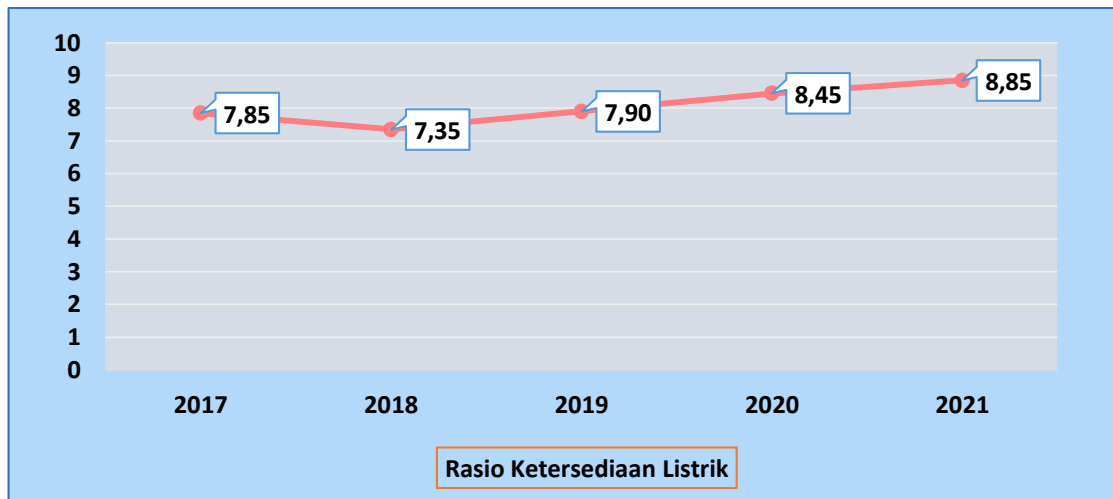
Mayoritas rumah tangga di kabupaten ini sebesar 40,01 persen memanfaatkan mata air sebagai sumber utama air minum rumah tangga, 14,77 persen bersumber dari mata air terlindung, dan 28,93 persen bersumber dari mata air tidak terlindung. Sementara itu persentase terbanyak kedua adalah rumah tangga dengan sumur tak terlindung 9,27 persen disusul rumah tangga dengan air isi ulang sebagai sumber utama air minumnya sebesar 26,59 persen.

Permasalahan dalam penyediaan air bersih untuk air minum adalah belum optimalnya pengelolaan sistem penyediaan air minum sehingga memenuhi standar, belum meratanya jaringan air minum pada masyarakat berpenghasilan rendah, kawasan kumuh dan kawasan khusus. Permasalahan lainnya yaitu tingginya tingkat kebocoran/kehilangan air fisik yang mencapai lebih dari 60 persen dari jumlah produksi dan rendahnya sumber daya manusia, menurunnya kualitas dan kuantitas air baku serta ketersediaan air baku yang tidak merata. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan beberapa upaya berupa fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air minum kepada PDAM, pembangunan sarana prasarana air minum pada masyarakat berpenghasilan rendah seperti pada kawasan rumah sehat sederhana/rusunawa, dan kawasan kumuh/nelayan serta pengembangan sistem penyediaan air minum regional.

C. Rasio Ketersediaan daya listrik

Ketersediaan energi listrik menjadi pendongkrak perekonomian serta memajukan kesejahteraan masyarakat, karena dengan adanya fasilitas listrik untuk penerangan, pemanfaatan waktu belajar anak di rumah bisa lebih lama dan aktifitas ekonomi di rumah tangga yang mengusahakan aktifitas ekonomi di rumah dapat lebih berlangsung sampai malam hari. Rasio ketersediaan daya listrik Kabupaten Gayo Lues 2021 sebesar 8,85 persen meningkat sebesar 0,40 persen dibandingkan tahun 2020 sebesar 8,45 persen. Untuk lebih dijelasnya dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2.43
Rasio Ketersediaan Listrik
Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017-2021 (Persen)

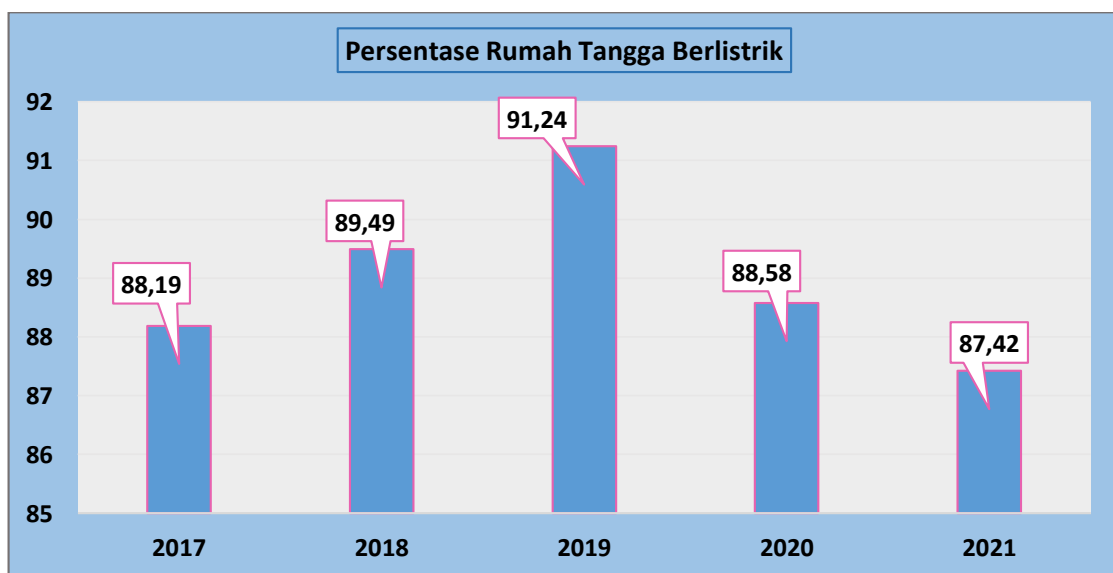


Sumber : Dinas Perindustrian dan ESDM, 2022

D. Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik

Jumlah Rumah Tangga yang menggunakan listrik di Kabupaten Gayo Lues terus menurun dari tahun 2020 ke tahun 2021. Sejak tahun 2017 hingga tahun 2019 jumlah persentase rumah tangga berlistrik di Kabupaten Gayo Lues telah meningkat sebesar 3,03 persen dan tahun 2020 ke tahun 2021 menurun sebesar 1,16 persen. Persentase jumlah rumah tangga berlistrik di Kabupaten Gayo Lues dapat di lihat pada Gambar 2.43. Untuk lebih dijelasnya dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2.44
Persentase Rumah Tangga Berlistrik
di Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017-2021 (Persen)



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2022

Rencana Pembangunan Kabupaten Gayo Lues Tahun 2023-2026



Perkembangan Permasalahan kelistrikan di Kabupaten Gayo Lues diantaranya adalah belum tercapainya akses listrik untuk seluruh masyarakat yang tercermin dari belum tercapainya rasio elektrifikasi 100 persen hingga saat ini. Upaya pemerintah Kabupaten Gayo Lues untuk mengatasi permasalahan kelistrikan adalah antara lain: 1) pemanfaatan potensi energi terbarukan untuk desa-desa yang tidak terjangkau jaringan listrik dan 2) meningkatkan rasio elektrifikasi hingga mencapai hasil 100 persen melalui penyambungan listrik gratis bagi masyarakat yang tidak mampu.

2.4. Evaluasi Pelaksanaan Indikator pada RPJMD Periode Sebelumnya

Hasil evaluasi capaian pembangunan Kabupaten Gayo Lues sudah menunjukkan perbaikan ke arah yang lebih baik. Beberapa indikator makro seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Ketimpangan pendapatan yang tergambar dari Indeks Gini lebih rendah dari Indeks Gini Aceh sebesar 0,263 begitu juga dengan Tingkat pengangguran terbuka (TPT) sudah lebih baik dari Aceh. Namun, disisi lain tingkat kemiskinan Gayo Lues masih lebih tinggi dari tingkat kemiskinan Aceh. Hal ini penurunan angka kemiskinan perlu menjadi perhatian serius seluruh OPD agar selanjutnya bersinergi dalam menyusun program-program yang dapat mengentaskan kemiskinan. Hasil Analisis Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Gayo Lues Terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) RPJMK Gayo Lues 2018-2021 dapat dilihat pada Tabel 2.39 dan Tabel 2.40 berikut:

Tabel 2.39

**Hasil Analisis Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Terhadap
Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMK Gayo Lues 2018-2022**

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	2018		2019		2020		2021		Ket	Target akhir RPJMK Thn. 2022
			2016	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	Persentase Sekolah bernuansa Islami	%	N/A	5	8,8	10	19,4	20	25	35	57,5		60
2	Persentase Kampung bernuansa Islami	%	N/A	5	5	8	8	13	21,37	20	20,7		29
3	Persentase Keluarga Samara	%	N/A	2	2	4	4	6	2,2			sudah dihapus	
4	Jumlah Pelanggaran Syariat Islam	Kasus	62	56	4	50	12	44	60	38	45		32
5	Laju Pertumbuhan Muzakki	%	N/A	2	3,3	2,25	6,6	2,5	20,16	2,75	3,91		3
6	Persentase Lembaga keuangan berbasis syariah	%	N/A	50	0	50	50	50	100			sudah dihapus	



No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	2018		2019		2020		2021		Ket	Target akhir RPJMK Thn. 2022
			2016	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
7	Persentase kemakmuran masjid	%	N/A	10	10	20	20	40	36,24	60	17,6		80
8	Jumlah event keagamaan	Event	N/A	12	11	13	13	15	0			sudah dihapus	
9	Persentase Kelompok Seni dan Budaya Aktif	%	N/A	10	59,01	30	59,01	40	100			sudah dihapus	
10	Persentase Sekolah bernuansa Budaya Gayo	%	N/A	5	4	10	35	20	19,4			sudah dihapus	
11	Jumlah Kampung Adat	Kampung	N/A	2	6	4	6	6	6	8	0		11
12	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,1	7,3	7,69	7,6	*	7,9	7,9	8,2	8,4		8,5
13	Persentase sekolah yang meningkat level akreditasinya	%	N/A	5	10,4	10	10,9	15	0	20	45,16		30
14	Persentase kunjungan ke perpustakaan	%	3	5	3,7	10	3,6	15	3			sudah dihapus	



No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	2018		2019		2020		2021		Ket	Target akhir RPJMK Thn. 2022
			2016	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
	per jumlah penduduk												
15	Meningkatnya Angka Harapan Hidup	Tahun	64,88	65,13	65,12	65,26	65	65,38	65,47	65,51	65,53		65,63
16	Angka Kematian Bayi (AKB)	Per 1000 KH	15,68	15,33	8	15,16	3,5	14,98	0,6	14,81	2		14,63
17	Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 KH	50,6	0	51	0	0	0	112	0	206,6		0
18	Persentase Pelayanan Kesehatan Pemerintah yang terakreditasi	%	0	7,6	27	23,07	100	46,15	100	69,23	100		100
19	Persentase Desa Ramah Anak	%	13	25	2,75	40	2,75	60	4,59			sudah dihapus	100
20	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	2,24	2,22	2,52	2,19	1,74	2,15	2,01	2,09	1,84		2,03
21	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	79,09	79,69	78,28	80,39	75,23	81,49	86,36	82,79	78,99		84



No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	2018		2019		2020		2021		Ket	Target akhir RPJMK Thn. 2022
			2016	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
22	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	%	5,76	5,94	5,89	5,99	4,87	6,04	0,54	6,09	2,55		6,14
23	Laju Pertumbuhan PDRB sektor pertanian dan Perikanan	%	3,86	3,94	-3,57	4,01	-1,92	4,09	3,92	4,16	0,37		4,24
24	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	%	5,89	5,99	7,48	6,09	-2,67	6,19	-1,70	6,29	3,42		6,39
25	Persentase jalan/jembatan dalam kondisi baik	%	62	65	45,32	69	46,66	73	45,48	77	45,54		80
26	Tingkat Kepatuhan Terhadap RTRW	%	N/A	10	0,015	20	0,014	30	0	40	0,03		50
27	Persentase Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	N/A	79,31	0,50	81	23,6	82,5	88,27	84	87		85
28	Persentase Angka Kemiskinan	%	21,86	21,76	20,71	20,86	19,87	19,86	19,32	18,86	19,64		17,5



No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	2018		2019		2020		2021		Ket	Target akhir RPJMK Thn. 2022
			2016	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
29	Meningkatnya Nilai Tukar Petani	%	N/A	98	91,53	101	90,32	103	99,94	105	97,13		107
30	Indeks Desa Membangun	indeks	0,5457	0,5472	0,5792	0,5482	0,5963	0,5492	0,5963	0,5512	0,5963		0,5532
31	Ketersediaan Energi Listrik Lokal	MW	5,2	6	8,7	7	9.2	7,5	9,2	8	3,9		9
32	Persentase Industri Energi Terbarukan	%	N/A	2	2	2	2,97	3	2,99	3	0		4
33	Nilai Investasi di Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	Milyar Rupiah	N/A	30	0	40	0	60	0	70	9.000		80
34	Jumlah Kunjungan Wisata Domestik dan Mancanegara	Orang	2908	3.000	11.384	3.100	17.646	5.300	14	5.600	11.726		16.000
35	Meraih Penghargaan Lingkungan Hidup (Adi Pura)	Ada/	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	ada	tidak ada	ada	tidak ada		Ada



No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	2018		2019		2020		2021		Ket	Target akhir RPJMK Thn. 2022
			2016	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
36	Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor	N/A	62	78,75	65	85,18	70	81,41	75	82,7		80
37	Nilai SAKIP Kabupaten Gayo Lues	Bobot	CC	B	CC	B	CC	B	CC	BB	n/a	belum keluar hasil penilaian	BB
38	Opini BPK atas Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	n/a	belum keluar hasil penilaian	WTP
39	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Keamanan, Ketertiban dan Keindahan)	%	N/A	83	41	86	100	93	89	94	100		95
40	Persentase kondisi darurat yang tertangani	%	N/A	90	100	92	100	94	100	95	100		95

Tabel 2.40

**Hasil Analisis Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Terhadap
Indikator Kinerja Daerah (IKD) RPJMK Gayo Lues 2018-2022**

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Sat	Kondisi Awal	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
				T	R	T	R	T	R	T	R
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT										
	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi										
1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian										
	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi										
1,1	Pertumbuhan PDRB	Persen	4,32	2,18	1,28	1,01	1,26	1	0,88	1,02	2,32
	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	Persen	5,89	5,89	5,03	4,87	0,58	2	-0,99	3	2,55
	Laju Pertumbuhan PDRB sektor pertanian dan Perikanan	Persen	3,86	-3,57	-4,32	-1,92	-0,95	2	3,92	2,4	0,37

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Sat	Kondisi Awal	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
				T	R	T	R	T	R	T	R
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	Persen	5,89	7,48	7,47	-2,67	-3,79	1	-1,7	1,02	3,42
1,2	Laju inflasi	Persen	5,6	1,84	1,84	1,65	1,2	5	3,55	4,8	1,97
1,3	PDRB per kapita										
	PDRB ADHB per kapita	Juta Rupiah	25,02	25,97	27,04	27,91	27,72	28,07	27,06	29,02	28,22
	PDRB ADHK per kapita	Juta Rupiah	25,02	19,31	20,48	20,54	20,68	23	19,55	24	19,6
1,4	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	Persen	78,14	79,29	79,29	80,13	80,13	82,64	80,68	18,23	80,36
1,5	Angka Kemiskinan	Persen	21,86	20,71	20,71	19,87	19,87	19,86	19,32	18,86	19,64
1,6	Indeks Gini	Persen	0,31	0,315	0,315	0,29	0,29	0,26	0,26	0,22	0,26
1,7	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	64,26	65,88	65,88	66,87	66,87	65	67,22	65,25	67,56
1,8	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	2,24	2,52	2,52	1,74	1,74	2,15	2,01	2,09	1,84
1,9	Tingkat partisipasi angkatan kerja	Persen	79,09	78,28	78,28	75,23	75,23	81,49	86,36	75,47	78,99
1,1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	N/A	78,75	78,75	85,18	85,18	70	81,41	79,63	82,7

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Sat	Kondisi Awal	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
				T	R	T	R	T	R	T	R
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1,1	Persentase PAD terhadap pendapatan	Persen	4	5,7	5,7	5,38	5,38	6,5	6,34	7	7,35
1,1	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	*
1,1	Rasio penduduk yang bekerja	Persen	97,7	83	83	98,26	98,26	98,5	97,98	98,7	77,53
	Fokus Kesejahteraan Sosial										
1	Angka melek huruf	Persen	93,8	97,49	94,08	95	94,98	96,8	93,91	97,9	97,47
1	Angka Harapan Lama Sekolah	Persen	13,37	13,49	13,49	14	13,73	13,65	13,77	13,75	13,78
1	Angka rata-rata lama sekolah	Persen	7,1	7,69	7,69	8	7,91	7,9	8,2	8,2	8,4
1	Angka Harapan Hidup	Tahun	64,88	65,12	65,12	65	65,38	65,38	65,47	65,51	65,53
1,1	Persentase Balita Gizi Buruk	Persen	0,02	0	0	0	0	0	0,01	0	0
1,1	Cakupan Desa Siaga Aktif	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1,1	Cakupan Desa ber PHBS	Persen	N/A	30,9	30,9	27,94	27,94	15	27,94	20	41,95
2	ASPEK DAYA SAING DAERAH										

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Sat	Kondisi Awal	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
				T	R	T	R	T	R	T	R
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2,1	Pengeluaran Konsumsi RT Perkapita	Juta Rupiah	8,048	8,529	8,529	8,806	8,806	9,540	8,790	10,020	8,856
2,2	Nilai Tukar Petani	Persen	N/A	91,53	91,53	90,32	90,32	103	94,94	99,24	97,13
2,3	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	Persen	39,98	39,9	39,9	45,66	45,66	42,96	42,73	1,58	42,62
2,4	Angka Kriminalitas yang tertangani	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2,5	Rasio ketergantungan	Persen	59,58	59,04	59,05	46,15	58,8	58,49	49	58,13	48,62
3	ASPEK PELAYANAN UMUM										
	Pelayanan Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar										
	Terkait Pelayanan Dasar										
1	Pendidikan										
1,1	Angka Partisipasi Kasar (APK)										
a.	Angka partisipasi Kasar SD/MI	Persen		113,95	113,95	112,83	112,83	99,52	112,95	99,53	114,85
b.	Angka partisipasi Kasar SMP/MTs	Persen		113,52	113,52	108,89	108,89	98,56	106,92	98,57	107,12

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Sat	Kondisi Awal	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
				T	R	T	R	T	R	T	R
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1,2	Angka partisipasi sekolah (APS)										
a.	Angka partisipasi sekolah SD/MI (7-12)	Persen	99,49	100	100	99,5	99,65	99,4	99,73	99,5	98,45
b.	Angka partisipasi sekolah SMP/MTs (13-15)	Persen	98,53	100	100	98,54	99,33	89,7	99,02	89,8	83,12
1,3	Angka Partisipasi Murni (APM)										
	APM SD/MI Paket A	Persen	98,16	100	100	99,65	99,65	27,75	99,73	28,1	99,84
	APM SMP/MTs Paket B	Persen	89,4	90,71	90,71	90,78	90,78	20,09	90,45	20,5	89,62
1,4	Angka Pendidikan yang ditamatkan										
a.	Persentase Penduduk yang Tamat SD	Persen	26,73	24,32	24,32	20,47	20,47	27,75	17,97	21,99	41,45
b.	Persentase Penduduk yang Tamat SMP	Persen	19,39	41,31	41,31	19,49	19,49	20,09	20,5	3,5	18,31
c.	Persentase Penduduk yang Tamat SMA	Persen	19,99	20,77	20,77	24,69	24,69	21,1	39,93*	7,75	27,80
d.	Persentase Penduduk yang Tamat DI/II/III	Persen	2,28	3,03	3,03	3,31	3,31	3		3,75	12,41
e.	Persentase Penduduk yang Tamat DIV/S1	Persen	6,98	10,3	10,3	10,5	10,5	7,5		8	*

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Sat	Kondisi Awal	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
				T	R	T	R	T	R	T	R
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1,5	Angka Kelulusan										
	Angka Kelulusan SD/MI	Persen	99,27	99,32	99,32	99,32	99,32	100	100	100	99,01
	Angka Kelulusan SMP/MTs	Persen	99,9	98,95	98,95	98,95	98,95	100	100	100	100
1,6	Angka Melanjutkan Sekolah										
	Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs	Persen	N/A	101,73	101,73	101,73	101,73	100	100	96,88	65,4
	Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/MA	Persen	N/A	100,93	100,93	100,93	100,93	100	100	43,86	100
1,7	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah										
	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD	Persen	96,88	96,88	96,88	96,88	96,88	96,88	96,88	96,88	70,32
	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMP	Persen	43,86	43,86	43,86	43,86	43,86	43,86	43,86	43,86	66,91
1,8	Rasio Guru terhadap murid										
	Rasio Guru terhadap murid SD/MI	Murid/Guru	11	11,5	11,5	13,2	13,2	11	11	11	9

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Sat	Kondisi Awal	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
				T	R	T	R	T	R	T	R
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Rasio Guru terhadap murid SMP/MTs	Murid/Guru	10	10,0	10,0	11,5	11,5	10	12	10	19
	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terakreditasi	Sekolah PAUD	N/A	15	15	20	20	45	30,9	60	35
1,9	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Persen	N/A	92,93	92,93	92	92	94	92	96	90,59
1,1	Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	Persen	N/A	85,11	85,11	92	92	94	92	96	90,88
2	Kesehatan										
2,1	Angka Kematian Bayi	Per 1000 KH	15,58	8	8	3,5	3,5	14,98	0,6	14,63	1,02
2,2	Angka Kematian Balita	per 1000 KH	2	3	3	3,5	3,5	1,43	0,6	1,4	0
2,3	Angka Kematian Neonatal	per 1000 KH	3	3	3	3,5	3,5	2,86	4,5	2,81	10,28
2,4	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 KH	50,6	51	51	0	0	40,6	112	0	257,2
2,5	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	Per 100.000 Pdkk	1,88	1,68	1,68	0,62	0,62	2,45	0,54	2,71	0,64

NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Sat	Kondisi Awal	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
				T	R	T	R	T	R	T	R
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2,4	Rasio Puskesmas	Per Kec	100	100	100	109	109	100	109	100	109
2,5	Cakupan Pembantu Puskesmas	Persen	26,21	26,21	26,21	27,6	27,6	26,5	27,6	26,6	27,6
2,6	Rasio dokter per satuan penduduk	Per 100.000 Pdkk	0,64	0,64	0,64	35,1	35,1	1,2	35,52	1,3	0,6
2,7	Capaian pelayanan Rujukan pasien Masyarakat Miskin	Persen	21,86	21,86	21,86	620,89	620,89	21,53	49	21,42	69,63
2,8	Cakupan Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan	Persen	100	0	0	0	0	100	100	100	0
2,9	Cakupan Desa Siaga Aktif	Persen	1	1	1	100	100	1	100	1	27,58
2,1	Cakupan Desa/kelurahan <i>Universal Child Immunization (UCI)</i>	Persen	80	83,45	83,45	68,3	68,3	86	62,1	87	35,86
2,1	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Per 100.000 Pdkk	188	188	188	211,48	211,48	230	111,77	240	146,5 9
2,1	Tingkat kematian karena tuberkulosis (per 100.000 Pddk)	Per 100.000 Pdkk	0	0	0	0	0	0	0	0	2,91
2,1	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	0

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Sat	Kondisi Awal	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
				T	R	T	R	T	R	T	R
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2,1	Penderita diare yang ditangani	Persen	95	80	80	8,05	8,05	95	63,9	95	292,71
2,2	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0019
2,2	Angka kejadian Malaria	Per 100.000 Pdkk	0	0	0	0	0	1	0	1	0
2,2	Cakupan kunjungan bayi	Persen	95	90	90	85,9	85,9	95	78,62	95	112,39
2,2	Cakupan kunjungan ibu hamil (K4)	Persen	95,2	95,2	95,2	82,8	82,8	95	96,5	95	118,67
2,2	Cakupan pelayanan nifas	Persen	91,5	91,5	91,5	75,7	75,7	90	83	90	79,26
2,2	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	Persen	81,7	81,7	81,7	100	100	80	7,8	80	0
2,2	Cakupan pelayanan anak balita	Persen	95	95	95	81,6	81,6	85	40,93	100	33,67
2,2	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI (MPASI) pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	Persen	100	100	100	0,91	0,91	100	50	100	29,27
2,2	Cakupan penjangkauan kesehatan siswa SD dan setingkat	Persen	96,7	96,7	96,7	86,7	86,7	100	86,4	100	72,12
2,2	Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang	Persen	95	95	95	0	0	100	0	100	0

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Sat	Kondisi Awal	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
				T	R	T	R	T	R	T	R
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam										
2,3	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	Persen	100	100	100	100	100	100	13	100	18,54
2,3	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Persen	84	84	84	78,5	78,5	90	85,1	90	85,14
2,3	Persentase Rumah Sakit Terakreditasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2,3	Persentase Puskesmas terakreditasi	Persen	0	27	27	100	100	25	100	-	100
3	Pekerjaan Umum										
3,1	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	Persen	67,1	45,32	45,32	46,66	46,66	80	45,48	85	45,54
3,2	Persentase rumah tinggal bersanitasi	Persen	N/A	44	44	46,72	46,72	70	46,72	70	46,72
3,3	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	Persen	N/A	-	-	-	-	80	28,06	85	16,8
3,4	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	Persen	N/A	51	51	-	-	60	0	65	0

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Sat	Kondisi Awal	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
				T	R	T	R	T	R	T	R
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3,5	Rasio Jaringan Irigasi	Persen	N/A	62,93	62,93	63,71	63,71	70	18,09	75	18,67
3,7	Rasio masjid per satuan penduduk	Persen	0,15	0,15	0,15	0,16	0,16	70	0,16	0,55	0,16
4	Penataan Ruang										
4,1	Ketaatan terhadap RTRW	Persen	N/A	0,015	0,015	0,014	0,014	30	0,01	10	0,03
5	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman										
5,1	Rasio rumah layak huni	Persen	9,53	20,8	20,8	20,45	20,45	20,78	20,64	24,1	20,78
5,2	Rasio pemukiman layak huni	Persen	N/A	15	15	15	15	20	15	24	15
5,3	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	Unit	574	0	0	50	50	678	50	878	80
5,4	Persentase pemukiman yang tertata	Persen	18	23	23	23,3	23,3	29	23,4	34	23,4
5,5	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	Persen	1,249	1,25	1,25	2,51	2,51	4,88	2,51	28	2,51
5,6	Cakupan lingkungan sehat dan aman yang didukung dengan PSU	Persen	65,2	65	65	65,13	65,13	70,2	65,13	72,2	65,13
5,7	Proporsi rumah tangga dengan akses	Persen		53	66,78	65,21	77,53	70	71,76	80	78

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Sat	Kondisi Awal	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
				T	R	T	R	T	R	T	R
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan										
6	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat										
6,1	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	Persen	N/A	41	41	101	101	93	89	94	29
6,2	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	Persen	N/A	80	80	80	80	80	80	85	90
7	Sosial										
7,1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Persen	65	61	61	3	3	80	0,6	80	53,01
7,2	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Persen	65	0	0	1	1	80	1,52	80	0
7,3	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Persen	95	100	100	100	100	95	1,05	95	100

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Sat	Kondisi Awal	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
				T	R	T	R	T	R	T	R
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Tidak Terkait Pelayanan Dasar										
1	Tenaga Kerja										
1,1	Rasio lulusan S1/S2/S3	Persen	8,1	8,82	8,82	10,3	10,3	20	1,94	25	2,82
1,2	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	Persen	N/A	59	59	60	60	30	0	35	79
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak										
2,1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Persen	8,3	46	46	8,8	7,98	8,9	5,99	9,1	5,81
2,2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	Persen	10	15	15	5	5	15	5	15	5
2,3	Rasio KDRT	Persen	N/A	0,03	0,03	0,27	0,27	13	0,013	12	0,014
2,4	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Persen	N/A	98	98	93	96,86	40	98,77	45	97,27

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Sat	Kondisi Awal	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
				T	R	T	R	T	R	T	R
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	Persen	N/A	80	80	66,6	66,6	100	100	100	100
3	Pangan										
3	Ketersediaan Pangan Utama	Persen	N/A	80	80	90	90	90	101	90	95
4	Pertanahan										
4,1	Persentase luas lahan bersertifikat	Persen	N/A	20	20	20	20	40	65,43	50	52
4,2	Penyelesaian kasus tanah Negara	Persen	N/A	70	70	100	100	70	0	70	50
5	Lingkungan Hidup										
5,1	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Ada/tidak ada	N/A	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	ada	Tidak Ada	ada	Tidak Ada
5,2	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	Ada/tidak ada	N/A	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	ada	Tidak Ada	ada	Tidak Ada
5,3	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	Persen	N/A	Belum	Belum Terukur	Belum Terukur	Belum Terukur	<1	Belum Terukur	<1	<1

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Sat	Kondisi Awal	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
				T	R	T	R	T	R	T	R
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Teruk ur							
5,4	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Ada/tidak ada	N/A	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	ada	Tidak Ada	ada	Ada
5,5	Persentase jumlah sampah yang tertangani	Persen	N/A	45	45	43,99	43,99	100	82	100	58,89
5,6	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	Persen	N/A	21,65	21,65	4,07	4,07	30	8,26	30	2,79
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil										
6,1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	Persen	N/A	87,86	87,86	95,82	95,82	97	98,75	98	93,53
6,2	Rasio bayi berakte kelahiran	Persen	N/A	79,18	79,18	73,97	73,97	100	57,39	100	85,45
6,3	Rasio pasangan berakte nikah	Persen	N/A	100	80	100	82	100	85	100	90
6,4	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada/tidak ada	N/A	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6,5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah/ Belum	N/A	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
6,6	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Persen	N/A	74,76	74,76	95,82	95,82	100	98,75	100	93,53

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Sat	Kondisi Awal	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
				T	R	T	R	T	R	T	R
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6,7	Cakupan penerbitan akta kelahiran	Persen	N/A	70,9	70,9	53,99	53,99	100	57,39	100	85,45
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa										
7,1	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	Persen	N/A	17,93	17,93	29,41	29,41	60	19,11	65	19,85
7,2	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Persen	N/A	18	18	20	20	30	14,7	35	14,7
7,3	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Persen	N/A	67	67	68,38	68,38	86	51,47	87	8
7,4	Persentase PKK aktif	Persen	N/A	46,2	46,2	72	72	86	52,94	87	100
7,5	Persentase LPM aktif	Persen	N/A	16,34	16,34	17,64	17,64	52	18,38	53	18,38
7,6	Persentase LPM berprestasi	Persen	N/A	6,89	6,89	7,35	7,35	16	7,35	17	7,35
7,7	Persentase Posyandu aktif	Persen	N/A	46,2	46,2	67	67	100	58,82	100	100
7,8	Swadaya masyarakat terhadap program	Persen	N/A	49,65	49,65	50	50	70	47,79	80	51,47

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Sat	Kondisi Awal	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
				T	R	T	R	T	R	T	R
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	pemberdayaan masyarakat										
7,9	Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat	Persen	N/A	49,65	49,65	50	50	70	33,08	80	34,55
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana										
8,1	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Orang	N/A	3,4	3,4	5,9	5,9	3	4	2	2
8,2	Ratio Akseptor KB	Persen	70	80,24	80,24	82	82	78	80	80	84,05
8,3	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49	Persen	N/A	80,24	80,24	87,01	87,01	85	80	87	84,05
8,4	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	Persen	100	100	100	100	100	100	163	100	289,8
9	Perhubungan										
9,1	Rasio ijin trayek	Indeks	N/A	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01
9,2	Jumlah uji kir angkutan umum	Unit	30	147	147	28	28	34	8	35	4

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Sat	Kondisi Awal	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
				T	R	T	R	T	R	T	R
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9,3	Pemasangan Rambu-rambu	Persen	N/A	60	60	60	60	85	74	88	0
9,4	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Orang	N/A	81080	81080	104390	104390	1200	990	1300	19800
9,5	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	Unit	5	5	5	5	5	5	5	5	5
10	Komunikasi dan Informatika										
	Cakupan Layanan Telekomunikasi	Persen	N/A	0,5	0,5	23,6	23,6	85	85	87	87
11	Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah										
11	Persentase koperasi aktif	Persen	N/A	3,08	3,08	11,28	11,28	30	37,59	35	21,9
11	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	Persen	80	91,6	91,6	49,49	49,49	72	49,49	70	49,49
12	Penanaman Modal										
12	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Badan Usaha	1	9	9	0	0	2	2	2	1
13	Kepemudaan dan Olah Raga										
13	Persentase organisasi pemuda yang aktif	Persen	N/A	91	91	90	90	30	82	40	82,5

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Sat	Kondisi Awal	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
				T	R	T	R	T	R	T	R
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Persentase wirausaha muda	Persen	N/A	10	10	66,8	66,8	20	67	25	70
13	Cakupan pembinaan olahraga	Persen	N/A	83,3	83,3	80	80	70	29	80	29
13	Cakupan pembinaan atlet muda	Persen	N/A	8,3	8,3	65,5	65,5	30	131	40	96
14	Jumlah atlet berprestasi	Orang	7	46	46	46	46	1	1	1	59
14	Jumlah prestasi olahraga di tingkat provinsi	Orang	N/A	44	44	-	-	1	1	1	59
14	Statistik										
14	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada/tidak ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
14	Buku "kabupaten dalam angka"	Ada/tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
15	Persandian										
	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	Persen	N/A	0,25	0,25	2,08	2,08	6	0	8	0
16	Kebudayaan										

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Sat	Kondisi Awal	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
				T	R	T	R	T	R	T	R
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Event	N/A	15	15	8	8	5	1	5	0
16	Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	Persen	N/A	0	0	0	0	100	7	100	4
16	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Jumlah	N/A	0	0	0	0	3	0	4	0
17	Perpustakaan					F					
17	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Orang	2660	3281	3281	3461	3461	4454	3005	5692	950
17	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Eks	31759	34612	33867	45802	40827	41287	45102	44463	45802
17	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	Per100	0,05	0,06	0,06	3,4	3,4	0,06	3,4	0,06	0,05
17	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	Orang	2423	1646	1646	3461	3461	3150	3461	3392	3128
18	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Judul	8257	8787	8787	9902	9902	9496	9,902	9908	9902
18	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	Orang	2	7	7	2	2	3	2	4	7
18	Kearsipan										

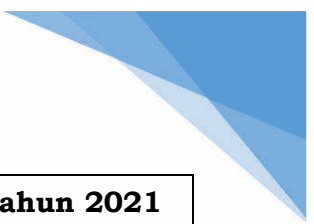
NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Sat	Kondisi Awal	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
				T	R	T	R	T	R	T	R
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	Persen	2	18	18	14,56	14,56	8	14,56	10	0
18	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Keg	3	-	-	1	1	3	1	3	0
	Layanan Urusan Pilihan										
1	Pariwisata										
1,1	Kunjungan wisata	Orang	2908	1138 4	11384	17646	17,646	3200	11,535	3300	11726
1,2	Lama kunjungan wisata	Hari	N/A	2 s/d 12	2 s/d 12	4	4	4	4	4	4
1,3	PAD sektor pariwisata	Rupiah	10 Juta	-	-	-	-	20 juta	0	20jt	0
2	Pertanian										
2,1	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	Persen	39,94	39,18	39,18	38,13	38,13	40,22	39,4	40,27	39,39
2,2	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	Persen	0,1	0,1	0,1	0,3	0,3	0,4	0,2	0,5	0,3
2,3	Cakupan bina kelompok tani	Persen	94	94	94	85	85	96,6	84	97,4	85

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Sat	Kondisi Awal	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
				T	R	T	R	T	R	T	R
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2,4	Produktivitas padi per hektar	Persen	4,9	4,9	4,9	3,4	3,4	5,2	4,53	5,3	4,2
3	Energi dan Sumber Daya Mineral										
3,1	Persentase rumah tangga pengguna listrik	Persen	97	97,5	97,5	97,8	97,8	98,25	98,25	98,75	98,75
3,2	Rasio ketersediaan daya listrik	Mega watt	8,6/ 7,1	8,7/ 7,35	8,7/ 7,35	9,2/ 7,9	9,2/ 7,9	9,7/ 8,35	9,8/ 8,45	9,8/ 8,85	9,8/ 8,85
3,3	Persentase pertambangan tanpa ijin	Ha	25	21	21	450,4	450,4	20	20	20	20
4	Perdagangan										
4,1	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Persen	11,07	10,81	10,99	10,58	11,33	11,6	10,99	11,8	10,55
4,2	Cakupan bina kelompok perdagangan atau usaha informal	Persen	N/A	3,07	3,07	3,8	3,8	30	3,08	35	2,93
5	Perindustrian										
5,1	Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB	Persen	10,4	11,48	12,14	8,52	10,75	10,55	10,63	10,6	10,79
5,2	Cakupan bina kelompok pengrajin	Orang	N/A	40	40	119	119	80	324,76	95	0

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Sat	Kondisi Awal	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
				T	R	T	R	T	R	T	R
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5,3	Pertumbuhan industry	Persen	5,56	5,66	5,66	5,82	5,82	5,86	0,61	5,96	0,44
6	Transmigrasi										
6,1	Persentase transmigran swakarsa	Persen	N/A	0	0	0	0	10	0	15	0
7	Perikanan										
7,1	Produksi perikanan	Persen	N/A	50	50	60	60	80	57	90	62
7,2	Konsumsi ikan	Persen	N/A	36,14	36,14	36,65	36,65	80	60	90	58
	Penunjang Urusan										
1	Perencanaan Pembangunan										
1,1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
1,2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada/tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Sat	Kondisi Awal	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
				T	R	T	R	T	R	T	R
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1,3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada/tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
1,4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
1,5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	Persen	85	82,5	82,5	81,7	81,7	100	94,5	100	89,42
1,6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	Persen	85	100	100	100	100	100	100,5	100	96,77
1,7	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	Persen	N/A	0	0,015	0	0,015	50	0,01	60	0,03
2	Keuangan										
2,1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	*
2,2	Persentase SILPA terhadap APBD	Persen	6	6,3	6,3	5,45	5,45	9	0,44	8	0,45
2,3	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	Persen	N/A	0	0	0	0	1	0,7	1	0
2,4	Total Belanja Langsung/Total APBD	Persen	63	48	48	50,67	50,67	56	44,94	56	50,96

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Sat	Kondisi Awal	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
				T	R	T	R	T	R	T	R
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2,5	Total Belanja Tidak Langsung/Total APBD	Persen	37	45	45	24,3	24,3	44	55,24	44	49,03
2,6	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	Persen	N/A	0,08	0,08	0,01	0,01	15	0,09	20	0,04
2,7	Penetapan APBD	Persen	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat waktu	Tepat Waktu
3	Kepegawaian										
3,1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	JP	N/A	132	132	200	200	200	200	200	887
3,2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Persen	N/A	10	10	-	-	20	0,35	25	0
3,3	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti Diklat structural	Persen	N/A	1	1	-	-	25	0	30	3,32
4	Sekretariat Dewan										
4,1	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen	Ada/tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada



NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Sat	Kondisi Awal	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
				T	R	T	R	T	R	T	R
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)										
4,2	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada/tidak ada	Ada	Ada	Ada		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada



BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk memperoleh proyeksi yang tepat mengenai kemampuan daerah dalam rangka mendanai rencana pembangunan dan pemecahan permasalahan secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan hal yang sangat penting di dalam rangka optimalisasi pemanfaatan potensi-potensi penerimaan daerah untuk melaksanakan pembangunan daerah, sehingga dapat tercapai target-target dalam peningkatan kualitas pembangunan. Pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Gayo Lues dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi dalam APBK yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBK merupakan instrumen yang menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan faktor strategis yang ikut menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tingkat kemampuan keuangan daerah dapat dilakukan dengan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, ekonomis, adil, bermanfaat, wajar, tertib, taat peraturan perundang-undangan, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengelolaan keuangan daerah merupakan sub-sistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan juga merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengelolaan keuangan yang baik adalah pengelolaan yang bisa mengoptimalkan potensi-potensi pembangunan suatu daerah, sehingga dapat tercapai target-target dalam peningkatan kualitas pembangunan.

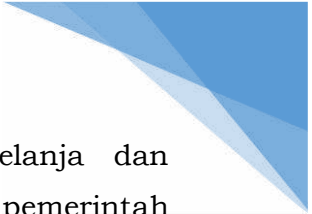


Guna mengetahui pertumbuhan keuangan daerah diperlukan suatu analisis pengelolaan keuangan daerah masa lalu sebagai dasar di dalam penentuan proyeksi penerimaan keuangan daerah pada tahun-tahun mendatang. Analisis kinerja keuangan masa lalu dilakukan terhadap penerimaan daerah dan pengeluaran daerah, penerimaan daerah yaitu pendapatan dari penerimaan pendapatan dan pembiayaan daerah serta pengeluaran daerah yaitu belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan. Kapasitas keuangan daerah pada dasarnya sejauh mana daerah mampu mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah. Berbagai objek penerimaan daerah dianalisis untuk memahami perilaku atau karakteristik penerimaan selama ini. Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran kapasitas pendapatan daerah dengan proyeksi tahun-tahun mendatang, untuk penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah gambaran mengenai pengelolaan pengelolaan keuangan atas pelaksanaan program kebijakan dalam mewujudkan, tujuan, dan misi pemerintah daerah. Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan tingkat pencapaian suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi pendapatan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditentukan melalui suatu kebijakan atau ketentuan suatu peraturan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Penilaian kinerja keuangan Kabupaten Gayo Lues dilihat dari dua sisi yaitu kinerja pencapaian pendapatan dan kinerja belanja Kabupaten Gayo Lues dari pelaksanaan program yang dijabarkan dalam APBK. Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan, maka diperlukan pendekatan prestasi kerja dalam penyusunan APBK, setiap alokasi biaya yang direncanakan harus dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai.

Kinerja keuangan yang disajikan ini merupakan kinerja keuangan selama periode tahun 2017-2021 berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang dikeluarkan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Gayo Lues yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). Struktur APBK Gayo Lues sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang



Pengelolaan Keuangan Daerah yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Sementara itu neraca daerah mencerminkan kondisi aset pemerintah daerah, kewajiban pemerintah daerah dan ekuitas dana. Kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues untuk pembiayaan sangat tergantung kepada pemerintah pusat dan Provinsi Aceh yaitu sebesar 83 persen, sedangkan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya sebesar 7 persen per tahun. Kinerja keuangan masa lalu menguraikan tentang kinerja pelaksanaan APBK. Kinerja pelaksanaan APBK diketahui dari kinerja pendapatan daerah dan kinerja belanja daerah. Gambaran kinerja keuangan masa lalu dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Gayo Lues, dijabarkan sebagai berikut.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBK

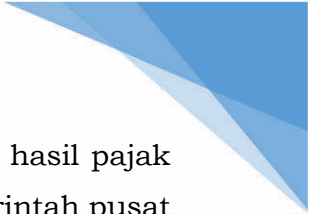
Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK), maka analisis kinerja pelaksanaan APBK harus dilakukan terhadap APBK itu sendiri, analisis kinerja pelaksanaan APBK pada dasarnya bertujuan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah.

Anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Gayo Lues merupakan instrumen untuk mengimplementasikan kebijakan keuangan Kabupaten Gayo Lues yang dibahas dan disetujui bersama antara Pemerintah Kabupaten Gayo Lues dan DPRK Gayo Lues serta ditetapkan dengan Qanun Kabupaten Gayo Lues. Secara umum kebijakan keuangan Kabupaten Gayo Lues dapat dilihat dari perkembangan APBK tahun per tahunnya. Secara umum struktur APBK merupakan satu kesatuan yang terdiri dari:

A. Pendapatan

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah terdiri atas :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah;
2. Dana Perimbangan yang meliputi dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana insentif daerah, dana desa, sesangkaan transfer pemerintah provinsi yaitu: dana bagi hasil pajak dari provinsi dan bagi hasil lainnya lainnya, bantuan keuangan dari pemerintah provinsi atau pemerintah lainnya;

- 
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah meliputi hibah, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah lainnya, bantuan keuangan dari pemerintah pusat dan pendapatan bagi hasil lainnya dari provinsi.

B. Belanja

Belanja Kabupaten Gayo Lues meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum Kabupaten Gayo Lues yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban Kabupaten Gayo Lues dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh Kabupaten Gayo Lues. Belanja Kabupaten Gayo Lues terdiri dari beberapa komponen :

1. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial, belanja operasi merupakan belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan;
2. Belanja Modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Belanja Modal merupakan belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan program dan kegiatan pemerintah daerah. Belanja Modal dalam APBK digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pilihan. Secara spesifik kebijakan alokasi belanja daerah Kabupaten Gayo Lues menitikberatkan alokasi belanja daerah pada bidang-bidang urusan wajib dan bidang urusan pilihan yang sesuai dengan prioritas pembangunan daerah;
3. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya;
4. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.

C. Pembiayaan

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. pembiayaan daerah dianggarkan dalam APBK dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang



urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah sesuai kode rekening berkenaan pada SKPK. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (SiLPA) merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dengan realisasi belanja daerah yang dalam APBK ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK tahun sebelumnya.

Secara keseluruhan realisasi pendapatan Kabupaten Gayo Lues dari tahun 2017-2021 mengalami penurunan dimana pada tahun 2017 realisasi pendapatan sebesar Rp. 976.610.487.499,45 dan pada tahun 2021 sebesar Rp. 866.299.706.637,24 dengan rata-rata pertumbuhan minus sebesar 3 persen. Menurut kelompok pendapatan Kabupaten Gayo Lues, rata-rata pertumbuhan positif pada Pendapatan Asli Daerah sebesar 2 persen, dana perimbangan rata-rata pertumbuhan menurun minus 1 persen. Sebaliknya untuk Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah mengalami pertumbuhan yang fluktuatif dari tahun 2017 sampai tahun 2021, pada tahun 2020 pendapatan hibah meningkat dikarenakan mendapat bantuan hibah dari provinsi untuk penanganan covid-19 dan infrastruktur secara keseluruhan rata-rata pertumbuhan sebesar 2.569 persen.

Rata-rata pertumbuhan belanja Kabupaten Gayo Lues selama periode 2017-2021 minus 3 persen, dimana pada tahun 2017 sebesar Rp.981.737.098.947,17 dan pada tahun 2021 sebesar Rp.865.796.574.657,60, yang terdiri dari pertumbuhan rata-rata dari belanja operasi sebesar minus 2 persen, belanja modal mengalami pertumbuhan negatif sebesar minus 4 persen, belanja tidak terduga meningkat sebesar 19 persen dan belanja transfer meningkat sebesar 0,1 persen.

Sedangkan rata-rata pertumbuhan pembiayaan Kabupaten Gayo Lues selama periode 2017-2021 mengalami pertumbuhan negatif mencapai minus 37 persen. Dengan rata-rata pertumbuhan penerimaan pembiayaan daerah sebesar minus 41persen, sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan stagnan sebesar minus 0 persen. Lebih jelas mengenai realisasi dan trend Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Gayo Lues periode Tahun 2017-2021 disajikan pada tabel dan gambar berikut:

Tabel 3.1**Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Kabupaten Gayo Lues 2017-2021**

No	Uraian	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	PENDAPATAN	976.610.487.499,45	860.506.512.575,25	955.951.451.751,26	920.676.739.729,40	866.299.706.637,24	(3)%
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	60.312.455.602,47	48.758.464.134,18	51.415.803.751,47	58.402.728.094,40	63.638.387.113,24	2%
	Pendapatan Pajak Daerah	5.433.785.265,80	6.144.707.294,00	6.978.714.035,00	5.904.228.419,00	7.877.737.919,00	11%
	Pendapatan Retribusi Daerah	22.296.472.033,00	1.427.456.490,00	1.719.285.047,00	1.019.816.159,00	1.254.803.190,00	(23)%
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.522.600.616,60	3.773.178.707,00	3.987.633.126,00	4.240.372.089,26	3.739.145.018,76	2%
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	29.059.597.687,07	37.413.121.643,18	38.730.171.543,47	47.238.311.427,14	50.766.700.985,48	15%
	PENDAPATAN TRANSFER	916.182.305.212,98	799.905.438.023,07	890.680.674.711,79	821.686.800.104,00	789.832.405.524,00	(3)%
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN	571.558.575.124,00	649.955.059.479,00	585.232.201.100,00	539.387.276.926,00	534.811.046.801,00	(1)%
	Dana Bagi Hasil Pajak	10.742.399.185,00	8.338.551.222,00	7.186.270.673,00	11.414.981.130,00	10.525.027.932,00	4%
	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	8.004.907.742,00	8.705.340.153,00	5.521.572.021,00	4.636.120.659,00	5.808.624.051,00	(5)%
	Dana Alokasi Umum	462.943.021.000,00	462.943.021.000,00	472.230.875.000,00	423.662.731.000,00	419.760.894.000,00	(2)%
	Dana Alokasi Khusus	89.868.247.197,00	169.968.147.104,00	100.293.483.406,00	99.673.444.137,00	98.716.500.818,00	12%



No	Uraian	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA	112.903.222.000,00	127.709.134.895,00	112.011.066.895,00	124.146.254.000,00	134.861.957.800,00	5%
	Dana Penyesuaian	112.903.222.000,00	127.709.134.895,00	112.011.066.895,00	124.146.254.000,00	134.861.957.800,00	5%
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	231.720.508.088,98	22.241.243.649,07	193.437.406.716,79	158.153.269.178,00	120.159.400.923,00	159%
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	19.580.968.062,23	22.241.243.649,07	31.390.213.275,79	30.792.926.101,00	27.726.948.603,00	11%
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	117.300.000,00	-	-	(25)%
	Dana Otonomi Khusus	212.139.540.026,75		161.929.893.441,00	92.360.343.077,00	-	(61)%
	Pendapatan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pmerintah Lainnya	-	-	-	35.000.000.000,00	92.432.452.320,00	164%
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	115.726.684,00	11.842.610.418,00	13.854.973.288,00	40.587.211.531,00	12.828.914.000,00	2.569%
	Pendapatan Hibah	2.663.875,00	11.837.360.000,00	13.850.800.000,00	40.566.250.000,00	-	111.094%
	Pendapatan Lainnya	113.062.809,00	5.250.418,00	4.173.288,00	20.961.531,00	12.828.914.000,00	15.347%
	BELANJA	981.737.098.947,17	872.242.666.102,85	997.301.204.353,29	922.032.643.854,40	865.796.574.657,60	(3)%
	BELANJA OPERASI	560.800.703.232,00	513.860.742.203,85	621.477.939.644,61	540.757.456.053,00	504.558.624.112,60	(2)%
	Belanja Pegawai	212.150.728.858,00	219.879.393.388,00	232.267.735.256,00	271.562.231.306,00	233.033.767.681,00	3%
	Belanja Barang dan Jasa	250.279.029.214,00	250.080.915.915,85	294.748.042.427,61	235.677.224.747,00	231.617.001.287,60	(1)%



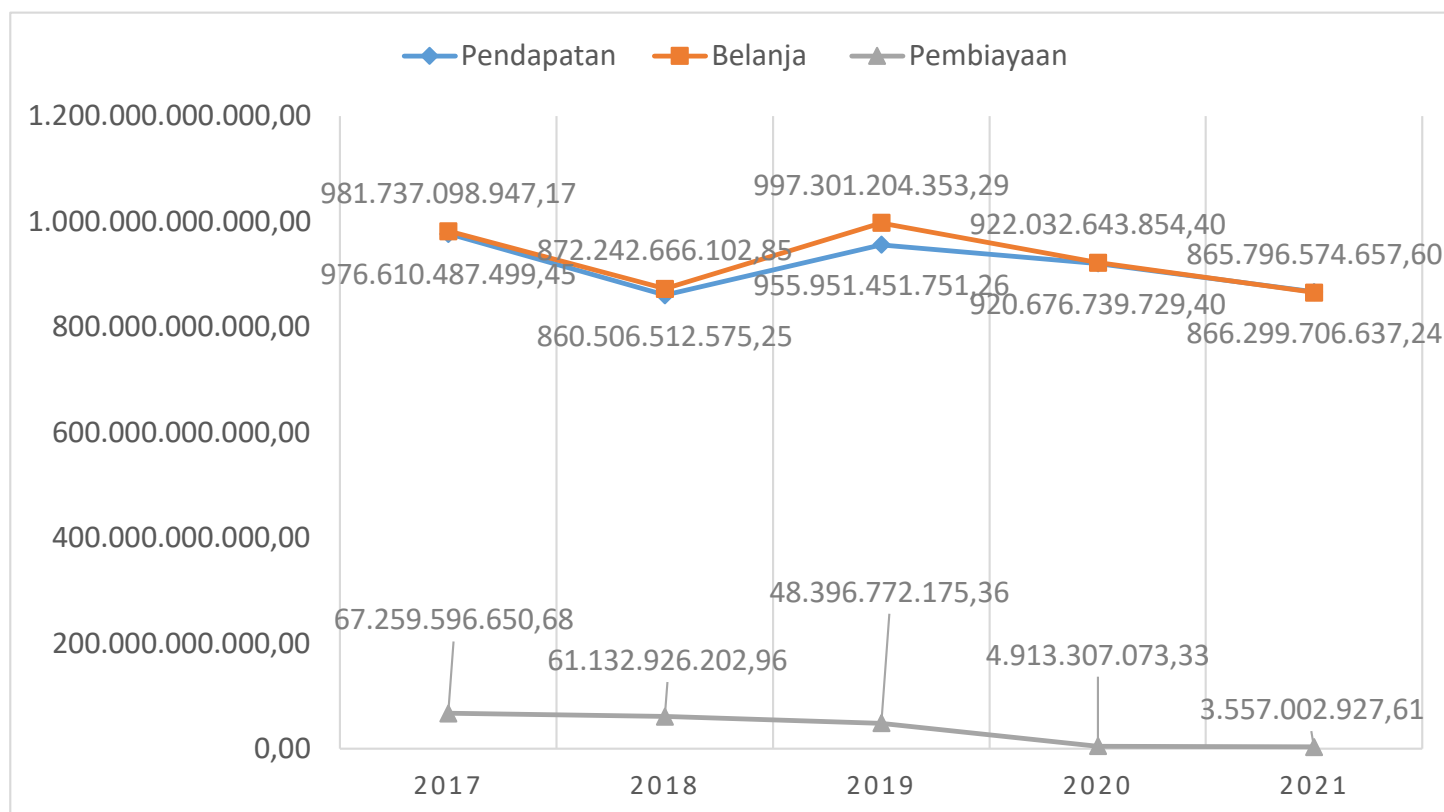
No	Uraian	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Belanja Subsidi	2.380.320.000,00	-	-	-	-	
	Belanja Hibah	89.489.569.160,00	36.388.752.900,00	82.791.461.961,00	16.546.400.000,00	30.217.065.044,00	18%
	Belanja Bantuan Sosial	6.501.056.000,00	7.511.680.000,00	11.670.700.000,00	16.971.600.000,00	9.690.790.100,00	18%
	BELANJA MODAL	241.994.974.893,00	182.929.286.128,00	189.666.012.327,68	158.855.311.972,40	192.711.178.360,00	(4)%
	Belanja Tanah	300.356.456,00	1.062.999.760,00	-	2.171.408.000,00	4.416.728.320,00	64%
	Belanja Peralatan dan Mesin	50.573.152.710,00	31.381.165.940,00	24.561.272.300,00	35.623.882.341,40	21.412.736.943,00	(14)%
	Belanja Gedung dan Bangunan	45.758.008.700,00	26.562.695.958,00	51.167.562.475,68	49.096.877.587,00	61.033.107.800,00	18%
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	140.822.019.527,00	110.187.713.170,00	112.754.354.752,00	64.508.416.350,00	104.771.126.217,00	0%
	Belanja Aset Tetap Lainnya	4.541.437.500,00	13.734.711.300,00	1.182.822.800,00	7.454.727.694,00	1.077.479.080,00	139%
	BELANJA TIDAK TERDUGA	24.292.898.900,00	26.465.320.000,00	25.919.170.500,00	63.548.507.560,00	14.884.920.415,00	19%
	Belanja Tidak Terduga	24.292.898.900,00	26.465.320.000,00	25.919.170.500,00	63.548.507.560,00	14.884.920.415,00	19%
	BELANJA TRANSFER	154.648.521.922,17	148.987.317.771,00	160.238.081.881,00	158.871.368.269,00	153.641.851.770,00	(0,1)%
	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	750.400.800,00	741.664.305,00	571.656.615,00	797.864.500,00	-	(21)%
	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	602.756.200,00	569.190.178,00	442.525.564,00	719.547.700,00	-	(16)%
	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	147.644.600,00	172.474.127,00	129.131.051,00	78.316.800,00	-	(37)%
	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	153.898.121.122,17	148.245.653.466,00	159.666.425.266,00	158.073.503.769,00	153.641.851.770,00	0%



No	Uraian	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Tranfer Bantuan Keuangan Ke Desa	153.473.989.056,17	147.821.521.400,00	159.242.293.200,00	158.015.630.769,00	153.641.851.770,00	0%
	Tranfer Bantuan Keuangan Lainnya	424.132.066,00	424.132.066,00	424.132.066,00	57.873.000,00	-	(47)%
	SURPLUS/(DEFISIT)	(5.126.611.447,72)	(11.736.153.527,60)	(41.349.752.602,03)	(1.355.904.125,00)	503.131.979,64	37%
	PEMBIAYAAN						
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	68.259.596.650,68	62.132.926.202,96	49.396.772.175,36	6.913.307.073,33	3.557.402.948,33	(41)%
	SiLPA	68.259.596.650,68	62.132.926.202,96	49.396.772.175,36	6.913.307.073,33	3.557.402.948,33	(41)%
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	2.000.000.000,00	-	0%
	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	2.000.000.000,00	-	0%
	PEMBIAYAAN NETTO	67.259.596.650,68	61.132.926.202,96	48.396.772.175,36	4.913.307.073,33	3.557.402.948,33	(37)%
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	62.132.985.202,96	49.396.772.675,36	7.047.019.573,33	3.557.402.948,33	4.060.534.927,97	(35)%

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Gayo Lues Tahun 2022

Gambar 3.1
Realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017 - 2021



Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Gayo Lues Tahun 2022

Dari tabel diatas selama tahun 2017-2021 menggambarkan trend realisasi pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Kabupaten Gayo Lues mengalami fluktuasi, baik itu pendapatan, belanja dan pembiayaan Kabupaten Gayo Lues.

1.1.1.1. Pendapatan Daerah

Secara umum komponen pendapatan terdiri dari:

1. Pendapatan asli daerah berasal dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
2. Dana perimbangan yang berasal dari bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus;
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah yang berasal dari pendapatan hibah dan pendapatan lainnya.

Pendapatan daerah yang disajikan secara serial menginformasikan mengenai rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Gayo lues Tahun Anggaran 2017–2021 sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2
Anggaran dan Realisasi Pendapatan
Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017-2021

TAHUN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI		
		Rp	Persen	Pertumbuhan (%)
2017	1.090.063.302.210,76	976.610.487.499,45	89,59	0,11
2018	873.263.059.099,60	860.506.512.575,25	98,54	(0,20)
2019	978.089.588.397,00	955.951.451.751,26	97,74	0,12
2020	910.107.790.360,00	920.676.739.729,40	101,16	(0,07)
2021	866.235.363.083,00	866.299.706.637,24	100,01	(0,05)
Rata-rata	943.551.820.630,07	916.008.979.638,52	97,41	(0,02)

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Gayo Lues Tahun 2022

Rata-rata anggaran pendapatan Kabupaten Gayo Lues tahun 2017-2021 berjumlah sebesar Rp.943.551.820.630,07 dengan rata-rata realisasi mencapai Rp.916.008.979.638,52 atau sebesar 97,41 persen. Realisasi Pendapatan Kabupaten Gayo Lues melebihi anggaran pendapatan diatas 100 persen, terdapat pada tahun 2020 dan 2021, sebaliknya pada tahun 2017-2019 realisasi pendapatan Kabupaten Gayo Lues tidak mencapai target 100%. Secara keseluruhan, target anggaran maupun realisasi Pendapatan Kabupaten Gayo Lues selama periode tahun 2017-2021 cenderung turun.

Disamping itu jika dilihat dari rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan Kabupaten Gayo Lues selama periode tahun 2017-2021 sebesar 0,02 persen, pertumbuhan realisasi tertinggi adalah pada tahun 2019 sebesar 0,12 persen dan mengalami pertumbuhan yang negatif pada tahun 2018, 2020 dan 2021.

1.1.1.2. Belanja Daerah

Selain mengukur kinerja APBK dari sumber pendapatan, juga dilakukan pada sisi realisasi belanja pemerintah daerah. Secara umum komponen belanja terdiri dari:

1. Belanja Operasi

Belanja operasi yang didalamnya terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.

2. Belanja Modal

Belanja modal yang didalamnya terdiri atas belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya.

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

4. Belanja Transfer

Belanja transfer yang didalamnya terdiri atas pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.

Pengukuran kinerja suatu daerah juga dapat dilihat dari seberapa besar realisasi belanja yang telah terserap, semakin besar realisasi belanja semakin bagus kinerja suatu daerah. Alokasi belanja daerah sebagian besar dialokasikan untuk pelayanan kepada masyarakat sehingga bisa menggerakkan perekonomian sektor riil yang berakibat pada peningkatan pendapatan masyarakat. Realisasi belanja daerah tahun 2017–2021 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.3
Anggaran dan Realisasi Belanja
Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017-2021

TAHUN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI		
		Rp	Persen	Pertumbuhan (%)
2017	981.737.098.947,17	981.737.098.947,17	100,00	0,02
2018	934.396.044.302,56	872.242.666.102,85	93,35	(0,05)
2019	1.069.686.029.330,45	997.301.204.353,29	93,23	0,14
2020	933.747.370.372,77	922.032.643.854,40	98,75	(0,13)
2021	887.592.766.031,00	865.796.574.657,60	97,54	(0,05)
Rata-rata	961.431.861.796,79	927.822.037.583,06	96,50	(0,01)

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Gayo Lues Tahun 2022

Rata-rata Belanja Kabupaten Gayo Lues tahun 2017-2021 berjumlah sebesar Rp.961.431.861.796,79 dengan realisasi mencapai Rp.927.822.037.583,06 atau sebesar 96,50 persen. Realisasi Belanja Kabupaten Gayo Lues yang 100 persen, terdapat pada tahun 2017, sebaliknya pada tahun 2018-2021 realisasi belanja Kabupaten Gayo Lues tidak mencapai target 100 persen. Secara keseluruhan, anggaran maupun realisasi Belanja Kabupaten Gayo Lues selama periode tahun 2017-2021 cenderung turun. Disamping itu jika dilihat dari rata-rata pertumbuhan realisasi Belanja Kabupaten Gayo Lues selama periode tahun 2017-202 mengalam

Rencana Pembangunan Kabupaten Gayo Lues Tahun 2023-2026

rata-rata pertumbuhan yang negatif sebesar 0,01 persen, realisasi rata-rata pertumbuhan terendah adalah pada tahun 2020 sebesar minus 0,13 persen sedangkan pertumbuhan tertinggi pada tahun 2019 sebesar 0,14 persen.

1.1.1.3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Secara umum komponen pembiayaan daerah Kabupaten Gayo Lues terdiri dari:

1. Penerimaan pembiayaan daerah yang didalamnya terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah;
2. Pengeluaran pembiayaan daerah yang didalamnya terdiri atas pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (Investasi) pemerintah daerah, dan pembayaran pokok utang.

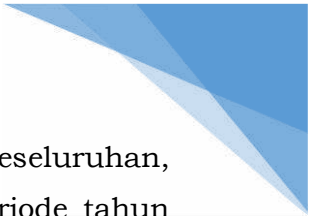
Gambaran tentang realisasi pembiayaan daerah yang disajikan pada tabel di bawah ini menginformasikan mengenai rata-rata perkembangan/kenaikan realisasi penerimaan dan pengeluaran daerah Kabupaten Gayo Lues. Realisasi pembiayaan daerah tahun 2017–2021 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.4
Anggaran dan Realisasi Pembiayaan
Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017-2021

TAHUN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI		
		Rp	Persen	Pertumbuhan (%)
2017	70.000.000.000,00	67.259.596.650,68	96,09	(0,08)
2018	61.132.926.202,96	61.132.926.202,96	100,00	(0,13)
2019	48.396.772.675,36	48.396.772.175,36	100,00	(0,21)
2020	23.639.580.012,77	4.913.307.073,33	20,78	(0,51)
2021***	21.357.402.948,00	3.557.402.948,33	16,66	(0,10)
Rata-rata	44.905.336.367,82	37.052.001.010,13	82,51	(0,20)

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Gayo Lues Tahun 2022

Rata-rata pertumbuhan Pembiayaan Kabupaten Gayo Lues tahun 2017-2021 mengalami pertumbuhan yang sebesar Rp.44.905.336.267,82 dengan rata-rata realisasi pembiayaan sebesar Rp.37.052.001.010,13 atau sebesar 82,51 persen. Realisasi Pembiayaan Kabupaten Gayo Lues mencapai 100 persen, terdapat pada tahun 2018 dan 2019 sebaliknya pada tahun 2017, 2020 dan 2021 realisasi



pendapatan Kabupaten Gayo Lues dibawah 100 persen. Secara keseluruhan, anggaran maupun realisasi Belanja Kabupaten Gayo Lues selama periode tahun 2017-2020 cenderung turun. Jika dilihat dari rata-rata pertumbuhan realisasi pembiayaan Kabupaten Gayo Lues selama periode tahun 2017-2021 mengalami penurunan sebesar minus 0,20 persen.

3.1.1. Neraca Daerah

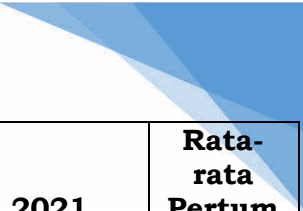
Neraca adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Neraca daerah merupakan kondisi keuangan Kabupaten Gayo Lues serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas dan solvabilitas.

Neraca daerah merupakan laporan keuangan yang harus dibuat oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah menyebutkan bahwa neraca merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh setiap pemerintah daerah yang memberikan informasi tentang posisi keuangan pemerintah daerah. Laporan neraca daerah ini memberikan informasi penting kepada pemerintah daerah, manajemen pemerintah, pihak legislatif daerah maupun pemberi pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan/aset daerah dan kewajiban daerah serta ekuitas dana. Selanjutnya mengenai gambaran neraca daerah Kabupaten Gayo Lues dalam kurun waktu Tahun 2017–2021 disajikan pada tabel di bawah ini.

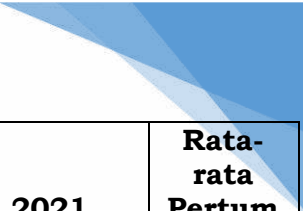


Tabel 3.5
Neraca dan Rata-rata Pertumbuhan Neraca
Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017-2021

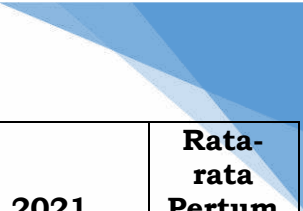
No	Uraian	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Rata-rata Pertum- buhan (%)
1	ASET						
2	ASET LANCAR						
3	Kas di Kas Daerah	61.303.187.789,96	46.074.681.531,90	5.037.700.388,34	1.514.756.348,36	1.167.911.813,23	
4	Kas di Bendahara Penerimaan	-	32.303.952,54	37.881.209,00	-	-	
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	166.894.100,00	-	-	-	-	
6	Kas di BLUD	-	2.466.585.744,02	111.893.545,69	1.217.373.926,97	2.824.867.530,74	
7	Kas di Bendahara FKTP (JKN)	642.111.113,00	822.657.877,70	823.782.522,00	825.212.673,00	67.755.584,00	
8	Kas di Bendahara BOS	20.733.200,00	-	902.000.000,00	60.000,00	-	
9	Kas Lainnya	3.320.725,07	1.195.336.429,42	3.473.319,18	20.860.251,00	658.740.740,00	
10	Setara Kas	-	-	-	-	-	



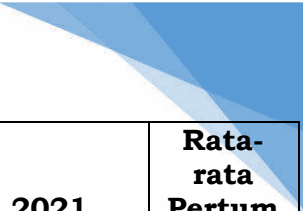
No	Uraian	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Rata-rata Pertumbuhan (%)
11	Investasi Jangka Pendek	-	-	-	512.500.000,00	512.500.000,00	
12	Piutang Pajak Daerah	1.695.950.804,20	1.820.507.037,20	2.224.092.826,20	2.264.575.185,20	2.373.735.555,20	
13	Piutang Retribusi	6.211.150.740,00	465.262.400,00	465.413.900,00	469.577.000,00	463.258.200,00	
14	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	-	8.548.776.939,00	12.623.230.880,00	4.378.355.809,00	7.357.458.300,00	
15	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	-	3.070.560.860,00	1.654.530.059,00	2.090.834.642,00	
16	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	888.190.942,18	9.049.171.855,79	8.561.196.714,00	4.930.052.588,00	5.608.873.210,00	
17	Piutang Lainnya	2.494.476.175,00	2.494.476.175,00	6.755.884.162,00	2.494.476.175,00	2.494.476.175,00	
18	Penyisihan Piutang	(3.974.750.452,32)	(4.135.923.766,70)	(4.375.377.324,93)	(4.441.271.134,79)	(4.520.606.952,69)	
19	Beban Dibayar Dimuka	155.790.040,92	150.218.283,30	92.463.987,15	196.280.366,65	164.051.197,43	
20	Persediaan	13.011.654.191,00	9.817.929.310,00	33.638.975.624,07	15.863.254.041,54	11.617.575.364,27	
21	JUMLAH ASET	82.618.709.369,01	78.801.983.769,17	69.973.172.612,70	31.900.593.288,93	32.881.431.359,18	(23)%



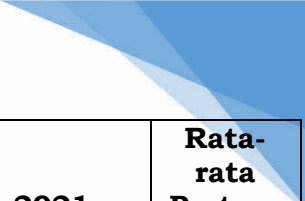
No	Uraian	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Rata-rata Pertumbuhan (%)
	LANCAR (3 s.d. 20)						
22	INVESTASI JANGKA PANJANG						
23	Investasi Jangka Panjang Non Permanen						
24	Investasi Non Permanen Lainnya	512.500.000,00	512.500.000,00	512.500.000,00	-	-	
25	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG NON PERMANEN (24)	512.500.000,00	512.500.000,00	512.500.000,00	-	-	-
26	Investasi Jangka Panjang Permanen						
27	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	21.739.799.094,87	22.245.158.011,87	64.487.978.136,87	66.465.600.573,27	66.942.191.558,27	
28	JUMLAH INVESTASI	21.739.799.094,87	22.245.158.011,87	64.487.978.136,87	66.465.600.573,27	66.942.191.558,27	49%



No	Uraian	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Rata-rata Pertumbuhan (%)
	JANGKA PANJANG PERMANEN (27)						
29	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG (25 + 28)	22.252.299.094,87	22.757.658.011,87	65.000.478.136,87	66.465.600.573,27	66.942.191.558,27	49%
30	ASET TETAP						
31	Tanah	196.443.873.690,98	198.696.137.400,98	282.435.181.527,98	302.319.917.431,98	306.403.151.167,98	
32	Peralatan dan Mesin	325.941.853.670,93	352.846.753.385,93	380.427.334.880,93	410.067.638.856,33	434.204.913.495,89	
33	Gedung dan Bangunan	665.337.480.006,24	708.650.305.389,24	766.382.469.033,92	811.857.047.534,20	880.581.561.537,30	
34	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.198.857.552.943,00	1.336.818.737.469,00	1.468.856.841.753,00	1.546.262.194.758,84	1.659.736.768.039,84	
35	Aset Tetap Lainnya	18.747.074.324,43	19.643.455.924,43	20.733.748.984,43	24.463.562.234,43	23.466.623.834,43	
36	Konstruksi Dalam Pengerjaan	18.573.760.264,00	18.246.565.314,00	18.505.130.534,00	8.115.155.362,00	9.270.205.078,00	
37	Akumulasi Penyusutan	(610.880.430.525,07)	(776.519.945.792,63)	(953.220.386.065,04)	(1.154.163.468.873,48)	(1.299.064.935.174,89)	
38	JUMLAH ASET TETAP (31 s.d. 37)	1.813.021.164.374,51	1.858.382.009.090,95	1.984.120.320.649,22	1.948.922.047.304,30	2.014.598.287.978,55	3%
39	ASET LAINNYA						



No	Uraian	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Rata-rata Pertumbuhan (%)
40	Tagihan Jangka Panjang	15.852.517.540,00	15.852.517.540,00	15.790.730.040,00	18.069.777.540,00	16.879.695.040,00	
41	Aset Tidak Berwujud	3.515.548.000,00	7.303.915.600,00	6.074.167.200,00	5.391.586.847,61	7.226.243.600,00	
42	Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	-	-	-	(2.290.420.866,68)	
43	Aset Lain-lain	75.399.897.396,25	1.357.872.317,99	705.725.755,97	1.868.858.637,99	1.488.324.489,99	
44	JUMLAH ASET LAINNYA (40 s.d. 42)	94.767.962.936,25	24.514.305.457,99	22.570.622.995,97	25.330.223.025,60	23.303.842.263,31	18%
45	JUMLAH ASET (21 + 29 + 38 + 44)	2.012.660.135.774,64	1.984.455.956.329,98	2.141.664.594.394,76	2.072.618.464.192,10	2.137.725.753.159,31	2%
46	KEWAJIBAN						
47	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
48	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	22.000,00	-	100.680.942,84	20.807.751,00	-	
49	Pendapatan Diterima Dimuka	-	11.430.000,00	9.104.167,00	22.712.229,00	25.585.365,00	
50	Utang Beban	287.860,00	4.034.963.422,08	18.214.496.242,00	23.289.458.693,00	39.060.725.575,37	



No	Uraian	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Rata-rata Pertumbuhan (%)
51	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	1.953.338.500,00	20.891.072.820,00	-	3.376.397.164,00	
52	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK (48 s.d. 51)	309.860,00	5.999.731.922,08	39.215.354.171,84	23.332.978.673,00	42.462.708.104,37	4841,91%
53	JUMLAH KEWAJIBAN (52)	309.860,00	5.999.731.922,08	39.215.354.171,84	23.332.978.673,00	42.462.708.104,37	4841,91%
54	EKUITAS						
55	EKUITAS	2.012.659.825.914,64	1.978.456.224.407,90	2.102.449.240.222,92	2.049.285.485.519,10	2.095.263.045.054,94	
56	JUMLAH EKUITAS (55)	2.012.659.825.914,64	1.978.456.224.407,90	2.102.449.240.222,92	2.049.285.485.519,10	2.095.263.045.054,94	1%
57	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS (53 + 56)	2.012.660.135.774,64	1.984.455.956.329,98	2.141.664.594.394,76	2.072.618.464.192,10	2.137.725.753.159,31	1%

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Gayo Lues Tahun 2022

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu (2017-2021)

a. Kebijakan Pendapatan

Kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Gayo lues merupakan perkiraan yang terukur, dan memiliki kepastian serta dasar hukum yang jelas. Kebijakan pendapatan daerah tersebut diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan. Untuk meningkatkan pendapatan daerah dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan;
2. Memantapkan kelembagaan melalui peningkatan peran dan fungsi UPT, dan Balai Penghasil;
3. Meningkatkan koordinasi antara pusat-daerah untuk pengalokasian sumber pendapatan dari dana perimbangan dan non perimbangan;
4. Meningkatkan *deviden* BUMD dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah;
5. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi;
6. Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan aset daerah;
7. Pemantapan kinerja organisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak;
8. Meningkatkan kemampuan aparatur yang berkompeten dalam rangka peningkatan pendapatan.

Adapun kebijakan pendapatan untuk meningkatkan dana perimbangan sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan penerimaan pajak orang pribadi dalam negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21, dan PPh Badan;
2. Meningkatkan koordinasi secara intensif dengan pemerintah pusat untuk dana perimbangan dan kabupaten/kota untuk obyek pendapatan sesuai wewenang provinsi.

Berdasarkan kebijakan perencanaan pendapatan daerah tersebut, dalam merealisasikan perkiraan rencana penerimaan pendapatan daerah (target), dilakukan strategi pencapaiannya sebagai berikut:

1. Strategi pencapaian target pendapatan asli daerah, ditempuh melalui:
 - a. Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan serta penyederhanaan sistem prosedur pelayanan;
 - b. Pelaksanaan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru;

- 
- c. Peningkatan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap;
 - d. Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan pendapatan asli daerah.
2. Strategi pencapaian target dana perimbangan, dilakukan melalui:
 - a. Sosialisasi secara terus menerus dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak;
 - b. Peningkatan akurasi data potensi baik potensi pajak maupun potensi sumber daya alam bekerjasama dengan Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pajak sebagai dasar perhitungan Bagi Hasil.

b. Kebijakan Belanja

Belanja daerah diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Kebijakan belanja daerah Kabupaten Gayo Lues sebagai berikut:

1. Memprioritaskan belanja untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib dan pilihan;
2. Memprioritaskan pemenuhan rencana pembangunan kabupaten Tahun 2023-2026;
3. Pemenuhan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari Belanja Daerah;
4. Pemenuhan anggaran fungsi kesehatan sekurang-kurangnya 10 persen dari total belanja APBD diluar gaji;
5. Pemenuhan anggaran fungsi infrastruktur;
6. Pengalokasian Bantuan keuangan kabupaten/kota, bantuan desa, hibah, Bansos;
7. Pengalokasian Anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), Belanja Operasional Sekolah (BOS) Pusat, Pajak Rokok sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
8. Mengalokasikan anggaran untuk kepentingan nasional serta kebutuhan penting dan mendesak lainnya.

c. Kebijakan Pembiayaan

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar dari pada penerimaan sehingga terdapat defisit. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah. Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah timbul karena ada surplus/kelebihan anggaran. Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah direncanakan penyertaan modal pada Bank Aceh Syariah.

3.1.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Analisis proporsi realisasi terhadap anggaran bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan daerah Kabupaten Gayo Lues pada periode tahun anggaran sebelumnya. Hasilnya digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah serta untuk menentukan kebijakan pembelanjaan di masa datang. Secara umum belanja daerah dapat dikategorikan ke dalam belanja paratur dan belanja publik. Belanja publik merupakan belanja yang penggunaannya diarahkan dan dinikmati langsung oleh masyarakat.

a. Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Gayo Lues

Gambaran tentang belanja daerah yang menginformasikan mengenai proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur Pemerintah Daerah. Kabupaten Gayo Lues. Belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur terdiri atas belanja pegawai ditampilkan pada tabel di bawah:

Tabel 3.6
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Gayo Lues

No	Uraian	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Persentase
		(a)	(b)	(a) / (b) x 100%
1	2017	212.150.728.858,00	982.737.098.947,17	22%
2	2018	219.879.393.388,00	873.242.666.102,85	25%
3	2019	232.267.735.256,00	998.301.204.353,29	23%
4	2020	271.562.231.306,00	924.032.643.854,40	29%
5	2021	233.033.767.681,00	865.796.574.657,60	27%
	Rata-rata	233.778.771.297,80	928.822.037.583,06	25%

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Gayo Lues Tahun 2022

Realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Rata-rata belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur selama tahun 2017-2021 Kabupaten Gayo Lues terlihat adanya fluktuasi. Rata-rata total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur selama tahun 2017-2021 sebesar Rp.233.778.771.297,80 dan rata-rata total pengeluaran belanja dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.928.822.037.583,06 atau sebesar 25 persen.

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa Analisis Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur untuk tahun 2017-2021. Persentase belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dibandingkan dengan total pengeluaran daerah relatif meningkat antar tahun pada periode Tahun 2017–2021. Pada tahun 2020 proporsinya adalah 29 persen. Ini berarti belanja untuk pembangunan tetap lebih besar dibandingkan dengan belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur.

3.1.2. Analisis Pembiayaan

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Analisis ini juga menunjukkan kemampuan

pemerintah untuk mencukupi pembiayaan akibat selisih pendapatan dengan alokasi belanja.

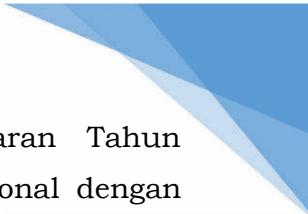
Adapun pembiayaan tersebut bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup : pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah. Perkembangan Pembiayaan selama tahun 2017- 2021 sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 3.7

Surplus/Defisit Riil Anggaran Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
	Pendapatan :					
1	Realisasi Pendapatan Daerah	976.610.487.499,45	860.506.512.575,25	955.951.451.751,26	920.676.739.729,40	866.299.706.637,24
	Total Penerimaan	976.610.487.499,45	860.506.512.575,25	955.951.451.751,26	920.676.739.729,40	866.299.706.637,24
	Dikurangi:					
1	Realisasi Belanja & Transfer Daerah	981.737.098.947,17	872.242.666.102,85	997.301.204.353,29	922.032.643.854,40	865.796.574.657,60
2.	Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	2.000.000.000,00	-
	Surplus /Defisit riil	(6.126.611.447,72)	(12.736.153.527,60)	(42.349.752.602,03)	(3.355.904.125,00)	503.131.979,64
	Ditutup oleh realisasi penerimaan pembiayaan					
1	Realisasi Penerimaan Pembiayaan	68.259.596.650,68	62.132.926.202,96	49.396.772.175,36	6.913.307.073,33	3.557.402.948,33
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	62.132.985.202,96	49.396.772.675,36	7.047.019.573,33	3.557.402.948,33	4.060.534.927,97

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Gayo Lues Tahun 2022



Perencanaan penganggaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun anggaran sebelumnya. Hal ini untuk menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran berjalan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

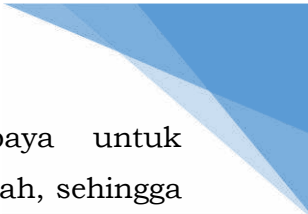
Data Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan nilai yang fluktuatif dan cenderung menurun. Selama kurun waktu 2017 sampai 2021, nilai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tertinggi pada tahun 2017 yaitu Rp 62.132.985.202,96.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa untuk pembangunan Kabupaten Gayo Lues memanfaatkan silpa yang ada untuk menutup defisit. Untuk menghindari defisit belanja dengan cara menutupnya dari penerimaan SiLPA pada tahun sebelumnya dari Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Gayo Lues.

3.3. Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan selama 4 (empat) tahun ke depan mulai dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2026. Tahapan awal yang dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah dan sumber penerimaan. Kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

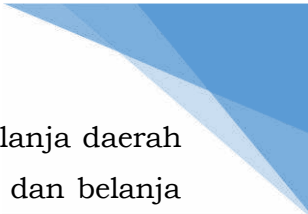
Kebijakan Alokasi Anggaran secara umum diarahkan untuk mendanai kebutuhan belanja Pemerintah Daerah, melalui belanja Perangkat Daerah yang ada dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang mengikutsertakan peran aktif pihak-pihak pemangku kepentingan. Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah karena adanya kebutuhan pembangunan daerah yang prioritas dan semakin meningkat. Kebijakan pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Dalam upaya pencapaian sasaran ataupun target rancangan struktur APBK, baik yang menyangkut Pendapatan, Belanja maupun Pembiayaan Daerah, maka Pemerintah Daerah mengembangkan strategi sebagai berikut:

- 
1. Meningkatkan kinerja pembangunan ekonomi sebagai upaya untuk meningkatkan investasi dan optimalisasi pemanfaatan potensi daerah, sehingga akan berdampak positif pada pendapatan daerah termasuk juga PAD;
 2. Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan pengkajian peluang investasi dan adanya kepastian hukum untuk meningkatkan minat investor menanamkan modalnya di kabupaten Gayo Lues;
 3. Identifikasi dan penggalan sumber-sumber obyek pajak dan retribusi daerah untuk meningkatkan PAD;
 4. Pengkajian dan penyesuaian Qanun-qanun yang berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah;
 5. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah atasan guna meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah;
 6. Menyusun agenda prioritas pembangunan untuk memantapkan dan memfokuskan kinerja pelaksanaan pembangunan;
 7. Menyusun dan memantapkan indikator kinerja program dan kegiatan pembangunan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan APBK;
 8. Meningkatkan partisipasi/pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.
 9. Melakukan pinjaman daerah untuk percepatan pembangunan infrastruktur yang memiliki daya ungkit yang besar terhadap peningkatan perekonomian daerah.

Terkait dengan hal tersebut diatas, maka untuk mendukung analisis terhadap proyeksi pendapatan, proyeksi belanja dan proyeksi pembiayaan untuk kurun waktu 4 (tahun) tahun kedepan mulai dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2026 perlu dilakukan analisis terhadap pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam 5 (lima) tahun yang lalu. Analisis ini sangat penting dalam upaya untuk mendapatkan gambaran tentang besaran anggaran belanja dan pembiayaan yang telah disediakan untuk periode dimaksud serta langkah-langkah kebijakan yang telah dirumuskan untuk mencapainya, termasuk dukungan terhadap pencapaian target sasaran prioritas nasional dan program prioritas provinsi.

3.3.1. Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan

Struktur Pendapatan dan Belanja dalam APBK disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Pendapatan Daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sedangkan komponen belanja daerah dibagi atas belanja operasi, belanja

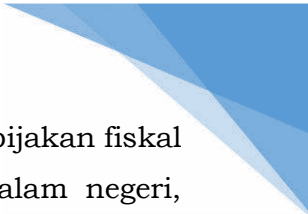


modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Pendapatan dan belanja daerah dalam perspektif rencana disajikan melalui hasil proyeksi pendapatan dan belanja daerah. Dasar utama dalam proyeksi pendapatan daerah mencakup empat faktor, yakni: (1) asumsi indikator makro ekonomi daerah; (2) kebijakan di bidang keuangan negara; (3) kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi keuangan daerah; serta (4) angka rata-rata pertumbuhan setiap obyek pendapatan daerah.

Sedangkan untuk proyeksi belanja daerah, selain mengacu pada analisis asumsi indikator makro ekonomi daerah, juga mengacu, pada analisis kebijakan. Selama periode 2023-2026, pendapatan daerah Kabupaten Gayo Lues diharapkan meningkat secara signifikan. Peningkatan ini diyakini akan lebih banyak didorong oleh pertumbuhan pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah serta dari pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan dari pemerintah provinsi. Sedangkan dana perimbangan meskipun masih cukup dominan, tetapi dengan tingkat pertumbuhan yang lebih kecil. Hal ini karena komponen dana perimbangan berada sepenuhnya dalam kebijakan pemerintah pusat. Sedangkan PAD merupakan komponen pendapatan yang betul-betul berasal dari dalam Kabupaten Gayo Lues sendiri, sehingga lebih mampu dikelola pelaksanaannya oleh pemerintah melalui kebijakan keuangan daerahnya.

Optimisme pertumbuhan pendapatan daerah, khususnya yang berasal dari daerah sendiri di Kabupaten Gayo Lues untuk empat tahun kedepan didasari pada berbagai aspek. Salah satunya dari besarnya potensi sumber-sumber pendapatan daerah yang baru, didorong oleh pertumbuhan ekonomi daerah yang diasumsikan akan bertumbuh signifikan kedepan. Potensi pendapatan daerah dari berkembangnya aktivitas ekonomi masyarakat, akan direspon dengan kebijakan pengelolaan keuangan daerah berupa intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah yang semakin membaik. Komponen pendapatan diproyeksikan berdasarkan data pendapatan dari masing-masing perangkat daerah yang menghasilkan pendapatan daerah. Data tersebut diproyeksi dengan beberapa asumsi:

1. Ekonomi Negara akan membaik dan meningkat rata-rata 6 % pertahun;
2. Pajak daerah meningkat rata-rata 9 % pertahun;
3. Retribusi daerah meningkat rata-rata 9 % per tahun, meliputi retribusi pelayanan kesehatan, pemakaian kekayaan daerah, pelayanan kebersihan, pelayanan perparkiran, izin trayek, pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).



Pada saat yang sama upaya pemerintah pusat dalam berbagai kebijakan fiskal nasional, nampaknya akan berpeluang meningkatkan pendapatan dalam negeri, sehingga transfer fiskal ke daerah juga akan semakin meningkat. Perkiraan pertumbuhan kinerja pendapatan daerah yang diharapkan sebagian besar dikontribusi dari dalam daerah sendiri. Kondisi ini akan semakin memperbaiki tingkat kemandirian fiskal Kabupaten Gayo Lues empat tahun kedepan. Ketergantungan pada sumber pendapatan dari luar daerah diharapkan akan semakin mengecil, sehingga akan menuju keseimbangan sumber keuangan daerah yang baik pada periode-periode pembangunan selanjutnya.

Seiring dengan proyeksi pendapatan yang tinggi diakibatkan pertumbuhan ekonomi, akan berdampak pada pertumbuhan belanja daerah. Asumsi makro ekonomi dan kondisi sosial yang telah ditetapkan dan diharapkan mampu dicapai selama periode empat tahun ke depan, berdampak pada besarnya kebutuhan belanja daerah, terutama pada program-program strategis yang mendorong pertumbuhan kegiatan ekonomi masyarakat. Perhitungan kemampuan anggaran pemerintah daerah terkait erat dengan kewajiban untuk membangun dan memberikan pelayanan publik. Pelaksanaan pembangunan daerah bergantung pada anggaran selama empat tahun kedepan. Proyeksi pendapatan dilakukan berdasarkan histori pendapatan lima tahun ke belakang. Proyeksi keuangan juga didasarkan pada rencana dan target pemerintah daerah, seperti target peningkatan PAD, rencana investasi dan lain sebagainya. Perkiraan pendapatan daerah disajikan secara indikatif dan disesuaikan dengan kondisi dan informasi terbaru pada saat perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya.

Untuk perkiraan penetapan pendapatan daerah terdapat beberapa asumsi yang menjadi dasar proyeksi, diantaranya asumsi proyeksi pajak, seperti telah diuraikan di atas bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gayo Lues pada kurun waktu Tahun 2017–2021 tercapai rata-rata sebesar 2 persen, dan berkontribusi sebesar 7 persen terhadap keseluruhan pendapatan daerah dari PAD, hal ini mengindikasikan bahwa dalam tahun-tahun mendatang komponen Pajak Daerah harus bisa ditingkatkan dan menjadi tumpuan serta andalan di dalam peningkatan pendapatan Daerah Kabupaten Gayo Lues. Untuk penetapan proyeksi pendapatan retribusi relative stagnan dan tidak menggambarkan kenaikan penerimaan yang drastis. Hal ini disebabkan karena pengelolaan keuangan dari retribusi daerah menjadi PPK BLUD untuk Rumah Sakit Daerah. Untuk hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan dividen dari hasil

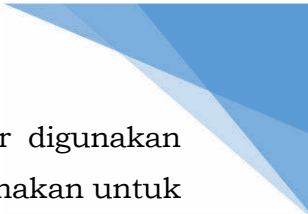


penyertaan modal yang dilakukan ke Bank Aceh Syariah, sedangkan pendapatan dari Lain-lain PAD yang Sah diperoleh dari pendapatan jasa giro dan pendapatan BLUD Rumah sakit.

Terkait proyeksi Dana Perimbangan, penyusunan target dana bagi hasil pajak/bukan pajak pada tahun-tahun mendatang secara umum terdapat kenaikan per tahun. Kenaikan tersebut mempertimbangkan rata-rata realisasi dana bagi hasil pajak per tahun dan penurunan dana bagi hasil bukan pajak. Penyusunan target DAU yang cenderung fluktuatif berdasarkan prediksi bahwa dengan akan dilaksanakannya pemilu serentak tahun 2024 pemerintah pusat akan memberikan tambahan DAU untuk pelaksanaan penyelenggaraan pemilu dan target pada tahun-tahun selanjutnya berkurang disebabkan tidak adanya kegiatan nasional yang bersifat serentak sehingga pendapatan DAU cenderung mengalami penurunan. Untuk penyusunan target DAK cenderung bersifat flat dan tidak ada kenaikan yang signifikan karena mempertimbangkan tidak ada perubahan yang fundamental terkait perhitungan alokasi, nilai tahun-tahun sebelumnya yang dianggap masih relevan sebagai perkiraan target.

Penurunan alokasi transfer daerah yang bersumber dari bantuan keuangan Dana Otonomi Khusus Aceh diperkirakan akan berkurang drastis sebanyak 50 persen dari total alokasi tahun-tahun sebelumnya yang akan dimulai dari tahun 2023 hingga tahun 2027, untuk itu diperlukan exit strategy yang harus dilaksanakan oleh daerah diantaranya dengan mengoptimalkan pendapatan dari Pendapatan Asli Daerah dengan melakukan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah, sehingga dapat menutup pendapatan DOKA yang mengalami penurunan. Selain itu dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah pemerintah kabupaten Gayo Lues harus melakukan inovasi, salah satunya adalah masyarakat dapat melakukan pembayaran secara on line untuk penyetoran pajak daerah maupun retribusi daerah tanpa harus melakukan setoran langsung ke Badan Pengelolaan Keuangan.

Sementara penyusunan Proyeksi Lain-Lain Pendapatan Yang Sah berdasarkan pertumbuhan penerimaan hibah dari pihak ketiga selama kurun waktu 2017–2021, berasal dari hibah dana BOS dan hibah dari provinsi, untuk proyeksi tahun 2023-2026 tidak dapat diprediksi dari mana sumber dana penerimaan hibah, dikarenakan dana BOS sudah menjadi bagian dari DAK NON Fisik.



Perkiraan belanja daerah kabupaten gayo lues sebagian besar digunakan untuk belanja operasi, dimana hampir 50 persen dari total belanja digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Belanja pegawai merupakan belanja yang dialokasikan untuk gaji dan tunjangan bagi PNS, tenaga PPPK dan pegawai honorer daerah sedangkan belanja barang dan jasa merupakan belanja yang digunakan untuk kegiatan rutin kantor dan belanja untuk mendukung pelaksanaan suatu sub kegiatan.

Untuk pembiayaan sumber penerimaan pembiayaan berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya yang diperkirakan sebesar 2.000.000.000,-. Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal yang akan dilakukan ke bank Aceh Syariah dan pembayaran cicilan pokok utang atas pinjaman daerah dari Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Tabel proyeksi keuangan Kabupaten Gayo Lues 2023-2026 ditunjukkan pada di bawah ini.

Tabel 3.8
Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Gayo lues Tahun 2023-2026

No	Uraian		PROYEKSI APBK			
			2023	2024	2025	2026
	PENDAPATAN DAERAH		847.897.822.481,90	903.288.620.719,50	887.397.400.945,14	908.379.902.095,59
1.	Pendapatan Asli Daerah		63.612.974.000,88	69.338.141.660,96	75.578.574.410,45	82.380.646.107,39
	a.	Pajak Daerah	7.893.897.369,00	8.604.348.132,21	9.378.739.464,11	10.222.826.015,88
	b.	Retribusi Daerah	1.254.803.190,00	1.367.735.477,10	1.490.831.670,04	1.625.006.520,34
	c.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	3.727.881.290,56	4.063.390.606,71	4.429.095.761,31	4.827.714.379,83
	d.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang sah	50.736.392.151,32	55.302.667.444,94	60.279.907.514,98	65.705.099.191,33
2.	Pendapatan Transfer		784.284.848.481,02	833.950.479.058,54	811.818.826.534,69	825.999.255.988,20
	a.	Transfer Pemerintah Pusat	703.537.841.000,00	751.857.299.840,00	728.355.239.828,00	741.140.568.204,56
		Dana Perimbangan	595.493.541.000,00	641.862.113.840,00	616.368.050.108,00	627.119.455.690,16
		Dana Transfer Umum	487.392.887.000,00	532.645.402.180,00	506.012.959.634,80	515.603.218.827,50
		Dana Bagi Hasil	10.459.669.000,00	10.668.862.380,00	10.882.239.627,60	11.099.884.420,15
		Dana Alokasi Umum	476.933.218.000,00	521.976.539.800,00	495.130.720.007,20	504.503.334.407,34
		Dana Transfer Khusus	108.100.654.000,00	109.216.711.660,00	110.355.090.473,20	111.516.236.862,66
		DAK Fisik	52.297.771.000,00	52.297.771.000,00	52.297.771.000,00	52.297.771.000,00
		DAK Non Fisik	55.802.883.000,00	56.918.940.660,00	58.057.319.473,20	59.218.465.862,66
		Dana Insentif Daerah	7.000.000.000,00	6.930.000.000,00	6.860.700.000,00	6.792.093.000,00
		Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dana Keistimewaan	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Uraian		PROYEKSI APBK			
			2023	2024	2025	2026
		Dana Desa	101.044.300.000,00	103.065.186.000,00	105.126.489.720,00	107.229.019.514,40
	b.	Transfer Antar-Daerah	80.747.007.481,02	82.093.179.218,54	83.463.586.706,69	84.858.687.783,64
		Pendapatan Bagi Hasil	26.876.841.210,00	27.145.609.622,10	27.417.065.718,32	27.691.236.375,50
		Bantuan Keuangan	53.870.166.271,02	54.947.569.596,44	56.046.520.988,37	57.167.451.408,14
3.		Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
	a.	Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
	b.	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
	c.	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	0,00	0,00	0,00	0,00
		BELANJA DAERAH	823.397.822.481,90	876.788.620.719,50	860.897.400.945,14	881.879.902.095,59
1		Belanja Operasi	493.308.834.000,60	532.299.632.238,20	513.299.632.238,20	525.299.632.238,20
	a.	Belanja Pegawai	233.549.015.769,00	237.539.814.006,60	241.039.814.006,60	245.039.814.006,60
	b.	Belanja Barang dan Jasa	225.851.963.087,60	228.851.963.087,60	230.351.963.087,60	234.351.963.087,60
	c.	Belanja Bunga	-	-	-	-
	d.	Belanja Subsidi				
	e.	Belanja Hibah	25.217.065.044,00	55.217.065.044,00	30.717.065.044,00	33.217.065.044,00
	f.	Belanja Bantuan Sosial	8.690.790.100,00	10.690.790.100,00	11.190.790.100,00	12.690.790.100,00
2		Belanja Modal	165.562.216.296,30	171.562.216.296,30	169.797.359.040,00	175.579.860.190,45
	a.	Belanja Tanah	5.264.857.256,30	5.264.857.256,30	4.000.000.000,00	4.500.000.000,00
	b.	Belanja Peralatan dan Mesin	18.415.645.943,00	18.415.645.943,00	18.915.645.943,00	21.198.147.093,45
	c.	Belanja Bangunan dan Gedung	55.033.107.800,00	57.033.107.800,00	57.033.107.800,00	59.033.107.800,00

No	Uraian		PROYEKSI APBK			
			2023	2024	2025	2026
	d.	Belanja Jalan,Irigasi dan Jaringan	85.771.126.217,00	87.771.126.217,00	87.771.126.217,00	89.771.126.217,00
	e.	Belanja Aset Tetap Lainnya	1.077.479.080,00	3.077.479.080,00	2.077.479.080,00	1.077.479.080,00
3	Belanja Tidak Terduga		10.884.920.415,00	14.884.920.415,00	14.884.920.415,00	14.884.920.415,00
4	Belanja Transfer		153.641.851.770,00	158.041.851.770,00	162.915.489.251,94	166.115.489.251,94
	a.	Belanja Bagi Hasil	423.181.900,00	823.181.900,00	923.181.900,00	1.123.181.900,00
	b.	Belanja Bantuan Keuangan	153.218.669.870,00	157.218.669.870,00	161.992.307.351,94	164.992.307.351,94
		Surflus /Defisit	24.500.000.000,00	26.500.000.000,00	26.500.000.000,00	26.500.000.000,00
	PEMBIAYAAN DAERAH					
1	Penerimaan Pembiayaan		2.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	a.	SiLPA	2.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	b.	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	c.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
	d.	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	e.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	f.	Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Uraian			PROYEKSI APBK			
				2023	2024	2025	2026
2	Pengeluaran Pembiayaan			26.500.000.000,00	26.500.000.000,00	26.500.000.000,00	26.500.000.000,00
	a.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo		25.500.000.000,00	25.500.000.000,00	25.500.000.000,00	25.500.000.000,00
	b.	Penyertaan Modal Daerah		1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
	c.	Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00	0,00	0,00
	d.	Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
	e.	Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		0,00	0,00	0,00	0,00
Pembiayaan Netto				(24.500.000.000,00)	(26.500.000.000,00)	(26.500.000.000,00)	(26.500.000.000,00)
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Berkenaan				0,00	(0,00)	(0,00)	(0,00)

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Gayo Lues Tahun 2022



Berdasarkan tabel diatas proyeksi dan kebijakan terhadap pendapatan, belanja dan pembiayaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah

Dalam menentukan proyeksi pendapatan daerah terdapat beberapa asumsi yang digunakan untuk menjadi dasar proyeksi, diantaranya asumsi proyeksi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari: Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Kabupaten Gayo lues pada kurun waktu Tahun 2017–2021 PAD tercapai rata-rata sebesar 2 persen, dan berkontribusi rata-rata diangka 7 persen terhadap keseluruhan pendapatan daerah, hal ini mengindikasikan bahwa dalam tahun-tahun mendatang komponen pajak daerah diharapkan dapat menjadi tumpuan dan andalan di dalam peningkatan pendapatan daerah Kabupaten Gayo Lues sehingga tidak bergantung kepada dana perimbangan.

Terkait proyeksi Dana Perimbangan, penyusunan target pada tahun-tahun mendatang secara umum terdapat kenaikan per tahun. Kenaikan tersebut mempertimbangkan rata-rata realisasi dana bagi hasil pajak per tahun. Penyusunan target DAU juga mempertimbangkan realisasi dalam lima tahun terakhir. Penyusunan target DAK bersifat flat dengan baseline tahun 2021, mempertimbangkan tidak ada perubahan yang fundamental terkait perhitungan alokasi, nilai tahun-tahun sebelumnya yang dianggap masih relevan sebagai perkiraan target. Sementara penyusunan Proyeksi Lain-Lain Pendapatan Yang Sah berdasarkan penerimaan hibah dari pihak ketiga selama kurun waktu 2017–2021.

Proyeksi perhitungan pendapatan telah memperhitungkan estimasi dana insentif daerah dari pemerintah. Tetapi dengan merebaknya pandemi COVID-19 ini, terdapat beberapa komponen pendapatan yang mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan kondisi normal, walaupun diharapkan pada tahun-tahun mendatang tidak terjadi lagi bencana sosial tersebut atau tidak sampai berkepanjangan sampai tahun mendatang. Hal ini diperkuat dengan kondisi bahwa Pemerintah akan memfokuskan pemulihan ekonomi dan reformasi nasional pada sejumlah sektor akibat COVID-19 di tahun 2023-2026. Setidaknya ada 3 (tiga) sektor akan menjadi fokus pemerintah yakni pemulihan kesehatan, jaringan pengaman sosial dan pemulihan ekonomi, yang tentu saja hal ini akan berdampak pada pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Gayo Lues.

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah dalam penyusunan APBDK terkait dengan pendapatan daerah, sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD meliputi semua penerimaan uang melalui RKUD yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah. Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:

- a) Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
- b) Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- c) Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- d) Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- e) Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah;

4. Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang terdiri atas:

- a) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
- b) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
- c) Hasil kerja sama daerah;
- d) Jasa giro;

- 
- e) Hasil pengelolaan dana bergulir;
 - f) Pendapatan bunga;
 - g) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
 - h) Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
 - i) Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - h) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - i) Pendapatan denda pajak daerah;
 - j) pendapatan denda retribusi daerah;
 - k) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 - l) Pendapatan dari pengembalian;
 - m) Pendapatan dari BLUD; dan
 - n) Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Kebijakan Pendapatan Kabupaten Gayo Lues diarahkan pada optimalisasi pendapatan asli daerah, melalui upaya-upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah, pengembangan potensi-potensi daerah sebagai sumber pendapatan potensial, pemberian insentif dan disinsentif kepada investor, serta pemanfaatan zakat/infaq/sedekah sesuai dengan syariat agama islam untuk kemakmuran masyarakat sebagai jenis pendapatan asli daerah.

Dalam rangka tercapainya arah kebijakan Pendapatan Kabupaten Gayo Lues tersebut, maka perlu ditetapkan langkah strategis sebagai berikut:

1. Memaksimalkan kinerja aparatur yang terlibat langsung dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah;
2. Meningkatkan koordinasi secara sinergis dengan Pemerintah Pusat, Provinsi Aceh, dan SKPK penghasil pendapatan;
3. Memperluas jangkauan dan mempermudah pelayanan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya di kecamatan sepanjang dapat meningkatkan penerimaan pendapatan daerah;

- 
4. Meningkatkan sosialisasi dalam rangka menggugah kesadaran masyarakat tentang manfaat pentingnya pajak dan retribusi untuk kesinambungan Kabupaten Gayo Lues;
 5. Mengoptimalkan pendapatan Kabupaten Gayo Lues yang berasal dari deviden atau penyertaan modal Kabupaten Gayo Lues pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 6. Mengarahkan belanja untuk pembinaan dan mendorong peningkatan pendapatan masyarakat;
 7. Melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap sumber-sumber pendapatan dengan tetap memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah, kemampuan masyarakat, dengan mengedepankan prinsip partisipasi, akuntabilitas, dan transparansi;
 8. Meningkatkan koordinasi di bidang pendapatan daerah dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah lainnya;
 9. Memperbaiki pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah;
 10. Melakukan kajian dan analisis terhadap potensi PAD secara berkelanjutan;
 11. Meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya manusia, serta pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan yang lengkap serta melakukan terobosan-terobosan untuk peningkatan pelayanan masyarakat.

b. Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gayo Lues. Belanja daerah selain dialokasikan untuk penuntasan program/kegiatan yang telah diamanatkan dalam dokumen perencanaan juga harus dialokasikan pada program/kegiatan dalam rangka pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Kebijakan belanja daerah dilakukan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif. Adapun kebijakan belanja daerah Kabupaten Gayo Lues, sebagai berikut:

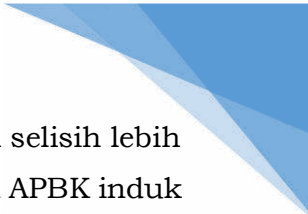
1. Mengalokasikan anggaran untuk membiayai belanja wajib dan mengikat;
2. Mengalokasikan belanja yang indikatornya belum tercapai berdasarkan hasil evaluasi;
3. Pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs);

- 
4. Sinkronisasi prioritas rencana pembangunan aceh 2023-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP);
 5. Mengalokasikan dana fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan;
 6. Mengalokasikan dana fungsi kesehatan dalam rangka peningkatan fungsi kesehatan Kabupaten gayo Lues secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10 persen dari total belanja APBK di luar gaji;
 7. Membangun sarana prasarana infrastruktur yang memadai;
 8. Mengalokasikan dana untuk pemulihan ekonomi, kesehatan dan sosial semua yang terdampak pandemi COVID-19.

Belanja daerah, dari tahun ke tahun relatif mengalami kenaikan. Sejak pada tahun 2017, alokasi belanja daerah sudah mencakup pembayaran gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil untuk 13 bulan dan Tunjangan Hari Raya (Gaji ke-14) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan kenaikan gaji pokok serta *acres*. Selain itu dianggarkan.

c. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Kebijakan pembiayaan harus terkait dengan penyelesaian permasalahan-permasalahan pembangunan daerah maupun pemanfaatan potensi-potensi daerah. Agar kebijakan pembiayaan daerah lebih terarah dan memberikan kontribusi yang positif di dalam upaya menggali alternatif sumber-sumber pembiayaan pembangunan, maka kebijakan penerimaan pembiayaan daerah diarahkan pengelolaan SiLPA, sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan untuk pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah.



Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dengan realisasi belanja daerah yang dalam APBK induk dianggarkan berdasarkan estimasi dan didefinisikan dalam perubahan APBK yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK tahun sebelumnya.

Rumusan kebijakan pembiayaan daerah di Kabupaten Gayo Lues diarahkan untuk:

1. Menjaga agar keuangan daerah tetap dalam kondisi surplus anggaran dan jika terjadi defisit anggaran sedapat mungkin ditutup dengan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun lalu;
2. Membentuk dana cadangan yang akan digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang sifatnya strategis;
3. Mengembangkan investasi daerah dan penyertaan modal dengan prinsip kehati-hatian.

3.1.1. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Berdasarkan hasil proyeksi pendapatan dan belanja daerah, dapat dirumuskan kerangka pendanaan keuangan daerah Kabupaten Gayo Lues untuk empat tahun kedepan. Kerangka pendanaan ini memaparkan hasil penghitungan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah beserta dengan alokasi prioritas pembangunan daerah Kabupaten Gayo Lues selama periode 2023-2026 yang akan datang. Penghitungan kerangka pendanaan pembangunan dalam empat tahun mendatang dilakukan dengan menghitung kapasitas riil keuangan daerah. Komponen penghitungan kapasitas riil ini adalah penerimaan daerah serta pengeluaran daerah. Penerimaan daerah meliputi pendapatan daerah (Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah) serta penerimaan pembiayaan daerah.

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 4 (empat) tahun ke depan. Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah sebagaimana telah dihitung dan ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan. Suatu kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Perhitungan kerangka pendanaan berpedoman pada analisa penerimaan dan pengeluaran APBK pada 4 (empat) tahun ke depan dan juga memperhatikan kebijakan pembangunan pemerintah pusat dan provinsi, angka rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah masa lalu, asumsi dan indikator makro ekonomi baik itu laju pertumbuhan PDRB, Inflasi, TPT, Tingkat Kemiskinan, dan IPM, kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, kebijakan di bidang keuangan negara. Gambaran tentang Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Gayo Lues untuk 4 (empat) tahun mendatang berdasarkan perkiraan kapasitas kemampuan keuangan daerah, direncanakan alokasi kapasitas kemampuan keuangan daerah sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dengan mempertimbangkan kebijakan nasional dan provinsi, tertuang pada Tabel berikut.

Tabel 3.9

Proyeksi Kapasitas riil Kemampuan Daerah Tahun 2023-2026

Uraian	Kapasitas Riil Kemampuan Daerah			
	2023	2024	2025	2026
Pendapatan daerah	847.897.822.481,90	903.288.620.719,50	887.397.400.945,14	908.379.902.095,59
Penerimaan Pembiayaan	2.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan	849.897.822.481,90	903.288.620.719,50	887.397.400.945,14	908.379.902.095,59
Dikurangi				
Pengeluaran Pembiayaan	26.500.000.000,00	26.500.000.000,00	26.500.000.000,00	26.500.000.000,00
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	823.397.822.481,90	876.788.620.719,50	860.897.400.945,14	881.879.902.095,59

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Gayo Lues Tahun 2022

Dari tabel di atas dapat diproyeksikan bahwa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Gayo Lues untuk 4 (empat) tahun ke depan hingga berakhirnya masa berlaku Rencana Pembangunan Kabupaten 2023-2026, yaitu:

1. Proyeksi Tahun 2023 sebesar Rp. 823.397.822.481,90.
2. Proyeksi Tahun 2024 sebesar Rp. 876.788.620.719,50.
3. Proyeksi Tahun 2025 sebesar Rp. 860.897.400.945,14.
4. Proyeksi Tahun 2026 sebesar Rp. 881.879.902.095,59.

Selanjutnya, setelah diketahui kapasitas riil kemampuan keuangan daerah

untuk selama 4 (empat) tahun kedepan, tahap berikutnya adalah rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk memenuhi kebutuhan anggaran belanja dalam rangka pendanaan program pembangunan selama 4 (empat) tahun ke depan. Kebijakan alokasi anggaran merupakan serangkaian kebijakan yang telah ditetapkan sebagai upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan alokasi anggaran yang tersedia untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat, serta dalam rangka pencapaian efektifitas program. Mengingat keterbatasan anggaran, maka pengalokasiannya berdasarkan skala prioritas (*money follow programme*) dan kebutuhan Prioritas alokasi penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dikelompokkan menjadi 3 (tiga). Kelompok Prioritas I, Kelompok Prioritas II dan Kelompok Prioritas III. Adapun prioritas anggaran untuk pembangunan Kabupaten Gayo Lues Tahun 2023 sampai dengan 2026, adalah sebagai berikut:

1. **Prioritas I**, dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat.
2. **Prioritas II**, dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan penerapan pelayanan dasar.
3. **Prioritas III**, dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

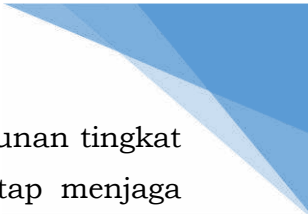
Rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Rincian data penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dimaksud, dapat dilihat pada tabel berikut dibawah

Tabel 3.10
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Keuangan Daerah
Kabupaten Gayo Lues Tahun 2023-2026

NO	Uraian	2023		2024		2025		2026	
		Rencana Penggunaan	%	Rencana Penggunaan	%	Rencana Penggunaan	%	Rencana Penggunaan	%
1	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	823.397.822.481,90		876.788.620.719,50		860.897.400.945,14		881.879.902.095,59	
2	Prioritas I	495.308.834.000,60	60,15	532.299.632.238,20	60,71	513.299.632.238,20	59,62	525.299.632.238,20	59,57
3	Prioritas II	163.562.216.296,30	19,86	171.562.216.296,30	19,57	169.797.359.040,00	19,72	175.579.860.190,45	19,91
4	Prioritas III	164.526.772.185,00	19,98	172.926.772.185,00	19,72	177.800.409.666,94	20,65	181.000.409.666,94	20,52

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Gayo Lues Tahun 2022

Untuk periode 2023-2026 yang akan datang, prioritas kapasitas riil keuangan daerah Kabupaten Gayo Lues akan dominan dialokasikan untuk prioritas I, terutama untuk belanja urusan pendidikan, urusan kesehatan, belanja pembangunan infrastruktur daerah, dan belanja urusan wajib pelayanan dasar lainnya. Hal ini diharapkan untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi yang positif, yang



ditandai dengan penurunan tingkat kemiskinan, rasio gini, dan penurunan tingkat pengangguran. Pada saat yang sama, dalam periode ini mampu tetap menjaga kualitas pembangunan daerah yang tinggi untuk memastikan peningkatan pembangunan manusia berjalan baik dan berkesinambungan yang ditandai peningkatan IPM yang konsisten. Artinya, secara teknokratik pemerintah daerah dapat menghadirkan desain dan rancangan program-program pembangunan daerah yang memastikan pencapaian tujuan dan sasaran peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkesinambungan.



BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Tujuan utama pembangunan daerah adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat berdasarkan indikator pembangunan yang meliputi: PDRB, Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka, Angka Kemiskinan, Gini Rasio dan Laju Inflasi. Untuk mencapai pembangunan daerah yang diharapkan harus melalui kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Dalam melaksanakan pembangunan daerah terdapat permasalahan-permasalahan pembangunan yang dihadapi, permasalahan pembangunan daerah merupakan perbedaan jarak antara kondisi saat ini (*existing*) dengan kondisi yang diharapkan “*gap expectation*”.

Penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Gayo Lues dalam kurun waktu lima tahun terakhir telah mencapai dan membuahkan hasil yang diharapkan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, tetapi untuk pembangunan kedepan masih terdapat permasalahan dan tantangan dari berbagai dimensi pembangunan. Berbagai permasalahan yang dihadapi Kabupaten Gayo Lues dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun internal yang terjadi sebagai dampak interaksi dan dinamika perkembangan berbagai sektor baik pada skala lokal kabupaten, provinsi maupun nasional. Permasalahan-permasalahan tersebut timbul karena kemampuan yang belum didayagunakan secara optimal, adanya kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Kondisi Kabupaten Gayo Lues saat ini digambarkan oleh capaian indikator kinerja pembangunan daerah sedangkan kondisi yang diharapkan adalah tujuan atau target yang hendak dicapai sesuai dengan yang telah direncanakan dalam dokumen rencana pembangunan. Isu strategis berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Gayo Lues melalui analisis dan telaahan terhadap hasil capaian kinerja pembangunan daerah pada periode sebelumnya. Untuk mengatasi permasalahan isu strategis dalam pembangunan daerah harus mengoptimalkan seluruh sumber kemampuan daerah yang potensial secara efektif untuk didayagunakan dalam membangun Kabupaten Gayo Lues.

Selain itu, identifikasi permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah dibentuk berdasarkan komponen hasil kajian dari isu dan permasalahan pembangunan nasional (RPJMN Tahun 2020-2024), hasil kajian dunia akademik, serta hasil kajian ekonomi, sosial, politik, lingkungan dan teknologi lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan. Pembangunan daerah Kabupaten Gayo Lues ke



depan diharapkan mampu berkembang guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana potensi yang terkandung di dalamnya. Permasalahan-permasalahan pokok dan isu-isu strategis ini dapat diatasi dengan memanfaatkan potensi, dan melanjutkan keberlangsungan (sustainability) pembangunan.

4.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

Perumusan permasalahan pembangunan dilakukan dengan cara mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan dalam kinerja pembangunan pada masa lalu, termasuk hubungan dengan kemampuan manajemen pemerintah dalam memberdayakan kewenangan yang dimiliki. Identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan kepada seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah maupun sekaligus terhadap semua urusan, yang bertujuan untuk memetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Permasalahan pembangunan diklasifikasi menurut dua tingkatan, yaitu permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah (permasalahan pada level makro daerah) dan permasalahan untuk penentuan program prioritas daerah (permasalahan pada level mikro sektoral atau permasalahan menurut urusan pemerintahan, baik urusan wajib dan urusan pilihan maupun urusan penunjang). Perbedaan pengklasifikasian permasalahan pembangunan ini selanjutnya akan menuntun dan mengarahkan pada formulasi tujuan dan sasaran, perumusan strategi, arah kebijakan, dan program prioritas pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan. Permasalahan pembangunan daerah di Kabupaten Gayo Lues dapat diuraikan sebagai berikut:

4.1.1. SYARIAT ISLAM

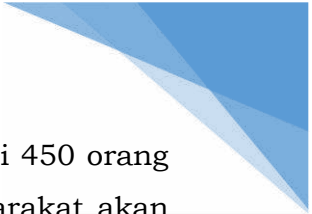
Permasalahan dalam pelaksanaan Syariat Islam adalah:

1. Belum optimalnya penegakkan Syariat Islam.

Penegakkan Syariat Islam perlu dilakukan di masyarakat, jumlah pelanggaran penyakit masyarakat tahun 2020 sampai tahun 2021 sebanyak 114 pelanggaran, pada tahun-tahun yang akan datang, pelanggaran penyakit masyarakat diharapkan menurun 10 pelanggaran pertahun.

2. Terbatasnya kuantitas dan kualitas da'i.

Masyarakat Gayo Lues yang hampir 100 persen beragama islam memerlukan peran da'i dalam meningkatkan kualitas kehidupan beragama, jumlah da'i yang ada sebanyak 224 da'i, karena kuantitas dan kualitas da'i yang masih terbatas, menjadi kendala dalam peningkatan syiar islam di Gayo Lues. Empat tahun



kedepan jumlah da'i di Gayo Lues akan bertambah 226 da'i menjadi 450 orang da'i, sehingga pelaksanaan pembinaan syariat islam kepada masyarakat akan meningkat.

3. Belum optimalnya program hafiz Al-Qur'an di Kabupaten Gayo Lues.

Jumlah hafiz Al-qur'an di Kabupaten Gayo Lues sebanyak 2.003 hafiz, dari jumlah tersebut hanya 27 orang yang hafiz 30 juz, sisanya jumlah hapalan para hafiz bervariasi, mulai dari 1 juz sampai dengan 29 juz, diharapkan empat tahun yang akan datang jumlah hafiz 30 juz akan bertambah menjadi 127 hafiz.

4. Belum optimalnya pengelolaan zakat, infaq, sadakah dan wakaf (ZISWAF).

Sumber pendapatan ZISWAF terdiri dari Zakat, Infaq dan Sadaqah.

- Realisasi zakat tahun 2021 sebesar Rp.3.220.354.313,-. Target 4 (empat) tahun ke depan sebesar Rp. 12.881.417.252,-;
- Realisasi Infaq tahun sebesar 2021 Rp.1.912.651.184,47,-. Target 4 (empat) tahun ke depan sebesar Rp.12.881.417.252,-;
- Realisasi shadaqoh tahun 2021 Rp. 0,-. Target 4 (empat) tahun ke depan sebesar Rp.20.000.000,-;
- Data muzakki/pemberi saat ini : 3.011 muzakki, Target 4 (empat) tahun ke depan 5000 muzaki;
- Data mustahik/ penerima, saat ini 3.952 mustahik, Target 4 (empat) tahun ke depan 3.952 mustahik.

5. Minimnya sarana dan prasarana ibadah yang berfungsi dengan baik.

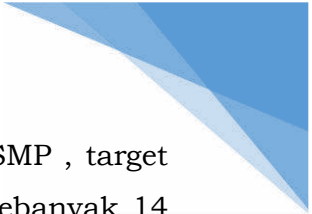
Peningkatan sarana dan prasarana ibadah sangat diperlukan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan minat masyarakat dalam melaksanakan kegiatan keagamaan di masjid, jumlah masjid di Gayo Lues sebanyak 170, sebanyak 28 masjid sudah kategori makmur, diharapkan empat tahun yang akan datang sebanyak 50 masjid akan berkategori makmur.

4.1.2. PENDIDIKAN

Permasalahan dalam Pendidikan adalah:

1. Belum meningkatnya level akreditasi sekolah.

- Jumlah PAUD: 68, terakreditasi: 24 PAUD, belum akreditasi: 44 PAUD, target akreditasi PAUD dan perubahan status akreditasi sampai 2026 sebanyak 20 PAUD;
- Jumlah SD: 91, terakreditasi: 84 SD, belum akreditasi: 3 SD, target akreditasi SD dan perubahan status akreditasi sampai 2026 sebanyak 46 SD;

- 
- Jumlah SMP: 40, terakreditasi : 36 SMP, Belum akreditasi : 4 SMP , target akreditasi SMP dan perubahan status akreditasi sampai 2026 sebanyak 14 SMP.
2. Belum maksimalnya pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur pendidikan terutama di daerah terpencil.
- Jumlah sekolah yang memerlukan pemeliharaan di daerah terpencil yaitu: TKN sebanyak 21 (dua puluh satu), SD dan SMP sebanyak 33 (tiga puluh tiga), Jumlah TKN, SD dan SMP yang akan dipelihara empat tahun kedepan sebanyak 54 (lima puluh empat) sekolah.
3. Belum optimalnya pembinaan dan event olahraga.
- Jumlah atlet yang dibina sebanyak 131 (seratus tiga puluh satu) atlet, target atlet yang akan dibina sampai dengan Tahun 2026 berjumlah 409 (empat ratus sembilan) atlet;
 - Jumlah event yang dilaksanakan pada tahun 2021 tidak ada, event yang akan dilaksanakan tahun 2023 s.d 2026 ada 5 (lima) event yaitu: sepak bola, senam, popda, popkab dan danone cup.
4. Masih rendahnya akreditasi dayah.
- Peningkatan manajemen dayah sangat diperlukan untuk meningkatkan dan menghasilkan para santri yang berkualitas, jumlah dayah yang ada di Gayo Lues sebanyak 47 dayah, 16 dayah sudah terakreditasi, diharapkan selama empat tahun kedepan jumlah dayah yang terakreditasi akan bertambah 31 dayah.

4.1.3. KESEHATAN

Permasalahan dalam Kesehatan adalah:

1. Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang prima.
 - Dalam rangka meningkatkan pelayanan rumah sakit salah satu langkah yang harus dilakukan adalah dengan melakukan peningkatan level akreditasi RSUD M. Ali Kasim yang saat ini berada pada tingkat madya, pada tahun 2026 ditargetkan menjadi tingkat paripurna;
 - Peningkatan level akreditasi terhadap 12 puskesmas juga harus dilakukan, dari 12 puskesmas, 2 puskesmas akreditasi tingkat utama, 9 (sembilan) puskesmas akreditasi tingkat madya dan hanya 1 (satu) puskesmas akreditasi tingkat dasar, pada tahun 2026 ditargetkan 6 puskesmas menjadi tingkat utama.

2. Belum optimalnya penanganan gizi buruk.

Berdasarkan data dari Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) penanganan gizi buruk dengan prevalensi stunting di Gayo Lues tahun 2021 sebanyak 42,9 %, rata-rata provinsi Aceh 33,2%, sedangkan rata-rata nasional sebanyak 24,4%, diharapkan kasus penderita gizi buruk / Stunting 4 (empat) Tahun kedepan target penurunan di Kabupaten Gayo Lues menjadi 23 %.

3. Masih rendahnya pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta kesehatan lingkungan.

- Untuk menghindari atau mengurangi risiko, masalah dan dampak buruk akibat penyakit baik penyakit menular maupun tidak menular pemerintah akan melakukan upaya pencegahan dan pengendalian. Salah satu pengendalian penyakit menular dan tidak menular TB paru dimana angka di Kabupaten Gayo Lues tahun 2021 mencapai 147 per 100.000 Penduduk. Target Penyelesaian kasus TB 4 (empat) tahun kedepan yang ditangani sebesar 100 %.
- Pasien terkonfirmasi Covid 19 di Gayo lues Pada Tahun 2020 s.d 2022 berjumlah 692 orang dengan jumlah kematian 49 orang. Target Vaksinasi Covid 19 di Kabupaten Gayo Lues adalah 74,545 jiwa, yang sudah mendapat vaksinasi pertama berjumlah 60,476 jiwa, vaksinasi kedua berjumlah 42,597 jiwa dan vaksinasi ketiga berjumlah 1,844 jiwa.

4. Belum optimalnya ketersediaan, penyebaran dan mutu sumber daya tenaga kesehatan.

Dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan secara merata kepada masyarakat Gayo Lues, maka ketersediaan sumber daya manusia kesehatan, penyebaran dan mutu nya harus ditingkatkan, sumber daya manusia di RSUMAK:

- Dokter umum sebanyak 15 dokter, dokter spesialis dalam sebanyak 3 dokter, dokter Gigi dan dokter spesialis Bedah sebanyak 2 dokter, Dokter Spesialis Anak, Dokter Spesialis Obgyn, Dokter Spesialis Kulit, Dokter Spesialis Mata, Dokter Spesialis THT, Dokter Spesialis Paru, Dokter Konsultan Endokrin, Dokter Spesialis Radiologi, Dokter Spesialis Anastesi, Dokter Spesialis Patologi Klinik sebanyak 1 dokter. Dokter yang belum ada yaitu: Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah, Dokter Spesialis Jiwa, Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik, Dokter Spesialis Medik Gigi dan Mulut, Dokter Spesialis Neurologi;

- Perawat sebanyak 176;
 - Bidan sebanyak 73;
 - Tenaga Kesehatan Lainnya sebanyak 80, total tenaga kesehatan berjumlah 361 orang.
 - Sebaran tenaga kesehatan dokter di puskesmas bervariasi dan terpusat di puskesmas perawatan Blangkejeren dimana tenaga dokter sebanyak 5 orang, di puskesmas lain berjumlah 1 sampai dengan 3 orang, untuk dokter gigi rata-rata berjumlah 1 dokter dan ada puskesmas yang tidak memiliki dokter gigi. Kedepannya jumlah, sebaran dan kualitas tenaga kesehatan akan ditingkatkan sehingga pelayanan kesehatan di pelosok dapat maksimal. Rasio penanganan pelayanan kesehatan khususnya Dokter yang berada di puskesmas yaitu 29/100.000 jumlah penduduk yang tertangani kesehatannya.
5. Belum maksimalnya pemeliharaan dan peningkatan sarana, prasarana dan infrastruktur kesehatan.
- Dalam melaksanakan pelayanan di rumah sakit harus didukung pemeliharaan dan peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur, jumlah gedung di rumah sakit sebanyak 34 gedung, gedung kondisi baik 22 gedung, gedung kondisi kurang baik 12 gedung, infrastruktur lainnya yang perlu ditingkatkan adalah gedung poliklinik dan ruang kelas.

4.1.4. EKONOMI DAN SUMBER DAYA

Permasalahan dalam Ekonomi dan Sumber Daya adalah:

1. Masih luasnya lahan produktif yang tidak dimanfaatkan.
Luas lahan produktif yang belum dimanfaatkan 2.400 Hektar menyebar di 11 Kecamatan, dengan luas terbesar berada di Pantan Cuaca 500 Hektar, Dabun Gelang 500 Hektar, Blangkejeren 450 Hektar, sisanya tersebar di kecamatan lain.
2. Lemahnya daya saing komoditas pertanian dan perikanan.
Tahun 2020 kontribusi PDRB sektor produksi Gayo Lues 39.40%, laju implisit 2.38% dan pertumbuhan 3.92%, sedangkan Aceh 30.98%, laju implisit 2.85% dan pertumbuhan 3.47%.
3. Masih tingginya hasil bumi yang dijual dalam bentuk bahan baku.
Tahun 2020 kontribusi PDRB sektor industri pengolahan 10.63%, laju implisit 3.91% dan pertumbuhan -1.70%, sedangkan Aceh 4.56%, laju implisit 5.56% dan pertumbuhan 2.16%.

4. Rendahnya daya saing produk UMKM dan IKM.

Tahun 2020 kontribusi PDRB sektor perdagangan 10.99%, laju implisit 1.20% dan pertumbuhan -0.99%, sedangkan Aceh 14.79%, laju implisit 2.06% dan pertumbuhan -5.34%.

5. Masih lemahnya daya saing ekonomi, infrastruktur dan SDM wisata Gayo Lues.

- Jumlah kunjungan ke Gayo Lues sepanjang tahun 2021 adalah 11.715 orang, Aceh selama 3 bulan di tahun 2021 sebanyak 10.401 orang;
- Jumlah event tetap di Gayo Lues baru 2 (dua) event, yaitu pacuan kuda dan festival budaya. jumlah kelompok sadar wisata pemula baru ada 5 (lima) kelompok, tersebar di kampung Badak, Agusen, Penosan, Pining dan Marpunge.

4.1.5. INFRASTRUKTUR DAN KONEKTIVITAS

Permasalahan dalam Infrastruktur dan Konektivitas adalah:

1. Belum seluruhnya kondisi jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi mantap. Penyelenggaraan jalan kabupaten yang merupakan kewenangan pemerintah Gayo Lues sepanjang 1.124,16 km, capaian proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap sepanjang 570,40 km, dan persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap sebesar 50,74%. Pada akhir tahun Rencana Pembangunan Kabupaten (RPK) Gayo Lues 2026 jalan mantap kabupaten mencapai 70%.
2. Rendahnya tingkat kepatuhan terhadap dokumen RTRW. Ketaatan/kepatuhan terhadap RTRW pada akhir tahun 2021 hanya mencapai 0,040%, hal ini disebabkan pelaksanaan pembangunan yang tidak sesuai dengan arahan pola ruang menyebabkan menurunnya tingkat kesesuaian pelaksanaan struktur dan pola ruang terhadap RTRWK Gayo Lues, diharapkan dengan telah dilakukannya revisi terhadap RTRWK Gayo Lues capaian yang ditargetkan pada akhir tahun 2026 dapat mencapai 12%.
3. Kurangnya penyediaan infrastruktur pelayanan dasar.
 - Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan sebesar 78 % diharapkan akhir tahun 2026 sudah 100% dapat mengakses air minum layak;
 - Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU sebesar 65,13 % diharapkan akhir tahun 2026 sudah 100% tercapai Lingkungan yang sehat dan aman;

- Cakupan ketersediaan rumah layak huni sebesar 20,87% diharapkan akhir tahun 2026 sudah 60% tercapai ketersediaan rumah layak huni;
 - Persentase lingkungan permukiman kumuh sebesar 2,15% diharapkan akhir tahun 2026 sudah 5%;
 - Rasio bangunan ber IMB sebesar 0,23 % diharapkan akhir tahun 2026 sudah 1,25% bangunan yang ber IMB.
4. Kurangnya penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan.
- Penyediaan sarana dan prasarana perhubungan jalan kabupaten hanya 16% dari total panjang jalan sepanjang 1.124,16 Km, diakhir tahun 2026 diharapkan dapat mencapai 80%;
 - Jumlah rambu lalu lintas yang harus dipasang 1.200 unit, yang sudah terpasang 74 unit;
 - Total marka jalan sepanjang 10.000 m, marka jalan yang sudah ada sepanjang 1.386 m;
 - Pagar pengaman yang diperlukan 1.500 unit, yang sudah terpasang 516 unit;
 - Gedung pengujian dan sarana KIR belum ada, ditargetkan terbangun 1 unit gedung KIR beserta kelengkapannya diakhir tahun 2026.

4.1.6. LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBENCANAAN

Permasalahan dalam Lingkungan Hidup dan Kebencanaan adalah:

1. Belum optimalnya penanganan dan pengolahan limbah.
Jumlah sampah pada tahun 2021 sebanyak 12.450,15 ton atau 49.800,60 m³, yang tertangani sebanyak 8.557,73 ton atau 34.230,92 m³ sekitar 68,74%.
2. Tingginya resiko bencana alam dan bencana sosial.
Berdasarkan Potensi Kebencanaan sangat tinggi di Daerah Gayo Lues untuk Tahun 2021 bahwa dalam penanganan masih sekitar 35 % dan Indeks Ketahanan Resiko bencana masih tinggi.
3. Meningkatnya lahan kritis.
Luas lahan Kritis saat ini di Kabupaten Gayo Lues seluas 64.546 Hektar. Untuk mengatasi lahan kritis perlu dilakukan upaya: memperluas wilayah untuk penghijauan serta mengembalikan fungsi daerah aliran sungai (DAS).

4. Belum terealisasinya pengendalian perubahan iklim dan mekanisme kompensasi jasa lingkungan.

Kampung Pro Iklim saat ini sebanyak 10 kampung, diakhir tahun 2026 ditargetkan sebanyak 50 kampung Pro Iklim. Sedangkan kompensasi jasa lingkungan Kabupaten Gayo Lues sampai saat ini belum terealisasi, diupayakan kompensasi tersebut dapat terealisasi sebagai sumber pendapatan Kabupaten Gayo Lues.

5. Belum optimalnya pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.

Luas Ruang Terbuka Hijau 110,92 Ha atau 18 titik, yang dikelola 2,89 Ha atau 5 titik. Diakhir tahun 2026 ditargetkan semua titik dapat ditangani.

4.1.7. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Permasalahan dalam Tata Kelola dan Pelayanan Publik adalah:

1. Belum optimalnya pengelolaan SDM aparatur pemerintah sesuai dengan bidang dan keahlian.

Jumlah PNS Aktif 3.005 orang, yang telah mengikuti diklat dalam rentang waktu 2017-2022 adalah 200 orang. Target PNS yang akan ikut Diklat pada rentang tahun 2023-2026 sebanyak 250 orang. Jumlah pegawai yang sudah mengikuti diklat PIM II sebanyak 8 orang dan PIM III 66 Orang, untuk diklat JFU dan JFT belum ada yang mengikuti. Target pegawai yang akan diklat pada rentang tahun 2023-2026 untuk PIM II, PIM III, JFU dan JFT sebanyak 50 orang setiap tahunnya.

2. Belum optimalnya indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan.

Nilai saat ini 82,70 atau mutu pelayanan B dan target empat tahun kedepan sampai ke A.

3. Belum terintegrasinya data dengan system informasi perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi pembangunan.

Belum terintegrasinya data dengan sistem informasi perencanaan, penganggaran, onitoring dan evaluasi pembangunan. SIPD masih mencakup perencanaan dan penganggaran sedangkan integrasi dengan data serta hasil monitoring dan evaluasi belum berjalan.

4. Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah.

- Pendanaan pembangunan Gayo Lues masih bertumpu pada anggaran pemerintah pusat dan provinsi (dana transfer) sebesar 92 persen dari total APBK;
- Alokasi Dana Otonomi Khusus Aceh diperkirakan akan berkurang 50 persen.

4.2. ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN

Isu strategis merupakan berbagai persoalan yang menjadi topik utama baik internasional, nasional, hingga regional. Isu strategis menjadi salah satu acuan pokok dalam menyusun prioritas pembangunan agar pencapaian tujuan pembangunan daerah lebih terstruktur, tepat, dan cepat. Dengan memperhatikan isu strategis yang terjadi pembangunan di Kabupaten Gayo Lues selama empat tahun kedepan dapat membawa masyarakat ke arah yang lebih baik. Penanganan dan antisipasi yang tepat terhadap isu prioritas dapat mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan selama empat tahun kedepan.

Isu-isu Strategis Pembangunan Kabupaten Gayo Lues mengacu pada Isu Strategis Internasional, Isu Strategis Nasional, dan kondisi Kabupaten Gayo Lues yang memerlukan penanganan segera. Isu strategis merupakan perbedaan (gap) antara kondisi saat ini (existing) dengan harapan yang tergambar tujuan pembangunan dalam masa transisi selama 4 tahun.

Isu Strategis Internasional meliputi:

- 1) Globalisasi ekonomi dan bisnis digital;
- 2) Transformasi Teknologi berbasis *Artificial Intelligence*;
- 3) Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs);
- 4) Sumber energi alternatif;
- 5) Perubahan iklim global; dan
- 6) Munculnya pusat dan kekuatan ekonomi baru di Samudera Hindia.

Isu Strategis Nasional meliputi:

- 1) Peningkatan produktivitas dan skala ekonomi pertanian, peternakan dan perikanan untuk mendukung kedaulatan pangan;
- 2) Peningkatan investasi industri pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan per kapita;
- 3) Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan suplai kelistrikan (jalan tol dan pembangkit listrik);
- 4) Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di Sumatera, khususnya di wilayah pantai barat Sumatera; dan
- 5) Pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri, Kawasan Strategis Pariwisata dan Kawasan Strategis dan Khusus Wilayah sesuai dengan potensi masing-masing daerah.

Isu Strategis Pemerintah Aceh meliputi:

- 1) Peningkatan Kualitas Demokrasi;
- 2) Peningkatan Kualitas Kelembagaan, Tatalaksana dan Sumber Daya Aparatur;

- 
- 3) Peningkatan Kualitas Penerapan Syariat Islam;
 - 4) Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;
 - 5) Pengembangan Kapasitas dan Daya Saing Keolahragaan dan Kepemudaan;
 - 6) Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat;
 - 7) Penurunan Angka Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem;
 - 8) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi;
 - 9) Pengembangan Kemitraan dan Peningkatan Sumber Pendanaan Pembangunan;
 - 10) Optimalisasi Kemandirian Pangan;
 - 11) Penciptaan Lapangan Kerja dan Penurunan Pengangguran;
 - 12) Pengurangan Ketimpangan Antar Wilayah melalui Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Strategis;
 - 13) Optimalisasi Tata Kelola Lingkungan Hidup, Pelestarian Hutan dan Penanganan Bencana;
 - 14) Penguatan Perdamaian secara Berkelanjutan.

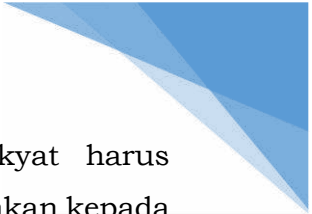
Berdasarkan pada isu-isu strategis di tingkat internasional, nasional maupun Aceh, maka disusun isu-isu strategis Kabupaten Gayo Lues yang diharapkan dapat teratasi dalam 4 tahun mendatang (2023 – 2026). Isu-isu strategis tersebut diuraikan di bawah ini.

- 1) Penguatan terhadap pelaksanaan Syariat Islam.

Pelaksanaan Syari'at Islam mulai diterapkan mulai tahun 2000, dengan ditetapkannya Perda Nomor 5 tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam, yang kemudian diperkuat dengan masuknya agenda Syariat Islam dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan terakhir ditetapkannya Qanun Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam. Meskipun demikian, pelaksanaan Syariat Islam belum optimal karena hanya lebih banyak menyoroti aspek jinayah saja, padahal Syariat Islam juga mengatur aspek-aspek lainnya, seperti ekonomi, pembinaan aqidah, akhlak dan lain-lain dalam tatanan kehidupan beragama dan bermasyarakat. Beberapa agenda penting syariat islam yang perlu menjadi perhatian, diantaranya: pembinaan ibadah dan akhlak.

- 2) Penurunan Angka Kemiskinan dan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi.

Salah satu tantangan utama dalam mewujudkan pembangunan di bidang kesejahteraan masyarakat Gayo Lues adalah pengurangan kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi antar pihak, termasuk dengan masyarakat itu sendiri. Untuk mengurangi jumlah penduduk



miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat harus dilakukan percepatan penanggulangan kemiskinan yang lebih diarahkan kepada pelaksanaan sistem perlindungan sosial yang dilakukan dengan cara pemberian jaminan sosial dan bantuan sosial serta peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar.

Langkah lainnya dalam mengurangi kemiskinan adalah dengan memastikan terpenuhinya layanan dasar, serta meningkatkan pendapatan minimal di atas garis kemiskinan melalui cara menumbuhkan perekonomian masyarakat melalui pola pemberdayaan dan penguatan usaha mikro kecil, peningkatan terhadap akses layanan keuangan serta peningkatan akses kesempatan kerja bagi penduduk miskin. Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat Gayo Lues, dapat dipastikan angka kemiskinan Kabupaten Gayo Lues dapat berkurang, sehingga Kabupaten Gayo Lues tidak lagi masuk sebagai salah satu kabupaten termiskin di Aceh.

3) Peningkatan Mutu Pendidikan.

Di Kabupaten Gayo Lues pendidikan menjadi permasalahan yang paling dominan dalam membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Kualitas Sumber Daya Manusia perlu mendapat perhatian yang lebih baik, mengingat tingkat pendidikan masyarakat Gayo Lues masih rendah. Masalah pokok pendidikan di Kabupaten Gayo Lues antara lain: belum meratanya akses pendidikan, belum optimalnya mutu pendidikan, belum optimalnya tata kelola pendidikan dan masih rendahnya minat baca masyarakat. Keempat masalah pokok tersebut disebabkan karena belum meratanya distribusi guru antar daerah dan masih banyak sekolah yang belum terakreditasi.

4) Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat.

Pelayanan kesehatan yang bermutu akan menghasilkan derajat kesehatan yang optimal. Tercapainya pelayanan kesehatan yang sesuai standar membutuhkan syarat ketersediaan sumber daya dan prosedur pelayanan. Ketersediaan sumber daya yang memadai dan sarana dan prasarana (bangunan dan sarana pendukung) serta sumber daya dana (pembiayaan kesehatan) dapat menghilangkan segala permasalahan kesehatan yang ada. Permasalahan kesehatan yang masih ditemui di Kabupaten Gayo Lues meliputi meliputi: masih banyaknya jumlah kematian ibu dan bayi, masih tingginya penyakit menular dan tidak menular, masih rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat, tingginya masalah gizi masyarakat, rendahnya kualitas dan pemerataan kesehatan.



Dengan dimasukkannya masalah ini kedalam isu strategis diharapkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Gayo Lues akan meningkat.

5) Optimalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan tata kelola pemerintahan.

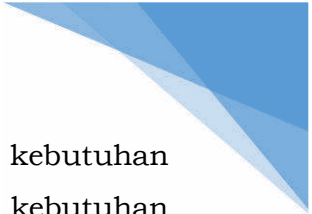
Reformasi birokrasi diharapkan dapat menciptakan birokrasi yang beorientasi pada kinerja yang tinggi sehingga kualitas pelayanan publik akan meningkat. Dampak yang terjadi apabila kualitas pelayanan publik semakin baik maka akan meningkatkan daya saing dan keberhasilan pembangunan di berbagai bidang. Birokrasi pemerintahan di Kabupaten Gayo Lues dibanyak sektor masih dirasakan kurang efisien. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan belum sepenuhnya dapat mencegah penyimpangan produk-produk kebijakan publik, karena belum adanya proses yang benar-benar transparan dan akuntabel baik dari segi penyusunan, pelaksanaan, maupun monitoring dan evaluasinya. Hal tersebut mengakibatkan banyak masyarakat berpendapat bahwa birokrasi pemerintahan tidak efisien, efektif, dan akuntabel, serta pelayanan publik belum optimal.

Prinsip dasar tata kelola pemerintahan yang baik seperti partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas belum sepenuhnya dapat berjalan dengan baik. Pemantapan akuntabilitas keuangan dan kinerja di Kabupaten Gayo lues memang sudah meningkat. Hal tersebut terlihat dari Pemerintah Kabupaten Gayo telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam kurun waktu 5 tahun berturut turut.

Namun, opini WTP tersebut belum sepenuhnya mencerminkan birokrasi yang bersih dan bebas KKN, manajemen aset milik daerah belum dikelola secara tertib administrasi dan tertib hukum, serta sistem pengendalian internal belum berjalan efektif.

6) Pengembangan dan Peningkatan kualitas sarana, prasarana infrastruktur.

Keberhasilan pembangunan salah satunya dapat diukur dari ketersediaan dan kecukupan serta kemampuan penyediaan sarana dan prasarana inrastruktur yang memadai, infrastruktur mempunyai peranan penting terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat. Dengan aset Infrastruktur yang baik dan memadai akan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Gayo Lues merujuk pada penyediaan sarana transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan



gedung dan fasilitas publik lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik.

7) Lingkungan Hidup dan Kebencanaan.

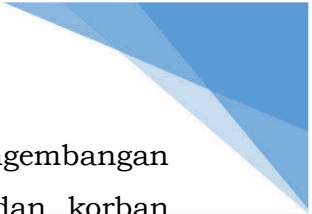
Isu strategis lingkungan hidup dan kebencanaan merupakan persoalan yang masih terjadi di Kabupaten Gayo Lues dan belum sepenuhnya bisa teratasi. Permasalahan lingkungan hidup dan kebencanaan ini akan semakin parah ketika cuaca ekstrem melanda karena membawa dampak yang signifikan seperti: meluapnya sungai, terjadinya longsornya tanah perbukitan dan kebakaran di lahan pertanian, perkebunan serta hutan. Masalah lingkungan hidup dan kebencanaan rata-rata disebabkan oleh kegiatan manusia yang tidak memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Isu strategis lingkungan hidup dan kebencanaan biasanya berada pada area pencemaran sungai, penebangan hutan dan banyaknya bencana alam banjir, longsor dan kebakaran. Selain bencana alam, hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah penanganan sampah, limbah padat dan limbah cair yang dihasilkan oleh rumah tangga dan industri. Untuk itu dibutuhkan penanganan yang lebih serius dengan manajemen limbah yang berkelanjutan (*sustainable waste management*).

8) Peningkatan Kualitas Demokrasi.

Pada tahun 2024 Indonesia khususnya Kabupaten Gayo Lues akan melaksanakan perhelatan pesta demokrasi yaitu pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah serentak dalam rentang waktu kurang dari 8 bulan. Untuk itu dalam rencana pembangunan kabupaten tahun 2023-2026, sejak awal harus disusun dengan matang desain dan konsep penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Salah satunya adalah mempersiapkan penganggaran yang memadai serta penyediaan fasilitas untuk pelaksanaan pemilu, penyusunan anggaran pemilu tahun 2024 harus berpatokan kepada prinsip efisiensi dan efektifitas, namun harus betul-betul memberikan manfaat yang besar dalam pelaksanaan pesta demokrasi tersebut.

9) Penguatan Perdamaian secara berkelanjutan.

Penanganan perdamaian yang merupakan implementasi dari MOU Helsinki tetap harus dilanjutkan, diantaranya: proses reintegrasi, pemberdayaan ekonomi, rehabilitasi kesehatan baik fisik maupun psikis, jaminan sosial bagi mantan pasukan Aceh merdeka maupun masyarakat korban konflik yang mengalami disabilitas/cacat permanen, belum dapat berjalan dengan sempurna. Penanganan perdamaian melalui isu strategis ini akan menciptakan situasi



damai yang berkelanjutan melalui proses pemberdayaan dan pengembangan ekonomi yang konkrit kepada mantan kombatan/tapol napol dan korban konflik, dengan menyelaraskan dengan program provinsi aceh melalui cara penyediaan lahan dengan legalitasnya (pengurusan sertifikat tanah).



BAB V

TUJUAN DAN SASARAN

5.1. TUJUAN DAN SASARAN

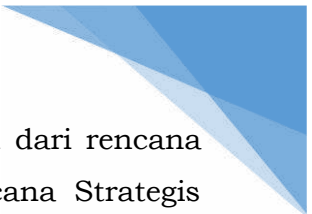
Tahapan pembangunan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Gayo Lues telah memasuki tahapan pembangunan ke-4 dan merupakan rangkaian akhir tahapan pembangunan jangka panjang Gayo Lues yang diharapkan pada akhir periode ini dapat mewujudkan masyarakat gayo lues yang bermartabat, terbebas dari keterisolasian dan kemiskinan yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas berdasarkan syariat islam yang kaffah.

Untuk menyempurnakan tahapan terakhir dalam RPJP ada beberapa sasaran pokok yang harus dilakukan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 yaitu:

1. Meningkatkan pemahaman dan kualitas pelaksanaan nilai-nilai islami dalam kehidupan masyarakat sehingga terbentuk karakter masyarakat yang islami;
2. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan professional;
3. Mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan mandiri;
4. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata;
5. Mewujudkan pelestarian nilai-nilai sejarah, adat istiadat dan seni budaya Gayo Lues.

Dalam mewujudkan sasaran pokok diatas, perlu dilakukan perumusan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Kabupaten Gayo Lues Tahun 2021-2026 yang dilakukan melalui pendekatan teknokratik dan partisipatif, yang secara keseluruhan memuat tujuan dan sasaran dengan berpedoman pada RPJP Kabupaten Gayo Lues 2005-2025, Rencana Pembangunan Aceh 2023-2026, Hasil Evaluasi, Isu-isu Startegis, Kebijakan Nasional dan Regulasi yang Berlaku. Perumusan tujuan dan sasaran tersebut merupakan penjabaran permasalahan dan isu strategis daerah 2023-2026 dalam upaya pencapaian arah kebijakan dan sasaran pokok RPJP Kabupaten Gayo Lues Tahun 2005-2025.

Tujuan dan Sasaran menjadi kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah. Tujuan merupakan keinginan tentang hal-hal yang akan dicapai untuk. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 4 tahun. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah mempunyai peranan penting sebagai rujukan utama



dalam pembangunan daerah, dimana rumusan tujuan dan sasaran dari rencana pembangunan daerah menjadi landasan perumusan sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Upaya mewujudkan pencapaian Rencana Pembangunan Kabupaten Gayo Lues tahun 2023-2026 meliputi 4 (empat) tujuan dengan 4 (empat) indikator tujuan dan 6 (enam) sasaran daerah dengan 12 (dua belas) indikator sasaran daerah yang diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1
Tujuan Dan Sasaran

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR / IKU	SATUAN	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatkan Penerapan Syari'at Islam dimasyarakat Gayo Lues	Persentase Ketaqwaan	Meningkatnya Penerapan Syariat Islam di Masyarakat dan Lembaga Pendidikan	Persentase Lembaga Pendidikan Bernuansa Islami	Persen	55	59	63	68	68
				Persentase Kemakmuran Masjid	Persen	25	30	35	45	45
				Jumlah Pelanggaran Syariat Islam	Kasus	55	50	45	40	40
2	Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Pertumbuhan PDRB	Persen	2,74	3,23	4,13	5,16	5,16
				Angka Kemiskinan	Persen	18,98	18,48	17,98	17,48	17,48
			Meningkatnya kualitas pendidikan	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,70	8,90	9,10	9,30	9,30
				Persentase Peningkatan Level Akreditasi Sekolah	Persen	52	54	57	58	58



NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR / IKU	SATUAN	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Meningkatnya Usia Harapan Hidup	Angka Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	65,79	65,92	66,05	66,18	66,18
3	Mewujudkan Good Governance (Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik)	Indeks pelayanan publik	Terciptanya Good Governance (Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik)	WTP	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
				Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor	85	86	87	90	90
4	Memelihara Perdamaian Secara Berkelanjutan	Jumlah konflik di masyarakat	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Keamanan, Ketertiban dan Keindahan)	Persen	83	86	89	92	92
				Persentasi kondisi darurat yang tertangani	Persen	75	85	90	92	92



BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan menyeluruh tentang upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Kabupaten Tahun 2023-2026 secara efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Gayo Lues disusun untuk menjadi acuan bagi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan bagi seluruh perangkat daerah lingkup pemerintah Kabupaten Gayo Lues, serta acuan bagi stakeholders terkait dalam partisipasi aktif mensukseskan pembangunan di Kabupaten Gayo Lues.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan berdasarkan Rencana Pembangunan Kabupaten Tahun 2023-2026 yang akan diwujudkan dalam empat tahun kedepan, perlu disusun strategi dan arah kebijakan yang akan menjamin bahwa rencana pembangunan kabupaten dapat dilaksanakan dan dapat pula dicapai tujuan dan sasarannya dengan baik. Selanjutnya strategi membutuhkan arah kebijakan agar tujuan dan sasaran menjadi tepat dan tidak salah arah. Strategi dan arah kebijakan yang dirumuskan didalam Rencana Pembangunan Kabupaten Tahun 2023-2026 ini harus dipedomani dalam menyusun program dan kegiatan pembangunan untuk empat tahun ke depan.

6.1. STRATEGI

Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun strategi pembangunan. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Dalam perumusan strategi memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan tujuan rencana pembangunan daerah.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Gayo Lues tahun 2023-2026 sebagaimana telah diuraikan pada BAB V sebelumnya, maka ditetapkan Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan yang akan dijalankan selama 4 (empat) tahun, mulai tahun 2023 sampai dengan 2026. Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Aceh 2023-2026 sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 6.1
Tujuan, Sasaran, dan Strategi
Kabupaten Gayo Lues 2023-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
1	2	3	4
1	Meningkatkan Penerapan Syari'at Islam dimasyarakat Gayo Lues	Meningkatnya Penerapan Syariat Islam di Masyarakat dan Lembaga Pendidikan	
			Memadukan kurikulum nasional dan menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung penerapan nilai-nilai islami
			Peningkatan kuantitas dan kualitas da'i
			Mensinergikan peran lembaga pemerintah dengan swadaya masyarakat dalam rangka percepatan program hafiz
			Optimalisasi fungsi lembaga pemerintah dan komunitas masyarakat dalam rangka menciptakan generasi islami
			Peningkatan profesionalisme dan kompetensi aparat penegak syari'at Islam
			Optimalisasi pengelolaan ZISWAF
			Penguatan kelembagaan Masjid
			Optimalisasi fungsi masjid sebagai sarana syiar dan peningkatan pemberdayaan masyarakat
			Peningkatan sarana dan prasarana masjid
			Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penegakkan syariat islam

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
1	2	3	4
2	Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	
			Meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat
			Menurunkan garis kemiskinan
			Pembangunan iklim investasi yang aman mudah dan <i>sustainable</i>
			Peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur
			Meningkatkan kepatuhan terhadap <i>regulasi</i> RTRW
		Meningkatnya kualitas pendidikan	
			Peningkatan kualitas Sumber Daya pendidikan
			Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan
		Meningkatnya Usia Harapan Hidup	
			Optimalisasi fasilitas pelayanan kesehatan
			Meningkatkan kesadaran masyarakat di bidang kesehatan
3	Mewujudkan Good Governance (Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik)	Terciptanya Good Governance (Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik)	
			Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang profesional dan berorientasi kinerja
			Peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan
4	Memelihara Perdamaian Secara Berkelanjutan	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban	
			Menciptakan keamanan dan ketertiban

6.2. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 4 (empat) tahun. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan pelaksanaan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Gayo Lues Tahun 2023-2026 dirumuskan berdasarkan pertimbangan untuk pencapaian target indikator sasaran yang ditetapkan pada setiap strategi yang dijalankan. Dalam rangka menentukan arah kebijakan pembangunan daerah, khususnya mengenai fokus atau tema pembangunan tahunan dalam satu periode Rencana Pembangunan Kabupaten (RPK), perlu memperhatikan beberapa faktor diantaranya pencapaian indikator sasaran. Hal ini sebagai dasar untuk menentukan langkah yang harus dilakukan untuk mencapai target indikator sasaran pada setiap strategi, sehingga semakin jelas tahapan dan ukuran target yang akan dicapai setiap tahunnya. Selanjutnya arah kebijakan pembangunan Kabupaten Gayo Lues yang menjadi prioritas pembangunan pada tahun 2023-2026 yang ditetapkan berdasarkan isu strategis serta pertimbangan strategis lainnya yang dinilai penting. Hasil kajian yang menjadi kebijakan pembangunan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6.2
Kebijakan Pembangunan Kabupaten Gayo Lues
Tahun 2023-2026

2023	2024	2025	2026
Peningkatan SDM dan Infrastruktur dasar untuk menunjang perekonomian	Peningkatan kualitas, daya saing produk, produktifitas komoditi unggulan dan peningkatan layanan publik serta penyuksesan Pemilu	Memperluas akses pasar komoditi unggulan dan pengembangan pariwisata	Terintegrasinya pariwisata dengan produk unggulan daerah Menuju kemandirian ekonomi

Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Rencana Pembangunan Kabupaten memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Metode yang digunakan sebagai alat bantu dalam merumuskan strategi pembangunan Kabupaen Gayo Lues Tahun 2023-2026. Adapun pilihan arah kebijakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Gayo Lues disajikan pada Tabel dibawah.

Tabel 6.3
Strategi Kebijakan Pembangunan Kabupaten Gayo Lues
Tahun 2023-2026

ARAH KEBIJAKAN	
Kebijakan Pembangunan Tahun 2023:	Pada tahun 2023 strategi kebijakan pembangunan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Gayo Lues adalah:
Peningkatan SDM dan Infrastruktur dasar untuk menunjang perekonomian	1. Pendidikan dan pelatihan
	2. Peningkatan Infrastruktur
	3. Persiapan pelaksanaan pilkada
	4. Penguatan pengelolaan pertanian
Kebijakan Pembangunan Tahun 2024:	Pada tahun 2024 strategi arah kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Gayo Lues adalah:
Peningkatan kualitas, daya saing produk, produktifitas komoditi unggulan dan peningkatan layanan publik serta penyuksesan Pemilu	1. Pelayanan publik
	2. Pendidikan dan pelatihan
	3. Pelaksanaan Pemilu
	4. Intensifikasi dan ekstensifikasi
	5. Promosi komoditi unggulan
	6. Value added /peningkatan nilai tambah komoditi
Kebijakan Pembangunan Tahun 2025:	Pada tahun 2025 strategi arah kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Gayo Lues adalah:
Memperluas akses pasar komoditi unggulan dan pengembangan pariwisata	1. Value added /peningkatan nilai tambah komoditi
	2. Promosi
	3. Pengembangan ekowisata dan agrowisata

ARAH KEBIJAKAN	
Kebijakan Pembangunan Tahun 2026:	Pada tahun 2026 strategi arah kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Gayo Lues adalah:
Terintegrasinya pariwisata dengan produk unggulan daerah Menuju kemandirian ekonomi	1. Promosi
	2. Koordinasi lintas sektor
	3. Kerjasama antar daerah dan lembaga

6.3. PROGRAM PRIORITAS

Strategi dan arah kebijakan pembangunan merupakan dasar bagi penentuan program pembangunan daerah. Program pembangunan daerah menjadi pelaksana dari arah kebijakan yang telah ditetapkan, sesuai dengan rencana waktu pelaksanaan. Program pembangunan daerah merupakan program strategis daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai kewenangannya, sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran rencana pembangunan kabupaten. Dengan demikian, program pembangunan daerah memiliki posisi strategis dalam pencapaian target sasaran pembangunan, dalam mewujudkan visi dan misi. Program pembangunan daerah disajikan selama 4 (empat) tahun mulai Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026, disajikan berdasarkan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Dengan sifat program pembangunan daerah yang bersifat strategis, maka pelaksanaan dan penganggarannya diutamakan. Penentuan program pembangunan daerah Kabupaten Gayo Lues juga merupakan bentuk pelaksanaan program unggulan rencana pembangunan kabupaten tahun 2023-2026 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 6.4
Tujuan, Sasaran dan Indikator dan Program Prioritas

No	TUJUAN/SASARAN/ DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL 2021	TARGET/PROYEKSI								KONDISI AKHIR		SKPK PENANGGUNG JAWAB
					2023		2024		2025		2026				
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGE T	Rp	TARGET	Rp	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	TOTAL					823.397.822.482		876.788.620.719		860.897.400.945		881.879.902.096		3.442.963.746.242	
1	MENINGKATKAN PENERAPAN SYARI'AT ISLAM DIMASYARAKAT GAYO LUES	Persentase Ketaqwaan	%	N/A	73,00	42.478.172.241	76,00	44.631.709.131	79,00	45.573.338.770	85,00	48.510.466.373	85,00	181.193.686.515	
1.1	MENINGKATNYA PENERAPAN SYARIAT ISLAM DI MASYARAKAT DAN LEMBAGA PENDIDIKAN	Persentase Lembaga Pendidikan Bernuansa Islami	Persen	25	55		59		63		68		68	-	
1.1.1	PROGRAM PENDIDIKAN DAYAH	Persentase dayah terakreditasi	%	40	50	5.214.756.987	60	6.589.158.000	70	7.162.000.000	80	8.114.231.000	80	27.080.145.987	DAYAH
1.1.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN MAJELIS PENDIDIKAN ACEH	Persentase Rekomendasi yang dilaksanakan	%	50	55	820.945.167	60	820.945.167	65	714.039.746	70	959.039.746	70	3.314.969.826	MPD
1.1.3	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah PAUD	%	24,00	24,25	3.860.567.142	24,50	4.092.052.244	24,65	4.916.272.834	25,00	5.079.574.233	25,00	17.948.466.453	DISDIK
		Angka Partisipasi Sekolah SD/MI	%	98,45	98,50	9.196.695.315	98,55	9.798.513.573	98,60	9.534.121.120	98,65	10.111.973.752	98,65	38.641.303.760	DISDIK
		Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs	%	83,12	83,17	8.819.606.168	83,43	9.020.677.645	83,69	8.243.969.371	83,95	9.080.403.799	83,95	35.164.656.983	DISDIK
1.1.4	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase sekolah yang melaksanakan Kurikulum muatan Lokal	%	13,78	13,88	60.000.000	13,93	68.000.000	13,98	68.000.000	14,03	68.000.000	14,03	264.000.000	DISDIK
		Persentase Kemakmuran Masjid	Persen	17	25		30		35		45		45		
1.1.5	PROGRAM MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) ACEH	Rasio Dai Per Satuan Penduduk	Per 1000 Penduduk	2,24	3,00	1.500.405.552	3,50	1.521.744.885	4,00	1.393.000.000	4,50	1.383.000.000	4,50	5.798.150.437	MPU
1.1.6	PROGRAM SYARIAT ISLAM ACEH	Indeks Pembangunan Syariat (IPS)	%	80	85	6.844.000.000	90	6.629.000.000	95	7.069.000.000	100,00	7.019.000.000	100	27.561.000.000	DSI
1.1.7	PROGRAM BAITUL MAL	Persentase Penyaluran terhadap Pengumpulan Zakat, Infak, Wakaf dan Harta Agama Lainnya	%	100	100	3.257.236.328	100	3.260.336.328	100	3.657.935.699	100	3.327.243.843	100	13.502.752.198	BAITUL MAL

No	TUJUAN/SASARAN/ DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL 2021	TARGET/PROYEKSI								KONDISI AKHIR		SKPK PENANGGUNG JAWAB
					2023		2024		2025		2026				
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGE T	Rp	TARGET	Rp	
		<i>Jumlah Pelanggaran Syariat Islam</i>	Kasus	35	55		50		45		40		40		
1.1.8	PROGRAM MAJELIS ADAT ACEH (MAA)	Persentase rekomendasi yang dilaksanakan	%	50	55	853.959.582	60	731.281.289	65	715.000.000	70	715.000.000	70	3.015.240.871	MAA
1.1.9	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat penyelesaian pelanggaran ketentraman dan ketertiban	%	70	83	2.050.000.000	86	2.100.000.000	89	2.100.000.000	92	2.653.000.000	92	8.903.000.000	SATPOL PP&WH
2	MENINGKATKAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	67,56	68,82	220.279.751.494	68,99	235.050.146.411	69,29	233.727.083.192	70,00	238.620.621.921	70,00	927.677.603.018	
2.1	MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Pertumbuhan PDRB	%	2,32	2,74		3,23		4,13		5,16		5,16		
2.1.1	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Laju inflasi daerah	%	1,97	3,70	1.750.773.980	2,65	1.803.297.199	2,64	1.857.396.115	2,92	1.857.396.115	2,92	7.268.863.409	SETDAKAB
2.1.2	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Rasio Desa yang melakukan kerjasama	Rasio	0,58	0,60	30.000.000	0,61	30.000.000	0,62	30.000.000	0,63	30.000.000	0,17	120.000.000	DPMK
2.1.3	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Indeks Desa membangun	Indeks	1,23	0,03	210.000.000	0,05	360.000.000	0,07	467.000.000	0,09	514.000.000	0,09	1.551.000.000	DPMK
2.1.4	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Rasio lembaga kemasyarakatan kampung dan adat yang aktif	Rasio	0,52	0,60	1.385.000.000	0,65	1.980.000.000	0,70	2.140.000.000	0,73	2.220.000.000	0,73	7.725.000.000	DPMK
2.1.5	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	%	50	62,50	1.264.989.817	65,63	1.379.918.012	68,91	1.700.000.000	72,35	1.006.586.374	72,35	5.351.494.203	DISNAKERTRANS
2.1.6	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja binaan yang ditempatkan	%	N/A	20	200.000.000			30	280.000.000	20	200.000.000	70	680.000.000	DISNAKERTRANS
2.1.7	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi Aktif	%	33,00	45,11	250.000.000	56,39	400.000.000	60,15	500.000.000	71,43	400.000.000	71,43	1.550.000.000	DISDAGKOP UKM
2.1.8	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Pertumbuhan Koperasi Produksi (non simpan pinjam)	%	N/A	8	400.000.000	16	600.000.000	18	581.000.000	20	500.000.000	20	2.081.000.000	DISDAGKOP UKM

No	TUJUAN/SASARAN/ DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL 2021	TARGET/PROYEKSI								KONDISI AKHIR		SKPK PENANGGUNG JAWAB
					2023		2024		2025		2026				
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET T	Rp	TARGET	Rp	
2.1.9	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pertumbuhan UMKM Produktif	%	2,55	2,70	1.000.000.000	3,60	500.000.000	4,00	350.000.000	5,80	300.000.000	16,10	2.150.000.000	DISDAGKOP UKM
2.1.10	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	10,55	15,29	2.107.080.836	15,99	2.586.000.000	16,71	3.100.000.000	17,47	2.501.658.386	17,47	10.294.739.222	DISDAGKOP UKM
2.1.11	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan jumlah investor	%	12,00	16,67	75.000.000	21,43	245.000.000	26,67	63.000.000	37,50	203.000.000	37,50	586.000.000	DPMPTSP
2.1.12	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Indeks Daya Saing Investasi	point	-0,41	0,02	75.000.000	0,03	20.000.000	0,05	110.000.000	0,10	75.000.000	0,10	280.000.000	DPMPTSP
2.1.13	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase pelaku usaha yang memiliki NIB	%	26,36	19,23	150.000.000	25,00	150.000.000	-	-	29,23	130.000.000	99,82	430.000.000	DPMPTSP
2.1.14	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase investor dan kegiatan usaha yang menyampaikan laporan	%	100	100	338.000.000	100	360.000.000	100	370.000.000	100	130.000.000	100	1.198.000.000	DPMPTSP
2.1.15	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan Pangan Utama	%	87,57	95	500.000.000	98	400.000.000	98	500.000.000	100	500.000.000	100	1.900.000.000	DISPANGKAN
2.1.16	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produktivitas kolam per hektar per tahun	ton/ha/tahun	3	4	1.700.000.000	4,5	1.800.000.000	5	1.000.000.000	5	1.700.000.000	5	6.200.000.000	DISPANGKAN
2.1.17	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase jenis ikan endemik langka yang dikonservasi	%	100	100	1.000.000.000	100	800.000.000	100	700.000.000	100	1.000.000.000	100	3.500.000.000	DISPANGKAN
2.1.18	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Intensitas Event Budaya per Tahun	Event /tahun	N/A	3	1.250.000.000	4	1.250.000.000	4	1.516.320.000	4	1.667.952.000	4	5.684.272.000	DISPAR
2.1.19	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Intensitas Event Seni Per Tahun	Event / tahun	N/A	3	150.000.000	3	150.000.000	3	174.960.000	3	188.956.800	12	663.916.800	DISPAR
2.1.20	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	1,17	3,59	1.387.557.568	4,80	1.387.557.568	5,17	1.648.660.000	5,70	1.743.731.200	19,26	6.167.506.336	DISPAR
2.1.21	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Pertumbuhan kunjungan wisata	%	1,20	10	400.000.000	18	400.000.000	16	466.560.000	-	-	38	1.266.560.000	DISPAR
2.1.22	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase kelompok ekraf dan pelaku wisata yang dibina	%	14	18	1.250.000.000	21	1.250.000.000	23	1.471.500.000	24	1.618.650.000	100	5.590.150.000	DISPAR

No	TUJUAN/SASARAN/ DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL 2021	TARGET/PROYEKSI								KONDISI AKHIR		SKPK PENANGGUNG JAWAB
					2023		2024		2025		2026				
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGE T	Rp	TARGET	Rp	
2.1.23	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	%	39,40	20,78	6.000.000.000	21,33	6.500.000.000	22,39	6.500.000.000	23,48	6.500.000.000	23,48	25.500.000.000	DISTAN
2.1.24	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase lahan produktif yang dapat diakses Jalan Usaha Tani dan Jaringan Irigasi Usaha Tani	%	12	15	8.985.000.000	22	9.685.000.000	38	9.685.000.000	45	9.685.000.000	45	38.040.000.000	DISTAN
2.1.25	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase hama penyakit yang ditangani per tahun	%	25	25	500.000.000	25	700.000.000	25	700.000.000	25	700.000.000	25	2.600.000.000	DISTAN
2.1.26	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Nilai Tukar Petani	%	104,33	107,01	500.000.000	107,89	700.000.000	108,78	700.000.000	109,68	700.000.000	109,68	2.600.000.000	DISTAN
2.1.27	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Laju pertumbuhan industri	%	0,44	6,34	2.560.000.000	7,56	3.070.000.000	9,26	2.880.000.000	9,37	2.922.909.500	32,53	11.432.909.500	DISPRIN
2.1.28	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase ketersediaan data dan informasi industri	%	N/A	30	200.000.000	30	200.000.000	20	200.000.000	20	200.000.000	100	800.000.000	DISPRIN
2.1.29	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase sarana prasarana LLAJ berfungsi baik	%	75	80	4.201.000.000	84	9.113.000.000	87	3.092.000.000	90	3.563.000.000	90	19.969.000.000	DISHUB
		Angka Kemiskinan	%	19,64	18,98		18,48		17,98		17,48		17,48		
2.1.30	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Kampung Mandiri Pangan	%	45	5	300.000.000	5	500.000.000	5	300.000.000	5	300.000.000	65	1.400.000.000	DISPANGKAN
2.1.31	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penyakit hewan yang ditangani per tahun	%	80	80	720.000.000	80	740.000.000	80	740.000.000	80	740.000.000	80	2.940.000.000	DISTAN
2.1.32	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Indeks Harga Implisit Pengeluaran Rumah Tangga	%	0,66	1,48	1.190.000.000	0,98	1.281.455.087	1,49	1.181.341.614	1,46	1.281.341.614	1,46	4.934.138.315	DISDAGKOP UKM
2.1.33	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Kalibrasi peralatan metrologi perdagangan per tahun	kali/tahun	4	4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	4	800.000.000	DISDAGKOP UKM

No	TUJUAN/SASARAN/ DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL 2021	TARGET/PROYEKSI								KONDISI AKHIR		SKPK PENANGGUNG JAWAB
					2023		2024		2025		2026				
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
2.1.34	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase Kelompok Industri yang dievaluasi ijinnya	%	N/A	-	-	-	-	3	45.650.000	-	-	3	45.650.000	DISPRIN
2.1.35	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase warga transmigrasi yang mendapatkan peningkatan kapasitas	%	N/A	12,90	450.000.000	12,90	300.000.000	12,90	450.000.000	12,90	300.000.000	51,60	1.500.000.000	DISNAKERTRANS
2.1.36	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase daerah irigasi (D.I) Fungsional	%	39,08	45	10.688.000.000	46	10.788.000.000	48	11.188.000.000	50	11.578.000.000	50	44.242.000.000	PUPR
2.1.37	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan kewenangan Kabupaten dalam kondisi mantan	%	50,74	60	28.200.000.000	62	23.800.000.000	65	26.700.000.000	70	28.100.000.000	70	106.800.000.000	PUPR
2.1.38	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air bersih perkotaan dan pedesaan	%	78	83,5	11.866.039.968	89	12.670.000.000	94,5	12.204.720.000	100	10.810.000.000	100	47.550.759.968	PUPR/PERKIM
2.1.39	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase pemenuhan pelayanan dasar SPM subbidang air limbah domestik	%	65,15	73,84	2.519.600.000	82,56	1.631.540.000	91,28	1.458.540.000	100	1.556.540.000	100	7.166.220.000	PUPR/PERKIM
2.1.40	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase berfungsi baik	%	65,15	73,84	3.146.000.000	82,56	2.848.657.968	91,28	3.766.000.000	100	5.174.000.000	100	14.934.657.968	PUPR/PERKIM
2.1.41	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman tertata	%	20,78	30,58	3.740.580.000	40,39	3.674.579.000	50,19	4.141.217.000	60	4.500.000.000	60	16.056.376.000	PERKIM
2.1.42	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase lingkungan kumuh yang tertangani	%	2,15	2,86	200.000.000	3,57	200.000.000	4,28	200.000.000	5	200.000.000	5	800.000.000	PERKIM
2.1.43	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase sarana prasarana utilitas umum berfungsi baik	%	65,13	73,84	4.235.000.000	82,66	3.000.000.000	91,28	4.176.699.968	100	4.868.536.968	100	16.280.236.936	PERKIM

No	TUJUAN/SASARAN/ DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL 2021	TARGET/PROYEKSI								KONDISI AKHIR		SKPK PENANGGUNG JAWAB
					2023		2024		2025		2026				
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
2.1.44	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase jumlah masyarakat yang mendapatkan bimbingan dan sosialisasi dalam rangka meningkatkan Kerukunan umat beragama dan Pemberantasan penyalahgunaan narkoba	%	0,21	48,50	300.000.000	0,73	300.000.000	0,99	100.000.000	0,99	100.000.000	51,21	800.000.000	KESBANGPOL
2.1.45	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase penyandang penyakit sosial yang dihina	%	80	100	2.199.236.540	100	2.199.236.540	100	2.199.236.540	100	2.100.000.000	100	8.697.709.620	DINSOS
2.1.46	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang penyakit sosial yang direhabilitasi	%	80	100	1.400.000.000	100	1.400.000.000	100	1.400.000.000	100	1.869.956.540	100	6.069.956.540	DINSOS
2.1.47	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Fakir Miskin yang masuk dalam DTKS	%	80	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	1.200.000.000	DINSOS
2.1.48	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase terpenuhinya elemen Kab/kota menuju layak anak (KIA)	%	50	65	773.308.970	75	910.000.000	85	910.000.000	100	1.035.000.000	100	3.628.308.970	DP3AP2KB
2.1.49	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Daerah	%	5,81	5,85	390.000.000	5,90	480.000.000	6,15	480.000.000	6,30	585.000.000	6,30	1.935.000.000	DP3AP2KB
2.1.50	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase keluarga yang mendapatkan fasilitasi penguatan 5 dimensi	%	40	50	80.000.000	55	150.000.000	55	150.000.000	60	200.000.000	60	580.000.000	DP3AP2KB
2.2	MENINGKATNYA KUALITAS PENDIDIKAN	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,40	8,70		8,90		9,10		9,30		9,30		
2.2.1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah PAUD	%	24,00	24,25	5.790.850.714	24,50	6.138.078.366	24,65	7.374.409.250	25,00	7.619.361.350	25,00	26.922.699.680	DISDIK
		Angka Partisipasi Sekolah SD/MI	%	98,45	98,50	13.795.042.975	98,55	14.697.770.359	98,65	14.301.181.679	98,65	15.167.960.626	98,65	57.961.955.639	DISDIK

No	TUJUAN/SASARAN/ DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL 2021	TARGET/PROYEKSI								KONDISI AKHIR		SKPK PENANGGUNG JAWAB
					2023		2024		2025		2026				
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGE T	Rp	TARGET	Rp	
		Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs	%	83,12	83,17	13.229.409.251	83,43	13.531.016.467	83,69	12.365.954.056	83,95	13.620.605.698	83,95	52.746.985.472	DISDIK
2.2.2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rasio perpustakaan per satuan penduduk	Rasio	0,002	0,002	247.000.000	0,002	425.000.000	0,002	790.000.000	0,002	820.000.000	0,010	2.282.000.000	DISARPUS
		Persentase Peningkatan Level Akreditasi Sekolah	%	50	52		54		57		58		58		
2.2.3	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase penetapan tenaga pendidik honorer menjadi P3K	%	9	21	500.000.000	36	500.000.000	50	500.000.000	66	500.000.000	66	2.000.000.000	DISDIK
2.2.4	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase sekolah terakreditasi	%	50	52	1.000.000.000	54	1.040.000.000	57	1.040.000.000	58	1.040.000.000	58	4.120.000.000	DISDIK
2.2.5	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase sekolah yang melaksanakan Kurikulum muatan lokal	%	13,78	13,88	90.000.000	13,93	102.000.000	13,98	102.000.000	14,03	102.000.000	14,03	396.000.000	DISDIK
2.3	MENINGKATNYA USIA HARAPAN HIDUP	Angka Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	65,53	65,79		65,92		66,05		66,18		66,18		
2.3.1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Fasilitas Kesehatan yang meningkat akreditasinya	%	25	37,50	62.592.152.875	50	71.451.602.875	62,50	70.087.400.000	100	68.531.687.750	100	272.662.843.500	DINKES / RSU M. ALI KASIM
2.3.2	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Tenaga kesehatan yang memenuhi standart Pelayanan Kesehatan	%	75	80	1.401.000.000	85	1.911.000.000	95	1.871.000.000	100	2.301.000.000	100	7.484.000.000	DINKES / RSU M. ALI KASIM
2.3.3	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Cakupan ketersediaan dan distribusi sediaan farmasi, alkes dan makanan minuman	%	90	95	133.700.000	95	137.700.000	95	157.700.000	96	177.700.000	96	606.800.000	DINKES
2.3.4	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Kampung Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	%	90	92	760.000.000	95	798.000.000	97	837.900.000	100	879.795.000	100	3.275.695.000	DINKES
2.3.5	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase PUS yang menjadi akseptor KB	%	55	60	580.000.000	65	560.000.000	70	660.000.000	75	660.000.000	75	2.460.000.000	DP3AP2KB

No	TUJUAN/SASARAN/ DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL 2021	TARGET/PROYEKSI								KONDISI AKHIR		SKPK PENANGGUNG JAWAB
					2023		2024		2025		2026				
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGE T	Rp	TARGET	Rp	
2.3.6	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase keluarga berencana yang terbina	%	55	60	2.373.428.000	70	2.704.736.970	75	2.634.736.970	80	2.839.296.000	80	10.552.197.940	DP3AP2KB
2.3.7	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Rumah tangga yang mendapatkan program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)	%	80	81	280.000.000	82	310.000.000	83	270.000.000	85	325.000.000	85	1.185.000.000	DP3AP2KB
2.3.8	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	%	35	40	660.000.000	50	800.000.000	60	810.000.000	70	810.000.000	70	3.080.000.000	DISPORA
2.3.9	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Organisasi Olahraga yang aktif	%	55	60	3.930.000.000	75	4.550.000.000	80	4.650.000.000	90	4.470.000.000	90	17.600.000.000	DISPORA
2.3.10	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Kelembagaan kepramukaan Tingkat sekolah dan daerah yang aktif	%	100	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	800.000.000	DISPORA
3	MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE (TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK)	Indeks Pelayanan Publik	Poin	N/A	2,50	541.558.338.685	2,60	573.809.939.177	2,70	558.624.894.487	2,80	571.602.091.236	2,80	2.245.595.263.585	
3.1	TERCIPTANYA GOOD GOVERNANCE (TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK)	WTP	Opini	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		
3.1.1	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase dokumen/arsip daerah yang diselamatkan dan dilestarikan	%	0,09	-	-	-	-	1	35.000.000	-	-	1	35.000.000	DISARPUS
3.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	50	60	75.000.000	65	110.000.000	70	140.000.000	75	140.000.000	75	465.000.000	DISARPUS
3.1.3	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan APIP	%	70	75	2.529.956.700	80	2.529.956.700	85	2.588.956.700	90	2.647.253.000	90	10.296.123.100	INSPEKTORAT

No	TUJUAN/SASARAN/ DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL 2021	TARGET/PROYEKSI								KONDISI AKHIR		SKPK PENANGGUNG JAWAB
					2023		2024		2025		2026				
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
3.1.4	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Meningkatnya level kapabilitas APIP	Level	3	3	1.335.200.000	3	1.335.200.000	4	1.335.200.000	4	1.335.200.000	4	5.340.800.000	INSPEKTORAT
3.1.5	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase SKPD yang menyampaikan laporan tepat waktu	%	100	100	142.011.326.952	100	140.922.050.599	100	139.800.395.956	100	138.826.231.805	100	561.560.005.312	BPKK
3.1.6	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase barang milik daerah yang terinventarisasi	%	100	100	1.550.394.000	100	1.550.394.000	100	1.550.394.000	100	1.550.394.000	100	6.201.576.000	BPKK
3.1.7	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rasio PAD terhadap total APBK	%	7,32	7,74	846.398.500	7,91	846.398.500	8,78	846.398.500	9,34	846.398.500	9,34	3.385.594.000	BPKK
3.1.8	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Kesesuaian antara Dokumen perencanaan tahunan dengan lima tahunan	%	89,42	100	2.193.000.000	100	2.393.000.000	100	2.263.000.000	100	2.359.000.000	100	9.208.000.000	BAPPEDA
3.1.9	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Kesesuaian Program Daerah, Provinsi dan Nasional	%	100	35	1.800.000.000	38	1.950.000.000	40	1.950.000.000	55	1.950.000.000	55	7.650.000.000	BAPPEDA
3.1.10	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil penelitian yang dikembangkan	%	100	100	600.000.000	100	650.000.000	100	650.000.000	100	650.000.000	100	2.550.000.000	BAPPEDA
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	82,70	85		86		87		90		90		
3.1.11	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pelaksanaan kebijakan tentang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	%	18,24	95	7.069.066.481	95	7.281.138.475	95	7.499.572.629	95	7.393.482.629	95	29.243.260.214	SETDAKAB
3.1.12	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah Danun yang ditetapkan	Danun	5	5	5.245.000.000	5	5.285.000.000	5	5.245.000.000	5	5.245.000.000	5	21.020.000.000	SETWAN
3.1.13	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rasio Penduduk ber KTP	%	75	80	99.795.650	85	195.795.650	90	190.795.650	95	209.795.000	100	696.181.950	DISDUKCAPIL
3.1.14	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rasio pasangan ber Akte Nikah	Rasio	65	75	98.540.850	80	192.540.850	85	192.540.850	90	202.540.000	90	686.162.550	DISDUKCAPIL
3.1.15	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase aplikasi adminduk berfungsi baik	%	65	75	98.129.730	80	198.129.730	85	193.129.730	90	203.129.000	90	692.518.190	DISDUKCAPIL

No	TUJUAN/SASARAN/ DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL 2021	TARGET/PROYEKSI								KONDISI AKHIR		SKPK PENANGGUNG JAWAB
					2023		2024		2025		2026				
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
3.1.16	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Data Profil Kependudukan yang dimutakhirkan	%	100	75	80.000.000	80	100.000.000	85	100.000.000	90	120.000.000	90	400.000.000	DISDUKCAPIL
3.1.17	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN yang dilantik dalam jabatan struktural dan fungsional	%	N/A	80	1.512.791.400	82	2.540.269.400	84	2.651.769.400	85	2.474.269.400	85	9.179.099.600	BKPSDM/ KOPRI
3.1.18	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	N/A	41	149.999.500	44	149.999.500	46	149.999.500	49	149.999.500	49	599.998.000	BKPSDM
3.1.19	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Regulasi tentang penyelenggaraan pemerintahan umum yang di sosialisasikan	%	84	95	823.000.000	95	826.276.000	95	894.010.900	95	910.000.000	95	3.453.286.900	11 KECAMATAN
3.1.20	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kepuasan masyarakat terhadap layanan tingkat kecamatan	%	82	95	614.070.000	95	340.000.000	95	705.000.000	95	430.000.000	95	2.089.070.000	11 KECAMATAN
3.1.21	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase berita/informasi PEMDA yang disebar melalui media massa	%	100	100	1.136.217.570	100	1.090.000.000	100	890.000.000	100	1.094.348.465	100	4.210.566.035	DISKOMINFO
3.1.22	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Penerapan Infrastruktur dan Aplikasi terintegrasi	%	50	60	1.050.000.000	70	1.467.126.996	80	1.137.391.996	85	1.130.000.000	85	4.784.518.992	DISKOMINFO
3.1.23	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Jumlah Dokumen statistik Data Sektoral Di Lingkup Daerah Kabupaten Gayo Lues	Dokumen	N/A	4	490.000.000	4	340.000.000	4	380.000.000	4	340.000.000	4	1.550.000.000	DISKOMINFO
3.1.24	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase SKPK yang menerapkan Persandian	%	N/A	100	140.000.000	100	100.000.000	100	170.000.000	100	540.000.000	100	950.000.000	DISKOMINFO

No	TUJUAN/SASARAN/ DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL 2021	TARGET/PROYEKSI								KONDISI AKHIR		SKPK PENANGGUNG JAWAB
					2023		2024		2025		2026				
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
3.1.25	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PERTANAHAN	Persentase Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH) yang berfungsi	%	42,68	30	132.000.000	40	158.000.000	50	244.000.000	60	265.000.000	60	799.000.000	DISTANAH
3.1.26	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase tertanganinya Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	%	96,29	75	200.000.000	75	221.000.000	80	303.000.000	85	309.000.000	85	1.033.000.000	DISTANAH
3.1.27	PROGRAM PENGURUSAN HAK HAK ATAS TANAH	Persentase aset tanah pemerintah yang teradministrasi	%	N/A	90	164.000.000	91	181.000.000	92	220.500.000	93	236.600.000	93	802.100.000	DISTANAH
3.1.28	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase tanah kosong yang dimanfaatkan	%	N/A	20	191.299.433	25	215.000.000	30	286.000.000	35	289.000.000	35	981.299.433	DISTANAH
3.1.29	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu	%	58,89	0,74	5.000.000.000	0,74	24.000.000.000	-	-	-	-	2,97	29.000.000.000	KESBANGPOL
3.1.30	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Jumlah Makam Pahlawan yang dikelola pemda	Makam	1	-	-	-	-	-	1	100.000.000	1	100.000.000	DINSOS	
3.1.31	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase sampah yang tertangani	%	68,74	69	2.407.262.000	72	2.640.041.081	76	2.418.262.000	94	3.038.262.000	94	10.503.827.081	DLH
3.1.32	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan Operasional Kantor	%	100	100	361.915.889.919	100	374.001.621.696	100	383.594.576.676	100	396.617.187.937	100	1.516.129.276.228	SELURUH SKPK
4	PENGUATAN PERDAMAIAN SECARA BERKELANJUTAN	Jumlah Konflik di Masyarakat	Jumlah	N/A	10,00	19.081.560.062	8,00	23.296.826.000	6,00	22.972.084.496	4,00	23.146.722.566	4,00	88.497.193.124	
4.1	MENINGKATNYA KEAMANAN, KETERTIBAN DAN KEINDAHAN	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Keamanan, Ketertiban dan Keindahan)	%	70	83		86		89		92		92		

No	TUJUAN/SASARAN/ DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL 2021	TARGET/PROYEKSI								KONDISI AKHIR		SKPK PENANGGUNG JAWAB
					2023		2024		2025		2026				
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
4.1.1	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase unsur Muspika dan Tokoh Agama, Tokoh masyarakat dalam koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	95	345.000.000,00	95	345.000.000,00	95	408.521.000,00	95	399.000.000,00	95	1.497.521.000,00	II KECAMATAN
4.1.2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase masyarakat per kecamatan yang memperoleh pendidikan wawasan kebangsaan	%	77,85	0,18	420.000.000,00	0,35	320.000.000,00	0,69	50.000.000,00	0,85	50.000.000,00	0,85	840.000.000,00	KESBANGPOL
4.1.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase LSM/ORMAS yang mengikuti pembinaan	%	N/A	0,20	1.700.000.000,00	0,22	2.250.000.000,00	0,24	700.000.000,00	0,26	700.000.000,00	0,92	5.350.000.000,00	KESBANGPOL
4.1.4	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase konflik sosial yang diawasi dan ditangani	%	96,84	0,70	1.300.000.000,00	0,75	1.300.000.000,00	0,80	1.151.163.496,00	0,85	1.151.163.496,00	3,10	4.902.326.992,00	KESBANGPOL
4.1.5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Tingkat kepatuhan terhadap RTRW	%	0,04	100	4.400.000.000,00	100	5.870.000.000,00	100	6.400.000.000,00	100	7.250.000.000,00	100	23.920.000.000,00	PUPR
4.1.6	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan gedung yang memiliki Izin mendirikan bangunan (IMB)	%	0,23	0,55	200.000.000,00	0,87	200.000.000,00	-	-	-	-	0,87	400.000.000,00	PUPR/PERKIM
4.1.7	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase bangunan yang tertata dengan baik	%	2,15	2,86	2.294.300.000,00	3,57	1.560.000.000,00	4,28	3.600.000.000,00	5	4.600.000.000,00	5	12.054.300.000,00	PUPR/PERKIM
4.1.8	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPD yang mendapatkan Layanan Komprehensif	%	45	55	598.000.000	60	740.000.000	65	740.000.000	70	835.000.000	70	2.913.000.000	DP3AP2KB
4.1.9	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak memerlukan Perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	%	30	35	180.000.000	40	250.000.000	45	250.000.000	50	325.440.970	50	1.005.440.970	DP3AP2KB

No	TUJUAN/SASARAN/ DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL 2021	TARGET/PROYEKSI								KONDISI AKHIR		SKPK PENANGGUNG JAWAB
					2023		2024		2025		2026				
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
4.1.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan masyarakat terkait rekomendasi lingkungan, izin PPLH yang diterbitkan pemerintah yang ditangani	%	100	100	200.000.000,00	100	220.000.000,00	100	180.000.000,00	100	299.118.100,00	100	899.118.100,00	DLH
		Persentase Kondisi Darurat Yang Tertangani	%	73	75		85		90		92		92		
4.1.11	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase kejadian Bencana yang ditanggulangi	%	100	100	416.000.000,00	100	508.000.000,00	100	508.000.000,00	100	443.000.000,00	100	1.875.000.000,00	BPBD
4.1.12	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	60	68	3.297.820.000,00	73	6.273.826.000,00	78	5.008.400.000,00	85	3.263.000.000,00	85	17.843.046.000,00	DAMKAR
4.1.13	PROGRAM PENANGANAN KONFLIK, SENGKETA DAN PERKARA PERTANAHAN	Persentase Kasus Perkara Pertanahan yang diselesaikan	%	N/A	2	134.000.000,00	2	146.000.000,00	2	206.000.000,00	2	220.000.000,00	8	706.000.000,00	DISTANAH
4.1.14	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	Dokumen	1	1	315.000.000,00	1	330.000.000,00	1	360.000.000,00	1	350.000.000,00	1	1.355.000.000,00	DLH
4.1.15	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	77,91	83,84	320.000.000,00	84,84	350.000.000,00	85,71	320.000.000,00	87,85	300.000.000,00	87,85	1.290.000.000,00	DLH
4.1.16	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Luasan RTH yang ditangani	%	22,40	28	250.000.000	32	375.000.000	40	380.000.000	52	425.000.000	52	1.430.000.000	DLH
4.1.17	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Perusahaan yang memiliki Dokumen AMDAL, UKL UPL dan SPPL	%	72	79	243.440.062	85	286.000.000	93	302.000.000	97	345.000.000	97	1.176.440.062	DLH

No	TUJUAN/SASARAN/ DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL 2021	TARGET/PROYEKSI								KONDISI AKHIR		SKPK PENANGGUNG JAWAB
					2023		2024		2025		2026				
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
4.1.18	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Jumlah Dokumen hasil kordinasi dan sinkronisasi terkait dengan PPLH yang dilakukan pemberdayaan, kemitraan, pendampingan dan penguatan	Dokumen	N/A	1	80.000.000	1	65.000.000	1	80.000.000	1	67.000.000	4	292.000.000	DLH
4.1.19	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase masyarakat yang mengikuti pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	%	N/A	5	50.000.000	5	85.000.000	5	85.000.000	5	100.000.000	5	320.000.000	DLH
4.1.20	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Penghargaan lingkungan hidup yang diperoleh	Ada/ Tidak ada	Ada	Ada	20.000.000	Ada	60.000.000	Ada	60.000.000	Ada	61.000.000	Ada	201.000.000	DLH
4.1.21	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	80	100	1.263.000.000,00	100	1.263.000.000,00	100	1.263.000.000,00	100	1.363.000.000,00	100	5.152.000.000,00	DINSOS
4.1.22	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase rumah layak huni bagi korban bencana yang dibangun	%	20,78	30,58	1.055.000.000,00	40,39	500.000.000,00	50,19	920.000.000,00	60	600.000.000,00	60	3.075.000.000,00	PERKIM



BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Kerangka pendanaan merupakan rencana penganggaran dan belanja untuk empat tahun ke depan. Sebagai rencana, maka analisis harus didasarkan dengan menunjukkan potensi kapasitas riil keuangan daerah untuk empat tahun kedepan. Terkait dengan kapasitas riil keuangan belanja daerah untuk empat tahun kedepan. Pemerintah Kabupaten Gayo Lues sudah menyusun program sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah dan secara konsisten melaksanakan amanat perundang-undangan seperti mengalokasikan anggaran untuk menunjang urusan wajib pelayanan dasar serta belanja-belanja yang sifatnya *mandatory* seperti alokasi alokasi urusan pendidikan minimal 20%, dari belanja daerah, alokasi urusan kesehatan minimal 10% dari diluar gaji dan tunjangan, alokasi belanja infrastruktur sebesar 40% dari Dana Alokasi Umum serta belanja *mandatory* lainnya.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program perangkat daerah guna mencapai sasaran pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten, maka dialokasikan anggaran untuk belanja daerah sebagaimana telah dihitung dan dianalisis pada Bab III Rencana Pembangunan Kabupaten (RPK) Tahun 2023-2026. Kerangka pendanaan pembangunan daerah mulai tahun 2023-2026 sudah menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana pembangunan kabupaten tahun 2023-2026 menerapkan *money follow programme* dengan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta situasi dan kondisi saat ini serta isu strategis pada masa datang sampai akhir periode masa jabatan kepala daerah. Hal ini berarti program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah menjadi prioritas yang akan dilaksanakan dan mendapatkan anggaran.

Untuk perkiraan penetapan pendapatan daerah terdapat beberapa asumsi yang menjadi dasar proyeksi, diantaranya asumsi proyeksi pajak, seperti telah diuraikan di atas bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gayo Lues pada kurun waktu Tahun 2017–2021 tercapai rata-rata sebesar 2 persen, dan berkontribusi sebesar 7 persen terhadap keseluruhan pendapatan daerah dari PAD,

Rencana Pembangunan Kabupaten Gayo Lues Tahun 2023-2026



hal ini mengindikasikan bahwa dalam tahun-tahun mendatang komponen Pajak Daerah harus bisa ditingkatkan dan menjadi tumpuan serta andalan di dalam peningkatan pendapatan Daerah Kabupaten Gayo Lues. Untuk penetapan proyeksi pendapatan retribusi relative stagnan dan tidak menggambarkan kenaikan penerimaan yang drastis. Hal ini disebabkan karena pengelolaan keuangan dari retribusi daerah menjadi PPK BLUD untuk Rumah Sakit Daerah. Untuk hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan dividen dari hasil penyertaan modal yang dilakukan ke Bank Aceh Syariah, sedangkan pendapatan dari Lain-lain PAD yang Sah diperoleh dari pendapatan jasa giro dan pendapatan BLUD Rumah sakit.

Terkait proyeksi Dana Perimbangan, penyusunan target dana bagi hasil pajak/bukan pajak pada tahun-tahun mendatang secara umum terdapat kenaikan per tahun. Kenaikan tersebut mempertimbangkan rata-rata realisasi dana bagi hasil pajak per tahun dan penurunan dana bagi hasil bukan pajak. Penyusunan target DAU yang cenderung fluktuatif berdasarkan prediksi bahwa dengan akan dilaksanakannya pemilu serentak tahun 2024 pemerintah pusat akan memberikan tambahan DAU untuk pelaksanaan penyelenggaraan pemilu dan target pada tahun-tahun selanjutnya berkurang disebabkan tidak adanya kegiatan nasional yang bersifat serentak sehingga pendapatan DAU cenderung mengalami penurunan. Untuk penyusunan target DAK cenderung bersifat flat dan tidak ada kenaikan yang signifikan karena mempertimbangkan tidak ada perubahan yang fundamental terkait perhitungan alokasi, nilai tahun-tahun sebelumnya yang dianggap masih relevan sebagai perkiraan target.

Penurunan alokasi transfer daerah yang bersumber dari bantuan keuangan Dana Otonomi Khusus Aceh diperkirakan akan berkurang drastis sebanyak 50 persen dari total alokasi tahun-tahun sebelumnya yang akan dimulai dari tahun 2023 hingga tahun 2027, untuk itu diperlukan exit strategy yang harus dilaksanakan oleh daerah diantaranya dengan mengoptimalkan pendapatan dari Pendapatan Asli Daerah dengan melakukan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah, sehingga dapat menutup pendapatan DOKA yang mengalami penurunan. Selain itu dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah pemerintah kabupaten Gayo Lues harus melakukan inovasi, salah satunya adalah masyarakat dapat melakukan pembayaran secara on line untuk penyetoran pajak daerah maupun retribusi daerah tanpa harus melakukan setoran langsung ke Badan Pengelolaan Keuangan.



Sementara penyusunan Proyeksi Lain-Lain Pendapatan Yang Sah berdasarkan pertumbuhan penerimaan hibah dari pihak ketiga selama kurun waktu 2017–2021, berasal dari hibah dana BOS dan hibah dari provinsi, untuk proyeksi tahun 2023-2026 tidak dapat diprediksi dari mana sumber dana penerimaan hibah, dikarenakan dana BOS sudah mejadi bagian dari DAK NON Fisik.

Perkiraan belanja daerah kabupaten gayo lues sebagian besar digunakan untuk belanja operasi, dimana hampir 50 persen dari total belanja digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Belanja pegawai merupakan belanja yang dialokasikan untuk gaji dan tunjangan bagi PNS, tenaga PPPK dan pegawai honorer daerah sedangkan belanja barang dan jasa merupakan belanja yang digunakan untuk kegiatan rutin kantor dan belanja untuk mendukung pelaksanaan suatu sub kegiatan.

Untuk pembiayaan sumber penerimaan pembiayaan berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya yang diperkirakan sebesar 2.000.000.000,-. Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal yang akan dilakukan ke bank Aceh Syariah dan pembayaran cicilan pokok utang atas pinjaman daerah dari Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Untuk melihat kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Kabupaten Gayo Lues dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7.1
Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten Gayo lues Tahun 2023-2026

No	Uraian	PROYEKSI APBK			
		2023	2024	2025	2026
	PENDAPATAN DAERAH	847.897.822.481,90	903.288.620.719,50	887.397.400.945,14	908.379.902.095,59
1.	Pendapatan Asli Daerah	63.612.974.000,88	69.338.141.660,96	75.578.574.410,45	82.380.646.107,39
	a. Pajak Daerah	7.893.897.369,00	8.604.348.132,21	9.378.739.464,11	10.222.826.015,88
	b. Retribusi Daerah	1.254.803.190,00	1.367.735.477,10	1.490.831.670,04	1.625.006.520,34
	c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	3.727.881.290,56	4.063.390.606,71	4.429.095.761,31	4.827.714.379,83
	d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang sah	50.736.392.151,32	55.302.667.444,94	60.279.907.514,98	65.705.099.191,33
2.	Pendapatan Transfer	784.284.848.481,02	833.950.479.058,54	811.818.826.534,69	825.999.255.988,20
	a. Transfer Pemerintah Pusat	703.537.841.000,00	751.857.299.840,00	728.355.239.828,00	741.140.568.204,56
	Dana Perimbangan	595.493.541.000,00	641.862.113.840,00	616.368.050.108,00	627.119.455.690,16
	Dana Transfer Umum	487.392.887.000,00	532.645.402.180,00	506.012.959.634,80	515.603.218.827,50
	Dana Bagi Hasil	10.459.669.000,00	10.668.862.380,00	10.882.239.627,60	11.099.884.420,15
	Dana Alokasi Umum	476.933.218.000,00	521.976.539.800,00	495.130.720.007,20	504.503.334.407,34
	Dana Transfer Khusus	108.100.654.000,00	109.216.711.660,00	110.355.090.473,20	111.516.236.862,66
	DAK Fisik	52.297.771.000,00	52.297.771.000,00	52.297.771.000,00	52.297.771.000,00
	DAK Non Fisik	55.802.883.000,00	56.918.940.660,00	58.057.319.473,20	59.218.465.862,66
	Dana Insentif Daerah	7.000.000.000,00	6.930.000.000,00	6.860.700.000,00	6.792.093.000,00
	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dana Keistimewaan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dana Desa	101.044.300.000,00	103.065.186.000,00	105.126.489.720,00	107.229.019.514,40

No	Uraian		PROYEKSI APBK			
			2023	2024	2025	2026
	b.	Transfer Antar-Daerah	80.747.007.481,02	82.093.179.218,54	83.463.586.706,69	84.858.687.783,64
		Pendapatan Bagi Hasil	26.876.841.210,00	27.145.609.622,10	27.417.065.718,32	27.691.236.375,50
		Bantuan Keuangan	53.870.166.271,02	54.947.569.596,44	56.046.520.988,37	57.167.451.408,14
3.		Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
	a.	Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
	b.	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
	c.	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	0,00	0,00	0,00	0,00
		BELANJA DAERAH	822.397.822.481,90	876.788.620.719,50	860.897.400.945,14	881.879.902.095,59
1		Belanja Operasi	493.308.834.000,60	532.299.632.238,20	513.299.632.238,20	525.299.632.238,20
	a.	Belanja Pegawai	233.549.015.769,00	237.539.814.006,60	241.039.814.006,60	245.039.814.006,60
	b.	Belanja Barang dan Jasa	225.851.963.087,60	228.851.963.087,60	230.351.963.087,60	234.351.963.087,60
	c.	Belanja Bunga	-	-	-	-
	d.	Belanja Subsidi				
	e.	Belanja Hibah	25.217.065.044,00	55.217.065.044,00	30.717.065.044,00	33.217.065.044,00
	f.	Belanja Bantuan Sosial	8.690.790.100,00	10.690.790.100,00	11.190.790.100,00	12.690.790.100,00
2		Belanja Modal	165.562.216.296,30	171.562.216.296,30	169.797.359.040,00	175.579.860.190,45
	a.	Belanja Tanah	5.264.857.256,30	5.264.857.256,30	4.000.000.000,00	4.500.000.000,00
	b.	Belanja Peralatan dan Mesin	18.415.645.943,00	18.415.645.943,00	18.915.645.943,00	21.198.147.093,45
	c.	Belanja Bangunan dan Gedung	55.033.107.800,00	57.033.107.800,00	57.033.107.800,00	59.033.107.800,00
	d.	Belanja Jalan,Irigasi dan Jaringan	85.771.126.217,00	87.771.126.217,00	87.771.126.217,00	89.771.126.217,00

No	Uraian			PROYEKSI APBK			
				2023	2024	2025	2026
	e.	Belanja Aset Tetap Lainnya		1.077.479.080,00	3.077.479.080,00	2.077.479.080,00	1.077.479.080,00
3	Belanja Tidak Terduga			10.884.920.415,00	14.884.920.415,00	14.884.920.415,00	14.884.920.415,00
4	Belanja Transfer			153.641.851.770,00	158.041.851.770,00	162.915.489.251,94	166.115.489.251,94
	a.	Belanja Bagi Hasil		423.181.900,00	823.181.900,00	923.181.900,00	1.123.181.900,00
	b.	Belanja Bantuan Keuangan		153.218.669.870,00	157.218.669.870,00	161.992.307.351,94	164.992.307.351,94
		Surflus /Defisit		24.500.000.000,00	26.500.000.000,00	26.500.000.000,00	26.500.000.000,00
	PEMBIAYAAN DAERAH						
1	Penerimaan Pembiayaan			2.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		a.	SiLPA	2.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		b.	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
		c.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
		d.	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
		e.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
		f.	Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pengeluaran Pembiayaan			26.500.000.000,00	26.500.000.000,00	26.500.000.000,00	26.500.000.000,00
		a.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	25.500.000.000,00	25.500.000.000,00	25.500.000.000,00	25.500.000.000,00



No	Uraian			PROYEKSI APBK			
				2023	2024	2025	2026
		b.	Penyertaan Modal Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
		c.	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
		d.	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
		e.	Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembiayaan Netto				(24.500.000.000,00)	(26.500.000.000,00)	(26.500.000.000,00)	(26.500.000.000,00)
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Berkenaan				0,00	(0,00)	(0,00)	(0,00)

Kebijakan belanja daerah dilakukan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif. Adapun kebijakan belanja daerah, sebagai berikut:

- a. Prioritas I, dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat;
- b. Prioritas II, dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan penerapan pelayanan dasar;
- c. Prioritas III, dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah pada hakekatnya merupakan acuan untuk menyusun program unggulan dengan target indikator kinerja. Dengan demikian, yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Kabupaten Gayo Lues ini hanya yang bersifat prioritas dan yang menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) Gayo Lues, serta operasional dan program prioritas pemerintah. Untuk melihat kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Kabupaten Gayo Lues dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7.2
Kerangka Pendanaan Pembangunan Kabupaten Gayo Lues
Tahun 2023-2026

No	Uraian		PROYEKSI APBK			
			2023	2024	2025	2026
	BELANJA DAERAH		823.397.822.481,90	876.788.620.719,50	860.897.400.945,14	881.879.902.095,59
1	Belanja Operasi		493.308.834.000,60	532.299.632.238,20	513.299.632.238,20	525.299.632.238,20
	a.	Belanja Pegawai	233.549.015.769,00	237.539.814.006,60	241.039.814.006,60	245.039.814.006,60
	b.	Belanja Barang dan Jasa	225.851.963.087,60	228.851.963.087,60	230.351.963.087,60	234.351.963.087,60
	c.	Belanja Bunga	-	-	-	-
	d.	Belanja Subsidi				
	e.	Belanja Hibah	25.217.065.044,00	55.217.065.044,00	30.717.065.044,00	33.217.065.044,00
	f.	Belanja Bantuan Sosial	8.690.790.100,00	10.690.790.100,00	11.190.790.100,00	12.690.790.100,00
2	Belanja Modal		165.562.216.296,30	171.562.216.296,30	169.797.359.040,00	175.579.860.190,45
	a.	Belanja Tanah	5.264.857.256,30	5.264.857.256,30	4.000.000.000,00	4.500.000.000,00
	b.	Belanja Peralatan dan Mesin	18.415.645.943,00	18.415.645.943,00	18.915.645.943,00	21.198.147.093,45
	c.	Belanja Bangunan dan Gedung	55.033.107.800,00	57.033.107.800,00	57.033.107.800,00	59.033.107.800,00
	d.	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	85.771.126.217,00	87.771.126.217,00	87.771.126.217,00	89.771.126.217,00

No	Uraian		PROYEKSI APBK			
			2023	2024	2025	2026
	e.	Belanja Aset Tetap Lainnya	1.077.479.080,00	3.077.479.080,00	2.077.479.080,00	1.077.479.080,00
3	Belanja Tidak Terduga		10.884.920.415,00	14.884.920.415,00	14.884.920.415,00	14.884.920.415,00
4	Belanja Transfer		153.641.851.770,00	158.041.851.770,00	162.915.489.251,94	166.115.489.251,94
	a.	Belanja Bagi Hasil	423.181.900,00	823.181.900,00	923.181.900,00	1.123.181.900,00
	b.	Belanja Bantuan Keuangan	153.218.669.870,00	157.218.669.870,00	161.992.307.351,94	164.992.307.351,94
		Surplus /Defisit	24.500.000.000,00	26.500.000.000,00	26.500.000.000,00	26.500.000.000,00
	PEMBIAYAAN DAERAH					
1	Penerimaan Pembiayaan		2.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	a.	SiLPA	2.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	b.	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	c.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
	d.	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	e.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	f.	Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pengeluaran Pembiayaan		26.500.000.000,00	26.500.000.000,00	26.500.000.000,00	26.500.000.000,00
	a.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	25.500.000.000,00	25.500.000.000,00	25.500.000.000,00	25.500.000.000,00
	b.	Penyertaan Modal Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
	c.	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	d.	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00



No	Uraian		PROYEKSI APBK			
			2023	2024	2025	2026
	e.	Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembiayaan Netto			(24.500.000.000,00)	(26.500.000.000,00)	(26.500.000.000,00)	(26.500.000.000,00)
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Berkenaan			0,00	(0,00)	(0,00)	(0,00)

TABEL 7.3
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAERAH DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN TAHUN 2023-2026

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	DATA CAPAIAN TAHUN 2021	2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPK		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM					TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			TOTAL					823.397.822.482		876.788.620.719		860.897.400.945		881.879.902.096		3.442.963.746.242	
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					377.759.625.915		396.013.852.875		#####		421.513.852.875		1.600.687.331.665	
1	DI		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					160.272.156.514		164.800.000.000		165.800.000.000		171.800.000.000		662.672.156.514	DISDIK
			DINAS PENDIDIKAN					148.772.156.514		152.500.000.000		153.000.000.000		158.000.000.000		612.272.156.514	DISDIK
1	DI	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan Operasional Kantor	%	100	100	92.429.984.949	100	93.511.891.346	100	94.554.091.690	100	95.610.120.542	100	376.106.088.527	DISDIK
1	DI	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah PAUD	%	24	24,25	9.651.417.856	24,50	10.230.130.610	24,65	12.290.682.084	25,00	12.698.935.583	25,00	44.871.166.133	DISDIK
				Angka Partisipasi Sekolah SD/MI	%	98,45	98,50	22.991.738.290	98,55	24.496.283.932	98,65	23.835.302.799	98,65	25.279.934.378	98,65	96.603.259.399	DISDIK
				Angka Partisipasi SMP/MTs	%	83,12	83,17	22.049.015.419	83,43	22.551.694.112	83,69	20.609.923.427	83,95	22.701.009.497	83,95	87.911.642.455	DISDIK
1	DI	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Sekolah yang Melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal	%	13,78	13,88	150.000.000	13,93	170.000.000	13,98	170.000.000	14,03	170.000.000	14,03	660.000.000	DISDIK
1	DI	04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Penetapan Tenaga Pendidik Honorer Menjadi P3K	%	9	21	500.000.000	36	500.000.000	50	500.000.000	66	500.000.000	66	2.000.000.000	DISDIK
1	DI	05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Sekolah Terakreditasi	%	50	52	1.000.000.000	54	1.040.000.000	57	1.040.000.000	58	1.040.000.000	58	4.120.000.000	DISDIK
			DINAS PENDIDIKAN DAYAH					9.000.000.000		9.800.000.000		10.000.000.000		11.000.000.000		39.800.000.000	DAYAH
1	DI	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan Operasional Kantor	%	100	100	3.785.243.013	100	3.210.842.000	100	2.838.000.000	100	2.885.769.000	100	12.719.854.013	DAYAH
1	DI	07	PROGRAM PENDIDIKAN DAYAH	Persentase dayah terakreditasi	%	40	50	5.214.756.987	60	6.589.158.000	70	7.162.000.000	80	8.114.231.000	80	27.080.145.987	DAYAH

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	DATA CAPAIAN TAHUN 2021	2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPK		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM					TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH					2.500.000.000		2.500.000.000		2.800.000.000		2.800.000.000		10.600.000.000	MPD
1	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan Operasional Kantor	%	100	100	1.679.054.833	100	1.679.054.833	100	2.085.960.254	100	1.840.960.254	100	7.285.030.174	MPD
1	01	08	PROGRAM PENYELENGGARAAN MAJELIS PENDIDIKAN ACEH	Persentase Rekomendasi yang dilaksanakan	%	50	55	820.945.167	60	820.945.167	65	714.039.746	70	959.039.746	70	3.314.969.826	MPD
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					110.713.852.875		125.713.852.875		123.000.000.000		130.713.852.875		490.141.558.625	DINKES
			DINAS KESEHATAN					70.000.000.000		75.000.000.000		75.000.000.000		78.000.000.000		298.000.000.000	DINKES
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan Operasional Kantor	%	100	100	29.389.000.000	100	31.825.550.000	100	28.528.000.000	100	36.267.670.125	100	126.010.220.125	DINKES
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Fasilitas Kesehatan Yang Meningkat Akreditasinya	%	25	37,50	38.516.300.000	50	40.727.750.000	62,50	43.855.400.000	100	38.973.834.875	100	162.073.284.875	DINKES
1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Tenaga Kesehatan yang Memenuhi Standart Pelayanan Kesehatan	%	75	80	1.201.000.000	85	1.511.000.000	95	1.621.000.000	100	1.701.000.000	100	6.034.000.000	DINKES
1	02	04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Sediaan Farmasi, Alkes dan Makanan Minuman	%	90	95	133.700.000	95	137.700.000	95	157.700.000	96	177.700.000	96	606.800.000	DINKES
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Kampung Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	%	90	92	760.000.000	95	798.000.000	97	837.900.000	100	879.795.000	100	3.275.695.000	DINKES
			RSU MUHAMMAD ALI KASIM					40.713.852.875		50.713.852.875		48.000.000.000		52.713.852.875		192.141.558.625	RSU MAK
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan Operasional Kantor	%	100	100	16.438.000.000	100	19.590.000.000	100	21.518.000.000	100	22.556.000.000	100	80.102.000.000	RSU MAK

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	DATA CAPAIAN TAHUN 2021	2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPK		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM					TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Fasilitas Kesehatan Yang Meningkat Akreditasinya	%	80	37.50	24.075.852.875	50.00	30.723.852.875	62.50	26.232.000.000	100	29.557.852.875	100	110.589.558.625	RSU MAK
1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Tenaga Kesehatan yang Memenuhi Standart Pelayanan Kesehatan	%	80	80	200.000.000	85	400.000.000	95	250.000.000	100	600.000.000	100	1.450.000.000	RSU MAK
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					51.000.000.000		48.000.000.000		53.000.000.000		56.000.000.000		208.000.000.000	PUPR
			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					51.000.000.000		48.000.000.000		53.000.000.000		56.000.000.000		208.000.000.000	PUPR
1	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan Operasional Kantor	%	100	100	7.712.000.000	100	7.542.000.000	100	8.712.000.000	100	9.072.000.000	100	33.038.000.000	PUPR
1	03	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase daerah irigasi (D.I) Fungsional	%	39.08	45	10.688.000.000	46	10.788.000.000	48	11.188.000.000	50	11.578.000.000	50	44.242.000.000	PUPR
1	03	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan kewenangan Kabupaten dalam kondisi mantap	%	50.74	60	28.200.000.000	62	23.800.000.000	65	26.700.000.000	70	28.100.000.000	70	106.800.000.000	PUPR
1	03	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Tingkat kepatuhan terhadap RTRW	%	0.04	100	4.400.000.000	100	5.870.000.000	100	6.400.000.000	100	7.250.000.000	100	23.920.000.000	PUPR
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					20.025.939.968		18.910.197.968		21.029.260.000		22.140.540.000		82.105.937.936	PUPR/ PERKIM
			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					20.025.939.968		18.910.197.968		21.029.260.000		22.140.540.000		82.105.937.936	PUPR /PERKIM
1	03	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air bersih perkotaan dan perdesaan	%	78	83.50	11.866.039.968	89	12.670.000.000	94.50	12.204.720.000	100	10.810.000.000	100	47.550.759.968	PUPR/ PERKIM

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	DATA CAPAIAN TAHUN 2021	2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPK		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM					TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	03	05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase pemenuhan pelayanan dasar SPM subbidang air limbah domestik	%	65,15	73,84	2.519.600.000	82,56	1.631.540.000	91,28	1.458.540.000	100	1.556.540.000	100	7.166.220.000	PUPR/ PERKIM
1	03	06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase berfungsi baik	%	65,15	73,84	3.146.000.000	82,56	2.848.657.968	91,28	3.766.000.000	100	5.174.000.000	100	14.934.657.968	PUPR/ PERKIM
1	03	08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan gedung yang memiliki izin mendirikan bangunan (IMB)	%	0,23	0,55	200.000.000	0,87	200.000.000	-	-	-	-	0,87	400.000.000	PUPR/ PERKIM
1	03	09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase bangunan yang tertata dengan baik	%	2,15	2,86	2.294.300.000	3,57	1.560.000.000	4,28	3.600.000.000	5	4.600.000.000	5	12.054.300.000	PUPR/ PERKIM
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					12.474.060.032		10.789.802.032		13.470.740.000		13.859.460.000		50.594.062.064	PERKIM
			DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					12.474.060.032		10.789.802.032		13.470.740.000		13.859.460.000		50.594.062.064	PERKIM
1	04	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan Operasional Kantor	%	100	100	3.243.480.032	100	3.415.223.032	100	4.032.823.032	100	3.690.923.032	100	14.382.449.128	PERKIM
1	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase rumah layak huni bagi korban bencana yang dibangun	%	20,78	30,58	1.055.000.000	40,39	500.000.000	50,19	920.000.000	60	600.000.000	60	3.075.000.000	PERKIM
1	04	03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman tertata	%	20,78	30,58	3.740.580.000	40,39	3.674.579.000	50,19	4.141.217.000	60	4.500.000.000	60	16.056.376.000	PERKIM
1	04	04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase lingkungan kumuh yang tertangani	%	4,33	3,58	200.000.000	2,82	200.000.000	2,06	200.000.000	1,29	200.000.000	1,29	800.000.000	PERKIM
1	04	05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase sarana prasarana utilitas umum berfungsi baik	%	65,13	73,84	4.235.000.000	82,66	3.000.000.000	91,28	4.176.699.968	100	4.868.536.968	100	16.280.236.936	PERKIM

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	DATA CAPAIAN TAHUN 2021	2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPK		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM					TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					14.273.616.526		18.800.000.000		20.100.000.000		17.000.000.000		70.173.616.526	SATPOL PP&WH
			SATUAN POLSI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH					5.500.000.000		6.000.000.000		6.500.000.000		7.000.000.000		25.000.000.000	SATPOL PP&WH
1	05	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan operasional kantor	%	100	100	3.450.000.000	100	3.900.000.000	100	4.400.000.000	100	4.347.000.000	100	16.097.000.000	SATPOL PP&WH
1	05	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat penyelesaian pelanggaran ketentraman dan ketertiban	%	70	83	2.050.000.000	86	2.100.000.000	89	2.100.000.000	92	2.653.000.000	92	8.903.000.000	SATPOL PP&WH
			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH					3.500.000.000		3.800.000.000		3.800.000.000		4.000.000.000		15.100.000.000	BPBD
1	05	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan Operasional Kantor	%	100	100	3.084.000.000	100	3.292.000.000	100	3.292.000.000	100	3.557.000.000	100	13.225.000.000	BPBD
1	05	03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase kejadian bencana yang ditanggulangi	%	100	100	416.000.000	100	508.000.000	100	508.000.000	100	443.000.000	100	1.875.000.000	BPBD
			DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN					5.273.616.526		9.000.000.000		9.800.000.000		6.000.000.000		30.073.616.526	DAMKAR
1	05	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan Operasional Kantor	%	100	100	1.975.796.526	100	2.726.174.000	100	4.791.600.000	100	2.737.000.000	100	12.230.570.526	DAMKAR
1	05	04	PROGRAM PENCEBAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	60	68	3.297.820.000	73	6.273.826.000	78	5.008.400.000	85	3.263.000.000	85	17.843.046.000	DAMKAR

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	DATA CAPAIAN TAHUN 2021	2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPK		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM					TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					9.000.000.000		9.000.000.000		9.000.000.000		10.000.000.000		37.000.000.000	DINSOS
			DINAS SOSIAL					9.000.000.000		9.000.000.000		9.000.000.000		10.000.000.000		37.000.000.000	DINSOS
1	06	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan Operasional Kantor	%	100	100	3.837.763.460	100	3.837.763.460	100	3.837.763.460	100	4.267.043.460	100	15.780.333.840	DINSOS
1	06	02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase penyanggah penyakit sosial yang dibina	%	80	100	2.199.236.540	100	2.199.236.540	100	2.199.236.540	100	2.100.000.000	100	8.697.709.620	DINSOS
1	06	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyanggah penyakit sosial yang direhabilitasi	%	80	100	1.400.000.000	100	1.400.000.000	100	1.400.000.000	100	1.869.956.540	100	6.069.956.540	DINSOS
1	06	05	PROGRAM PERLUNDUAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Fakir Miskin Yang Masuk Dalam DTKS	%	80	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	1.200.000.000	DINSOS
1	06	06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	80	100	1.263.000.000	100	1.263.000.000	100	1.263.000.000	100	1.363.000.000	100	5.152.000.000	DINSOS
1	06	07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Jumlah Makam Pahlawan yang dikelola pemuda	Makam	1		-		-		-	1	100.000.000,00	1	100.000.000	DINSOS
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					70.252.919.164		82.532.544.913		78.859.938.386		82.673.908.800		314.319.311.263	
2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					3.550.000.000		3.700.000.000		4.550.000.000		3.700.000.000		15.500.000.000	DISNAKERTRANS
			DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI					3.550.000.000		3.700.000.000		4.550.000.000		3.700.000.000		15.500.000.000	DISNAKERTRANS
2	07	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan Operasional Kantor	%	100	100	2.085.010.183	100	2.320.081.988	100	2.570.000.000	100	2.493.413.626	100	9.468.505.797	DISNAKERTRANS

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	DATA CAPAIAN TAHUN 2021	2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPK		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM					TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	07	03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	%	50	62,50	1.264.989.817	65,63	1.379.918.012	68,91	1.700.000.000	72,35	1.006.586.374	72,35	5.351.494.203	DISNAKERTRANS
2	07	04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja binaan yang ditempatkan	%	N/A	20	200.000.000			30	280.000.000	20	200.000.000	70	680.000.000	DISNAKERTRANS
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLUNDUNGAN ANAK					5.766.572.000		6.425.263.030		6.435.263.030		7.175.704.000		25.802.802.060	DP3AP2KB
			DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLUNDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					5.766.572.000		6.425.263.030		6.435.263.030		7.175.704.000		25.802.802.060	DP3AP2KB
2	08	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan Operasional Kantor	%	100	100	3.745.263.030	100	3.895.263.030	100	3.905.263.030	100	4.195.263.030	100	15.741.052.120	DP3AP2KB
2	08	02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Daerah	%	5,81	5,85	390.000.000	5,90	480.000.000	6,15	480.000.000	6,30	585.000.000	6,30	1.935.000.000	DP3AP2KB
2	08	03	PROGRAM PERLUNDUNGAN PEREMPUAN	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan Komprehensif	%	45	55	598.000.000	60	740.000.000	65	740.000.000	70	835.000.000	70	2.913.000.000	DP3AP2KB
2	08	04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Keluarga yang Mendapatkan Fasilitas Penguatan 5 Dimensi	%	40	50	80.000.000	55	150.000.000	55	150.000.000	60	200.000.000	60	580.000.000	DP3AP2KB
2	08	06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Terpenuhi Elemen kab/Kota Menuju Layak Anak (KLA)	%	50	65	773.308.970	75	910.000.000	85	910.000.000	100	1.035.000.000	100	3.628.308.970	DP3AP2KB

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	DATA CAPAIAN TAHUN 2021	2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPK		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM					TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	08	07	PROGRAM PERUNDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak memerlukan Perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	%	30	35	180.000.000	40	250.000.000	45	250.000.000	50	325.440.970	50	1.005.440.970	DP3AP2KB
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					4.300.000.000		4.400.000.000		4.300.000.000		4.300.000.000		17.300.000.000	DISPANGKAN
			DINAS PANGAN DAN PERIKANAN					4.300.000.000		4.400.000.000		4.300.000.000		4.300.000.000		17.300.000.000	DISPANGKAN
2	09	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Operasional Kantor	%	100	100	3.500.000.000	100	3.500.000.000	100	3.500.000.000	100	3.500.000.000	100	14.000.000.000	DISPANGKAN
2	09	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Kampung Mandiri Pangan	%	45	5	300.000.000	5	500.000.000	5	300.000.000	5	300.000.000	65	1.400.000.000	DISPANGKAN
2	09	03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan Pangan Utama	%	87,57	95	500.000.000	98	400.000.000	98	500.000.000	100	500.000.000	100	1.900.000.000	DISPANGKAN
2	10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					3.000.000.000		3.300.000.000		3.800.000.000		4.000.000.000		14.100.000.000	DISTANAH
			DINAS PERTANAHAN					3.000.000.000		3.300.000.000		3.800.000.000		4.000.000.000		14.100.000.000	DISTANAH
2	10	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan Operasional Kantor	%	100	100	2.178.700.567	100	2.379.000.000	100	2.540.500.000	100	2.680.400.000	100	9.778.600.567	DISTANAH
2	10	05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase tertanganinya Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	%	96,29	75	200.000.000	75	221.000.000	80	303.000.000	85	309.000.000	85	1.033.000.000	DISTANAH
2	10	08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase tanah kosong yang dimanfaatkan	%	N/A	20	191.299.433	25	215.000.000	30	286.000.000	35	289.000.000	35	981.299.433	DISTANAH

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	DATA CAPAIAN TAHUN 2021	2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPK		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM					TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	10	12	PROGRAM PENGURUSAN HAK HAK ATAS TANAH	Persentase aset tanah pemerintah yang teradministrasi	%	N/A	90	164.000.000	91	181.000.000	92	220.500.000	93	236.600.000	93	802.100.000	DISTANAH
2	10	16	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PERTANAHAN	Persentase Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH) yang berfungsi	%	42,68	30	132.000.000	40	158.000.000	50	244.000.000	60	265.000.000	60	799.000.000	DISTANAH
2	10	17	PROGRAM PENANGANAN KONFLIK, SENGKETA DAN PERKARA PERTANAHAN	Persentase Kasus Perkara Pertanahan yang diselesaikan	%	N/A	2	134.000.000	2	146.000.000	2	206.000.000	2	220.000.000	8	706.000.000	DISTANAH
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					8.500.000.000		9.500.000.000		9.500.000.000		10.000.000.000		37.500.000.000	DLH
			DINAS LINGKUNGAN HIDUP					8.500.000.000		9.500.000.000		9.500.000.000		10.000.000.000		37.500.000.000	DLH
2	11	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan Operasional Kantor	%	100	100	4.614.297.938	100	5.088.958.919	100	5.314.738.000	100	5.014.619.900	100	20.032.614.757	DLH
2	11	02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	Dokumen	1	1	315.000.000	1	330.000.000	1	360.000.000	1	350.000.000	1	1.355.000.000	DLH
2	11	03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	77,91	83,84	320.000.000	84,84	350.000.000	85,71	320.000.000	87,85	300.000.000	87,85	1.290.000.000	DLH
2	11	04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Luasan RTH yang ditangani	%	22,4	28	250.000.000	32	375.000.000	40	380.000.000	52	425.000.000	52	1.430.000.000	DLH
2	11	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERUNDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase perusahaan yang memiliki dokumen AMDAL, UKL, UPL dan SPPL	%	72	79	243.440.062	85	286.000.000	93	302.000.000	97	345.000.000	97	1.176.440.062	DLH

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	DATA CAPAIAN TAHUN 2021	2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPK		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM					TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	11	07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Jumlah Dokumen hasil kordinasi dan sinkronisasi terkait dengan PPLH yang dilakukan pemberdayaan, kemitraan, pendampingan dan penguatan	Dokumen	N/A	1	80.000.000	1	65.000.000	1	80.000.000	1	67.000.000	4	292.000.000	DLH
2	11	08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN UNGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase masyarakat yang mengikuti pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	%	N/A	5	50.000.000	5	85.000.000	5	85.000.000	5	100.000.000	20	320.000.000	DLH
2	11	09	PROGRAM PENGHARGAAN UNGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Penghargaan lingkungan hidup yang diperoleh	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	20.000.000	Ada	60.000.000	Ada	60.000.000	Ada	61.000.000	Ada	201.000.000	DLH
2	11	10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN UNGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan masyarakat terkait rekomendasi lingkungan, izin PPLH yang diterbitkan pemerintah yang ditangani	%	100	100	200.000.000	100	220.000.000	100	180.000.000	100	299.118.100	100	899.118.100	DLH
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Sampah yang ditangani	%	68,74	69	2.407.262.000	72	2.640.041.081	76	2.418.262.000	94	3.038.262.000	94	10.503.827.081	DLH
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					3.000.000.000		4.000.000.000		4.000.000.000		4.500.000.000		15.500.000.000	DISDUKCAPIL
			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					3.000.000.000		4.000.000.000		4.000.000.000		4.500.000.000		15.500.000.000	DISDUKCAPIL
2	12	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan operasional kantor	%	100	100	2.623.533.770	100	3.313.533.770	100	3.323.533.770	100	3.764.536.000	100	13.025.137.310	DISDUKCAPIL

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	DATA CAPAIAN TAHUN 2021	2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPK		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM					TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	12	02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rasio Penduduk ber KTP	%	75	80	99.795.650	85	195.795.650	90	190.795.650	95	209.795.000	95	696.181.950	DISDUKCAPIL
2	12	03	PROGRAM PENCATATAN SIPIIL	Rasio pasangan ber Akte Nikah	%	65	75	98.540.850	80	192.540.850	85	192.540.850	90	202.540.000	90	686.162.550	DISDUKCAPIL
2	12	04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase aplikasi adminduk berfungsi baik	%	65	75	98.129.730	80	198.129.730	85	193.129.730	90	203.129.000	90	692.518.190	DISDUKCAPIL
2	12	05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Data Profil Kependudukan yang dimutakhirkan	%	100	75	80.000.000	80	100.000.000	85	100.000.000	90	120.000.000	90	400.000.000	DISDUKCAPIL
2	13		<i>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</i>					<i>4.000.000.000</i>		<i>4.500.000.000</i>		<i>4.500.000.000</i>		<i>5.000.000.000</i>		<i>18.000.000.000</i>	<i>DPMK</i>
			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG					4.000.000.000		4.500.000.000		4.500.000.000		5.000.000.000		18.000.000.000	DPMK
2	13	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan operasional kantar	%	100	100	2.375.000.000	100	2.130.000.000	100	1.863.000.000	100	2.236.000.000	100	8.604.000.000	DPMK
2	13	03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Rasio Desa yang melakukan kerjasama	Rasio	0,58	0,60	30.000.000	0,61	30.000.000	0,62	30.000.000	0,63	30.000.000	0,17	120.000.000	DPMK
2	13	04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Indeks Desa Membangun	Indeks	1,23	0,03	210.000.000	0,05	360.000.000	0,07	467.000.000	0,09	514.000.000	0,09	1.551.000.000	DPMK
2	13	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Rasio lembaga kemasyarakatan gampong dan adat yang aktif	Rasio	0,52	0,60	1.385.000.000	0,65	1.980.000.000	0,70	2.140.000.000	0,73	2.220.000.000	0,73	7.725.000.000	DPMK

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	DATA CAPAIAN TAHUN 2021	2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPK		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM					TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					3.233.428.000		3.574.736.970		3.564.736.970		3.824.296.000		14.197.197.940	DP3AP2KB
			DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERUNDONGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					3.233.428.000		3.574.736.970		3.564.736.970		3.824.296.000		14.197.197.940	DP3AP2KB
2	14	02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase PUS yang Menjadi Akseptor KB	%	55	60	580.000.000	65	560.000.000	70	660.000.000	75	660.000.000	75	2.460.000.000	DP3AP2KB
2	14	03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase keluarga berencana yang terbina	%	55	60	2.373.428.000	70	2.704.736.970	75	2.634.736.970	80	2.839.296.000	80	10.552.197.940	DP3AP2KB
2	14	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Program Pemberdaya dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)	%	80	81	280.000.000	82	310.000.000	83	270.000.000	85	325.000.000	85	1.185.000.000	DP3AP2KB
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					7.500.000.000		13.000.000.000		6.500.000.000		7.000.000.000		34.000.000.000	DISHUB
			DINAS PERHUBUNGAN					7.500.000.000		13.000.000.000		6.500.000.000		7.000.000.000		34.000.000.000	DISHUB
2	15	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan Operasional Kantor	%	100	100	3.299.000.000	100	3.887.000.000	100	3.408.000.000	100	3.437.000.000	100	14.031.000.000	DISHUB
2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU UNTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase sarana prasarana LLAJ berfungsi baik	%	75	80	4.201.000.000	84	9.113.000.000	87	3.092.000.000	90	3.563.000.000	90	19.969.000.000	DISHUB

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	DATA CAPAIAN TAHUN 2021	2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPK		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM					TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	16		<i>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</i>					<i>4.370.000.000</i>		<i>5.060.000.000</i>		<i>4.950.000.000</i>		<i>5.120.000.000</i>		<i>19.500.000.000</i>	<i>DISKOMINFO</i>
			DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN					4.370.000.000		5.060.000.000		4.950.000.000		5.120.000.000		19.500.000.000	DISKOMINFO
2	16	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan Operasional Kantor	%	100	100	2.183.782.430	100	2.502.873.004	100	2.922.608.004	100	2.895.651.535	100	10.504.914.973	DISKOMINFO
2	16	02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Berita/Informasi PEMDA yang disebar melalui media massa	%	100	100	1.136.217.570	100	1.090.000.000	100	890.000.000	100	1.094.348.465	100	4.210.566.035	DISKOMINFO
2	16	03	PROGRAM APUKASI INFORMATIKA	Persentase Penerapan Infrastruktur dan Aplikasi terintegrasi	%	50	60	1.050.000.000	70	1.467.126.996	80	1.137.391.996	85	1.130.000.000	85	4.784.518.992	DISKOMINFO
2	17		<i>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</i>					<i>4.502.919.164</i>		<i>4.932.544.913</i>		<i>5.518.658.386</i>		<i>6.017.000.000</i>		<i>20.971.122.463</i>	<i>DISDAGKOP UKM</i>
			DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH					4.502.919.164		4.932.544.913		5.518.658.386		6.017.000.000		20.971.122.463	DISDAGKOP UKM
2	17	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Operasional Kantor	%	100	100	2.852.919.164	100	3.432.544.913	100	4.087.658.386	100	4.817.000.000	100	15.190.122.463	DISDAGKOP UKM
2	17	05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi Aktif	%	33,00	45,11	250.000.000	56,39	400.000.000	60,15	500.000.000	71,43	400.000.000	71,43	1.550.000.000	DISDAGKOP UKM
2	17	06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERUNDUNGAN KOPERASI	Pertumbuhan Koperasi Produksi (non simpan pinjam)	%	N/A	8	400.000.000	16	600.000.000	18	581.000.000	20	500.000.000	20	2.081.000.000	DISDAGKOP UKM
2	17	07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pertumbuhan UMKM Produktif	%	2,55	2,70	1.000.000.000	3,60	500.000.000	4	350.000.000	5,80	300.000.000	16,10	2.150.000.000	DISDAGKOP UKM

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	DATA CAPAIAN TAHUN 2021	2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPK		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM					TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	18		LURUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					3.000.000.000		3.500.000.000		3.500.000.000		4.000.000.000		14.000.000.000	DPMPTSP
			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU					3.000.000.000		3.500.000.000		3.500.000.000		4.000.000.000		14.000.000.000	DPMPTSP
2	18	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Operasional Kantor	%	100	100	2.362.000.000	100	2.725.000.000	100	2.957.000.000	100	3.462.000.000	100	11.506.000.000	DPMPTSP
2	18	02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan jumlah Investor	%	12	16,67	75.000.000	21,43	245.000.000	26,67	63.000.000	37,50	203.000.000	37,50	586.000.000	DPMPTSP
2	18	03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Indeks Daya Saing Investasi	Point	-0,41	0,02	75.000.000	0,03	20.000.000	0,05	110.000.000	0,10	75.000.000	0,10	280.000.000	DPMPTSP
2	18	04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase pelaku usaha yang memiliki NIB	%	26,36	19,23	150.000.000	25,00	150.000.000	-	-	29,23	130.000.000	99,83	430.000.000	DPMPTSP
2	18	05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Investor dan Kegiatan usaha yang menyampaikan laporan	%	100	100	338.000.000	100	360.000.000	100	370.000.000	100	130.000.000	100	1.198.000.000	DPMPTSP
2	19		LURUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					8.000.000.000		8.800.000.000		9.000.000.000		8.800.000.000		34.600.000.000	DISPORA
			DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					8.000.000.000		8.800.000.000		9.000.000.000		8.800.000.000		34.600.000.000	DISPORA
2	19	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan Operasional Kantor	%	100	100	3.210.000.000	100	3.250.000.000	100	3.340.000.000	100	3.320.000.000	100	13.120.000.000	DISPORA
2	19	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Organisasi Kepemudaan yang Aktif	%	35	40	660.000.000	50	800.000.000	60	810.000.000	70	810.000.000	70	3.080.000.000	DISPORA
2	19	03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Organisasi Olahraga Yang Aktif	%	55	60	3.930.000.000	75	4.550.000.000	80	4.650.000.000	90	4.470.000.000	90	17.600.000.000	DISPORA

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	DATA CAPAIAN TAHUN 2021	2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPK		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM					TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	19	04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Kelembagaan Kepramukaan Tingkat Sekolah dan Daerah Yang Aktif	%	100	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	800.000.000	DISPORA
2	20		LURUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					490.000.000		340.000.000		380.000.000		340.000.000		1.550.000.000	DISKOMINFO
			DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN					490.000.000		340.000.000		380.000.000		340.000.000		1.550.000.000	DISKOMINFO
2	20	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Jumlah Dokumen statistik Data Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten Gayo Lues	Dokumen	N/A	4	490.000.000	4	340.000.000	4	380.000.000	4	340.000.000	4	1.550.000.000	DISKOMINFO
2	21		LURUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					140.000.000		100.000.000		170.000.000		540.000.000		950.000.000	DISKOMINFO
			DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN					140.000.000		100.000.000		170.000.000		540.000.000		950.000.000	DISKOMINFO
2	21	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase SKPK yang menerapkan persandian	%	N/A	100	140.000.000	100	100.000.000	100	170.000.000	100	540.000.000	100	950.000.000	DISKOMINFO
2	22		LURUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					4.400.000.000		4.400.000.000		4.691.280.000		4.856.908.800		18.348.188.800	DISPAR
			DINAS PARIWISATA					1.400.000.000		1.400.000.000		1.691.280.000		1.856.908.800		6.348.188.800	DISPAR
2	22	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Intensitas event budaya per tahun	Event/ Tahun	N/A	3	1.250.000.000	4	1.250.000.000	4	1.516.320.000	4	1.667.952.000	4	5.684.272.000	DISPAR
2	22	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Intensitas Event Seni Per Tahun	Event/ Tahun	N/A	3	150.000.000	3	150.000.000	3	174.960.000	3	188.956.800	12	663.916.800	DISPAR
			MAJELIS ADAT ACEH					3.000.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000		12.000.000.000	MAA
2	22	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan Operasional Kantor	%	100	100	2.146.040.418	100	2.268.718.711	100	2.285.000.000	100	2.285.000.000	100	8.984.759.129	MAA
2	22	07	PROGRAM MAJELIS ADAT ACEH (MAA)	Persentase Rekomendasi yang dilaksanakan	%	50	55	853.959.582	60	731.281.289	65	715.000.000	70	715.000.000	70	3.015.240.871	MAA

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	DATA CAPAIAN TAHUN 2021	2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPK		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM					TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					2.425.000.000		2.890.000.000		3.325.000.000		3.360.000.000		12.000.000.000	DISARPUS
			DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN					2.425.000.000		2.890.000.000		3.325.000.000		3.360.000.000		12.000.000.000	DISARPUS
2	23	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan operasional kantoor	%	100	100	2.178.000.000	100	2.465.000.000	100	2.535.000.000	100	2.540.000.000	100	9.718.000.000	DISARPUS
2	23	02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rasio perpustakaan per satuannya penduduk	Rasio	0,002	0,002	247.000.000	0,002	425.000.000	0,002	790.000.000	0,002	820.000.000	0,002	2.282.000.000	DISARPUS
2	24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					75.000.000		110.000.000		175.000.000		140.000.000		500.000.000	DISARPUS
			DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN					75.000.000		110.000.000		175.000.000		140.000.000		500.000.000	DISARPUS
2	24	02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	50	60	75.000.000	65	110.000.000	70	140.000.000	75	140.000.000	75	465.000.000	DISARPUS
2	24	03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase dokumen/ arsip daerah yang diselamatkan dan dilestarikan	%	0,09	-	-	-	-	1	35.000.000	-	-	1	35.000.000	DISARPUS
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					47.247.080.836		50.567.455.087		50.940.061.614		51.126.091.200		199.880.688.737	
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					2.700.000.000		2.600.000.000		1.700.000.000		2.700.000.000		9.700.000.000	DISPANGKAN
			DINAS PANGAN DAN PERIKANAN					2.700.000.000		2.600.000.000		1.700.000.000		2.700.000.000		9.700.000.000	DISPANGKAN
3	25	03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase jenis ikan endemik langka yang dikonservasi	%	100	100	1.000.000.000	100	800.000.000	100	700.000.000	100	1.000.000.000	100	3.500.000.000	DISPANGKAN
3	25	04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produktivitas kolam per hektar per tahun	Ton/ Ha/ Tahun	3	4	1.700.000.000	4,5	1.800.000.000	5	1.000.000.000	5	1.700.000.000	5	6.200.000.000	DISPANGKAN

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	DATA CAPAIAN TAHUN 2021	2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPK		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM					TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	26		LURUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					5.600.000.000		5.600.000.000		6.308.720.000		6.143.091.200		23.651.811.200	DISPAR
			DINAS PARIWISATA					5.600.000.000		5.600.000.000		6.308.720.000		6.143.091.200		23.651.811.200	DISPAR
3	26	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhiya Kebutuhan Operasional Kantor	%	100	100	2.562.442.432	100	2.562.442.432	100	2.722.000.000	100	2.780.710.000	100	10.627.594.864	DISPAR
3	26	02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	1,17	3,59	1.387.557.568	4,80	1.387.557.568	5,17	1.648.660.000	5,70	1.743.731.200	19,26	6.167.506.336	DISPAR
3	26	03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Pertumbuhan kunjungan wisata	%	1,20	10	400.000.000	18	400.000.000	16	466.560.000	-	-	38	1.266.560.000	DISPAR
3	26	05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Kelompok Ekraf dan Pelaku Wisata yang dibina	%	14	18	1.250.000.000	21	1.250.000.000	23	1.471.500.000	24	1.618.650.000	100	5.590.150.000	DISPAR
3	27		LURUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					28.000.000.000		30.000.000.000		30.000.000.000		30.000.000.000		118.000.000.000	DISTAN
			DINAS PERTANIAN					28.000.000.000		30.000.000.000		30.000.000.000		30.000.000.000		118.000.000.000	DISTAN
3	27	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhiya Kebutuhan Operasional Kantor	%	100	100	11.295.000.000	100	11.675.000.000	100	11.675.000.000	100	11.675.000.000	100	46.320.000.000	DISTAN
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	%	39,40	20,78	6.000.000.000	21,33	6.500.000.000	22,39	6.500.000.000	23,48	6.500.000.000	23,48	25.500.000.000	DISTAN
3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase lahan produktif yang dapat diakses Jalan Usaha Tani dan Jaringan Irigasi Usaha Tani	%	12	15	8.985.000.000	22	9.685.000.000	38	9.685.000.000	45	9.685.000.000	45	38.040.000.000	DISTAN
3	27	04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penyakit hewan yang ditangani per tahun	%	80	80	720.000.000	80	740.000.000	80	740.000.000	80	740.000.000	80	2.940.000.000	DISTAN
3	27	05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase hama penyakit yang ditangani per tahun	%	25	25	500.000.000	25	700.000.000	25	700.000.000	25	700.000.000	25	2.600.000.000	DISTAN

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	DATA CAPAIAN TAHUN 2021	2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPK		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM					TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	27	07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Nilai Tukar Petani	%	104,33	107,01	500.000.000	107,89	700.000.000	108,78	700.000.000	109,68	700.000.000	109,68	2.600.000.000	DISTAN
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					3.497.080.836		4.067.455.087		4.481.341.614		3.983.000.000		16.028.877.537	DISDAGKOP UKM
			DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH					3.497.080.836		4.067.455.087		4.481.341.614		3.983.000.000		16.028.877.537	DISDAGKOP UKM
3	30	3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	10,55	15,29	2.107.080.836	15,99	2.586.000.000	16,71	3.100.000.000	17,47	2.501.658.386	17,47	10.294.739.222	DISDAGKOP UKM
3	30	04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Indeks Harga Implisit Pengeluaran Rumah Tangga	%	0,66	1,48	1.190.000.000	0,98	1.281.455.087	1,49	1.181.341.614	1,46	1.281.341.614	1,46	4.934.138.315	DISDAGKOP UKM
3	30	06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERUNDUNGAN KONSUMEN	Kalibrasi peralatan metrologi perdagangan per Tahun	Kali/ Tahun	4	4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	4	800.000.000	DISDAGKOP UKM
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					7.000.000.000		8.000.000.000		8.000.000.000		8.000.000.000		31.000.000.000	DISPRIN
			DINAS PERINDUSTRIAN DAN ESDM					7.000.000.000		8.000.000.000		8.000.000.000		8.000.000.000		31.000.000.000	DISPRIN
3	31	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Operasional Kantor	%	100	100	4.240.000.000	100	4.730.000.000	100	4.874.350.000	100	4.877.090.500	100	18.721.440.500	DISPRIN
3	31	02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Laju pertumbuhan industri	%	0,44	6,34	2.560.000.000	7,56	3.070.000.000	9,26	2.880.000.000	9,37	2.922.909.500	32,53	11.432.909.500	DISPRIN
3	31	03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase Kelompok Industri yang dievaluasi Izinnya	%	N/A	-	-	-	-	3	45.650.000	-	-	3	45.650.000	DISPRIN
3	31	04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase ketersediaan data dan informasi industri	%	N/A	30	200.000.000	30	200.000.000	20	200.000.000	20	200.000.000	100	800.000.000	DISPRIN

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	DATA CAPAIAN TAHUN 2021	2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPK		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM					TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	32		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI					450.000.000		300.000.000		450.000.000		300.000.000		1.500.000.000	DISNAKERTRANS
			DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI					450.000.000		300.000.000		450.000.000		300.000.000		1.500.000.000	DISNAKERTRANS
3	32	04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase warga transmigrasi yang mendapatkan peningkatan kapasitas	%	N/A	12,90	450.000.000	12,90	300.000.000	12,90	450.000.000	12,90	300.000.000	51,60	1.500.000.000	DISNAKERTRANS
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					64.000.000.000		63.000.000.000		64.723.322.778		65.223.322.778		256.946.645.556	
4	01		SEKRETARIAT DAERAH					39.000.000.000		38.000.000.000		39.723.322.778		39.723.322.778		156.446.645.556	SETDAKAB
			SEKRETARIAT DAERAH					39.000.000.000		38.000.000.000		39.723.322.778		39.723.322.778		156.446.645.556	SETDAKAB
4	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan operasional kantor	%	100	100	30.180.159.539	100	28.915.564.326	100	30.366.354.034	100	30.472.444.034	100	119.934.521.933	SETDAKAB
4	01	02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pelaksanaan kebijakan tentang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	%	18,24	95	7.069.066.481	95	7.281.138.475	95	7.499.572.629	95	7.393.482.629	95	29.243.260.214	SETDAKAB
4	01	03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Laju inflasi daerah	%	1,97	3,70	1.750.773.980	2,65	1.803.297.199	2,64	1.857.396.115	2,92	1.857.396.115	2,92	7.268.863.409	SETDAKAB
4	02		SEKRETARIAT DPRD					25.000.000.000		25.000.000.000		25.000.000.000		25.500.000.000		100.500.000.000	SETWAN
			SEKRETARIAT DPRK					25.000.000.000		25.000.000.000		25.000.000.000		25.500.000.000		100.500.000.000	SETWAN
4	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan operasional kantor	%	100	100	19.755.000.000	100	19.715.000.000	100	19.755.000.000	100	20.255.000.000	100	79.480.000.000	SETWAN
4	02	02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah Danun yang ditetapkan	Danun	5	5	5.245.000.000	5	5.285.000.000	5	5.245.000.000	5	5.245.000.000	5	21.020.000.000	SETWAN

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	DATA CAPAIAN TAHUN 2021	2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPK		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM					TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					202.858.906.364		204.358.906.364		204.619.159.868		#####		816.636.972.596	
5	01		PERENCANAAN					11.400.000.000		11.850.000.000		11.850.000.000		11.850.000.000		46.950.000.000	BAPPEDA
			BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH					11.400.000.000		11.850.000.000		11.850.000.000		11.850.000.000		46.950.000.000	BAPPEDA
5	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan Operasional Kantor	%	100	100	7.407.000.000	100	7.507.000.000	100	7.637.000.000	100	7.541.000.000	100	30.092.000.000	BAPPEDA
5	01	02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Kesesuaian antara Dokumen Perencanaan tahunan dengan Dokumen Perencanaan Lima Tahunan	%	89,42	100	2.193.000.000	100	2.393.000.000	100	2.263.000.000	100	2.359.000.000	100	9.208.000.000	BAPPEDA
5	01	03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Konsistensi Program Daerah, Provinsi dan Nasional	%	100	35	1.800.000.000	38	1.950.000.000	40	1.950.000.000	55	1.950.000.000	55	7.650.000.000	BAPPEDA
5	02		KEUANGAN					183.819.159.868		183.819.159.868		183.819.159.868		#####		735.457.479.604	BPKK
			BADAN PENGELOLA KEUANGAN KABUPATEN					183.819.159.868		183.819.159.868		183.819.159.868		184.000.000.000		735.457.479.604	BPKK
5	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya kebutuhan Operasional Kantor	%	100	100	39.411.040.416	100	40.500.316.769	100	41.621.971.412	100	42.776.975.695	100	164.310.304.292	BPKK
5	02	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase SKPD yang menyampaikan laporan tepat waktu	%	100	100	142.011.326.952	100	140.922.050.599	100	139.800.395.956	100	138.826.231.805	100	561.560.005.312	BPKK
5	02	03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase barang milik daerah yang terinventarisasi	%	100	100	1.550.394.000	100	1.550.394.000	100	1.550.394.000	100	1.550.394.000	100	6.201.576.000	BPKK
5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rasio PAD terhadap total APBK	%	7,32	7,74	846.398.500	7,91	846.398.500	8,78	846.398.500	9,34	846.398.500	9,34	3.385.594.000	BPKK

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	DATA CAPAIAN TAHUN 2021	2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPK		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM					TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5	03		KEPEGAWAIAN					6.889.746.996		7.889.746.996		8.150.000.500		8.150.000.500		31.079.494.992	BKPSDM
			BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA					5.850.000.500		6.850.000.500		6.850.000.500		6.850.000.500		26.400.002.000	BKPSDM
5	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan operasional kantor	%	100	100	4.353.011.500	100	4.327.533.500	100	4.427.533.500	100	4.577.533.500	100	17.685.612.000	BKPSDM
5	03	02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN yang dilantik dalam jabatan struktural dan fungsional	%	N/A	80	1.496.989.000	82	2.522.467.000	84	2.422.467.000	85	2.272.467.000	85	8.714.390.000	BKPSDM
			KORPRI					1.039.746.496		1.039.746.496		1.300.000.000		1.300.000.000		4.679.492.992	KORPRI
5	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan operasional kantor	%	100	100	1.023.944.096	100	1.021.944.096	100	1.070.697.600	100	1.098.197.600	100	4.214.783.392	KORPRI
5	03	02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase fasilitasi pembinaan pelayanan kepegawaian kepada SKPD	%	78	80	15.802.400	85	17.802.400	90	229.302.400	95	201.802.400	95	464.709.600	KORPRI
5	04		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					149.999.500		149.999.500		149.999.500		149.999.500		599.998.000	BKPSDM
			BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA					149.999.500		149.999.500		149.999.500		149.999.500		599.998.000	BKPSDM
5	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	N/A	41	149.999.500	44	149.999.500	46	149.999.500	49	149.999.500	49	599.998.000	BKPSDM
5	05		 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					600.000.000		650.000.000		650.000.000		650.000.000		2.550.000.000	BAPPEDA
			BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH					600.000.000		650.000.000		650.000.000		650.000.000		2.550.000.000	BAPPEDA
5	05	02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil penelitian yang dikembangkan	%	100	100	600.000.000	100	650.000.000	100	650.000.000	100	650.000.000	100	2.550.000.000	BAPPEDA

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	DATA CAPAIAN TAHUN 2021	2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPK		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM					TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN					10.000.000.000		10.000.000.000		10.500.000.000		11.000.000.000		41.500.000.000	
6	01		INSPEKTORAT DAERAH					10.000.000.000		10.000.000.000		10.500.000.000		11.000.000.000		41.500.000.000	INSPEKTORAT
			INSPEKTORAT					10.000.000.000		10.000.000.000		10.500.000.000		11.000.000.000		41.500.000.000	INSPEKTORAT
6	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan operasional kantor	%	100	100	6.134.843.300	100	6.134.843.300	100	6.575.843.300	100	7.017.547.000	100	25.863.076.900	INSPEKTORAT
6	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan APIP	%	70	75	2.529.956.700	80	2.529.956.700	85	2.588.956.700	90	2.647.253.000	90	10.296.123.100	INSPEKTORAT
6	01	03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Meningkatnya level kapabilitas APIP	Level	3	3	1.335.200.000	3	1.335.200.000	4	1.335.200.000	4	1.335.200.000	4	5.340.800.000	INSPEKTORAT
7			UNSUR KEWILAYAHAN					21.508.232.600		21.508.232.600		23.758.232.600		23.758.232.600		90.532.930.400	
7	01		KECAMATAN					21.508.232.600		21.508.232.600		23.758.232.600		23.758.232.600		90.532.930.400	11 (SBBLAS) KECAMATAN
			KECAMATAN BLANGKEJEREN					2.000.000.000		2.000.000.000		2.200.000.000		2.200.000.000		8.400.000.000	KECAMATAN BLANGKEJEREN
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan operasional kantor	%	90	100	1.888.930.000	100	1.912.000.000	100	2.047.000.000	100	2.076.000.000	100	7.923.930.000	KECAMATAN BLANGKEJEREN
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KEWRAHAN	Persentase kepuasan masyarakat terhadap layanan tingkat kecamatan	%	82	95	46.070.000	95	25.000.000	95	60.000.000	95	30.000.000	95	161.070.000	KECAMATAN BLANGKEJEREN
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase unsur Muspika dan Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dalam koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	95	30.000.000	95	28.000.000	95	58.000.000	95	59.000.000	95	175.000.000	KECAMATAN BLANGKEJEREN

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	DATA CAPAIAN TAHUN 2021	2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPK		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM					TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Regulasi tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang di sosialisasikan	%	84	95	35.000.000	95	35.000.000	95	35.000.000	95	35.000.000	95	140.000.000	KECAMATAN BLANGKEJEREN
			KECAMATAN KUTAPANJANG					1.850.000.000		1.850.000.000		2.100.000.000		2.100.000.000		7.900.000.000	KECAMATAN KUTAPANJANG
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan operasional kantor	%	85	100	1.680.000.000	100	1.709.724.000	100	1.900.989.100	100	1.915.000.000	100	7.205.713.100	KECAMATAN KUTAPANJANG
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kepuasan masyarakat terhadap layanan tingkat kecamatan	%	82	95	50.000.000	95	25.000.000	95	75.000.000	95	60.000.000	95	210.000.000	KECAMATAN KUTAPANJANG
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase unsur Muspika dan Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dalam koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	95	30.000.000	95	30.000.000	95	30.000.000	95	30.000.000	95	120.000.000	KECAMATAN KUTAPANJANG
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Regulasi tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang di sosialisasikan	%	84	95	90.000.000	95	85.276.000	95	94.010.900	95	95.000.000	95	364.286.900	KECAMATAN KUTAPANJANG
			KECAMATAN RIKIT GAIB					1.950.000.000		1.950.000.000		2.150.000.000		2.150.000.000		8.200.000.000	KECAMATAN RIKIT GAIB
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan operasional kantor	%	100	100	1.817.000.000	100	1.847.000.000	100	1.994.479.000	100	2.030.000.000	100	7.688.479.000	KECAMATAN RIKIT GAIB
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kepuasan masyarakat terhadap layanan tingkat kecamatan	%	83	95	50.000.000	95	20.000.000	95	60.000.000	95	25.000.000	95	155.000.000	KECAMATAN RIKIT GAIB

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	DATA CAPAIAN TAHUN 2021	2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPK		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM					TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase unsur Muspika dan Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dalam koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	95	25.000.000	95	25.000.000	95	30.521.000	95	30.000.000	95	110.521.000	KECAMATAN RIKIT GAIB
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Regulasi tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang di sosialisasikan	%	83	95	58.000.000	95	58.000.000	95	65.000.000	95	65.000.000	95	246.000.000	KECAMATAN RIKIT GAIB
			KECAMATAN TERANGUN					2.100.000.000		2.100.000.000		2.300.000.000		2.300.000.000		8.800.000.000	KECAMATAN TERANGUN
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan operasional kantor	%	100	100	1.920.000.000	100	1.950.000.000	100	2.110.000.000	100	2.140.000.000	100	8.120.000.000	KECAMATAN TERANGUN
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KEWRAHAN	Persentase kepuasan masyarakat terhadap layanan tingkat kecamatan	%	82	95	65.000.000	95	35.000.000	95	65.000.000	95	35.000.000	95	200.000.000	KECAMATAN TERANGUN
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase unsur Muspika dan Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dalam koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	95	30.000.000	95	30.000.000	95	30.000.000	95	30.000.000	95	120.000.000	KECAMATAN TERANGUN
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Regulasi tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang di sosialisasikan	%	80	95	85.000.000	95	85.000.000	95	95.000.000	95	95.000.000	95	360.000.000	KECAMATAN TERANGUN

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	DATA CAPAIAN TAHUN 2021	2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPK		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM					TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			KECAMATAN PINING					1.550.000.000		1.550.000.000		1.750.000.000		1.750.000.000		6.600.000.000	KECAMATAN PINING
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan operasional kantor	%	100	100	1.405.000.000	100	1.390.000.000	100	1.575.000.000	100	1.585.000.000	100	5.955.000.000	KECAMATAN PINING
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KEWRAHAN	Persentase kepuasan masyarakat terhadap layanan tingkat kecamatan	%	82	95	30.000.000	95	40.000.000	95	50.000.000	95	50.000.000	95	170.000.000	KECAMATAN PINING
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase unsur Muspika dan Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dalam koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	95	30.000.000	95	35.000.000	95	40.000.000	95	30.000.000	95	135.000.000	KECAMATAN PINING
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Regulasi tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang di sosialisasikan	%	81	95	85.000.000	95	85.000.000	95	85.000.000	95	85.000.000	95	340.000.000	KECAMATAN PINING
			KECAMATAN BLANGPEGAYON					1.960.000.000		1.960.000.000		2.160.000.000		2.160.000.000		8.240.000.000	KECAMATAN BLANGPEGAYON
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan operasional kantor	%	100	100	1.777.000.000	100	1.807.000.000	100	1.975.000.000	100	2.005.000.000	100	7.564.000.000	KECAMATAN BLANGPEGAYON
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KEWRAHAN	Persentase kepuasan masyarakat terhadap layanan tingkat kecamatan	%	82	95	68.000.000	95	38.000.000	95	70.000.000	95	40.000.000	95	216.000.000	KECAMATAN BLANGPEGAYON
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase unsur Muspika dan Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dalam koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	95	30.000.000	95	30.000.000	95	30.000.000	95	30.000.000	95	120.000.000	KECAMATAN BLANGPEGAYON

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	DATA CAPAIAN TAHUN 2021	2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPK		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM					TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Regulasi tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang di sosialisasikan	%	85	95	85.000.000	95	85.000.000	95	85.000.000	95	85.000.000	95	340.000.000	KECAMATAN BLANGPEGAYON
			KECAMATAN DABUN GELANG					2.448.232.600		2.448.232.600		2.648.232.600		2.648.232.600		10.192.930.400	KECAMATAN DABUN GELANG
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan operasional kantor	%	100	100	2.273.232.600	100	2.321.232.600	100	2.468.232.600	100	2.498.232.600	100	9.560.930.400	KECAMATAN DABUN GELANG
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KEWRAHAN	Persentase kepuasan masyarakat terhadap layanan tingkat kecamatan	%	83	95	60.000.000	95	27.000.000	95	65.000.000	95	35.000.000	95	187.000.000	KECAMATAN DABUN GELANG
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase unsur Muspika dan Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dalam koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	95	30.000.000	95	27.000.000	95	30.000.000	95	30.000.000	95	117.000.000	KECAMATAN DABUN GELANG
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Regulasi tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang di sosialisasikan	%	84	95	85.000.000	95	73.000.000	95	85.000.000	95	85.000.000	95	328.000.000	KECAMATAN DABUN GELANG
			KECAMATAN BLANGJERANGO					2.100.000.000		2.100.000.000		2.300.000.000		2.300.000.000		8.800.000.000	KECAMATAN BLANGJERANGO
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan operasional kantor	%	100	100	1.935.000.000	100	1.940.000.000	100	2.120.000.000	100	2.125.000.000	100	8.120.000.000	KECAMATAN BLANGJERANGO
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KEWRAHAN	Persentase kepuasan masyarakat terhadap layanan tingkat kecamatan	%	84	95	60.000.000	95	35.000.000	95	55.000.000	95	35.000.000	95	185.000.000	KECAMATAN BLANGJERANGO

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	DATA CAPAIAN TAHUN 2021	2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPK		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM					TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase unsur Muspika dan Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dalam koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	95	40.000.000	95	40.000.000	95	40.000.000	95	40.000.000	95	160.000.000	KECAMATAN BLANGJERANGO
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Regulasi tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang di sosialisasikan	%	82	95	65.000.000	95	85.000.000	95	85.000.000	95	100.000.000	95	335.000.000	KECAMATAN BLANGJERANGO
			KECAMATAN PANTAN CUACA					1.700.000.000		1.700.000.000		1.900.000.000		1.900.000.000		7.200.000.000	KECAMATAN PANTAN CUACA
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan operasional kantor	%	100	100	1.510.000.000	100	1.540.000.000	100	1.670.000.000	100	1.700.000.000	100	6.420.000.000	KECAMATAN PANTAN CUACA
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KEWRAHAN	Persentase kepuasan masyarakat terhadap layanan tingkat kecamatan	%	83	95	65.000.000	95	35.000.000	95	80.000.000	95	50.000.000	95	230.000.000	KECAMATAN PANTAN CUACA
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase unsur Muspika dan Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dalam koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	95	40.000.000	95	40.000.000	95	50.000.000	95	50.000.000	95	180.000.000	KECAMATAN PANTAN CUACA
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Regulasi tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang di sosialisasikan	%	79	95	85.000.000	95	85.000.000	95	100.000.000	95	100.000.000	95	370.000.000	KECAMATAN PANTAN CUACA

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	DATA CAPAIAN TAHUN 2021	2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPK		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM					TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			KECAMATAN PUTERI BETUNG					2.100.000.000		2.100.000.000		2.300.000.000		2.300.000.000		8.800.000.000	KECAMATAN PUTERI BETUNG
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan operasional kantor	%	100	100	1.945.000.000	100	1.975.000.000	100	2.130.000.000	100	2.155.000.000	100	8.205.000.000	KECAMATAN PUTERI BETUNG
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KEWRAHAN	Persentase kepuasan masyarakat terhadap layanan tingkat kecamatan	%	81	95	60.000.000	95	30.000.000	95	60.000.000	95	35.000.000	95	185.000.000	KECAMATAN PUTERI BETUNG
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase unsur Muspika dan Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dalam koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	95	30.000.000	95	30.000.000	95	35.000.000	95	35.000.000	95	130.000.000	KECAMATAN PUTERI BETUNG
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Regulasi tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang di sosialisasikan	%	82	95	65.000.000	95	65.000.000	95	75.000.000	95	75.000.000	95	280.000.000	KECAMATAN PUTERI BETUNG
			KECAMATAN TRIPE JAYA					1.750.000.000		1.750.000.000		1.950.000.000		1.950.000.000		7.400.000.000	KECAMATAN TRIPE JAYA
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan operasional kantor	%	100	100	1.575.000.000	100	1.605.000.000	100	1.760.000.000	100	1.790.000.000	100	6.730.000.000	KECAMATAN TRIPE JAYA
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KEWRAHAN	Persentase kepuasan masyarakat terhadap layanan tingkat kecamatan	%	80	95	60.000.000	95	30.000.000	95	65.000.000	95	35.000.000	95	190.000.000	KECAMATAN TRIPE JAYA

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	DATA CAPAIAN TAHUN 2021	2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPK		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM					TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase unsur Muspika dan Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dalam koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	95	30.000.000	95	30.000.000	95	35.000.000	95	35.000.000	95	130.000.000	KECAMATAN TRIPE JAYA
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Regulasi tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang di sosialisasikan	%	80	95	85.000.000	95	85.000.000	95	90.000.000	95	90.000.000	95	350.000.000	KECAMATAN TRIPE JAYA
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					12.027.971.275		31.064.542.552		4.000.000.000		4.000.000.000		51.092.513.827	
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					12.027.971.275		31.064.542.552		4.000.000.000		4.000.000.000		51.092.513.827	KESBANGPOL
			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					12.027.971.275		31.064.542.552		4.000.000.000		4.000.000.000		51.092.513.827	KESBANGPOL
8	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan operasional kantor	%	100	100	3.307.971.275	100	2.894.542.552	100	1.998.836.504	100	1.998.836.504	100	10.200.186.835	KESBANGPOL
8	01	02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase masyarakat per kecamatan yang memperoleh pendidikan wawasan kebangsaan	%	77,85	0,18	420.000.000	0,35	320.000.000	0,69	50.000.000	0,85	50.000.000	0,85	840.000.000	KESBANGPOL
8	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu	%	58,89	0,74	5.000.000.000	0,74	24.000.000.000	-	-	-	-	2,97	29.000.000.000	KESBANGPOL

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	DATA CAPAIAN TAHUN 2021	2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPK		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM					TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
8	01	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase LSM/ORMAS yang mengikuti pembinaan	%	n/a	0,20	1.700.000.000	0,22	2.250.000.000	0,24	700.000.000	0,26	700.000.000	0,92	5.350.000.000	KESBANGPOL
8	01	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase jumlah masyarakat yang mendapatkan bimbingan dan sosialisasi dalam rangka meningkatkan Kerukunan umat beragama dan Pemberantasan penyalahgunaan narkoba	%	0,21	48,50	300.000.000	0,73	300.000.000	0,99	100.000.000	0,99	100.000.000	51,21	800.000.000	KESBANGPOL
8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase konflik sosial yang diawasi dan ditangani	%	96,84	0,70	1.300.000.000	0,75	1.300.000.000	0,80	1.151.163.496	0,85	1.151.163.496	3,10	4.902.326.992	KESBANGPOL

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	DATA CAPAIAN TAHUN 2021	2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPK		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM					TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
9			UNSUR KEKHUSUSAN					17.743.086.328	0	17.743.086.328	0	18.096.685.699		17.784.493.843		71.367.352.198	
9	01		ACEH					17.743.086.328	1	17.743.086.328	1	18.096.685.699		17.784.493.843		71.367.352.198	
			BAITUL MAL					4.543.086.328	1	4.543.086.328	1	4.896.685.699		4.584.493.843		18.567.352.198	BAITUL MAL
9	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan Operasional Kantor	%	100	100	1.285.850.000	100	1.282.750.000	100	1.238.750.000	100	1.257.250.000	100	5.064.600.000	BAITUL MAL
9	01	04	PROGRAM BAITUL MAL	Persentase Penyaluran terhadap Pengumpulan Zakat, Infak, Wakaf dan Harta Agama Lainnya	%	100	100	3.257.236.328	100	3.260.336.328	100	3.657.935.699	100	3.327.243.843	100	13.502.752.198	BAITUL MAL
			MAJELIS PERMUSYAWARATAN					3.200.000.000		3.200.000.000		3.200.000.000		3.200.000.000		12.800.000.000	MPU
9	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan Operasional Kantor	%	100	100	1.699.594.448	100	1.678.255.115	100	1.807.000.000	100	1.817.000.000	100	7.001.849.563	MPU
9	01	03	PROGRAM MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) ACEH	Rasio Da"i Persatuan Penduduk	per 1000 Penduduk	2,24	3,00	1.500.405.552	3,50	1.521.744.885	4,00	1.393.000.000	4,50	1.383.000.000	4,50	5.798.150.437	MPU
			DINAS SYARIAT ISLAM					10.000.000.000		10.000.000.000		10.000.000.000		10.000.000.000		40.000.000.000	DSI
9	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan operasional kantor	%	100	100	3.156.000.000	100	3.371.000.000	100	2.931.000.000	100	2.981.000.000	100	12.439.000.000	DSI
9	01	02	PROGRAM SYARIAT ISLAM ACEH	Indeks Pembangunan Syariat (IPS)	%	80	85	6.844.000.000	90	6.629.000.000	95	7.069.000.000	100	7.019.000.000	100	27.561.000.000	DSI



BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu program, kegiatan, tujuan dan sasaran dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome) dan dampak (impact). Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah menjadi hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) beberapa program. Sementara Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.

Indikator kinerja daerah bertujuan memberi gambaran tentang program/kegiatan yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU dijadikan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis suatu pemerintahan serta SKPK sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggungjawab. Ukuran pencapaian rencana pembangunan kabupaten ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang akan ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD).

Penetapan IKU bertujuan untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintah serta merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan dalam peningkatan kinerja dan akuntabilitas kinerja. Penetapan Indikator kinerja untuk IKU maupun IKD harus memenuhi kriteria spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan sesuatu yang dapat diukur sehingga dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan SKPK dalam mengajukan anggaran. Hasil perumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah untuk tahun 2023-2026 yang sudah dicapai tahun sebelumnya dapat dipedomani untuk dijadikan Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Selanjutnya, penetapan Indikator Makro Kabupaten Gayo Lues, Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah dapat dilihat pada berikut:

Tabel 8.1
Penetapan Indikator Makro Kabupaten Gayo Lues 2023-2026

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2021	2023	2024	2025	2026	Target Kinerja Pada Akhir Periode RPK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pertumbuhan PDRB	Persen	2,32	2,74	3,23	4,13	5,16	5,16
2	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	67,56	68,82	68,99	69,29	70,00	70,00
3	Angka Kemiskinan	Persen	19,64	18,98	18,48	17,98	17,48	17,48
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	1,84	1,47	1,29	1,13	0,98	0,98
5	Indeks Gini	Persen	0,26	0,24	0,23	0,21	0,20	0,20
6	Laju Inflasi	Persen	1,97	3,70	2,65	2,64	2,92	2,92

Tabel 8.2
Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Gayo Lues 2023-2026

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL 2021	2023	2024	2025	2026	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPK
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Persentase Lembaga Pendidikan Bernuansa Islami	Persen	25	55	59	63	68	68
2	Persentase Kemakmuran Masjid	Persen	17	25	30	35	45	45
3	Jumlah Pelanggaran Syariat Islam	Kasus	35	55	50	45	40	40
4	Pertumbuhan PDRB	Persen	2,32	2,74	3,23	4,13	5,16	5,16
5	Angka Kemiskinan	Persen	19,64	18,98	18,48	17,98	17,48	17,48
6	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,40	8,70	8,90	9,10	9,30	9,30
7	Persentase Peningkatan Level Akreditasi Sekolah	Persen	50	52	54	57	58	58
8	Angka Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	65,53	65,79	65,92	66,05	66,18	66,18
9	WTP	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
10	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	82,70	85	86	87	90	90
11	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Keamanan, Ketertiban dan Keindahan)	Persen	70	83	86	89	92	92
12	Persentase kondisi darurat yang tertangani	Persen	73	75	85	90	92	92

Tabel 8.3
Penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten Gayo Lues 2023-2026

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2021	2023	2024	2025	2026	Target Kinerja Pada Akhir Periode RPK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
1	PDRB Per Kapita							
1.1	PDRB ADHB Per Kapita	Juta Rupiah	28,53	31,46	33,03	34,68	36,41	36,41
1.2	PDRB ADHK Per Kapita	Juta Rupiah	19,82	20,65	21,08	21,53	21,98	21,98
2	Pengeluaran Per Kapita	Juta Rupiah	8,856	9,398	9,702	1,010	1,062	1,062
3	Jumlah Pengangguran	Jiwa	1119	1,097	1,075	1,053	1,032	1,032
4	Jumlah Penduduk Miskin	Jiwa	18,610	17,870	17,513	17,163	16,820	16,820
5	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Persen	2,76	2,23	2,01	1,81	1,63	1,63
6	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,78	13,88	13,93	13,98	14,03	14,03
7	Persentase Balita Gizi Buruk	Persen	0	0	0	0	0	0
8	Prevalensi Balita Gizi Kurang	Persen	25,95	21,42	19,21	19,00	18,87	18,87
9	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	86,82	87,77	88,24	88,89	89,73	89,73
10	Persentase PAD Terhadap Pendapatan	Persen	7,35	7,74	7,91	8,78	9,34	9,34
11	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
12	Kontribusi Sektor Pertanian	Persen	39,39	20,78	21,33	22,39	23,48	23,48
13	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	Persen	10,55	15,29	15,99	16,71	17,43	17,43
14	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	Persen	10,79	19,52	22,10	23,90	24,12	24,12

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2021	2023	2024	2025	2026	Target Kinerja Pada Akhir Periode RPK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	Persen	1,17	3,59	4,80	5,17	5,70	5,70
	ASPEK DAYA SAING DAERAH							
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita	Juta	830,289	8,892 / 57,08	9,163 / 56,75	9,474 / 56,34	9,829 / 55,83	9,829 / 55,83
2	Nilai Tukar Petani	Persen	104,33	107,01	107,89	108,78	109,68	109,68
3	Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita	Persen	42,62	42,92	43,25	43,66	44,17	44,17
	ASPEK PELAYANAN UMUM							
1	Pendidikan							
1.1	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,78	13,88	13,93	13,98	14,03	14,03
1.2	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,40	8,70	8,90	9,10	9,30	9,30
1.3	Angka Partisipasi Kasar (APK)							
	Angka partisipasi Kasar SD/MI	Persen	114,85	114,83	114,81	114,79	114,77	114,77
	Angka partisipasi Kasar SMP/MTs	Persen	107,12	107,10	107,08	107,06	107,04	107,04
1.4	Angka Partisipasi Sekolah							
	Angka partisipasi sekolah SD/MI (7-12)	Persen	98,45	98,47	98,49	98,51	98,53	98,53
	Angka partisipasi sekolah SMP/MTs (13-15)	Persen	83,12	83,14	83,16	83,18	83,20	83,20
1.5	Angka Partisipasi Murni (APM)							
	APM SD/MI Paket A	Persen	99,84	99,85	99,86	99,87	99,88	99,88
	APM SMP/MTs Paket B	Persen	89,62	89,70	89,80	89,85	89,90	89,90

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2021	2023	2024	2025	2026	Target Kinerja Pada Akhir Periode RPK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.6	Angka Putus Sekolah (APS)							
	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	Persen	0,776	0,773	0,768	0,764	0,759	0,759
	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTS	Persen	2,53	2,48	2,43	2,37	2,32	2,32
1.7	Angka Kelulusan (AL)							
	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	Persen	99,01	100	100	100	100	100
	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	Persen	100	100	100	100	100	100
1.8	Angka Melanjutkan (AM)							
	Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/MTs	Persen	65,4	95,2	95,7	96,2	96,6	96,6
	Angka Melanjutkan (AM) SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	Persen	100	81,5	82,1	82,7	83,3	83,3
1.9	Rasio Ketersediaan Sekolah / Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar	Persen	105,8	105,2	103,9	102,6	101,4	101,4
1.10	Rasio Guru / Murid Sekolah Pendidikan Dasar	Per 10.000	1.034	1.020	1.030	1.040	1.050	1.050
1.11	Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D4	Persen	86,03	87,2	88,3	89,4	90,5	90,5
2	Kesehatan							
2.1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Per 1000 KH	1,02	1,03	0,51	0,00	0,00	0,00
2.2	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	Per 1000 KH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	Per 1000 KH	10,3	10,29	9,26	8,23	7,20	7,20

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2021	2023	2024	2025	2026	Target Kinerja Pada Akhir Periode RPK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.4	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	Per 100.000 Pddk	257,2	205,8	154,3	102,9	51,4	51,4
2.5	Rasio Dokter per Satuan Penduduk	Per 1000 Pddk	0,60	26,6	27,7	28,1	29	29
2.6	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	Persen	0	100	100	100	100	100
2.7	Cakupan Desa / Kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	Persen	35,9	70	80	90	100	100
2.8	Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (Per 100.000 Pddk)	Per 100.000 Pddk	146,6	141,7	136,8	132,02	128,14	128,14
2.9	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari Total Populasi	Persen	0,0019	0,0018	0,0009	0,0009	0,000	0,000
2.10	Cakupan Kunjungan Bayi	Persen	89,0	100	100	100	100	100
2.11	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K4)	Persen	84,3	100	100	100	100	100
2.12	Cakupan Pelayanan Nifas	Persen	79,3	100	100	100	100	100
2.13	Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani	Persen	0,0	100	100	100	100	100
2.14	Cakupan Pelayanan Anak Balita	Persen	33,67	100	100	100	100	100
2.15	Cakupan Penjangkaran Kesehatan Siswa SD dan Setingkat	Persen	72,13	100	100	100	100	100
2.16	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani	Persen	18,54	100	100	100	100	100
2.17	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	Persen	85,15	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2021	2023	2024	2025	2026	Target Kinerja Pada Akhir Periode RPK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
3.1	Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	Persen	39,08	45	46	48	50	75
3.2	Ketaatan Terhadap RTRW	Persen	0,04	2	6	8	10	10
3.3	Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (> 40 -KM/JAM)	Persen	45,54	60	62	65	70	70
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman							
4.1	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni.	Persen	20,78	30,58	40,39	50,19	60	60
4.2	Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan.	Persen	78	83,5	89	94,5	100	100
4.3	Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung Dengan PSU.	Persen	65,13	73,84	82,56	91,28	100	100
4.4	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	Persen	4,33	3,58	2,82	2,06	1,29	1,29
4.5	Rasio Bangunan Ber IMB Per Satuan Bangunan.	Persen	0,23	0,55	0,87	1,41	1,5	1,5
5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat							
5.1	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rite) Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Persen	60	68	73	78	85	85

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2021	2023	2024	2025	2026	Target Kinerja Pada Akhir Periode RPK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.2	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten	Persen	90	90	95	95	100	100
5.3	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Keamanan, Ketertiban dan Keindahan)	Persen	29	83	86	89	92	92
5.4	Persentase Penegakan PERDA	Persen	38	40	45	50	55	55
6	Sosial							
6.1	Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	Persen	53,01	55,45	60,01	65,78	70,00	70,00
6.4	Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	Persen	100	100	100	100	100	100
6.5	Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental Serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial	Persen	0	100	100	100	100	100
	LAYANAN URUSAN WAJIB NON DASAR							
1	Tenaga Kerja							
1.1	Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	Persen	50,00	62,50	65,63	68,91	72,35	72,35

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2021	2023	2024	2025	2026	Target Kinerja Pada Akhir Periode RPK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
2.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Persen	9,3	9,3	9,4	9,7	9,8	9,8
2.2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	Persen	5	10	10	10	10	10
2.3	Rasio KDRT	Persen	0,014	0,013	0,012	0,011	0,010	0,010
2.4	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Persen	97,27	97,30	97,35	97,38	97,40	97,40
2.5	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu	Persen	100	100	100	100	100	100
3	Pangan							
3.1	Ketersediaan Pangan Utama	Persen	87,57	95	98	98	100	100
3.2	Pola Pangan Harapan	Persen	87	90	93	97	100	100
3.3	Peningkatan Kawasan Mandiri Pangan	Persen	45	5	10	5	5	75
4	Pertanahan							
4.1	Persentase Lahan Bersertifikat	Persen	52	53	54	55	56	56
4.2	Penyelesaian Kasus Tanah Negara	Persen	50	51	52	53	55	55
4.3	Penyelesaian Izin Lokasi	Persen	15	20	25	30	35	50

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2021	2023	2024	2025	2026	Target Kinerja Pada Akhir Periode RPK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Lingkungan Hidup							
5.1	Tersusunnya RPPLH Kabupaten	Ada/Tidak	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5.2	Terselenggaranya KLHS Untuk K/R/P Tingkat Daerah Provinsi	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5.3	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	Indeks	<1	<1	<1	<1	<1	<1
5.4	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5.5	Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani	Persen	58,89	74	79	86	94	94
5.6	Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi Melalui 3R	Persen	2,79	3,40	3,90	4,57	5,00	5,00
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
6.1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	Persen	93,53	100	100	100	100	100
6.2	Rasio bayi berakte kelahiran	Persen	85,45	100	100	100	100	100
6.3	Rasio pasangan berakte nikah	Persen	60	60	70	80	90	90
6.4	Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2021	2023	2024	2025	2026	Target Kinerja Pada Akhir Periode RPK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
7.1	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik	Persen	19,85	22,76	24,14	25,52	26,90	26,90
7.2	Rata-Rata jumlah kelompok binaan PKK	Persen	8	10	12	14	16	16
7.3	Persentase PKK Aktif	Persen	100	100	100	100	100	100
7.4	Persentase Posyandu Aktif	Persen	100	100	100	100	100	100
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
8.1	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Anak	2	2	2	2	2	2
8.2	Rasio Akseptor KB	Persen	84,05	84,55	85	87	90	90
8.3	Angka pemakaian kontrasepsi/ <i>Contraceptive Prevalance Rate</i> (CPR) bagi perempuan menikah usia 15-49	Persen	84,05	84,55	85	87	90	90
8.4	Cakupan Ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	Persen	289,8	100	100	100	100	100
9	Perhubungan							
9.1	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	Unit	n/a	0	0	50	55	55
9.2	Jumlah Pelabuhan Laut/ Udara/ Terminal Bis	Unit	4	4	4	4	4	4
9.3	Persentase Layanan Angkutan Darat	Persen	75	78	80	83	85	85

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2021	2023	2024	2025	2026	Target Kinerja Pada Akhir Periode RPK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.4	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	Persen	35	40	45	60	65	65
9.5	Pemasangan Rambu-Rambu	Persen	0	75	80	82	85	85
9.6	Jumlah Orang yang Terangkut Angkutan Umum	Orang	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
9.7	Jumlah Barang yang Terangkut Angkutan Barang yang Terangkut Angkutan Umum	Ton	30.000	40.000	42.000	45.000	50.000	50.000
10	Komunikasi dan Informatika							
10.1	Cakupan Pengembangan dan Peberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Persen	45	50	60	70	80	80
11	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah							
11.1	Persentase Koperasi Aktif	Persen	33	45,11	56,39	60,15	71,43	71,43
11.2	Pertumbuhan UMKM	Persen	2,55	2,70	3,60	4,00	5,80	5,80
12	Penanaman Modal							
12.1	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Investor	12	14	16	18	20	20
12.2	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Juta	59,000	60,840	69,358	78,373	86,995	86,995
12.3	IKM Terhadap Pelayanan Perizinan	Nilai	B	B	B	B	B	B

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2021	2023	2024	2025	2026	Target Kinerja Pada Akhir Periode RPK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	Kepemudaan dan Olahraga							
13.1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	Persen	82,5	82,8	83,00	83,50	84,00	84,00
13.2	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	Persen	35	50	60	70	80	80
13.3	Cakupan pembinaan olahraga	Persen	29	40	50	60	70	70
13.4	Jumlah prestasi olahraga	Medali	5	5	8	10	12	12
14	Statistik							
14.1	Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
14.2	Buku Kabupaten Dalam Angka	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
14.3	Buku 'PDRB'	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
15	Persandian							
15.1	Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah	Persen	0	4	8	12	16	16
16	Perpustakaan							
16.1	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahunan	Rasio	0,009	0,011	0,013	0,015	0,017	0,017
16.2	Koleksi Buku yang Tersedia Diperpustakaan Daerah	Rasio	0,22	0,24	0,26	0,28	0,30	0,30
16.3	Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk	Per 1000 penduduk	0,52	0,53	0,54	0,55	0,56	0,56

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2021	2023	2024	2025	2026	Target Kinerja Pada Akhir Periode RPK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.4	Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan	Judul	9,902	9,957	10,007	10,57	10,107	10,107
16.5	Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, dan Penilai yang Memiliki Sertifikat	Persen	28,57	42,85	57,12	71,42	85,71	85,71
17	Kearsipan							
17.1	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku	Persen	0	30	35	40	45	45
17.2	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	kegiatan	0	2	2	2	2	2
	LAYANAN URUSAN PILIHAN							
1	Pariwisata							
1.1	Lama Kunjungan Wisata	Hari	2	3	4	5	5	5
1.2	Peningkatan Kunjungan wisata	Persen	1,2	10,00	16,00	10,00	16,00	16,00
2	Pertanian							
2.1	Cakupan Bina Kelompok Petani	Persen	90	≥ 97	≥ 97	≥ 97	≥ 97	≥ 97
2.2	IP Komoditi Padi	Kali	1,6	1,70	1,80	1,85	2,00	2,00
2.3	Produktivitas Padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	Ton Per Hektar	4,7	4,90	4,90	5,00	5,00	5,00
3	Energi dan Sumber Daya Mineral							
3.1	Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik	Persen	98	≥ 98	≥ 98	≥ 100	100	100
3.2	Rasio Ketersediaan Daya Listrik	Mega Watt	3,8-4,0	3,8-5,5	3,8-6,0	3,8-6,5	5,8-6,7	5,8-6,7

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2021	2023	2024	2025	2026	Target Kinerja Pada Akhir Periode RPK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Perdagangan							
4.1	Ekspor Bersih Perdagangan	Juta	n/a	1,000	3,000	3,000	5,000	5,000
5	Perindustrian							
5.1	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	Persen	100	100	100	100	100	100
5.2	Laju Pertumbuhan Industri	Persen	-1,7	6,34	7,56	9,26	9,37	9,37
	PENUNJANG URUSAN							
1	Perencanaan Pembangunan							
1.1	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
1.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA/PERKADA	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
1.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang Telah Ditetapkan Dengan PERKADA	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
1.4	Tersedianya Dokumen RTRW yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
1.5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD	Persen	89,42	100	100	100	100	100
1.6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam APBD	Persen	96,77	100	100	100	100	100
1.7	Kesesuaian Rencana Pembangunan Dengan RTRW	Persen	0,03	30	35	40	45	45

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2021	2023	2024	2025	2026	Target Kinerja Pada Akhir Periode RPK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Keuangan							
2.1	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.2	Penetapan APBK	Tepat Waktu /Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
3	Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan							
3.1	Rata-rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	Jam	887	50	50	50	50	50
3.2	Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal (Prajabatan)	Persen	0	97	97	97	97	97
3.3	Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural (PIM II, III)	Persen	0,13	0,16	0,19	0,22	0,25	0,25
3.4	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah (Eselon II)	Orang	34	34	34	34	34	34
3.5	Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah (Eselon III)	Orang	283	684	684	684	684	684
4	Pengawasan							
5.1	Persentase Tindak lanjut Temuan	Persen	56,93	60	65	70	75	75
5.2	Jumlah Temuan BPK	Temuan	772	300	330	350	400	400



NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2021	2023	2024	2025	2026	Target Kinerja Pada Akhir Periode RPK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Sekretariat Dewan							
6.1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6.2	Tersusun dan terintegrasinya Program Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6.3	Terintegrasi program program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada



BAB IX PENUTUP

Rencana Pembangunan Kabupaten (RPK) Gayo Lues Tahun 2023-2026 memiliki peran dan fungsi strategis dalam pembangunan. RPK ini merupakan dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah, dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 4 (empat) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJP Kabupaten Gayo Lues Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026 dan RPJMN 2020-2024. Selain itu Dokumen Rencana Pembangunan Kabupaten (RPK) tahun 2023-2026 akan menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan lainnya. Adapun kaidah pelaksanaan dan pedoman transisi Rencana Pembangunan Kabupaten (RPK) Tahun 2023-2026 disajikan pada subbab di bawah ini.

9.1. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Pembangunan Kabupaten Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

1. Perangkat Daerah Kabupaten Gayo Lues berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang terdapat dalam RPK Tahun 2023-2026 yang disinergikan dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
2. Dalam rangka mencapai target indikator kinerja daerah dalam RPK Gayo Lues Tahun 2023-2026 diperlukan langkah-langkah pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah setiap tahunnya secara optimal.
3. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi berkala terhadap RPK Kabupaten Gayo Lues Tahun 2023-2026.
4. Penyusunan RKPK Kabupaten Gayo Lues 2023 sampai dengan Tahun 2026 berpedoman pada RPK Kabupaten Gayo Lues Tahun 2023-2026, yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja kabupaten (RAPBK).

9.2. Pedoman Transisi

Pada masa transisi dimana RPJMK Kabupaten Gayo Lues 2018-2022 akan habis masa berlakunya dan akan dilaksanakannya pilkada serentak pada tahun 2024 sehingga ada kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah, maka diperlukan adanya pedoman untuk dijadikan acuan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Tahun 2023 sampai tahun 2026. Sebagaimana diketahui, tahun 2022 adalah tahun terakhir periode RPJMK Kabupaten Gayo Lues.

Dengan adanya penyusunan RPK tahun 2023-2026 diharapkan akan terwujud sinergi antar pelaku pembangunan, antar fungsi pemerintahan maupun antara Kabupaten Gayo Lues dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi, serta terbangun keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. RPK tahun 2023-2026 diharapkan mampu mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin terkendalinya sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.

RPK Tahun 2023-2026 akan dijadikan pedoman utama bagi pemerintah dalam menyelenggarakan pembangunan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun, yang memuat program prioritas pembangunan dan kerangka pendanaan serta akan menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues dalam penyusunan Rencana Strategi SKPK (Renstra-SKPK) kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja SKPK (Renja-SKPK).

Salah satu agenda penyusunan RPK tahun 2023-2026 yaitu menyelesaikan permasalahan pembangunan yang belum sepenuhnya terselesaikan sampai dengan tahun 2022, serta diharapkan dapat menangani permasalahan pembangunan serta isu-isu strategis yang masih menjadi persoalan yang harus diselesaikan. Dengan disusunnya RPK tahun 2023-2026 Pemerintah Kabupaten Gayo Lues mengajak kepada seluruh pemangku kepentingan agar berperan aktif dalam mensukseskan dan mewujudkan masyarakat Gayo Lues yang sejahtera.

BUPATI GAYO LUES

H. MUHAMMAD AMRU

